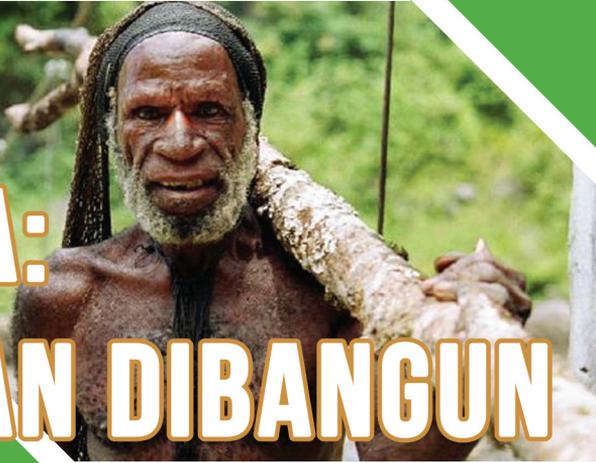




MANUSIA PAPUA: MEMBANGUN DAN DIBANGUN

*Analisa Pembangunan Manusia
Provinsi Papua Tahun 2015*



PUSDALISBANG
Pusat Data dan Analisis Pembangunan
Provinsi Papua





MANUSIA PAPUA: MEMBANGUN DAN DIBANGUN

*Analisa Pembangunan Manusia
Provinsi Papua Tahun 2015*





SAMBUTAN

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan rahmat-Nya sehingga publikasi Analisa Pembangunan Manusia Provinsi Papua Tahun 2015 dapat diterbitkan. Publikasi ini disusun oleh Pusat Data dan Analisis Pembangunan Provinsi Papua. Saya menyambut gembira terbitnya publikasi Analisa Pembangunan Manusia Provinsi Papua Tahun 2015 dengan tema “Manusia Papua: Membangun dan Dibangun”. Saya yakin bahwa indikator-indikator yang ada dalam publikasi ini dapat secara jelas menggambarkan posisi pembangunan Provinsi Papua. Informasi ini juga akan menjadi salah satu baseline bagi pemantauan tingkat perkembangan pembangunan di Provinsi Papua selanjutnya.

Visi pembangunan Papua tahun 2013-2018 adalah Papua Bangkit Mandiri dan Sejahtera. Visi tersebut kemudian didukung oleh lima misi pembangunan, salah satunya yaitu “Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Papua yang Sehat, Berprestasi, dan Berakhlak Mulia”. Misi yang sangat mulia ini menjadi salah satu tujuan dalam menentukan agenda serta program kerja Pemerintah Provinsi Papua hingga 2018 nantinya.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Papua sebagai salah satu bagian dari Pemerintah Daerah Provinsi Papua mengimplementasikan visi dan misi pembangunan Papua 2013-2018 dalam suatu visi “Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Strategis dan Berkualitas”. Strategis dan berkualitas menjadi kata kunci dalam menentukan arah kebijakan pembangunan di Provinsi Papua. Dalam hal ini kami meyakini bahwa perencanaan pembangunan yang strategis dan berkualitas didukung oleh data dan informasi yang juga berkualitas.

Pada kesempatan ini saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tim penyusun dari Pusat Data dan Analisis Pembangunan. Ucapan terima kasih dan penghargaan juga saya sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi aktif dalam upaya penyusunan publikasi ini. Akhirnya, semoga kerja baik ini bermanfaat bagi bangsa dan negara.

Jayapura, November 2016
KEPALA BAPPEDA PROVINSI PAPUA

DR. Drs. MUHAMMAD MUSAAD, M.Si



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan rahmat-Nya sehingga buku Analisa Pembangunan Manusia Provinsi Papua Tahun 2015 dapat dipublikasikan. Buku ini dimaksudkan untuk memotret kondisi pembangunan manusia di Provinsi Papua. Buku Analisa Pembangunan Manusia Provinsi Papua Tahun 2015 ini merupakan pengukuran yang dipersiapkan dalam rangka mengefektifkan pencapaian misi pembangunan Provinsi Papua yaitu “Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Papua yang Sehat, Berprestasi, dan Berakhlak Mulia”. Pembangunan manusia sendiri masih memiliki tantangan yang cukup besar dikarenakan hingga saat ini status pembangunan manusia Provinsi Papua masih dalam kategori “rendah”.

Buku ini disusun dengan menggunakan data-data yang sudah dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik sebagai rujukan indikator-indikator utama penyusun indeks. Didalam buku ini selain menyajikan analisis mengenai status pencapaian pembangunan manusia juga disajikan indikator-indikator lainnya yang menunjang pembangunan manusia itu sendiri dari bidang sosial maupun ekonomi.

Besar harapan kami agar buku Analisa Pembangunan Manusia Provinsi Papua Tahun 2015 dapat digunakan sebagai acuan untuk penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan di Provinsi Papua. Kedepannya, Analisa Pembangunan Manusia Provinsi Papua Tahun 2015 ini perlu terus disempurnakan seiring dengan penyempurnaan indikator. Berbagai masukan yang konstruktif dari berbagai pihak sangat kami harapkan.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam publikasi Analisa Pembangunan Manusia Provinsi Papua Tahun 2015 ini, kami mengucapkan terima kasih



dan memberikan apresiasi yang tinggi. Semoga publikasi Analisa Pembangunan Manusia Provinsi Papua Tahun 2015 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan di Provinsi Papua.

Jayapura, November 2016
KEPALA PUSDALISBANG PROVINSI PAPUA

ANDRY, SIP., M.Si

DAFTAR ISI

Sambutan	iii
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Gambar	xi
Daftar Lampiran	xvii

BAB 1

Manusia, Mengukur dan Diukur **1**

Pembangunan Manusia, Bagaimana Merumuskannya?	5
Apa Saja yang Dibahas di Publikasi Ini?	8

BAB 2

Status Pembangunan Manusia Provinsi Papua **11**

Pembangunan Manusia di Papua, Sudah Sejauh Mana?	14
Papua, Benarkah Tertinggal?	19
Membangun Papua Bukan Hanya Membangun Jayapura	25
Lima Wilayah Adat, Pendekatan Baru Pembangunan Papua	37
Tantangan: Pembangunan Manusia di Papua	38

BAB 3

Perempuan, Aset Pembangunan yang Terlupakan **43**

Pembangunan Gender Bukan Hanya Angka	45
--------------------------------------	----

Pembangunan Gender Papua, Terendah atau Terbaik?	46
--	----

IPM vs IPG, Pencapaian Kabupaten/Kota di Papua	48
--	----

Sudah Berdayakah Perempuan Papua?	49
-----------------------------------	----

Membangun dan Memberdayakan Perempuan Papua	52
---	----

Kesetaraan Gender, Tantangan Baru Bagi Papua	55
--	----

BAB 4

Membangun Desa: Langkah Awal Pembangunan Papua **57**

Papua “Mahal”	59
---------------	----

Papua “Sulit”	62
---------------	----

Papua “Tertinggal”	63
--------------------	----

Tantangan: Menghapus Stereotype Papua Mahal, Sulit dan Tertinggal	64
---	----

BAB 5

Pendidikan: Modal Pembangunan Manusia **65**

Masih Perlukah Mengukur Kemampuan Membaca dan Menulis?	69
--	----

Status Pendidikan Penduduk Papua	71
----------------------------------	----

Isu Gender Dalam Pendidikan. Seberapa Penting?	78
--	----

Tantangan: Disparitas Pendidikan Papua	82
--	----

BAB 6	
Semua Dimulai Dari Sehat	85
Morbiditas; Bukan Sekedar Sakit	88
Pertanyaan Kesehatan Mendasar: Berapa Lama Saya Dapat Berharap Hidup?	94
Kematian Bayi: Mati Sebelum Bertumbuh	98
Dilayani dan Terlayani: Pelayanan Dasar Kesehatan	100
Tantangan: Mengapa Susah Membangun Sehat?	103
BAB 7	
Papua Yang Kaya, Jadi Mana Yang Miskin?	105
Pendidikan Miskin Papua: Permasalahan Pembangunan	108
Menentukan Jumlah Penduduk Miskin di Papua	110
Seberapa Parah dan Seberapa Dalam Kemiskinan di Papua?	113
Kemiskinan Kabupaten/Kota di Papua: Semakin Jauh, Semakin Miskin	115
Kemiskinan Multidimensi	118
<i>Multiple Deprivasi</i>	119
Tingkat Kemiskinan Multimensi: Fenomena Perdesaan	124
Alarm Pembangunan: Ketimpangan	129
Tantangan: Mengurangi si Miskin	132

BAB 8	
Ekonomi Papua: Masihkan Pertanian?	133
Perekonomian Papua: Gambaran Umum	136
Struktur Ekonomi Papua: Dominasi Sektor Pertanian	138
Dari Sektor Primer ke Sektor Sekunder dan Tersier	142
Pertumbuhan Ekonomi	144
Rata-rata Pendapatan Penduduk Papua	147
PDRB Pengeluaran: Kebutuhan Konsumsi Rumah Tangga	148
Investasi	151
Perbandingan Antar Kabupaten/Kota	154
Tantangan: Menyelaraskan Pembangunan Ekonomi dan Pembangunan Manusia	156
BAB 9	
Tenaga Kerja Papua	159
Tren Kondisi Ketenagakerjaan Papua	162
Produktivitas Pekerja	168
Struktur Demografi Penduduk Usia Kerja Papua: Dominasi Pekerja Muda dan Pekerja Laki-laki	170
Karakteristik Penduduk Usia Kerja: Pendidikan yang Rendah	173
Struktur Demografi Angkatan Kerja Papua	175
Tingkat Pendidikan Angkatan Kerja Papua	178
Struktur Demografi Penduduk Bekerja	180

Mayoritas Pekerja di Papua Berpendidikan Rendah	183
Dominasi Sektor Pertanian	184
Karakteristik Pekerja: Jam Kerja	186
Karakteristik Pekerja: Status Pekerjaan	188
Karakteristik Pekerja: Sektor Formal dan Informal	191
Karakteristik Pengangguran Papua	193
Karakteristik Setengah Pengangguran Papua	198
Tantangan: Kualitas Pekerja Papua	199

BAB 10

Demokrasi: Bentuk Pembangunan Lainnya	Bentuk Manusia 201
Demokrasi di Papua: Proses dan Progress	203
IDI Provinsi Papua dan Nasional	209
Tantangan yang Dihadapi	212

DAFTAR GAMBAR

2.1	Capaian dan Pertumbuhan IPM di Provinsi Papua, 2010-2015	14
2.2	Capaian dan Pertumbuhan AHH di Provinsi Papua, 2010-2015	15
2.3	Capaian dan Pertumbuhan RLS di Provinsi Papua, 2010-2015	17
2.4	Capaian dan Pertumbuhan HLS di Provinsi Papua, 2010-2015	28
2.5	Capaian dan Pertumbuhan Pengeluaran di Provinsi Papua, 2010-2015	19
2.6	IPM Provinsi-Provinsi di Indonesia, 2015	21
2.7	Pertumbuhan IPM Provinsi-Provinsi di Indonesia, 2015	22
2.8	Kesenjangan IPM Provinsi-Provinsi di Indonesia, 2015	24
2.9	Status Capaian IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2015	26
2.10	IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2015	27
2.11	Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2015	30
2.12	Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2015	31
2.13	Rata-rata Pengeluaran yang Disesuaikan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2015	32
2.14	Rata-rata Pertumbuhan IPM Per Tahun Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2010-2015	33
2.15	Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2015	34
2.16	Kesenjangan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2015	38
3.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Provinsi Papua, 2010-2015	45
3.2	IPM dan IPG Provinsi-Provinsi di Indonesia, 2015	47
3.3	IPM dan IPG Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2015	49
3.4	IPM dan IDG Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2015	52
3.5	IPG dan IDG Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2015	54
4.1	Indeks Kemahalan Konstruksi	61

	Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2015	
4.2	Indeks Kesulitas Geografis Desa Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2014	62
5.1	Angka Melek Huruf Menurut Kelompok Umur Penduduk di Provinsi Papua, 2010-2015	70
5.2	Angka Melek Huruf Penduduk 7-24 Tahun Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2015	72
5.3	Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 7-24 Tahun Menurut Status Pendidikan di Provinsi Papua, 2010-2015	73
5.4	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur di Provinsi Papua, 2015	77
5.5	Angka Melek Huruf Penduduk 15-24 Tahun dan 25 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Papua, 2015	82
6.1	Tingkat Kesakitan Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Papua, 2011-2015	89
6.2	Tingkat Kesakitan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2015	91
6.3	Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2015	93
6.4	Angka Harapan Hidup Penduduk Provinsi Papua, 2010-2015	96
6.5	Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2015	97
6.6	Angka Kematian Bayi dan Anak di Provinsi Papua dan Indonesia, 2007 dan 2012	99
6.7	Persentase Penolong Kelahiran di Provinsi Papua, 2012-2015	102
7.1	Perkembangan Penduduk Miskin Provinsi Papua, 2000 - 2015	109
7.2	Garis Kemiskinan Menurut Komponen di Provinsi Papua, 2010 - 2015	112
7.3	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2010 - 2015	116
7.4	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2010 - 2015	117
7.5	Komposisi Headcount Ratio (H), Intensitas Kemiskinan (A), dan Tingkat Kemiskinan	126

	Multidimensi (MPI) Provinsi Papua, 2015	
7.6	Tingkat Kemiskinan Multidimensi (MPI) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua, 2015	127
7.7	Kontribusi Dimensi Terhadap Tingkat Kemiskinan Multidimensi Menurut Tempat Tinggal Provinsi Papua, 2015	128
7.8	Gini Ratio Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2015	131
8.1	Struktur Perekonomian Provinsi Papua, 2015	140
8.2	Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Papua, 2011-2015	140
8.3	Struktur Perekonomian Menurut Sektor Primer, Sekunder, dan Tersier Provinsi Papua, 2011-2015	143
8.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua, 2011-2015	145
8.5	Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Papua, 2011-2015	145
8.6	PDRB per Kapita Papua, 2012-2015	148
8.7	Komponen Pengeluaran PDRB Provinsi Papua, 2015	149
8.8	Pertumbuhan PDRB Riil Menurut Pengeluaran Provinsi Papua, 2011-2015	150
8.9	Perkembangan Jumlah Proyek dan Nilai Investasi PMDN dan PMA di Papua, 2011-2013	153
9.1	TPAK Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua, 2015	166
9.2	Tingkat Pangangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua, 2015	167
9.3	Penduduk Usia Kerja Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua, 2015	171
9.4	Persentase Penduduk Usia Kerja Menurut Kegiatan Utama di Provinsi Papua, 2015	173
9.5	Jumlah Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Provinsi Papua, 2015	175
9.6	Persentase Penduduk Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Papua, 2015	177
9.7	Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua, 2015	179
9.8	Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Provinsi Papua, 2015	181

9.9	Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua, 2015	182	Usaha di Provinsi Papua, 2015		
9.10	Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Papua, 2015	184	9.16	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Sektor Formal dan Informal dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua, 2015	192
9.11	Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Usaha di Provinsi Papua, 2015	185	9.17	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Sektor Formal dan Informal Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2015	193
9.12	Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Jam Kerja di Provinsi Papua, 2015	187	9.18	Pengangguran Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua, 2015	194
9.13	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua, 2015	189	9.19	Pengangguran Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Papua, 2015	197
9.14	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Status Pekerjaan di Provinsi Papua, 2015	190	9.20	Setengah Penganggur Terpaksa Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin dan Pendidikan di Provinsi Papua, 2015	198
9.15	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Lapangan	191	10.1	Perkembangan IDI Provinsi Papua dan Nasional , 2009-2015	204
			10.2	Perkembangan IDI Provinsi Papua Menurut Aspek, 2009-2015	205
			10.3	Perkembangan Variabel IDI Provinsi Papua, 2014-2015	206

10.4	Indeks	Demokrasi	
	Indonesia	Menurut	
	Provinsi, 2015		210

10.5	Indeks Demokrasi Provinsi		
	Papua dan Nasional, 2015		211

DAFTAR LAMPIRAN

2.1	Pembangunan Lima Wilayah Adat Papua	37
5.1	Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun yang Tidak Bersekolah atau Tidak Bersekolah Lagi Menurut Alasan Utama dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua, 2015	74
5.2	Persentase Penduduk 7-24 Tahun Menurut Partisipasi Sekolah dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua, 2015	78
5.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua, 2015	80
5.4	Pendidikan yang Ditamatkan Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah yang Dimiliki dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua, 2015	81
7.1	Perkembangan Penduduk Miskin Menurut Daerah Tempat Tinggal Provinsi Papua, 2010-2015	110
7.2	Garis Kemiskinan Menurut Daerah Tempat Tinggal Provinsi Papua, 2010-2015	112
7.3	Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan	114

	Menurut Daerah Tempat Tinggal, Provinsi Papua Maret 2007 - September 2015	
7.4	Persentase Rumah Tangga yang Mengalami Deprivasi Menurut Banyaknya Indikator di Provinsi Papua, 2015	120
7.5	Status Deprivasi Menurut Indikator Kemiskinan Multidimensi Provinsi Papua, 2015	122
8.1	Perkembangan Beberapa Indikator Ekonomi Papua, 2011-2015	137
8.2	Distribusi PDRB Nominal Menurut Pengeluaran Provinsi Papua, 2011-2015	150
8.3	Capaian IPM dan Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota Papua, 2015	155
9.1	Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan di Provinsi Papua, 2011-2015	163
9.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua, 2015	165

9.3	Produktivitas Tenaga Kerja Menurut Sektor di Provinsi Papua, 2014-2015 (Juta Rupiah)	169
9.4	Penduduk Usia Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua, 2015	174
9.5	Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jumlah Jam Kerja di Provinsi Papua, 2015	188
9.6	Pengangguran Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua, 2015	195
10.1	Perkembangan Skor Indikator IDI Provinsi Papua 2014-2015	207

RINGKASAN EKSEKUTIF

Capaian pembangunan manusia di Papua secara umum terus menunjukkan peningkatan meskipun belum mampu mengangkat Papua keluar dari kategori “rendah” dalam status pembangunan manusianya. Dalam kurun waktu 2010-2015, Papua berhasil meningkatkan capaian IPM yang semula bernilai 54,45 pada tahun 2010 menjadi 57,25 di tahun 2015. Selama lima tahun kebelakang rata-rata pertumbuhan IPM di Provinsi Papua mencapai 1,01 persen per tahun, sedangkan pertumbuhan IPM tahun 2015 jika dibandingkan dengan tahun 2014 adalah sebesar 0,88 persen.

Di tahun 2015 ini harapan hidup bayi yang baru lahir di Papua dapat bertahan hidup hingga usia 65,09 tahun, secara rata-rata penduduk Papua usia 25 tahun ke atas sudah menempuh 5,99 tahun masa sekolah atau sudah menyelesaikan pendidikan setara kelas V dan hampir menyelesaikan kelas VI. Selain itu rata-rata penduduk usia 7 tahun yang mulai bersekolah, diharapkan dapat mengenyam pendidikan hingga 9,55

tahun atau setara dengan kelas IX atau tamat SMP serta pengeluaran per kapita yang disesuaikan mencapai Rp.6.469.000 per kapita per tahun di tahun 2015.

Salah satu hal yang mempengaruhi pencapaian pembangunan adalah komitmen pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan. Pelaksanaan program-program pembangunan termasuk pengawasan dan evaluasi terhadap program-program yang dilaksanakan memiliki peran dalam mencapai keberhasilan pembangunan di suatu wilayah.

Tantangan besar saat ini adalah Provinsi Papua hingga saat ini masih terjebak dalam kesulitan terutama akses serta sarana prasarana pendidikan dan kesehatan yang lengkap. Hal ini lah yang menyebabkan Provinsi Papua menjadi satu-satunya provinsi dengan status pembangunan manusia di kategori “rendah”.

MANUSIA, MENGUKUR DAN DIUKUR

1

1

MANUSIA, MENGUKUR DAN DIUKUR

“Pembangunan manusia adalah mengenai upaya memperluas pilihan hidup penduduk dengan berfokus pada peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan bukan hanya aspek ekonomi.”

————— *(Human Development Report 2015)*

Manusia adalah aset nyata dalam proses pembangunan sehingga menjadi hal yang wajar jika manusia menjadi tujuan akhir dari pembangunan, tidak hanya sekedar alat untuk membangun. Paradigma lama dalam pembangunan lebih berfokus pada pertumbuhan ekonomi. Seiring berjalannya waktu banyak ditemui negara-negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun memiliki kualitas manusia yang masih rendah.

“Fokus utama pembangunan manusia pada perluasan pilihan masyarakat untuk hidup dengan bebas dan bermartabat bergerak seiring dengan pertumbuhan yang positif dan perubahan dalam tingkat kesejahteraan”

Hal ini yang menyebabkan perubahan pada paradigma pembangunan yang baru dimana pembangunan juga perlu dititikberatkan pada pembangunan kualitas hidup manusia.

Konsep pembangunan manusia pada dasarnya menggeser pengertian paradigma lama yang menjadikan manusia sebagai alat pembangunan manusia. Fokus utama pembangunan manusia pada perluasan pilihan masyarakat untuk hidup dengan bebas dan bermartabat bergerak seiring dengan pertumbuhan yang positif dan

perubahan dalam tingkat kesejahteraan. Konsep pembangunan manusia mencakup seluruh aspek kehidupan penduduk baik sosial, ekonomi, politik, budaya dan lingkungan sehingga konsep

pembangunan manusia adalah manusia itu sendiri dan kesejahteraannya.

Pembangunan manusia yang merupakan perwujudan jangka panjang dari pembangunan itu sendiri yang digambarkan melalui tiga komponen yang paling mendasar yaitu berumur panjang dan hidup sehat, memperoleh pendidikan dan memiliki akses terhadap sumber-sumber kebutuhan agar hidup secara layak. Ketiga komponen itu dipilih karena apabila ketiga hal tersebut tidak dimiliki maka pilihan lain tidak dapat diakses sehingga tingkat pemenuhan ketiga komponen tersebut sudah dapat merefleksikan tingkat keberhasilan pembangunan manusia suatu wilayah.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) saat ini telah menjadi indikator yang penting dalam melihat sisi lain pembangunan di dunia, termasuk di Indonesia dan Provinsi Papua itu sendiri. Sebagai salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk), IPM telah menjadi salah satu indikator strategis dalam perencanaan pembangunan.

Manfaat lainnya dari IPM yaitu sebagai salah satu indikator yang digunakan untuk menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Di tahun 2015, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) melakukan pemeringkatan dan memberikan penghargaan kepada provinsi-provinsi yang telah mampu meningkatkan pembangunan diwilayahnya dimana variabel determinan yang digunakan untuk melakukan penilaian tersebut adalah pertumbuhan IPM. Manfaat IPM yang begitu besar bagi pembangunan menyebabkan Indonesia menjadikan IPM sebagai salah satu ukuran kinerja pemerintah dan digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Sejak kembalinya wilayah Irian Barat ke Indonesia pada tahun 1963, wilayah yang kini disebut sebagai Papua telah menjadi bagian integral Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selama 53 tahun pembangunan di Provinsi Papua sudah dan masih terus berjalan. Daya tarik utama Provinsi Papua dalam pertambangan sebagai salah satu kekayaan alam yang juga memegang

peranan utama dalam perkembangan kondisi ekonomi dan politik di Provinsi Papua. Sebagai wilayah yang kaya akan hasil alam, Provinsi Papua memiliki kesempatan untuk melakukan percepatan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakatnya di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan lainnya melalui pengambilan kebijakan yang tepat. Sebaliknya kesalahan dalam pengambilan keputusan bisa menyebabkan pembangunan di Provinsi Papua menjadi stagnan.

Penulisan publikasi ini merupakan salah satu sarana Pemerintah Papua untuk menilai pembangunan yang telah berjalan di Provinsi Papua dengan mengukur IPM di Provinsi Papua serta indikator-indikator pembangunan lainnya baik penilaian secara ekonomi maupun sosial. Dengan mengetahui posisi pembangunan di wilayah Provinsi Papua saat ini menjadi salah satu langkah Pemerintah Provinsi Papua untuk menentukan arah kebijakan di masa yang akan datang.

Pembangunan Manusia, Bagaimana Merumuskannya?

IPM pertama kali diperkenalkan oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu United Nations Development Program (UNDP) pada tahun 1990 melalui publikasi yang rutin diterbitkan setiap tahun dalam Human Development Report (Laporan Pembangunan Manusia). UNDP memperkenalkan IPM sebagai indeks komposit yang mampu untuk mengukur

pembangunan manusia serta dihitung melalui pendekatan dimensi umur panjang dan hidup sehat yang didekatkan dengan angka harapan hidup saat lahir, dimensi pengetahuan yang didekatkan dengan angka melek huruf dewasa, serta dimensi standar hidup

layak yang didekatkan dengan PDB per kapita. Tahun berikutnya UNDP melakukan penyempurnaan dalam penghitungan IPM dengan menambahkan variabel rata-rata lama sekolah ke dalam dimensi pengetahuan sehingga dimensi pengetahuan dibangun oleh dua variabel yaitu angka melek huruf dan rata-rata

“IPM pertama kali diperkenalkan oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu United Nations Development Program (UNDP) melalui publikasi Human Development Report (Laporan Pembangunan Manusia)”

lama sekolah. Pengukuran dimensi pengetahuan ini dilakukan dengan pembobotan pada dua variabelnya yaitu bobot dua per tiga untuk indikator angka melek huruf dan satu per tiga untuk indikator rata-rata lama sekolah. Tahun 1995 UNDP kembali melakukan penyempurnaan metode penghitungan IPM dimana UNDP mengganti variabel rata-rata lama sekolah menjadi gabungan angka partisipasi kasar dan pembobotan tetap dilakukan dengan metode yang sama seperti sebelumnya.

Tahun 2010 UNDP melakukan perubahan metodologi penghitungan IPM yang disebut sebagai IPM metode baru karena indikator-indikator yang digunakan dianggap sudah tidak relevan lagi. Perubahan yang dilakukan cukup signifikan yaitu dengan menggunakan indikator Harapan Lama Sekolah (*Expected Years of Schooling*) sebagai pengganti indikator Angka Partisipasi Kasar gabungan (*Combined Gross Enrollment Ratio*). Indikator Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Tambahan dimana metode

aritmatik yang sebelumnya digunakan dalam penentuan nilai komposit IPM diganti menjadi rata-rata geometrik. Tahun 2011 UNDP kembali melakukan penyempurnaan dengan merubah tahun dasar penghitungan PNB per kapita dari 2008 menjadi 2005. Di tahun 2014 UNDP melakukan penyempurnaan kembali penghitungan metode baru. Kali ini, UNDP merubah metode agregasi indeks pendidikan dari rata-rata geometrik menjadi rata-rata aritmatik dan tahun dasar PNB per kapita.

“IPM merupakan indeks komposit yang disusun oleh dimensi umur panjang dan hidup sehat, dimensi pengetahuan, dan dimensi hidup layak”

Serangkaian perubahan yang dilakukan UNDP bertujuan agar dapat membuat suatu indeks komposit yang cukup

relevan dalam mengukur pembangunan manusia.

Di Indonesia sendiri penghitungan IPM dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan menggunakan dasar-dasar penghitungan yang dilakukan oleh UNDP. Hal ini dilakukan agar nilai IPM yang dikeluarkan baik oleh BPS maupun UNDP bisa dibandingkan secara internasional. Tahun 2014 BPS resmi mengumumkan

penghitungan IPM metode baru dengan sumber data sebagai berikut:

- Angka harapan hidup saat lahir (Sensus Penduduk 2010/SP2010, Proyeksi Penduduk)
- Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (Survei Sosial Ekonomi Nasional/SUSENAS)
- PNB per kapita yang didekatkan dengan pengeluaran per kapita

(Survei Sosial Ekonomi Nasional/SUSENAS).

Dari empat indikator yang digunakan oleh UNDP, perbedaan indikator hanya terdapat pada indikator PNB per kapita. Perbedaan ini disebabkan oleh masalah ketersediaan data dimana data PNB per kapita tidak tersedia pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Share 1.1 Implementasi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua

Dengan adanya desentralisasi, tanggung jawab atas sebagian besar kegiatan pembangunan dilimpahkan dan dilaksanakan langsung di Pemerintah Daerah tingkat kabupaten/kota sehingga pembangunan yang efektif jika dilaksanakan dari tingkat terendah yang diprakarsai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Konsep pembangunan manusia sangatlah luas, mencakup hampir seluruh aspek kehidupan manusia, dari kebebasan mengungkapkan pendapat, kesetaraan gender, lapangan pekerjaan, gizi anak sampai melek huruf orang dewasa. Sebaliknya indeks pembangunan manusia (IPM) memiliki cakupan yang lebih sempit dimana hanya mengukur sebagian saja dari keadaan pembangunan manusia. Dengan melihat pada hal tersebut sehingga pusat perhatian harus diletakkan lebih pada konsep daripada indeks itu sendiri. Hal ini berarti pada setiap pengambilan kebijakan harus mendahulukan aspek manusia sebagai tujuan dari setiap kebijakan. Apabila manusia telah menjadi tujuan maka setiap kebijakan yang diambil akan mengikuti prinsip produktivitas, pemerataan, keberlanjutan dan pemberdayaan. Produktivitas yang berarti memrepresentasikan kebutuhan manusia untuk terus berproduksi agar proses pembangunan dapat terus berjalan. Pemerataan menunjukkan adanya akses yang adil

terhadap sumber daya ekonomi dan sosial bagi seluruh warga. Keberlanjutan menjadi prasyarat mutlak keseimbangan antara generasi sekarang dengan yang akan datang. Pemberdayaan diperlukan agar masyarakat turut berpartisipasi dalam proses pembangunan yang juga akan menentukan arah hidup mereka sendiri.

Angka IPM sendiri telah memberikan beberapa petunjuk penting bagi pemerintah. Kesenjangan antara capaian IPM saat ini dengan angka indeks 100 mencerminkan “kekurangan” pembangunan manusia. Dengan kata lain, jarak yang harus ditempuh oleh setiap daerah untuk mencapai pembangunan manusia sempurna. Perbandingan antar waktu memperlihatkan kemajuan atau bahkan kurangnya kemajuan suatu kabupaten tertentu.

Apa Saja yang Dibahas di Publikasi Ini?

Publikasi ini ditulis oleh Pemerintah Provinsi Papua sebagai salah satu bahan pendamping dalam menyusun program dan kebijakan untuk pembangunan di Tanah Papua. Dengan dasar tujuan tersebut, penulisan publikasi ini disusun berdasarkan tema dan topik yang terkait langsung dengan pembangunan di Tanah Papua.

Publikasi ini dimulai dengan bab satu yang memberikan gambaran mengenai definisi IPM. Penjabaran mengenai cara mengukur IPM serta manfaat dan metodologi penghitungan IPM juga tersedia di bab ini.

Status pembangunan manusia di Provinsi Papua diuraikan di bab dua. Gambaran mengenai capaian IPM Provinsi Papua hingga tingkat kabupaten/kota serta perbandingan dengan provinsi-provinsi lainnya menjadi fokus utama dari publikasi ini.

Dalam mewujudkan pembangunan yang berbasis gender, data indeks pembangunan gender (IPG) yang merupakan data turunan IPM disajikan di bab tiga.

Bab empat menyajikan kondisi akses ke infrastruktur dasar di Provinsi Papua.

Mencakup kondisi geografis di Provinsi Papua.

Situasi pendidikan dan kesehatan di Provinsi Papua disajikan di bab lima dan bab enam. Memberikan gambaran mengenai melek huruf, partisipasi sekolah serta aspek gender sebagai data dasar pengambilan kebijakan di bidang pendidikan. Data kesehatan yang disajikan mengenai harapan hidup, kematian bayi serta data dasar di bidang kesehatan lainnya.

Kemiskinan sebagai salah satu isu hangat yang tidak pernah sepi dari perhatian

pemerintah disajikan di bab tujuh. Berkaitan dengan kemiskinan yaitu masalah perekonomian dan ketenagakerjaan di Papua diulas berturut-turut di bab delapan dan bab sembilan. Kesejahteraan lainnya yaitu berupa kebebasan dalam demokrasi akan dijabarkan dalam bab sepuluh mengenai indeks demokrasi papua.

Sebagai tambahan di akan ditampilkan lampiran penjelasan teknis dari indikator-indikator yang disajikan di publikasi ini. Selain itu data tematik dan tabel-tabel disajikan juga didalam.

**STATUS
PEMBANGUNAN
MANUSIA
PROVINSI
PAPUA**

2

2

STATUS PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI PAPUA

“Peningkatan capaian IPM tidak lepas dari peningkatan dari setiap komponen penyusunnya.”

Pembangunan manusia kian menjadi perhatian karena merupakan gambaran keberhasilan suatu wilayah dalam pembangunan. Capaian pembangunan manusia di Papua secara umum terus menunjukkan peningkatan meskipun belum mampu mengangkat Papua keluar dari kategori “rendah” dalam status pembangunan manusianya. Belum mampunya IPM Papua menembus kategori “sedang” bisa disebabkan peningkatan dimensi-dimensinya yang belum optimal. Lambatnya peningkatan dimensi IPM akan terakumulasi pada peningkatan nilai IPM. Semakin rendah kecepatan peningkatan IPM maka

semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai nilai IPM yang ideal (100). Kecepatan suatu daerah dalam mencapai IPM ideal ditunjukkan oleh nilai pertumbuhan IPM. Konsep pertumbuhan IPM berpegang pada semakin besar nilai IPM dengan besar perubahan yang sama maka akan menghasilkan pertumbuhan yang semakin kecil. Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Pembangunan Manusia di Papua, Sudah Sejahter Mana?

Hasil nilai akhir IPM merupakan kombinasi dari nilai dimensi-dimensinya. Dalam kurun waktu 2010-2015, Papua berhasil meningkatkan capaian IPM yang semula bernilai 54,45 pada tahun 2010 menjadi 57,25 di tahun 2015. Kenaikan sebesar 2,80 poin selama kurun waktu lima tahun menunjukkan prestasi Pemerintah Provinsi Papua dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua. Selama lima tahun kebelakang rata-rata pertumbuhan IPM di Provinsi Papua mencapai 1,01 persen per tahun, sedangkan pertumbuhan IPM tahun 2015 jika dibandingkan dengan tahun 2014 adalah sebesar 0,88 persen.

Pertumbuhan IPM tertinggi dalam kurun waktu 2010-2015 terjadi di tahun 2013 sebesar 1,26 persen. Peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua yang digambarkan oleh IPM yang terus meningkat setiap tahunnya masih menyisakan pekerjaan rumah bahwa kenaikan capaian IPM tersebut masih belum mampu mengangkat IPM Papua yang hingga tahun 2015 masih berada dalam kategori rendah. Jika ditinjau dari perkembangan capaian IPM Provinsi Papua setiap tahunnya, peluang Provinsi Papua untuk menaikkan status pembangunan manusia ke dalam status kategori “sedang” cukup besar dan bisa terjadi pada beberapa tahun mendatang.

Gambar 2.1 Capaian dan Pertumbuhan IPM di Provinsi Papua, 2010-2015



Capaian IPM yang merupakan agregasi dari tiga dimensi yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak menggambarkan peranan ketiga dimensi tersebut dalam membentuk kesejahteraan hidup masyarakat Papua. Secara umum, Provinsi Papua mengalami peningkatan di seluruh dimensi.

Dimensi umur panjang dan hidup sehat diimplementasikan melalui indikator angka harapan hidup (AHH) saat lahir. Di tahun 2015, capaian AHH saat lahir di

Provinsi Papua mencapai 65,09 tahun yang dapat diartikan bahwa harapan hidup bayi yang baru lahir di Papua dapat bertahan hidup hingga usia 65,09 tahun. Dalam kurun waktu 2010-2015, AHH saat lahir di Papua telah meningkat sebesar 0,78 poin yaitu sebesar 64,31 tahun pada tahun 2010 menjadi 65,09 tahun di 2015. Secara rata-rata pertumbuhan AHH saat lahir adalah sebesar 0,24 persen per tahun. Selama periode 2010-2015 pertumbuhan AHH saat lahir tertinggi terdapat pada tahun 2015 yaitu sebesar 0,39 persen.

Gambar 2.2 Capaian dan Pertumbuhan AHH di Provinsi Papua, 2010-2015



Angka harapan hidup saat lahir merupakan indikator yang dapat mencerminkan derajat kesehatan suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses hingga kualitas kesehatan. Tren angka harapan hidup saat lahir dari tahun 2010-2015 menunjukkan adanya kecenderungan yang terus meningkat. Hal ini menunjukkan harapan bayi yang baru lahir untuk hidup semakin besar karena membaiknya derajat kesehatan masyarakat dan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup manusia.

Dimensi IPM yang kedua yaitu dimensi pengetahuan diwakili oleh rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS). Indikator RLS merupakan gambaran dari indikator output pembangunan jangka panjang sehingga memang perkembangan indikator RLS ini relatif lebih lambat jika dibandingkan dengan indikator lainnya. Sebaliknya indikator HLS merupakan indikator proses pembangunan yang digunakan sebagai ukuran keberhasilan program-program pendidikan jangka pendek. Kedua indikator ini menjadi gambaran capaian

dan penambahan sumber daya manusia berkualitas di suatu wilayah.

Indikator RLS di Provinsi Papua pada tahun 2015 sebesar 5,99 tahun yang berarti secara rata-rata penduduk Papua usia 25 tahun ke atas sudah menempuh 5,99 tahun masa sekolah atau sudah menyelesaikan pendidikan setara kelas V dan hampir menyelesaikan kelas VI. Dalam kurun waktu 2010-2015 indikator RLS di Provinsi Papua meningkat sebesar 0,40 poin sedangkan secara rata-rata pertumbuhan indikator RLS di Provinsi Papua selama tahun 2010-2015 sebesar 1,40 persen. Pertumbuhan RLS tertinggi selama tahun 2010-2015 terjadi di tahun 2015 ini dimana pertumbuhan RLS mencapai hingga 3,99 persen. Seperti halnya IPM, meskipun tumbuh dengan cukup tinggi namun indikator RLS di Papua masih sangat rendah. Menjaga konsistensi peningkatan indikator RLS adalah dengan menurunkan Angka Putus Sekolah (APS). Rendahnya RLS di Papua berkaitan secara langsung dengan aksesibilitas terhadap fasilitas pendidikan dimana sebagian besar fasilitas, sarana dan prasarana

pendidikan di Papua masih terpusat di wilayah perkotaan.

Gambar 2.3 Capaian dan Pertumbuhan RLS di Provinsi Papua, 2010-2015

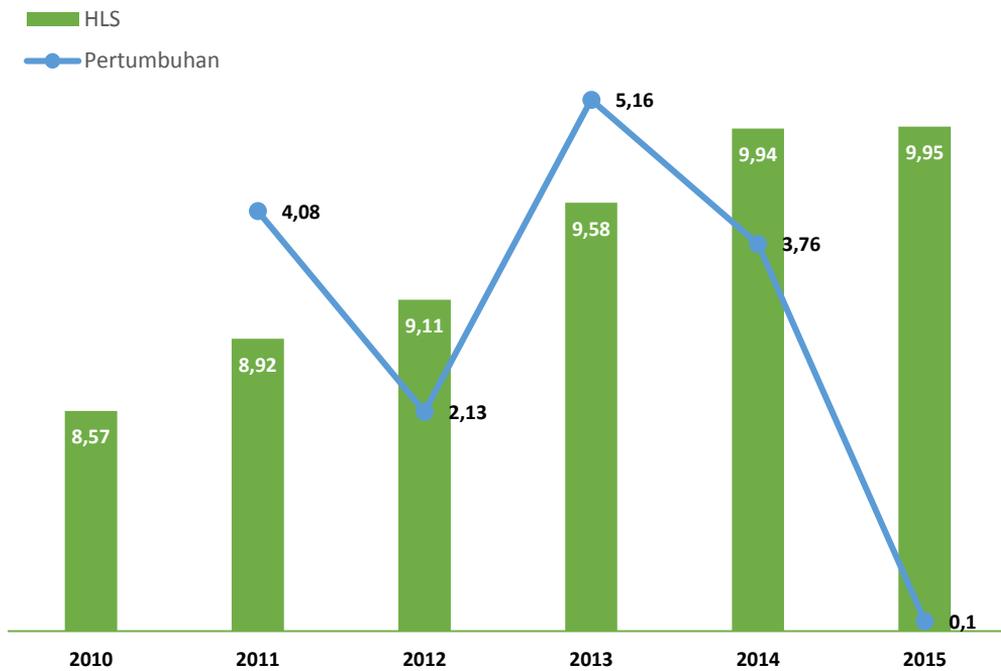


Dimensi pengetahuan lainnya yaitu harapan lama sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS di Papua pada tahun 2015 adalah sebesar 9,95 tahun yang berarti rata-rata penduduk usia 7 tahun yang mulai bersekolah, diharapkan dapat mengenyam pendidikan hingga 9,55 tahun atau setara dengan kelas IX atau tamat SMP. Selama periode tahun 2010 hingga 2015, Pemerintah Papua mampu meningkatkan HLS Papua hingga 1,38 poin yang semula di tahun

2010 sebesar 8,57 tahun menjadi 9,95 tahun di tahun 2015. Secara rata-rata HLS di Papua meningkat sebesar 3,05 persen per tahun namun pertumbuhan tertinggi terjadi di tahun 2013 sebesar 5,16 persen.

Peningkatan HLS yang cukup signifikan di Papua telah menjadi *booster* dalam peningkatan capaian IPM itu sendiri. Untuk menjaga konsistensi peningkatan nilai HLS secara langsung adalah dengan meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut jenjang pendidikan.

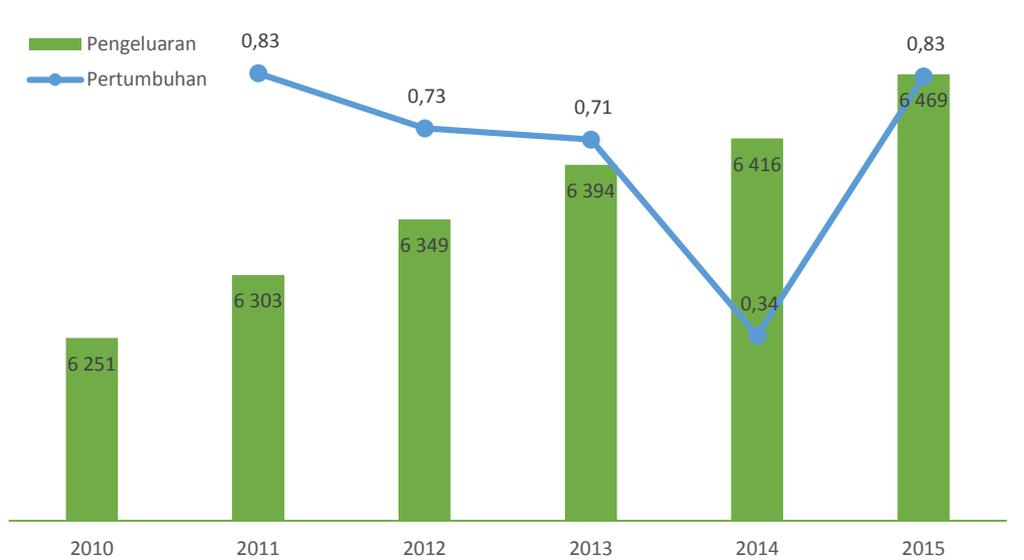
Gambar 2.4 Capaian dan Pertumbuhan HLS di Provinsi Papua, 2010-2015



Dimensi terakhir dalam penghitungan IPM yang juga tidak kalah pentingnya yaitu dimensi hidup layak yang diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan mencapai Rp.6.469.000 per kapita per tahun di tahun 2015. Seperti halnya indikator lainnya, nilai pengeluaran per kapita yang disesuaikan mengalami peningkatan yang setiap tahunnya dimana selama periode 2010-2015 meningkat

hingga Rp.218.000. Secara rata-rata pertumbuhan indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan mencapai 0,69 persen per tahun serta tahun 2011 dan 2015 menjadi tahun dengan pertumbuhan tertinggi yaitu 0,83 persen. Besaran nilai pengeluaran per kapita yang disesuaikan merefleksikan tingkat daya beli masyarakat dan kemampuan ekonomi rumah tangga.

Gambar 2.5 Capaian dan Pertumbuhan Pengeluaran di Provinsi Papua, 2010-2015



Papua, Benarkah Tertinggal?

Pencapaian pembangunan antar daerah tentunya tidak sama. Salah satu hal yang mempengaruhi pencapaian pembangunan adalah komitmen pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan. Pelaksanaan program-program pembangunan termasuk pengawasan dan evaluasi terhadap program-program yang dilaksanakan memiliki peran dalam mencapai keberhasilan pembangunan di suatu wilayah.

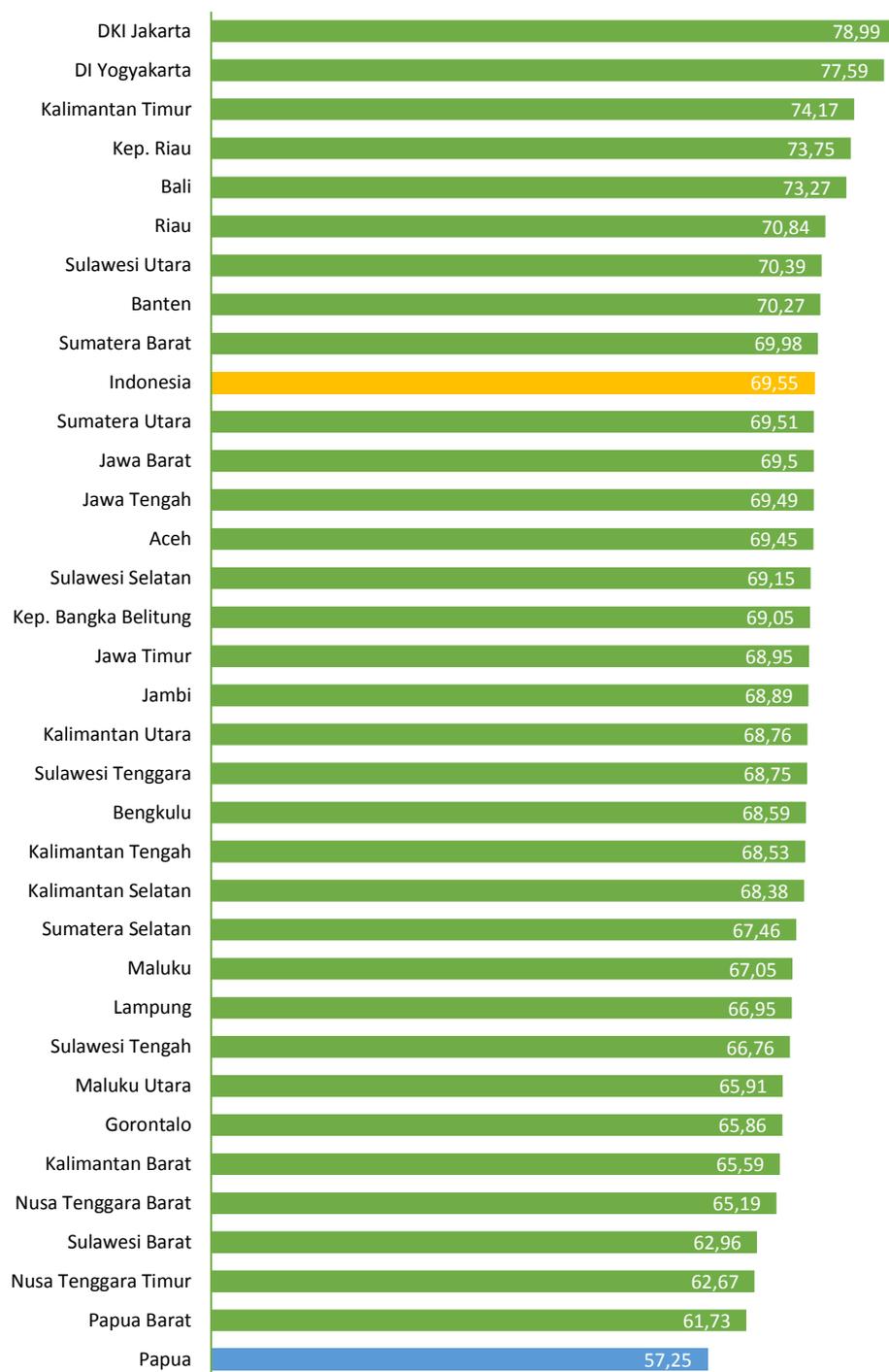
Membandingkan IPM Papua dengan provinsi lainnya di Indonesia menjadi tolak ukur sudah sampai mana pembangunan di Provinsi Papua jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya. Tidak dapat dipungkiri jika garis start pembangunan di Provinsi Papua memang tidak sama jika dibandingkan dengan provinsi lainnya sehingga pembangunan di Provinsi Papua cenderung terkesan tertinggal.

Capaian IPM Indonesia pada tahun 2015 adalah sebesar 70,78. Secara umum delapan provinsi termasuk dalam capaian IPM “tinggi”, 25 provinsi berada pada kategori “sedang” dan satu provinsi yang

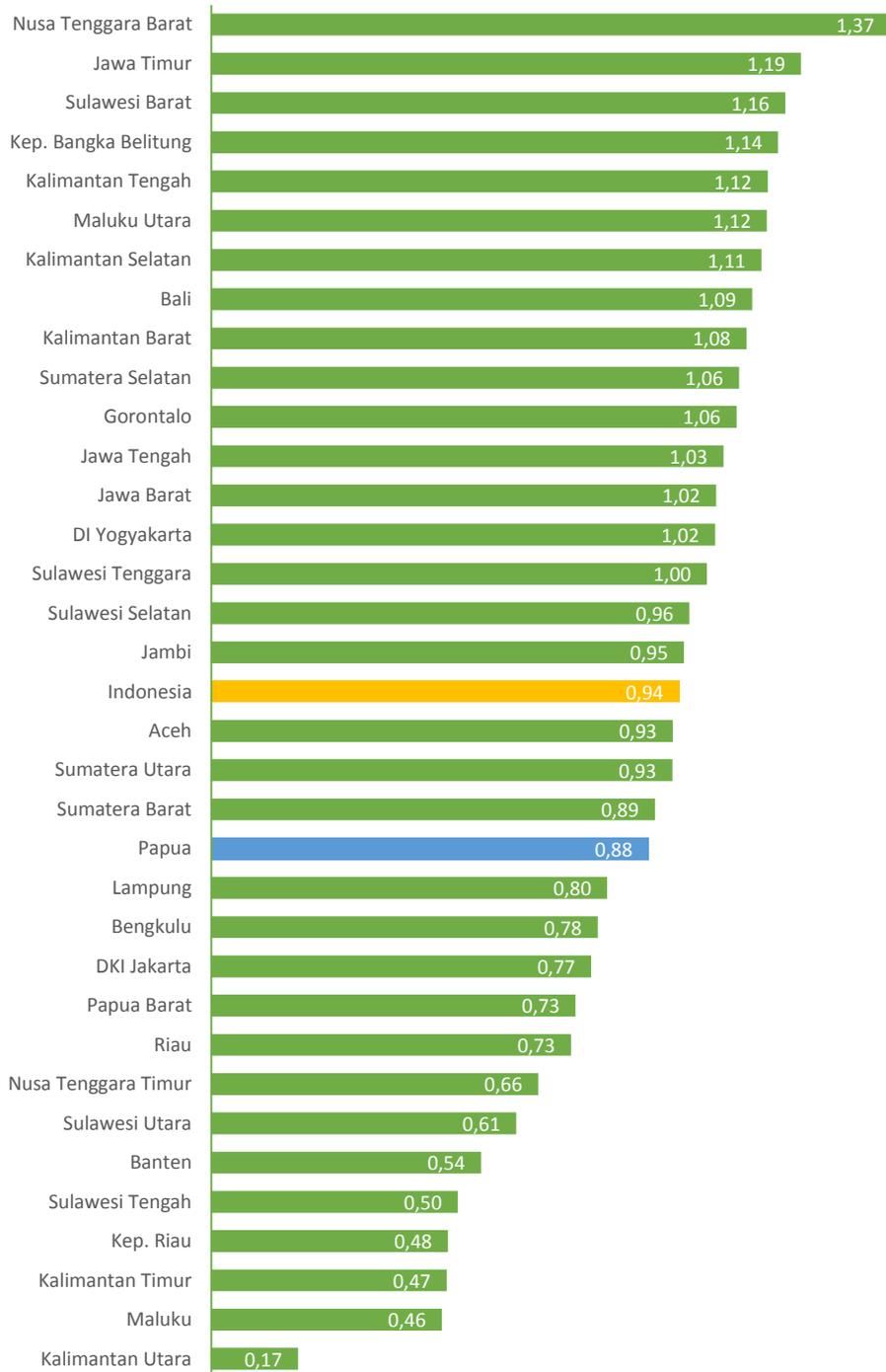
berada pada kategori “rendah”. IPM tertinggi dicapai oleh Provinsi DKI Jakarta dengan capaian IPM sebesar 78,99. Tentu bukan hal yang aneh jika DKI Jakarta menjadi provinsi dengan capaian IPM tertinggi, hal ini dikarenakan Provinsi DKI Jakarta merupakan pusat dari seluruh kegiatan baik pemerintahan maupun ekonomi. Sebagai pusat roda pemerintahan maupun perekonomian di Indonesia, DKI Jakarta memiliki kelengkapan sarana prasarana yang lengkap. Akses pendidikan dan kesehatan pun mudah didapatkan di ibukota Indonesia ini. Dengan kondisi ini sehingga menyebabkan iklim kompetitif di DKI Jakarta dan secara tidak langsung menjadi kantung sumber daya manusia yang berkualitas.

Provinsi Papua sendiri merupakan provinsi dengan capaian IPM terendah yaitu sebesar 57,25 dan menjadi satu-satunya provinsi yang termasuk dalam kategori capaian IPM “rendah”. Dengan kondisi yang berkebalikan dengan Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Papua hingga saat ini masih terjebak dalam kesulitan terutama akses serta sarana prasarana pendidikan dan kesehatan yang lengkap. Hal ini lah yang menyebabkan Provinsi Papua menjadi satu-satunya provinsi dengan status pembangunan manusia di kategori “rendah”.

Gambar 2.6 IPM Provinsi-Provinsi di Indonesia, 2015



Gambar 2.7 Pertumbuhan IPM Provinsi-Provinsi di Indonesia, 2015



Di tahun 2015 IPM Provinsi Papua tumbuh hingga sebesar 0,88 persen. Nilai pertumbuhan Provinsi Papua di tahun 2015 ini tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2013 pertumbuhan IPM Provinsi Papua mencapai pertumbuhannya yang tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir yaitu periode 2010 hingga 2015 dengan nilai pertumbuhan sebesar 1,26 persen. Nilai pertumbuhan IPM Provinsi Papua ini menjadi salah satu titik terang bahwa kualitas pembangunan manusia di Provinsi Papua masih bisa meningkat.

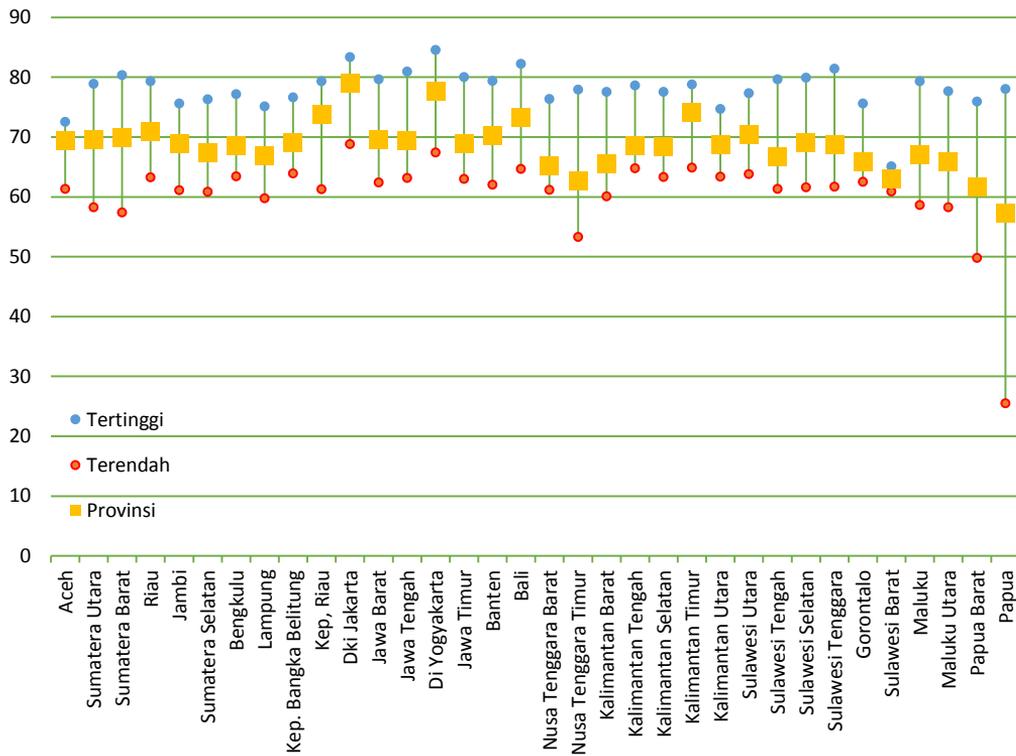
Dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya, nilai pertumbuhan IPM Provinsi Papua bukanlah yang terendah meski tidak juga menjadi yang tertinggi. pada periode tahun 2014-2015 Provinsi Nusa Tenggara Barat menempati posisi pertama dengan pertumbuhan IPM sebesar 1,37 persen. Disusul oleh Provinsi Jawa Timur (1,19 persen), Provinsi Sulawesi Barat (1,16 persen), Provinsi Kep.

Bangka Belitung (1,14 persen), dan Provinsi Kalimantan Tengah (1,12 persen). Keberhasilan dari provinsi-provinsi ini dalam mempercepat pembangunan manusia bisa menjadi contoh yang baik bagi Provinsi Papua untuk meningkatkan nilai IPM.

Pada dasarnya IPM provinsi merupakan komposit dari IPM kabupaten/kota di wilayahnya sehingga membandingkan IPM provinsi saja belum bisa menjadi ukuran keterwakilan pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah. Perbandingan IPM provinsi di wilayah kabupaten/kota memberikan gambaran peta sebaran capaian IPM di wilayah tersebut. Gambaran ini secara lebih lanjut merupakan gambaran kesenjangan pembangunan manusia antar wilayah sehingga bisa dibandingkan seberapa besar kesenjangan kualitas pembangunan manusia antar wilayah.

“Selama tahun 2010 hingga 2015, Provinsi Papua menempati posisi dengan IPM terendah jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya. Bahkan sejak tahun 2012, Provinsi Papua merupakan satu-satunya provinsi dengancapaian IPM “rendah””

Gambar 2.8 Kesenjangan IPM Provinsi-Provinsi di Indonesia, 2015



Kesenjangan pembangunan manusia di Indonesia tahun 2015 menunjukkan Provinsi Sulawesi Barat memiliki kesenjangan pembangunan yang paling rendah yaitu 4,22. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat berjalan secara merata. Bahkan Provinsi Sulawesi Barat menjadi satu-satunya provinsi dengan nilai kesenjangan pembangunan manusia dibawah sepuluh. Sebaliknya Provinsi Papua memiliki

kesenjangan pembangunan manusia yang paling tinggi yaitu sebesar 52,58. Faktanya 33 provinsi di Indonesia memiliki nilai kesenjangan yang berada dalam kisaran empat hingga 26. Provinsi Papua menjadi satu-satunya provinsi yang memiliki tingkat kesenjangan pembangunan manusia di atas 50. Hal ini tentunya sangat mengkhawatirkan dan membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah Provinsi Papua.

Selisih pembangunan manusia antar kabupaten/kota di Provinsi Papua yang mencapai hingga 52,59 menunjukkan bahwa kesenjangan pembangunan di Provinsi Papua masih tinggi. Dimensi kesehatan, pendidikan dan hidup layak yang berkualitas belum bisa dirasakan oleh seluruh penduduk Provinsi Papua secara merata. Hal ini lah yang sesungguhnya menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah Provinsi Papua, agar pembangunan di Provinsi Papua bisa berjalan secara merata.

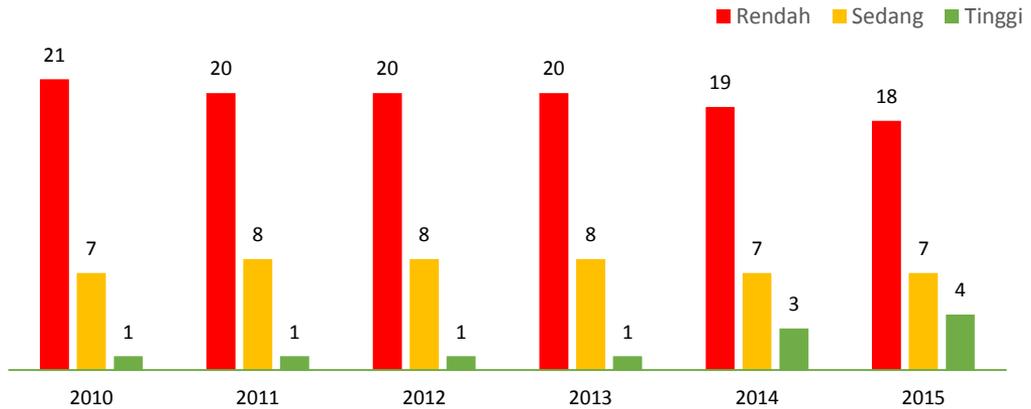
Membangun Papua Bukan Hanya Membangun Jayapura

Sebagai provinsi terluas di Indonesia, Provinsi Papua memiliki karakteristik wilayah yang beragam. Secara administrasi Provinsi Papua terdiri dari 28 kabupaten dan satu kota. Dengan jumlah

administrasi yang cukup tinggi, capaian IPM di kabupaten/kota di Provinsi Papua pun cukup beragam. Pada tahun 2015 sebanyak 18 kabupaten di Provinsi Papua memiliki capaian IPM “rendah”, tujuh kabupaten memiliki capaian IPM “sedang”, dan empat kabupaten/kota memiliki capaian IPM “tinggi”. Capaian IPM “sangat tinggi” tidak ditemukan di Provinsi Papua.

Status capaian IPM kabupaten/kota di Provinsi Papua pada tahun 2015 mengalami peningkatan yang cukup baik jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2010 yang menjadi tahun dasar penghitungan IPM metode baru, sebanyak 21 kabupaten memiliki capaian IPM “rendah”, tujuh kabupaten memiliki capaian IPM “sedang”, serta satu kota yang memiliki capaian IPM “tinggi”.

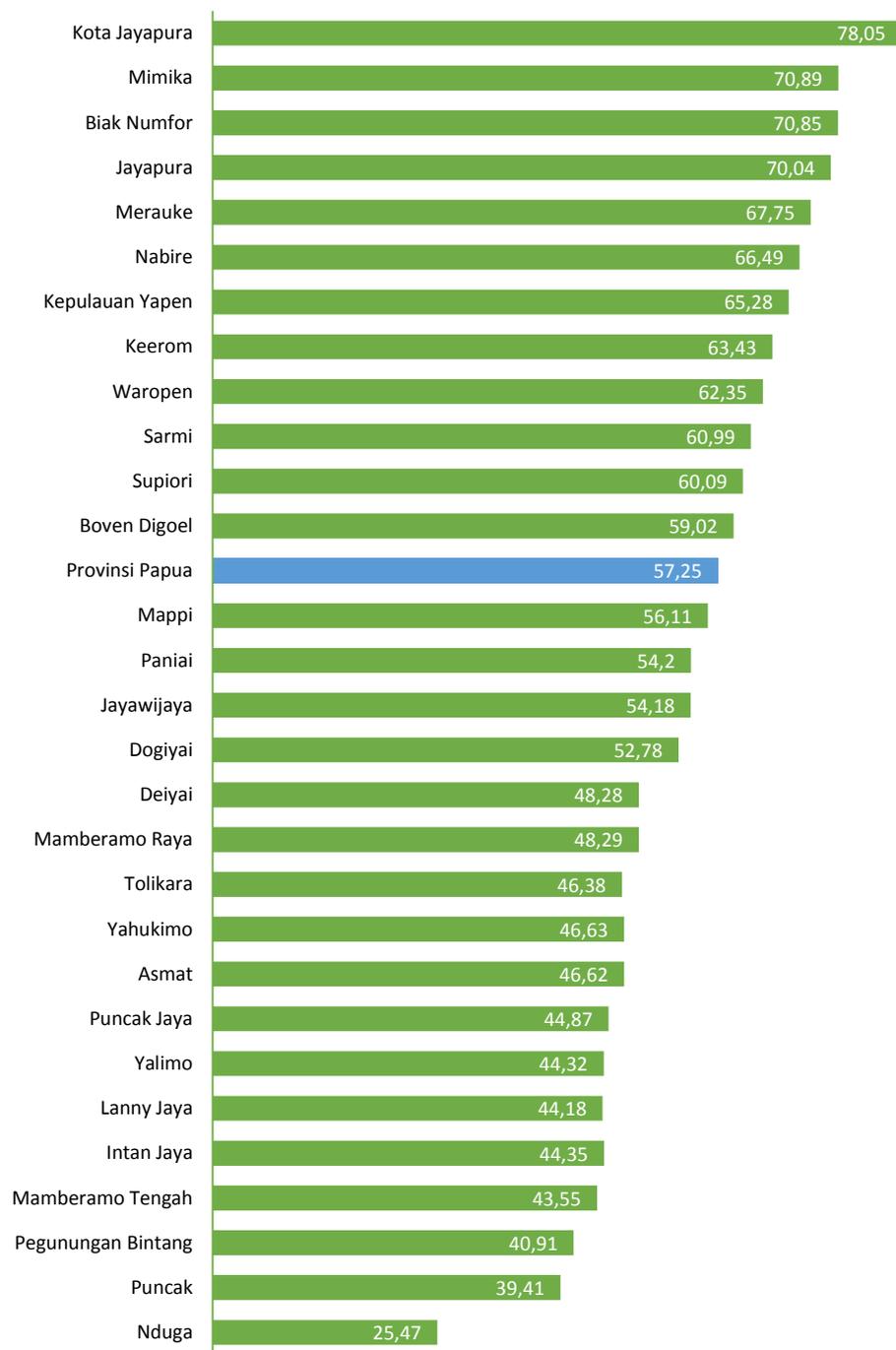
Gambar 2.9 Status Capaian IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2015



Di tahun 2015 ini IPM tertinggi adalah sebesar 78,05 di Kota Jayapura sedang yang terendah sebesar 25,47 di Kabupaten Nduga. Seperti halnya IPM provinsi-provinsi di Indonesia, nilai IPM

tertinggi terdapat di wilayah ibukota provinsi dimana akses dan fasilitas sarana dan prasarana pembangunan sudah lebih baik jika dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lainnya.

Gambar 2.10 IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2015



Posisi Kota Jayapura yang merupakan pusat pemerintahan maupun perekonomian di Provinsi Papua menjadikannya sebagai pusat pembangunan di Provinsi Papua sehingga wajar saja jika IPM di wilayah ini menjadi yang tertinggi. Tingginya nilai IPM di Kota Jayapura didorong oleh dimensi pendidikan dan dimensi hidup layak. Pada tahun 2015 indikator RLS di Kota Jayapura sebesar 11,09 tahun yang menjadi RLS tertinggi di Provinsi Papua dan satu-satunya kabupaten/kota yang memiliki nilai RLS di atas sepuluh. Hal ini berarti secara rata-rata penduduk Papua usia 25 tahun ke atas sudah menempuh 11,09 tahun masa sekolah atau sudah menyelesaikan pendidikan setara kelas XI dan hampir menyelesaikan kelas XII. Begitu juga dengan HLS Kota Jayapura yang mencapai nilai 14,16 tahun yang menjadikan Kota Jayapura dengan HLS tertinggi di Provinsi Papua meskipun jika dilihat perbedaannya dengan kabupaten lainnya tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Dengan nilai HLS Kota Jayapura yang mencapai 14,16 menunjukkan rata-rata penduduk usia tujuh tahun yang mulai bersekolah diharapkan dapat

mengenyam pendidikan hingga 14,16 tahun atau setara dengan Diploma II. Hal ini tentunya memberikan gambaran pendidikan yang sudah cukup maju di Kota Jayapura jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Provinsi Papua.

Dimensi hidup layak yang juga turut berperan menjadikan IPM Kota Jayapura yang tertinggi di Provinsi Papua menunjukkan nilai pengeluaran di Kota Jayapura sebesar Rp.14.249 ribu per kapita per tahun. Dengan pencapaian yang cukup tinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Provinsi Papua menunjukkan bahwa geliat perekonomian di Kota Jayapura yang memang pusat perekonomian Provinsi Papua memang lebih baik dibandingkan wilayah lainnya.

Sejak tahun 2014 Kabupaten Mimika dan Kabupaten Biak Numfor serta di tahun 2015 Kabupaten Jayapura mengalami perubahan status capaian pembangunan manusia menjadi “tinggi”. Oleh karena itu di tahun 2015 ini, selain Kota Jayapura, terdapat tiga kabupaten lainnya yang memiliki status capaian pembangunan manusia “tinggi”.

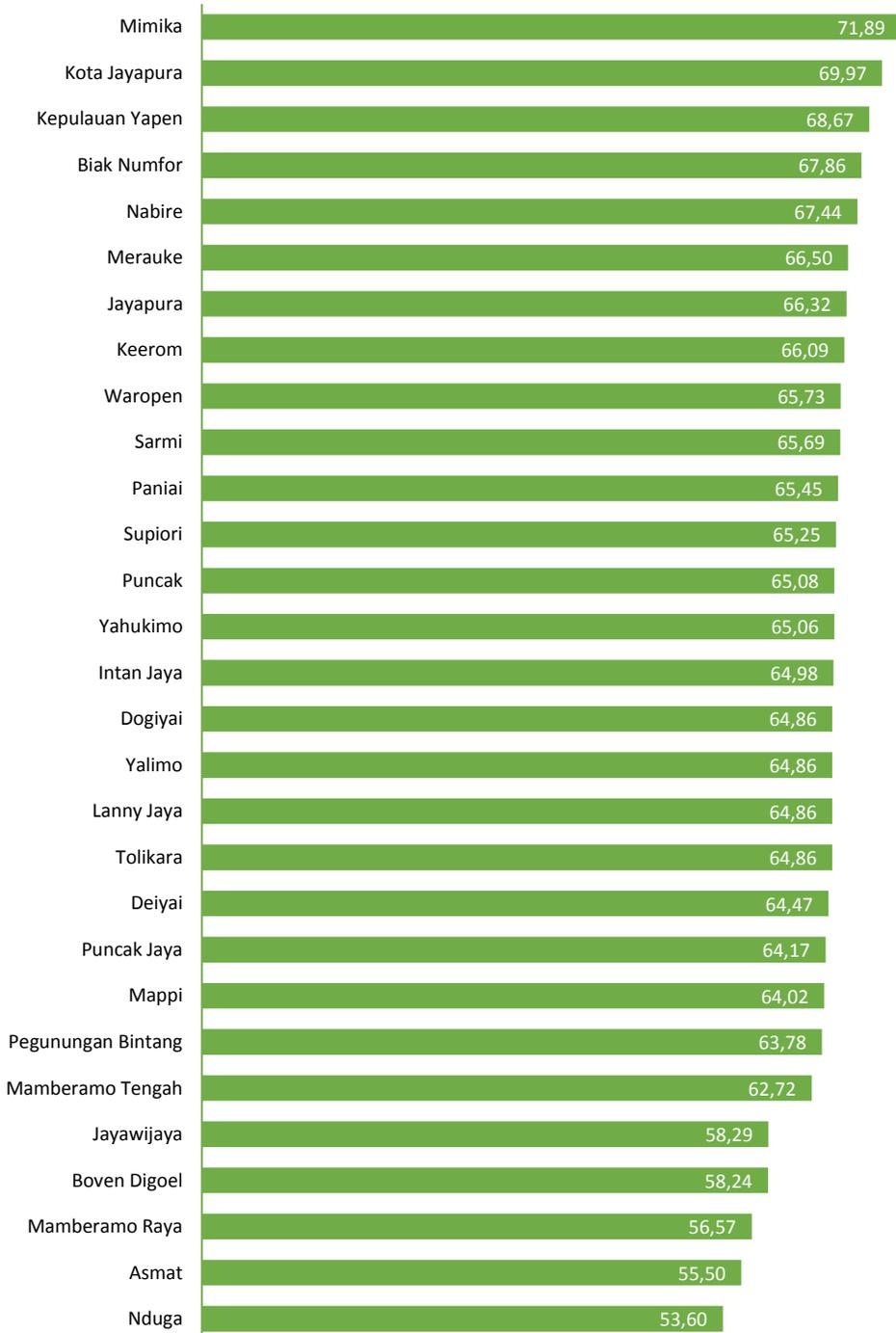
Kabupaten Mimika yang dengan capaian IPM sebesar 70,89 menjadi kabupaten dengan capaian IPM tertinggi kedua setelah Kota Jayapura. Berbeda dengan Kota Jayapura yang capaian IPM nya didorong oleh dimensi pendidikan dan dimensi pengeluaran, capaian IPM Kabupaten Mimika didorong oleh dimensi kesehatan dan dimensi pengeluaran.

AHH saat lahir di Kabupaten Mimika pada tahun 2015 adalah sebesar 71,89. Indikator yang mewakili dimensi kesehatan ini menunjukkan bahwa harapan hidup bayi yang baru lahir di Kabupaten Mimika dapat bertahan hidup hingga usia 71,89 tahun. Nilai ini merupakan yang tertinggi di Provinsi Papua, bahkan dibandingkan dengan Kota Jayapura yang nilai AHH nya hanya sebesar 69,97 tahun. Dengan melihat nilai dari indikator AHH saat lahir ini menunjukkan bahwa kualitas kesehatan di Kabupaten Mimika sudah lebih baik

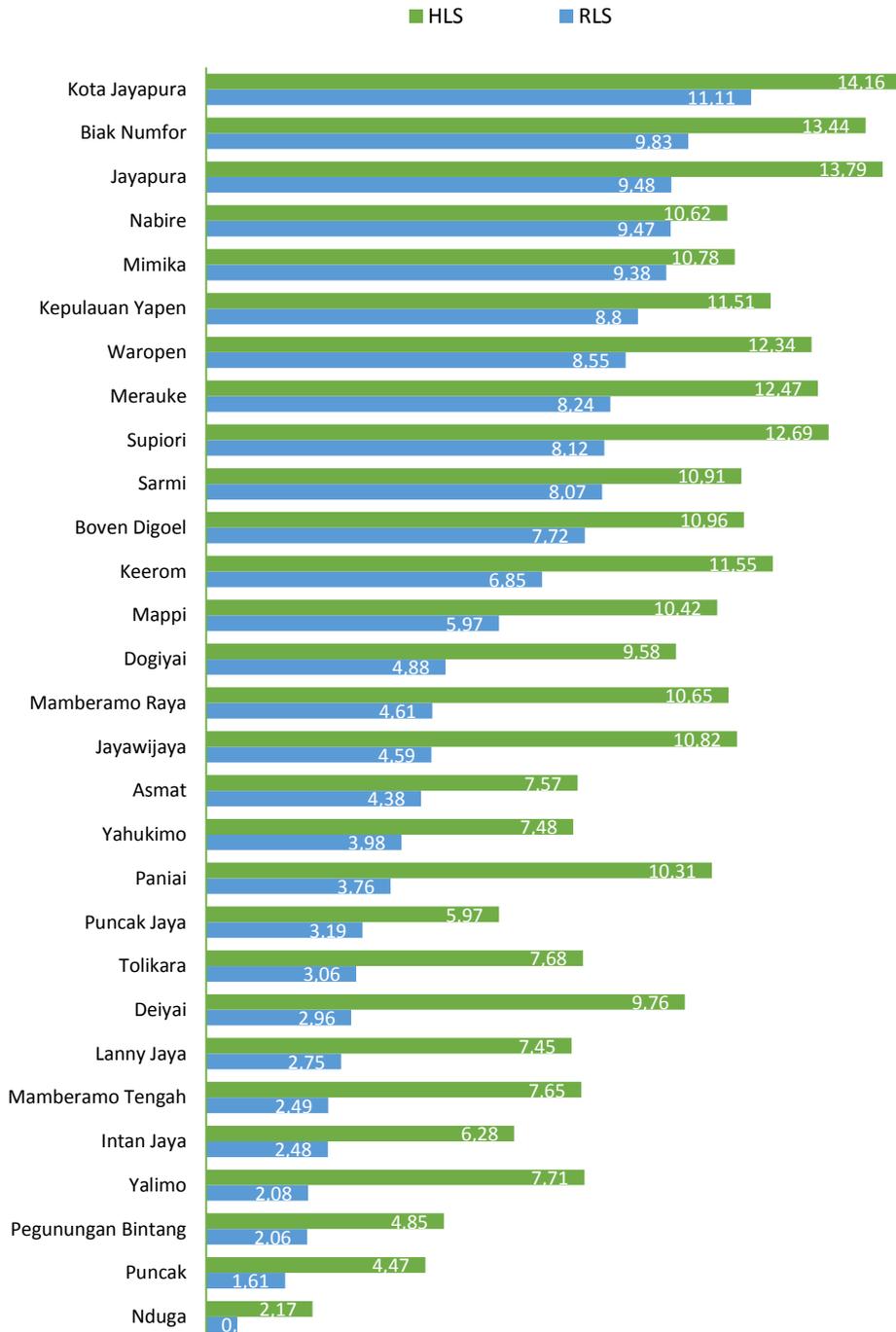
bahkan yang terbaik dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Papua. Pada dimensi pengeluaran, Kabupaten Mimika menempati urutan tertinggi kedua dibandingkan wilayah lain di Provinsi Papua. Dengan nilai pengeluaran yang disesuaikan sebesar Rp.10.952 ribu per kapita per tahun juga menunjukkan geliat perekonomian yang cukup baik di Kabupaten Mimika. Hal ini ditengarai karena keberadaan tambang emas terbesar di Indonesia yang dikelola oleh PT. Freeport.

Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Jayapura yang menempati urutan capaian IPM tertinggi ketiga dan keempat memiliki nilai capaian masing-masing sebesar 70,85 dan 70,04. Jika diperhatikan di kedua kabupaten ini memiliki pola komposit yang sama pada IPM nya dimana capaian IPM di kedua kabupaten ini didorong oleh dimensi pendidikan.

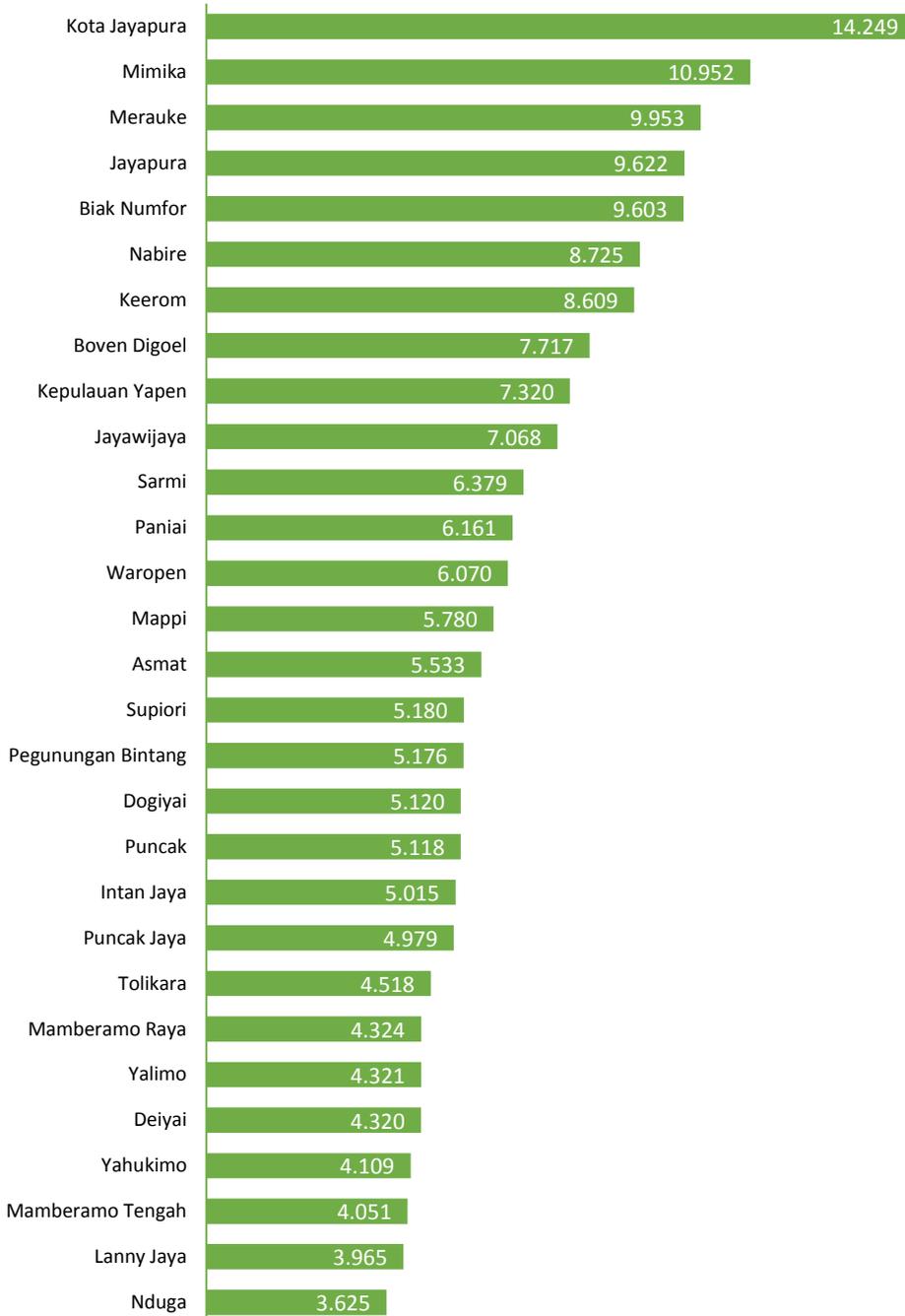
Gambar 2.11 Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2015



Gambar 2.12 Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2015



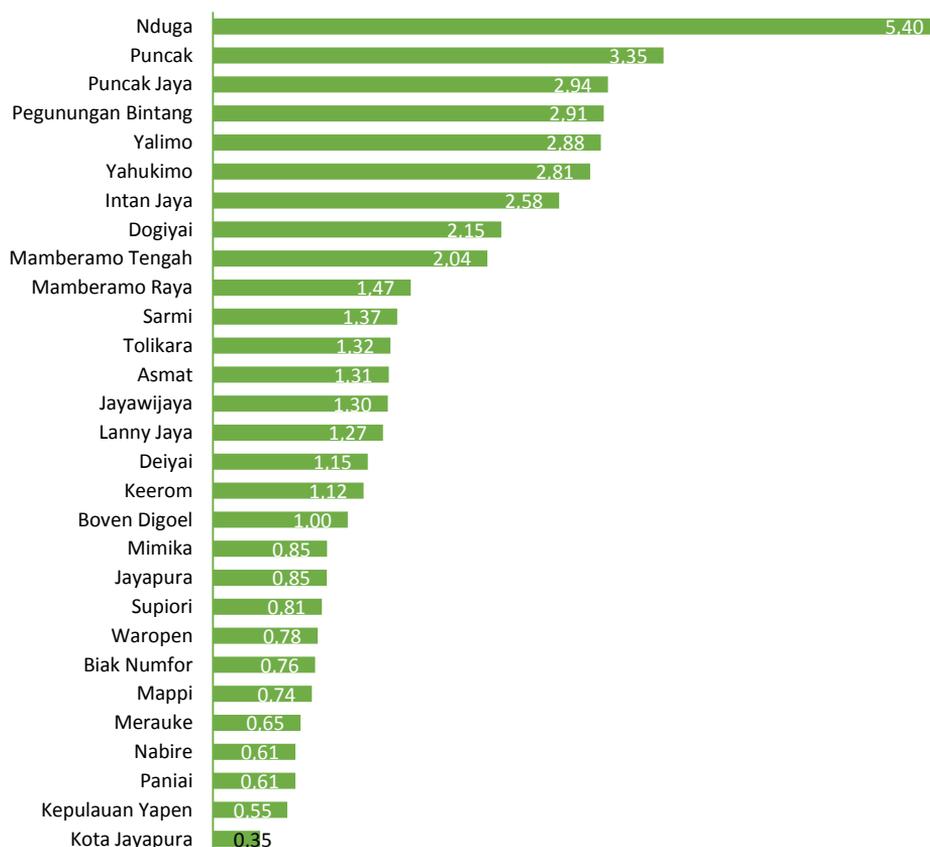
Gambar 2.13 Rata-rata Pengeluaran yang Disesuaikan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2015



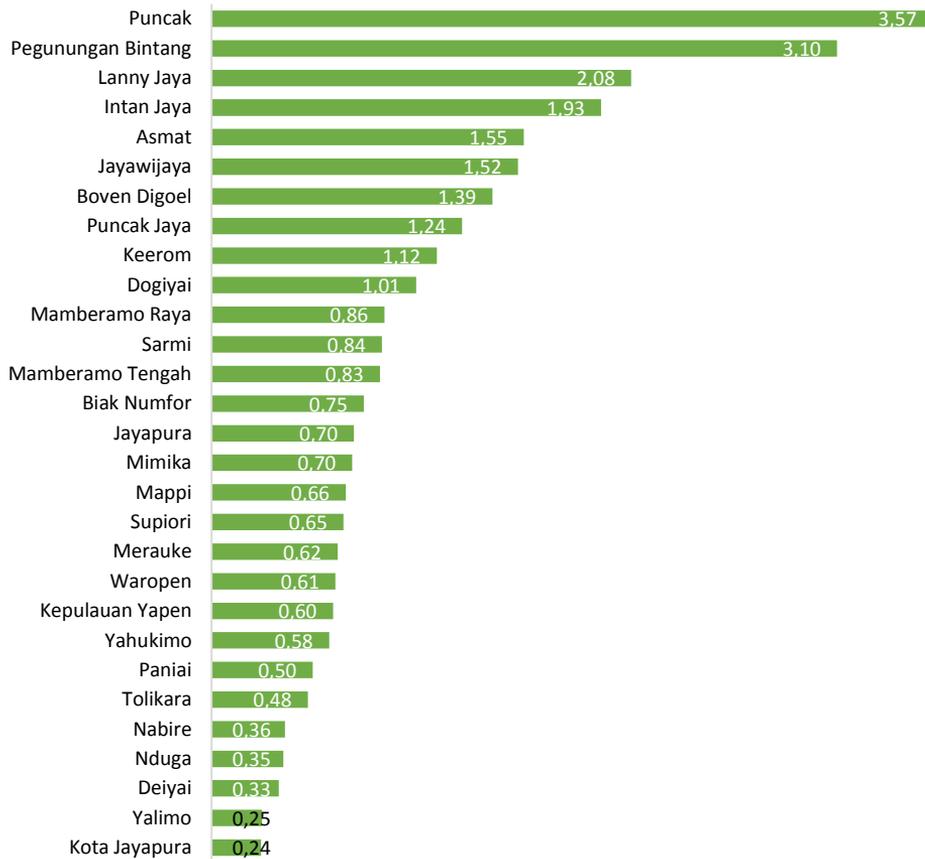
Kabupaten Nduga dengan capaian IPM terendah di Provinsi Papua sebesar 25,47 menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Kabupaten Nduga masih sangat rendah. Rendahnya capaian IPM di Kabupaten Nduga dipengaruhi oleh seluruh dimensi baik dimensi kesehatan, dimensi pendidikan maupun dimensi hidup layak. Pada seluruh indikator di

dimensi-dimensi tersebut, capaian IPM Kabupaten Nduga selalu berada pada posisi terendah. Kabupaten Nduga yang merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya memang masih tertinggal. Akses dan fasilitas sarana prasarana yang kurang menjadikan Kabupaten Nduga tertinggal dari seluruh aspek pembangunan manusia.

Gambar 2.14 Rata-rata Pertumbuhan IPM Per Tahun Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2010-2015



Gambar 2.15 Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2015



Seperti telah diuraikan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, pertumbuhan capaian IPM menjadi salah satu indikator yang menunjukkan kecepatan pembangunan manusia. Kota Jayapura yang meskipun memiliki capaian IPM tertinggi di Provinsi Papua namun memiliki rata-rata pertumbuhan IPM per tahun yang terendah yaitu sebesar 0,35 persen per tahun. Sebaliknya Kabupaten

Nduga yang memiliki capaian IPM terendah namun memiliki rata-rata pertumbuhan IPM per tahun yang tertinggi yaitu sebesar 5,40 persen. Dengan begitu performa pembangunan di Kabupaten Nduga perlu dipertahankan dalam kondisi yang sama setiap tahunnya agar mampu mempercepat peningkatan kualitas pembangunan manusianya.

Performa membangun ini lah yang perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah dibanding sekedar memperhatikan nilai capaian IPM. Jika setiap tahun performa pembangunan yang dinilai berdasarkan pertumbuhan IPM nya bergerak sama atau bahkan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya maka diyakini mampu mempercepat gerak capaian IPM mencapai nilai 100 (pembangunan manusia tertinggi).

Share 2.1 Menjaga Performa Pembangunan

Selain meningkatkan capaian IPM, penting bagi Pemerintah Provinsi Papua untuk menjaga bahkan meningkatkan performa pembangunan yang dilakukan dengan menjaga laju pertumbuhan IPM itu sendiri. Dalam mengukur capaian IPM, performa pembangunan yang perlu dijaga dan ditingkatkan hanya mencakup kesehatan, pendidikan dan hidup layak.

Lalu bagaimana cara mudah untuk menjaga laju pertumbuhan IPM?

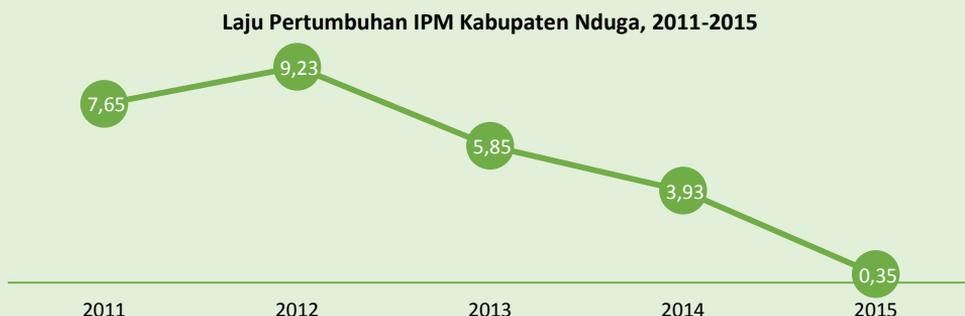
Sebagai contoh di Kabupaten Nduga yang memiliki capaian IPM terendah yaitu sebesar 25,47 di tahun 2015 dengan rata-rata pertumbuhan per tahun dalam periode 2011 hingga 2015 adalah sebesar 5,40 persen. Jika setiap tahun pembangunan di Kabupaten Nduga berjalan secara konstan dengan kondisi laju pertumbuhan IPM 5,40 persen maka Kabupaten Nduga akan mencapai IPM=100 di tahun 2028 atau kurang lebih 12 tahun dari sekarang.

Melihat laju pertumbuhan IPM Kabupaten Nduga pada periode tahun 2011 hingga 2015, laju pertumbuhan IPM Kabupaten Nduga mengalami penurunan bahkan yang terendah terjadi di tahun 2015 hanya mencapai 0,35 persen. Bayangkan jika performa pembangunan di Kabupaten Nduga setiap tahunnya terjadi seperti pada tahun 2015 maka untuk mencapai IPM=100 dibutuhkan waktu selama kurang lebih 210 tahun, bahkan bisa lebih jika terus menurun.

Perhatikan kembali trend laju pertumbuhan IPM di Kabupaten Nduga, pada tahun 2012 mencapai laju pertumbuhan tertinggi yaitu 9,23 persen. Jika performa ini dipertahankan setiap tahunnya atau bahkan meningkat, Kabupaten Nduga hanya membutuhkan waktu kurang lebih 8,07 tahun untuk mencapai IPM=100 atau dengan kata lain di tahun 2023, pembangunan manusia di Kabupaten Nduga sudah berada pada titik sempurna.

Terlihat jelas bedanya bukan? Hal ini tentu memudahkan pemangku kebijakan untuk mempelajari trend laju pertumbuhan IPM, dan meninjau kebijakan yang dilakukan di tahun tersebut. Mengapa di tahun 2012 Kabupaten Nduga memiliki laju pertumbuhan tertinggi? Mengapa laju pertumbuhan Kabupaten Nduga mengalami penurunan hingga memiliki laju pertumbuhan yang rendah di 2015? Hal ini bisa terjawab dengan meninjau ulang kebijakan yang dibuat di tahun tersebut.

Angka IPM sendiri telah memberikan beberapa petunjuk penting bagi pemerintah. Kesenjangan antara capaian IPM saat ini dengan angka indeks 100 mencerminkan “kekurangan” pembangunan manusia. Dengan kata lain, jarak yang harus ditempuh oleh setiap daerah untuk mencapai pembangunan manusia sempurna. Perbandingan antar waktu memperlihatkan kemajuan atau bahkan kurangnya kemajuan suatu kabupaten tertentu.



Lima Wilayah Adat, Pendekatan Baru Pembangunan Papua

Sebagai terobosan pembangunan di Provinsi Papua, BAPPENAS dengan Pemerintah Provinsi Papua merumuskan pendekatan pembangunan kawasan strategis berbasis lima wilayah adat. Pembagian kawasan ini berdasarkan

kedekatan kultur, kedekatan teritorial dan kedekatan dalam indikator pembangunannya. Pembangunan yang berbasis pada lima wilayah adat ini merupakan salah satu usaha Pemerintah Provinsi Papua dalam percepatan pembangunan sehingga lebih terarah dan tepat sasaran.

Tabel 2.1 Pembangunan Lima Wilayah Adat Papua

Mamta (1)	Saireri (2)	Animha (3)	La Pago (4)	Mee Pago (5)
Kota Jayapura	Biak Numfor	Merauke	Jayawijaya	Mimika
Jayapura	Kep. Yapen	Boven Digoel	Yahukimo	Nabire
Keerom	Waropen	Mappi	Tolikara	Paniai
Sarmi	Supiori	Asmat	Puncak Jaya	Dogiyai
Mamberamo Raya			Yalimo	Deiyai
			Lanny Jaya	Intan Jaya
			Mamberamo Tengah	
			Pegunungan Bintang	
			Puncak	
			Nduga	

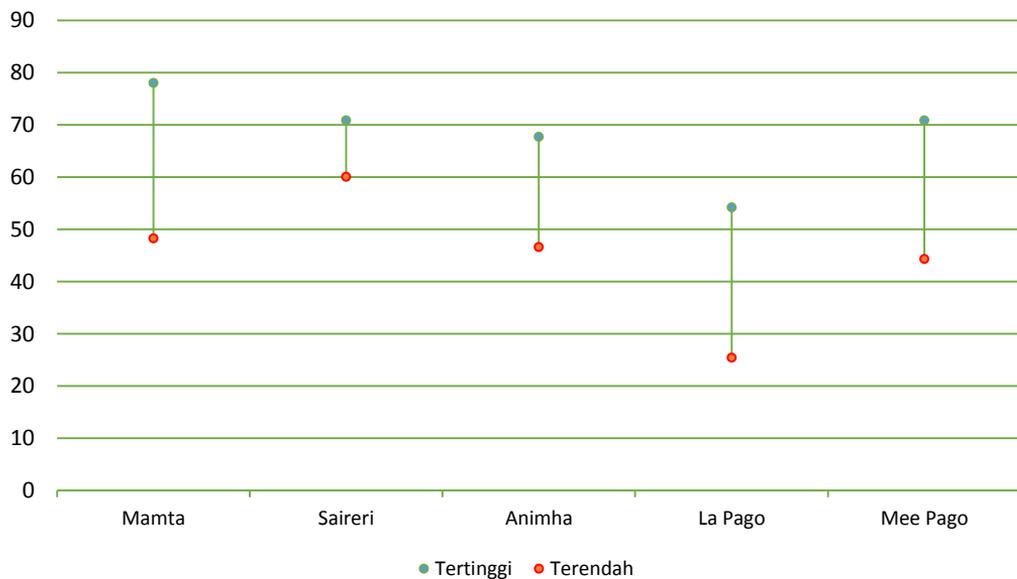
Untuk menghitung IPM pada masing-masing wilayah adat memang membutuhkan upaya tersendiri yang hingga saat ini belum dapat diakomodir. Oleh karena itu untuk menganalisisnya terbatas pada range dan kesenjangan capaian IPM di masing-masing wilayah adat.

Kawasan adat Saireri memiliki kesenjangan IPM yang terendah dibandingkan wilayah adat lainnya. Begitu juga dengan wilayah selatan Provinsi Papua yang tergabung dalam kawasan adat Animha, memiliki kesenjangan yang tidak terlalu lebar meskipun tingkat kesenjangannya masih di atas Saireri. Baik kawasan Mamta, La Pago maupun Mee

Pago memiliki jarak kesenjangan IPM yang hampir sama sehingga bisa dikatakan bahwa meskipun memiliki karakteristik

sosial dan budaya yang hampir serupa namun tidak menjamin kesamaan dalam geliat pembangunan.

Gambar 2.16 Kesenjangan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2015



Tantangan: Pembangunan Manusia di Papua

Capaian IPM Provinsi Papua memang mengalami peningkatan setiap tahunnya namun hal ini tidak boleh menjadi alasan untuk berbangga diri. Status pembangunan manusia Provinsi Papua yang masih berada dalam kategori “rendah” membutuhkan peran aktif para

penyusun kebijakan di masa yang akan datang. Untuk melakukan lompatan kategori tidak bisa hanya dengan “*business as usual*”, namun dibutuhkan inovasi dalam pengambilan kebijakan.

Kesenjangan pembangunan manusia di Provinsi Papua berada dalam kategori yang mengkhawatirkan. Tentunya bukan rahasia umum jika pembangunan di

wilayah perkotaan memang lebih cepat dibandingkan wilayah perdesaan sehingga nilai IPM di wilayah perkotaan lebih tinggi. Pemerataan pembangunan wajib direalisasikan, bukan hanya menjadi

sekedar wacana. Pembangunan di wilayah perkotaan dan perdesaan perlu berjalan secara beriringan sehingga pemerataan pembangunan bisa terjadi.

**PEREMPUAN,
ASET
PEMBANGUNAN
YANG
TERLUPAKAN**

3

3

PEREMPUAN, ASET PEMBANGUNAN YANG TERLUPAKAN

“Sebagian perempuan masih menjadi obyek yang harus menderita, seperti pada kasus kekerasan terhadap perempuan, perdagangan manusia, dan lain-lain. Disamping itu, kesempatan perempuan dalam menyalurkan aspirasinya melalui perlemen juga masih minim. Padahal perempuan telah berperan banyak dalam pembangunan nasional dan pewujudan kesejahteraan.”

Konsep gender secara umum diartikan bukan semata sebagai perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, melainkan perbedaan peran, perilaku, kegiatan serta atribut yang dikonstruksikan secara sosial dalam masyarakat. Pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara, penjabaran konsep gender adalah keselarasan dalam peran sosial, ekonomi, dan politik antara laki-laki dan perempuan.

Upaya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender telah dilakukan oleh

berbagai pihak. Masyarakat dunia melalui Majelis Umum PBB telah mencetuskan deklarasi mengenai Hak Asasi Manusia pada tahun 1948, yang merupakan bentuk keprihatinan dunia terhadap permasalahan gender, dan diikuti oleh berbagai deklarasi serta konvensi lainnya yang berkaitan mengenai penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Sementara itu, Pemerintah Indonesia juga mengadopsi berbagai kebijakan yang mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui GBHN, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan lain-lain. Saat ini juga sedang dibahas mengenai

Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender.

Dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, tidak serta merta masalah-masalah terkait gender akan hilang. Sebagian perempuan masih menjadi obyek yang harus menderita, seperti pada kasus kekerasan terhadap perempuan, perdagangan manusia, dan lain-lain. Disamping itu, kesempatan perempuan dalam menyalurkan aspirasinya melalui perlemen juga masih minim. Padahal perempuan telah berperan banyak dalam pembangunan nasional dan pewujudan kesejahteraan. Hal ini seiring dengan pendapat dari UNDP, bahwa mengabaikan aspek gender akan menghambat proses pembangunan di suatu wilayah. Tingkat keberhasilan pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender saat ini telah dapat diukur, salah satunya adalah dengan IPG (Indeks Pembangunan Gender), yang diperkenalkan oleh United Nations Development Programs (UNDP) dalam Laporan Pembangunan Manusia tahun 1995. Dari angka IPG ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai

perkembangan capaian pembangunan yang sudah mengakomodasi aspek-aspek gender.

Tingkat kesetaraan capaian pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki dapat tergambar dengan menganalisis IPM dan IPG secara bersama-sama. Dengan melihat selisih antara IPM dan IPG akan dapat dilihat tingkat kesetaraan gender. Jika nilai IPM sama dengan nilai IPG menunjukkan bahwa tidak terjadi ketimpangan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki karena pembangunan manusia yang diukur secara umum maupun dengan mempertimbangkan gender memberikan hasil yang sama. Sebaliknya jika nilai IPG dibawah nilai IPM berarti terjadi ketimpangan capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Semakin besar selisih antara IPM dan IPG menunjukkan bahwa semakin besar ketidaksetaraan gender di wilayah tersebut.

Pembangunan Gender Bukan Hanya Angka

Membangun kesetaraan dan keadilan gender adalah hal yang sudah diupayakan oleh Pemerintah melalui beberapa kebijakan-kebijakan. Jaminan tidak adanya perbedaan dalam status dan kedudukan perempuan dan laki-laki dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tercermin berbagai program pembangunan. Partisipasi perempuan dalam program tersebut, terutama ditujukan dalam peningkatan kualitas hidup melalui program peningkatan kapabilitas atau kemampuan dasar. Program tersebut mencakup berbagai pelayanan dasar seperti kesehatan,

pendidikan, dan kemudahan akses ekonomi dan sosial yang diberikan oleh pemerintah. Implementasi program pembangunan tersebut antara lain peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai proses pembangunan, penguatan peran di masyarakat, dan peningkatan kualitas kelembagaan berbagai instansi pemerintah, organisasi perempuan, dan lembaga-lembaga lainnya. Namun demikian, berbagai tantangan harus dihadapi dalam implementasinya. Oleh karena itu upaya tersebut belum memperlihatkan hasil yang maksimal, meskipun sudah menunjukkan peningkatan yang berarti dalam pembangunan berbasis gender.

Gambar 3.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Provinsi Papua, 2010-2015



Selama periode 2010 hingga 2014 pencapaian pembangunan gender di Provinsi Papua menunjukkan peningkatan secara terus-menerus, hanya saja di tahun 2015 capaian IPG di Provinsi Papua mengalami penurunan sebesar 0,05 dari capaian tahun 2014 sebesar 78,57 menjadi 78,52 di tahun 2015. Penurunan IPG di tahun 2015 bukan satu-satunya hal yang perlu dikhawatirkan. Selama tahun 2010 hingga tahun 2015, gap antara IPM dengan IPG cukup lebar yang berarti masih ada ketimpangan pembangunan antara laki-laki dengan perempuan.

Pembangunan Gender Papua, Terendah atau Terbaik?

Semua provinsi di Indonesia mempunyai semangat yang sama dalam

memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender untuk mewujudkan kemakmuran di wilayahnya. Namun demikian, capaian pembangunan terkait gender belum merata antarprovinsi terlihat dari disparitas angka IPG antarprovinsi. Pada tahun 2015, IPG Provinsi Sumatera Barat merupakan yang tertinggi dengan capaian sebesar 94,74 sedangkan Provinsi Papua kembali menempati posisi IPG terendah yaitu sebesar 78,52. Nilai IPG yang mendekati 100 menunjukkan bahwa kesetaraan gender di provinsi tersebut sudah hampir tercapai. Pola yang terbentuk antara IPG dengan IPM ini adalah IPM dan IPG bergerak sejalan sehingga sebagian besar provinsi yang memiliki IPM tinggi umumnya memiliki IPG yang tinggi juga.

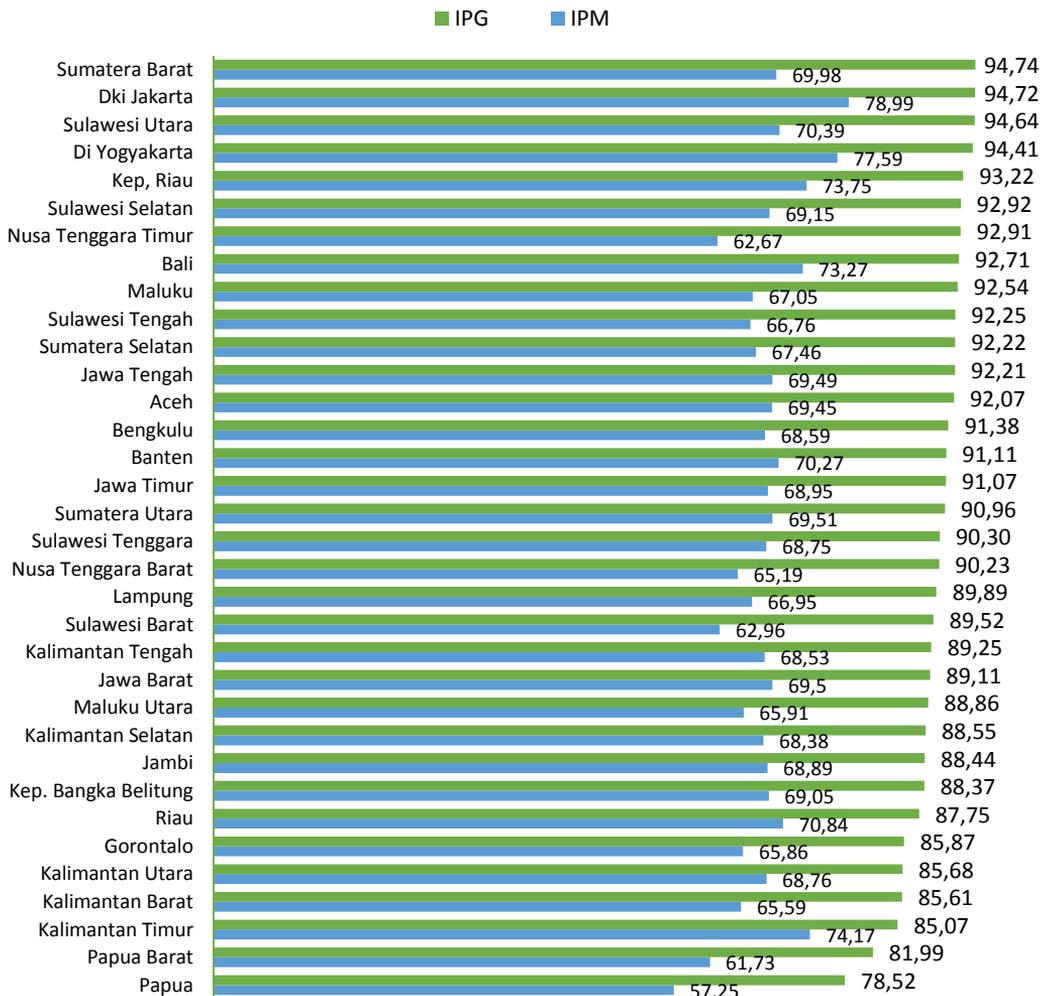
Share 3.1 Membedakan IPM, IPG dan IDG

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian secara keseluruhan di suatu negara untuk tiga dimensi pokok pembangunan manusia yaitu umur panjang, pengetahuan dan standar hidup layak.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi yang sama dengan IPM berdasarkan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan). Semakin besar perbedaan gender dalam pembangunan maka semakin rendah juga IPG nya.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur sejauh mana peran partisipasi perempuan dalam pembangunan sehingga IDG lebih ditekankan pada ketidaksetaraan kesempatan.

Gambar 3.2 IPM dan IPG Provinsi-Provinsi di Indonesia, 2015



IPM vs IPG, Pencapaian Kabupaten/Kota di Papua

Menganalisis capaian IPG di kabupaten/kota di Provinsi Papua akan lebih menarik jika disandingkan dengan capaian IPM nya. Dengan menyandingkan kedua angka tersebut dan membandingkannya dengan capaian IPM dan IPG di Provinsi Papua akan dapat terlihat capaian IPM, capaian IPG serta gambaran wilayah berdasarkan IPM dan IPG nya.

Pada Kuadran I, adalah kabupaten/kota dengan capaian angka IPM yang tinggi atau di atas IPM Provinsi Papua, dan angka IPGnya juga tinggi atau di atas rata-rata provinsi. Pada kuadran ini, tingginya pembangunan manusia yang dicapai, sejalan dengan kesetaraan gender yang diperoleh juga. Termasuk didalamnya adalah Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Kepulauan yapen, Kabupaten Nabire, Kabupaten Merauke, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Biak Numfor dan Kota Jayapura.

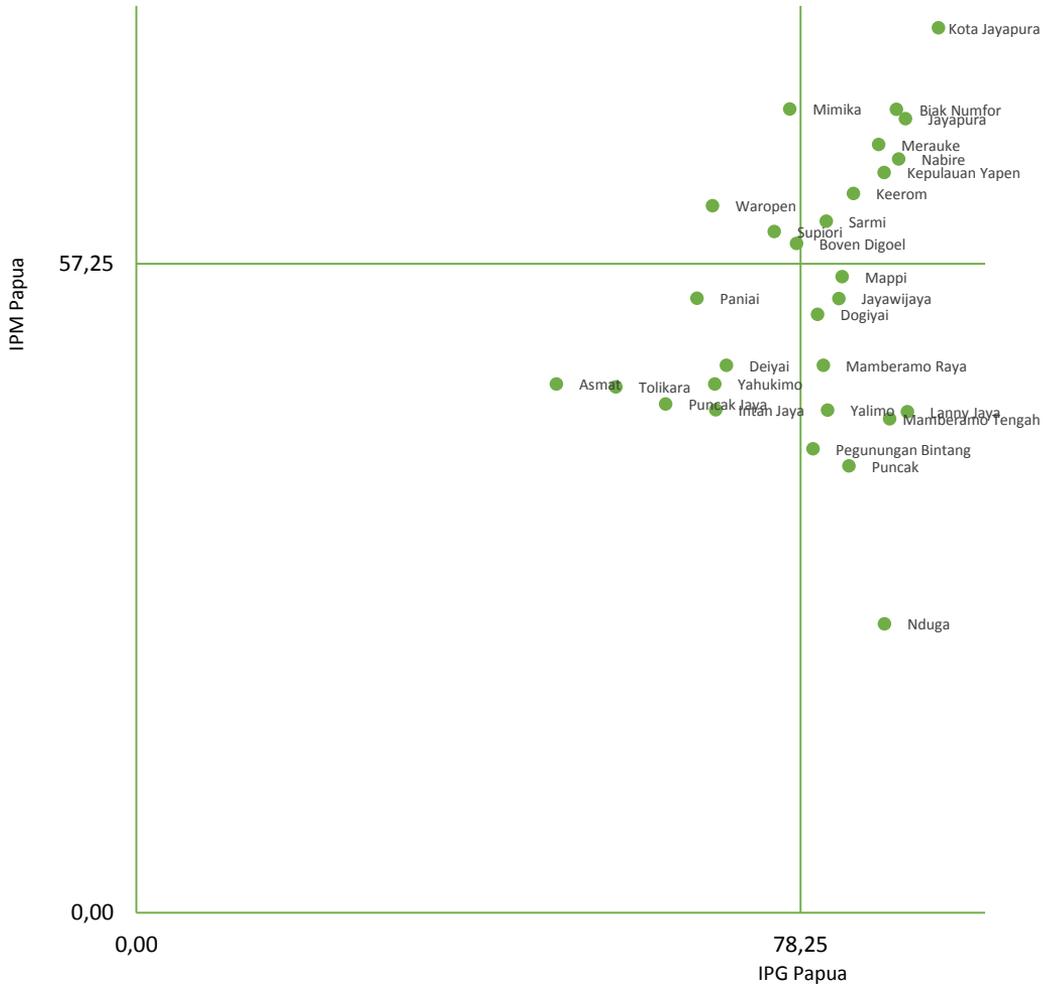
Sebaliknya, pada Kuadran III terdapat kabupaten dengan IPM dan IPG yang rendah. Kabupaten yang berada pada kuadran ini adalah kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Asmat, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Deiyai dan Kabupaten Paniai.

Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Supiori, Kabupaten Waropen dan Kabupaten Mimika termasuk pada kuadran II termasuk didalamnya kabupaten/kota yang mempunyai capaian IPM yang tinggi, namun kesetaraan gendernya masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kualitas cakupan pembangunannya sudah cukup tinggi, namun kurang berbasis gender.

Pada kuadran IV, angka IPG tinggi namun capaian IPMnya sangat rendah. Hal ini menunjukkan kesetaraan gender sudah cukup tinggi, namun kualitas capaian pembangunannya masih rendah yaitu Kabupaten Mappi, Kabupaten Puncak, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Yalimo,

Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Mappi.

Gambar 3.3 IPM dan IPG Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2015



Sudah Berdayakah Perempuan Papua?

Jika IPG merupakan suatu indikator pengukuran kesenjangan atau

ketidaksetaraan gender, maka Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengkaji sejauh mana persamaan

peranan perempuan dalam proses pengambilan keputusan serta kontribusi dalam aspek ekonomi maupun sosial. IDG menggambarkan keterlibatan perempuan dalam bidang politik melalui indikator persentase perempuan di parlemen, keterlibatan perempuan dalam posisi strategis di dunia kerja melalui indikator persentase perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi dan teknis, serta menggambarkan keterlibatan perempuan sebagai penyumbang pendapatan rumah tangga melalui indikator persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja.

Pada tahun 2015 IDG Provinsi Papua adalah sebesar 63,69, kesenjangan yang masih cukup jauh antara IPM dengan IDG menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan dalam proses pembangunan di Provinsi Papua masih belum cukup baik. Memaknai IDG akan lebih mudah jika disandingkan dengan angka IPM dan dilakukan melalui analisis kuadran. Kuadran I dengan kriteria IPM tinggi dan IDG tinggi menunjukkan bahwa pembangunan manusia pada kabupaten/kota didalamnya berada pada

kondisi yang sudah baik, yang diikuti pula dengan pemberdayaan perempuan yang baik. Hal ini dapat diartikan bahwa hasil dari pembangunan manusia yang sudah baik sudah dapat dimanfaatkan oleh penduduknya untuk berbuat yang maksimal dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan. Kabupaten Sarmi, Kabupaten Nabire dan Kota Jayapura memiliki karakteristik pada kuadran ini.

Kuadran II yang memiliki kriteria IPM rendah dan IDG tinggi merupakan daerah dengan capaian pembangunan manusia yang masih rendah. Namun demikian kapabilitas laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai aspek kehidupan cukup tinggi. Kabupaten yang termasuk dalam kuadran ini adalah Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Supiori, Kabupaten Waropen, Kabupaten Keerom, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Merauke, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika dan Kabupaten Biak Numfor.

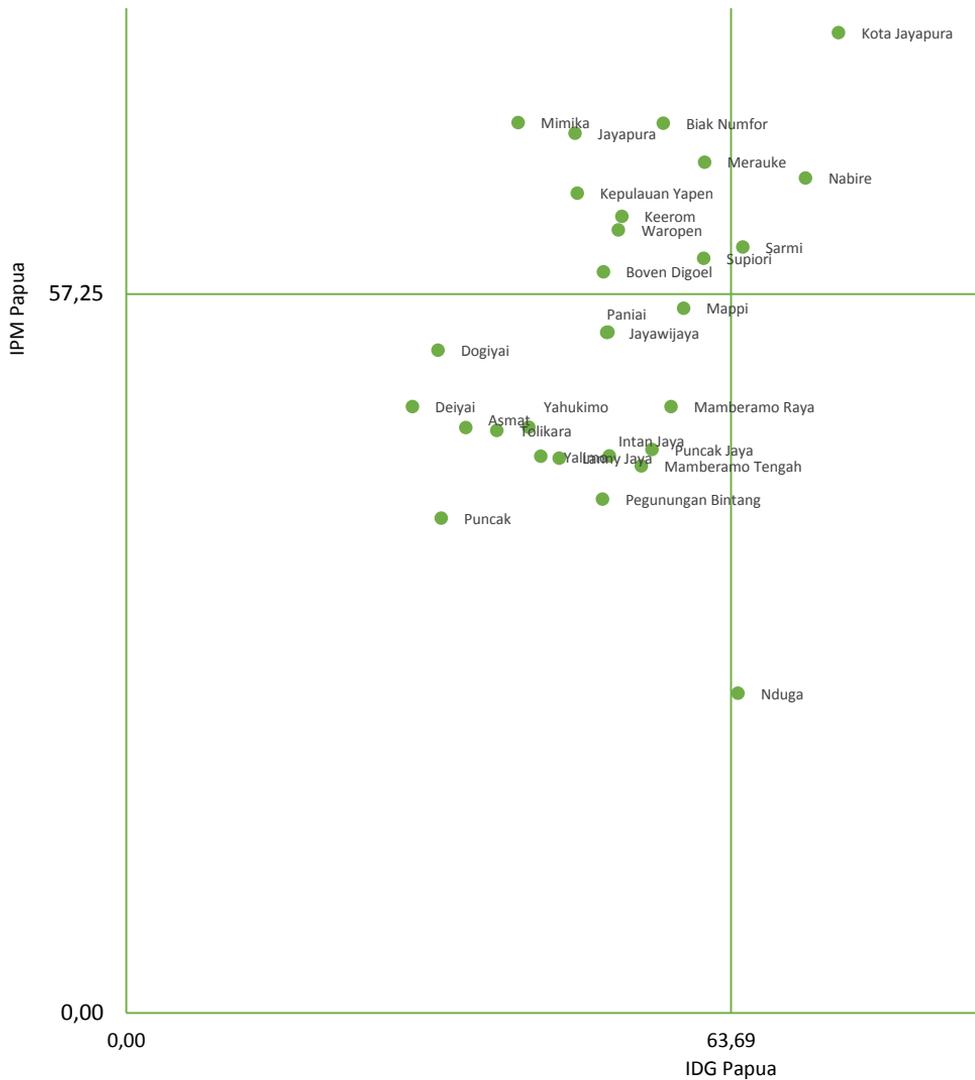
Kriteria IPM rendah dan IDG rendah termasuk dalam kuadran III. Kondisi ini merupakan kondisi yang paling buruk

karena rendahnya capaian pembangunan manusia yang telah berakibat pada rendahnya kapabilitas penduduk untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai aspek kehidupan. Kriteria ini dimiliki oleh Kabupaten Puncak, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Asmat, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Mamberamo Raya,

Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Paniai dan Kabupaten Mappi.

Kuadran IV menandai kabupaten telah memiliki pembangunan manusia yang berjalan baik dengan capaian IPM yang sudah tinggi namun tidak diikuti oleh pemberdayaan gender yang rendah (capaian IDG). Di Provinsi Papua sendiri satu-satunya kabupaten yang termasuk dalam kriteria ini adalah Kabupaten Nduga.

Gambar 3.4 IPM dan IDG Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2015



Membangun dan Memberdayakan Perempuan Papua

Setara dan berdaya merupakan dua hal yang berbeda. IPG menitikberatkan pada kesetaraan yang dalam hal ini kesetaraan

pencapaian pembangunan baik bagi laki-laki maupun perempuan. Lain halnya dengan berdaya yang diukur dengan IDG, kesetaraan dalam hal ini mencakup pencapaian bagi perempuan agar memiliki arti penting tidak hanya dari segi status dan kedudukan tetapi adanya upaya

peningkatan kapabilitas perempuan untuk berperan serta dalam pengambilan keputusan.

Secara teori semakin tinggi pencapaian pembangunan gender akan berdampak pada peningkatan peranan perempuan, khususnya partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Untuk menganalisis hubungan antara IPG dan IDG di kabupaten/kota di Provinsi Papua maka digunakan analisis kuadran.

Kuadran I mendefinisikan IPG tinggi dan IDG tinggi. Kuadran ini menunjukkan bahwa pembangunan gender sudah baik yang diikuti pula dengan pemberdayaan gender yang baik, sehingga dapat dikatakan hasil dari pembangunan berbasis gender sudah baik di kabupaten/kota tersebut diiringi dengan kondisi penduduknya yang mampu berbuat maksimal dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan tanpa membedakan peran berdasarkan jenis kelamin. Kabupaten Nabire, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Nduga dan Kota Jayapura termasuk dalam kategori ini.

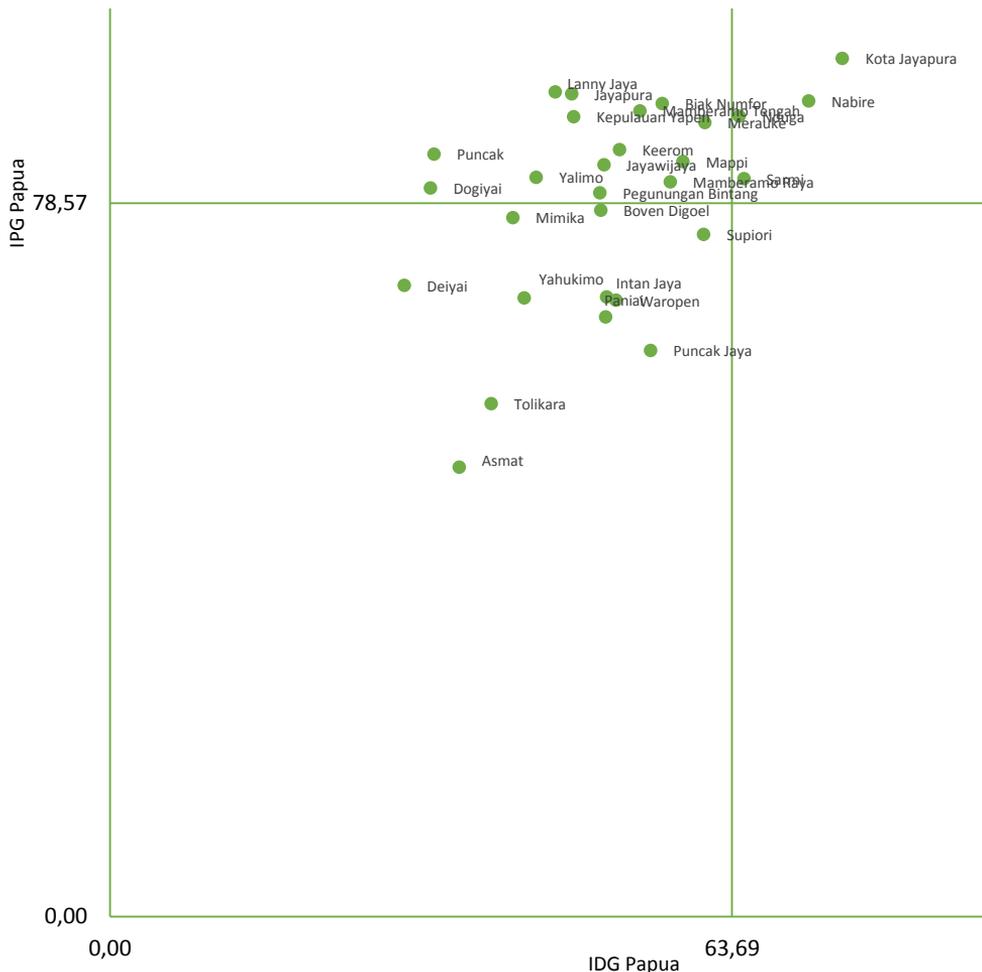
Kuadran II menunjukkan pembangunan manusia berbasis gender yang sudah baik tidak diikuti oleh pemberdayaan gender yang baik, ditandai dengan IPG tinggi dan IDG rendah. Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Puncak, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Keerom, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Mappi, Kabupaten Merauke, Kabupaten Mamberamo Tengah dan Kabupaten Biak Numfor termasuk dalam kuadran ini. Hal ini terjadi karena masih ada kesenjangan peran antara laki-laki dan perempuan yang menyebabkan rendahnya IDG.

Kondisi paling buruk ditandai dengan IPG rendah dan IDG rendah yang terdapat di kuadran III. Pada kategori ini kurang baiknya pembangunan manusia berbasis gender juga diikuti oleh rendahnya pemberdayaan gender. Hal ini menunjukkan perlunya upaya peningkatan kapasitas dan peran gender dalam pembangunan manusia. Kabupaten yang termasuk dalam kategori ini adalah

Kabupaten Deiyai, Kabupaten Asmat, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Mimika, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Supiori, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Waropen dan Kabupaten Puncak Jaya.

Kuadran IV menunjukkan kondisi dengan IPG rendah dan IDG tinggi. Di Provinsi Papua tidak ada kabupaten/kota yang termasuk dalam kuadran ini.

Gambar 3.5 IPG dan IDG Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2015



Kesetaraan Gender, Tantangan Baru Bagi Papua

Secara umum, ketimpangan capaian pembangunan manusia secara gender relatif tidak mengalami perubahan setiap tahunnya. Beberapa kabupaten/kota yang sudah memiliki tingkat capaian pembangunan manusia yang cukup baik ternyata masih mengalami ketimpangan gender, sehingga memang terlihat adanya

disparitas tingkat capaian pembangunan menurut gender.

Masalah lainnya adalah ketimpangan capaian pembangunan gender belum bisa memberikan jaminan akan kesetaraan pemberdayaan gender. Akhirnya perempuan di Papua memang belum bisa dinyatakan setara dan berdaya bagi pembangunan manusia secara keseluruhan di Papua.

**MEMBANGUN
DESA: LANGKAH
AWAL
PEMBANGUNAN
PAPUA**

4

4

MEMBANGUN DESA: LANGKAH AWAL PEMBANGUNAN PAPUA

“Pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.”
 — Agenda Strategis Pemerintah

Salah satu faktor penting yang terlupakan dalam membangun suatu wilayah adalah aksesibilitas. Pembangunan sarana dan prasarana fasilitas bagi masyarakat baru bisa terwujud jika dimulai dengan membuka akses.

Papua “Mahal”

Kebijakan otonomi daerah (Otda) yang diundangkan pada tahun 2000 diarahkan untuk mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan di semua daerah. Dengan penerapan kebijakan ini diharapkan tujuan nasional yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat

tercapai secara efektif dan efisien. Tujuan lain dari kebijakan Otda adalah pemerataan kemampuan keuangan antar daerah sehingga ketimpangan antar daerah dapat teratasi.

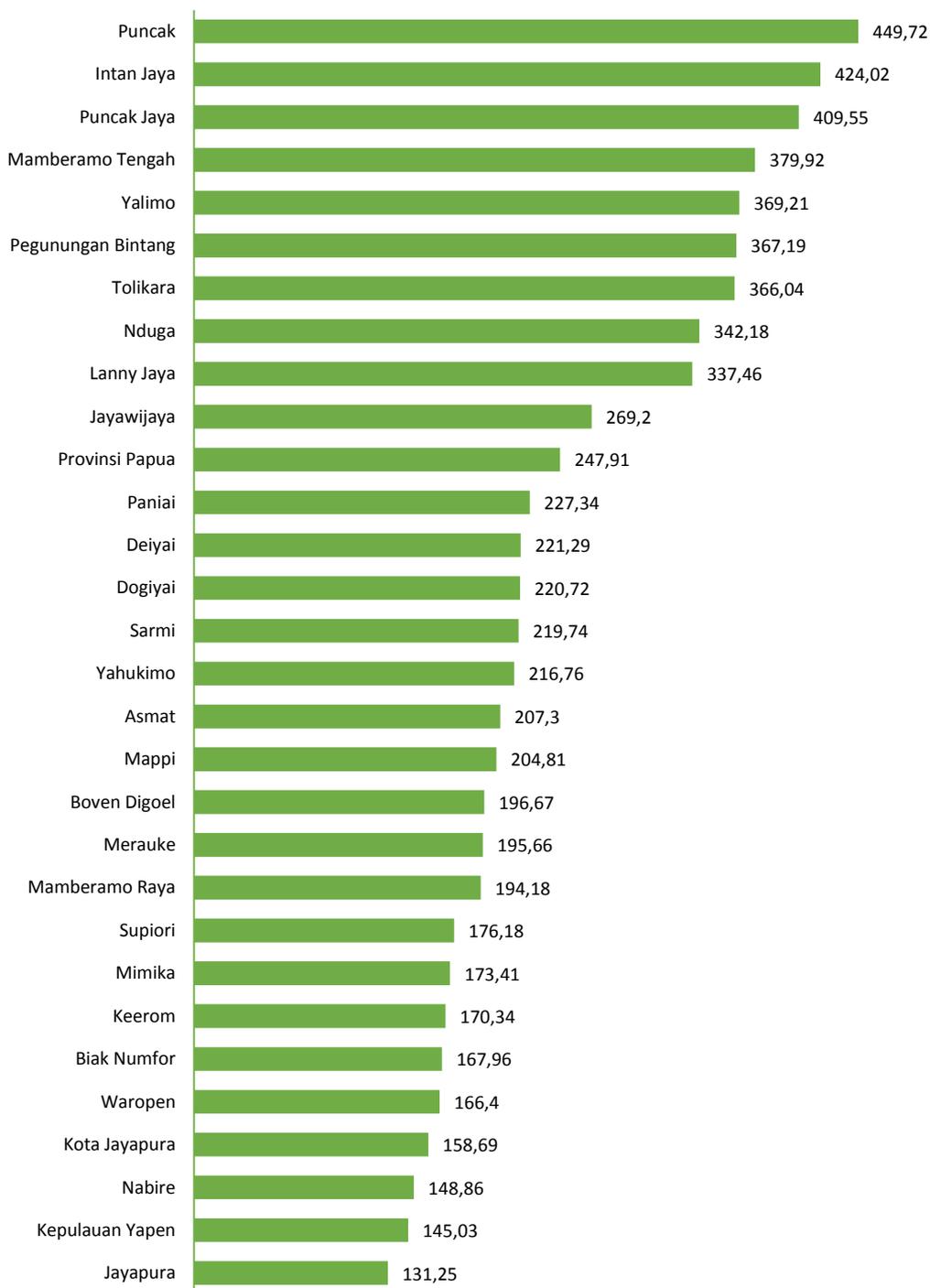
IKK digunakan sebagai proxy untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut. Tidak ada dua gedung kantor yang identik atau jembatan yang sama persis karena masing-masing memiliki karakter dan desain yang dibuat khusus untuk ditempatkan pada lokasi masing-masing.

Penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), karenanya, didasarkan atas suatu pendekatan atau kompromi tertentu. Misalnya yang menjadi objek adalah bangunan tempat tinggal, maka bangunan tempat tinggal tersebut harus mengakomodir berbagai macam rancangan dan model.

IKK disajikan dengan menentukan salah satu ibukota provinsi sebagai kota acuan, dimana Kota Surabaya sebagai kota acuan.

IKK Provinsi Papua pada tahun 2015 merupakan IKK tertinggi di Indonesia dengan nilai IKK sebesar 247,91. Sementara IKK tertinggi di Provinsi Papua adalah Kabupaten Puncak yaitu sebesar 449,72. Angka tersebut menggambarkan Kabupaten Puncak memiliki kondisi geografis yang paling sulit diantara kabupaten/kota lain di Provinsi Papua, sedangkan IKK terendah adalah Kabupaten Jayapura dengan nilai IKK sebesar 131,25.

Gambar 4.1 Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2015



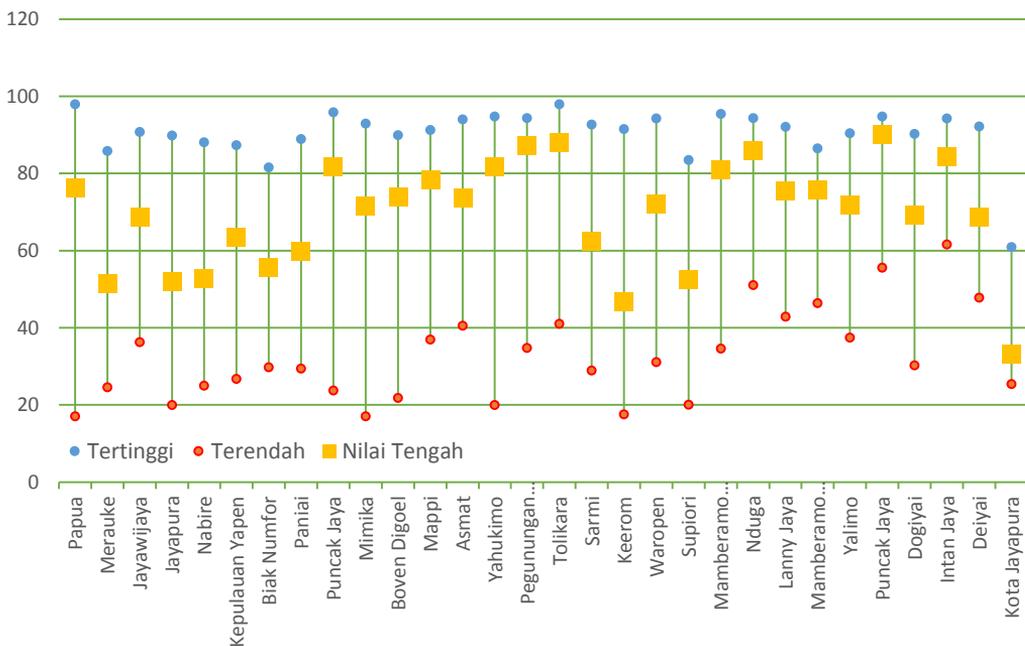
Papua “Sulit”

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari APBN, salah satu komponen yang digunakan dalam pengalokasian dana desa adalah IKG desa. BPS telah menyusun IKG untuk seluruh wilayah pemerintahan setingkat desa (desa, nagari, dan UPT). IKG merupakan indeks komposit yang mempunyai skala dari 0 (nol) sampai 100 (seratus) dan disusun oleh tiga komponen, yaitu: 1)

ketersediaan pelayanan dasar, 2) kondisi infrastruktur, dan 3) aksesibilitas/ transportasi. Semakin tinggi indeks menunjukkan tingkat kesulitan geografis yang semakin tinggi.

IKG terendah tercatat sebesar 17,05 yang terdapat di desa Limau Asri Barat (Kabupaten Mimika). Sedangkan IKG paling tinggi berada di desa Dorera Distrik Wari/Taiyeye (Kabupaten Tolikara) yang tercatat sebesar 97,89.

Gambar 4.2 Indeks Kesulitan Geografis Desa Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2014



Papua “Tertinggal”

Rata-rata Indeks Pembangunan Desa di Provinsi Papua sebesar 30,46. Di tahun 2014 sebanyak 91,79 persen desa dengan kategori tertinggal dan 0,10 persen berkategori mandiri. Sementara sisanya 8,11 persen berkategori berkembang. Angka ini berada di bawah angka rata-rata nasional.

Provinsi Papua memiliki nilai rata-rata indeks dengan kategori tertinggal pada semua dimensi pembangunan. Nilai indeks masing-masing dimensi dalam kategori tertinggal adalah sebagai berikut: pelayanan dasar (32,54 persen), kondisi infrastruktur (22,19 persen), aksesibilitas/transportasi (45,41 persen), pelayanan umum (40,70 persen), dan penyelenggaraan pemerintahan (44,61 persen). Terlihat jika dimensi paling tinggi di Provinsi Papua adalah aksesibilitas/transportasi dan terendah adalah kondisi infrastruktur.

Indeks Pembangunan Desa Povinsi Papua tahun 2014 tertinggi secara rata-rata dimiliki desa-desa di Kota Jayapura

sebesar 63,26. Dari indeks tersebut dapat diketahui terdapat 7,69 persen desa dengan kategori mandiri, 84,62 persen memiliki kategori berkembang, serta 7,69 persen desa dengan kategori tertinggal.

Hal ini diikuti oleh Kabupaten Supiori dan Kabupaten Nabire dengan masing-masing nilai rata-rata indeksnya adalah 48,32 dan 47,52. Kedua kabupaten tersebut tidak memiliki desa dengan kategori mandiri dari jumlag desa keseluruhan di masing-masing kabupaten. Sementara desa dengan kategori tertinggal sebanyak 52,63 persen dan 54,17 persen dari jumlah desa di setiap kabupaten.

Sementara Kabupaten dengan IPD paling rendah adalah Kabupaten Nduga dengan nilai sebesar 19,71. Di Kabupaten Nduga 100 persen desa merupakan desa tertinggal. Selain Kabupaten nduga, beberapa kabupaten juga terdiri dari 100 persen desa tertinggal yaitu Kabupaten Puncak, Intan Jaya, Mamberamo Tengah dan Deiyai.

Tantangan: Menghapus Stereotype Papua Mahal, Sulit dan Tertinggal

Menilik seluruh data yang telah tersaji memang tidak salah dengan adanya stereotype bahwa Papua itu mahal, sulit dan tertinggal. Pada dasarnya saat provinsi lain sudah berfikir untuk membuat inovasi pembangunan sebagai langkah peningkatan kualitas manusia di wilayahnya, Provinsi Papua masih berkutat dalam membuka akses untuk mengejar ketertinggalannya.

Kondisi geografis Provinsi Papua memang berbeda dengan wilayah lainnya. Banyak

kabupaten Provinsi Papua ini yang bahkan belum bisa dicicipi dengan akses darat dan masih mengandalkan akses udara. Tentu saja hal ini menjadi poin minus bagi Provinsi Papua. Membuka akses menjadi sangat mahal dibandingkan dengan membangun fasilitas di wilayah itu sendiri.

Persoalan ini sudah saatnya menjadi perhatian bagi seluruh pelaku pembangunan di Papua, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun pihak swasta.

**PENDIDIKAN:
MODAL
PEMBANGUNAN
MANUSIA**

5

5

PENDIDIKAN: MODAL PEMBANGUNAN MANUSIA

“Pembangunan sebagai proses memperluas pilihan-pilihan dalam hal ini adalah kemampuan atau kapabilitas manusia untuk berfungsi dalam rangka meningkatkan kualitas hidupnya.”

————— *Amartya Sen*

Pembangunan yang berfokus pada pembangunan ekonomi, dalam hal ini pendapatan nasional dan atau pertumbuhan ekonomi yang tinggi, seringkali ‘gagal’ memenuhi apa yang benar-benar dibutuhkan oleh manusia atau penduduk sebagai kekayaan negara yang sesungguhnya. Dalam diskusi mengenai ekonomi dan pembangunan kondisi tersebut didefinisikan sebagai pertumbuhan tanpa pembangunan yang banyak terjadi di negara-negara berkembang.

Amartya Sen kemudian mendefinisikan pembangunan sebagai proses memperluas pilihan-pilihan dalam hal ini adalah kemampuan atau kapabilitas manusia untuk berfungsi dalam rangka meningkatkan kualitas hidupnya. Konsep inilah yang kemudian digunakan oleh United Nations Development Program (UNDP) untuk mengukur pembangunan manusia dan memastikan bahwa pembangunan manusia tidak hanya untuk meningkatkan kapabilitas tetapi juga kesempatan untuk menggunakan kapabilitas tersebut.

Input utama pembangunan manusia dalam hubungannya dengan pembentukan kapabilitas dan kemampuan manusia adalah pendidikan dan kesehatan, sehingga dalam konteks pembangunan dua unsur tersebut disebut sebagai modal manusia (*human capital*). Pendidikan mengarahkan kepada kreativitas individu, meningkatkan partisipasi ekonomi, sosial, aktivitas budaya dalam masyarakat, memberikan kontribusi untuk proses pembangunan manusia (Hallaq, 1990), sedangkan kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan. Pada saat yang sama kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas sementara keberhasilan pendidikan juga bertumpu pada kesehatan yang baik. Oleh karena itu pendidikan dan kesehatan merupakan komponen pertumbuhan dan pembangunan yang vital. Dalam bab ini, akan dibahas sejauh mana pencapaian pendidikan di Papua, sedangkan kesehatan akan dibahas pada bab yang lain.

Modal manusia, khususnya yang diperoleh melalui pendidikan merupakan faktor

penentu yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi capaian pendidikan suatu wilayah mengindikasikan semakin banyak pekerja yang produktif dan memiliki keterampilan sehingga dapat meningkatkan output dalam kegiatan ekonomi. Selain itu, pada tingkat tertentu, capaian pendidikan memiliki dampak yang kuat terhadap beberapa hasil pembangunan sosial seperti kematian anak, fertilitas, pendidikan anak, dan distribusi pendapatan.

Ada banyak ukuran yang digunakan untuk mengukur capaian pendidikan, pada umumnya adalah partisipasi sekolah dan tingkat literasi penduduk. Akan tetapi, kedua ukuran tersebut tidak cukup mampu untuk mengukur persediaan (*stok*) modal manusia yang tersedia di suatu wilayah. Lutz, Goujon, & Wils (2008) mengemukakan bahwa dalam studi perkembangan pendidikan, penting untuk membedakan antara arah (*flow*) dan persediaan (*stok*). Dalam analisis ini, partisipasi sekolah digunakan untuk mengukur arah capaian pendidikan sedangkan pendidikan yang ditamatkan

dan rata-rata lama sekolah untuk mengukur stok modal manusia yang tersedia di Papua. Sementara itu, angka literasi juga dapat digunakan untuk mengukur stok karena terkait dengan kemampuan dasar yang harus dimiliki manusia untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi maupun sosial. Selain itu, angka literasi digunakan sebagai salah satu komponen dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selama kurang lebih dua dekade.

Masih Perlukah Mengukur Kemampuan Membaca dan Menulis?

Untuk mengukur sejauh mana pembangunan sosial dan ekonomi di suatu negara atau wilayah, pada tahun 1990 UNDP membentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berdasarkan tiga tujuan atau produk akhir pembangunan yaitu: masa hidup (*longevity*) yang diukur dengan usia harapan hidup; pengetahuan (*knowledge*) yang diukur dengan kemampuan baca tulis orang dewasa dan rata-rata tahun bersekolah; serta standar hidup (*standard of living*) yang diukur dengan pendapatan riil per kapita. Sejalan

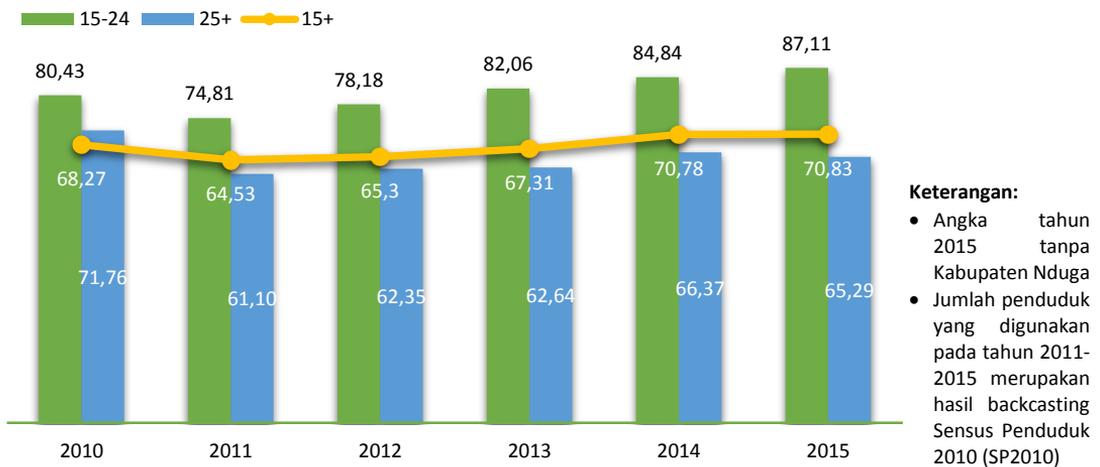
waktu terdapat beberapa perubahan dalam metode penghitungan maupun indikator yang digunakan. Sebagai contoh, mulai tahun 2015 UNDP tidak lagi menggunakan indikator literasi atau kemampuan baca tulis (melek huruf) orang dewasa untuk mengukur pendidikan yang digantikan oleh *expected years of schooling* atau harapan lama sekolah. Indikator melek huruf dianggap sudah tidak relevan lagi untuk mengukur pembangunan pendidikan karena capaian di kebanyakan negara-negara di dunia sudah hampir mencapai 100 persen. Meskipun demikian, di beberapa wilayah khususnya di negara-negara miskin dan berkembang, capaian indikator tersebut masih rendah, termasuk di Papua.

Sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar di bawah, pada tahun 2015 sebesar 70,83 persen penduduk usia 15 tahun ke atas yang melek huruf, yang berarti masih ada sekitar 29 persen lainnya yang tidak memiliki kemampuan membaca dan menulis. Secara nasional hanya sekitar 4,78 persen saja penduduk 15 tahun ke atas yang tidak dapat membaca dan menulis, sehingga apabila

dibandingkan dengan kondisi di Papua, angka 29 persen masih sangat tinggi bahkan merupakan yang tertinggi

dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia.

Gambar 5.1 Angka Melek Huruf Menurut Kelompok Umur Penduduk di Provinsi Papua, 2010-2015



Selanjutnya, ketika capaian AMH dibandingkan menurut kelompok umur, jelas terlihat bahwa indikator tersebut terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Ini mengindikasikan adanya perkembangan kemampuan membaca dan menulis penduduk, kurun waktu lima tahun terakhir. Hal tersebut dapat dilihat dengan membandingkan capaian AMH antara penduduk usia muda (15-24 tahun) dengan penduduk usia dewasa (25 tahun ke atas). Pada tahun 2015, AMH penduduk muda sebesar 87 persen sedangkan AMH

penduduk dewasa tidak lebih dari 65 persen. Besarnya capaian indikator AMH penduduk usia muda dibandingkan penduduk usia dewasa mengindikasikan keberhasilan pembangunan dalam bidang pendidikan di Papua yang telah berlangsung sejauh ini.

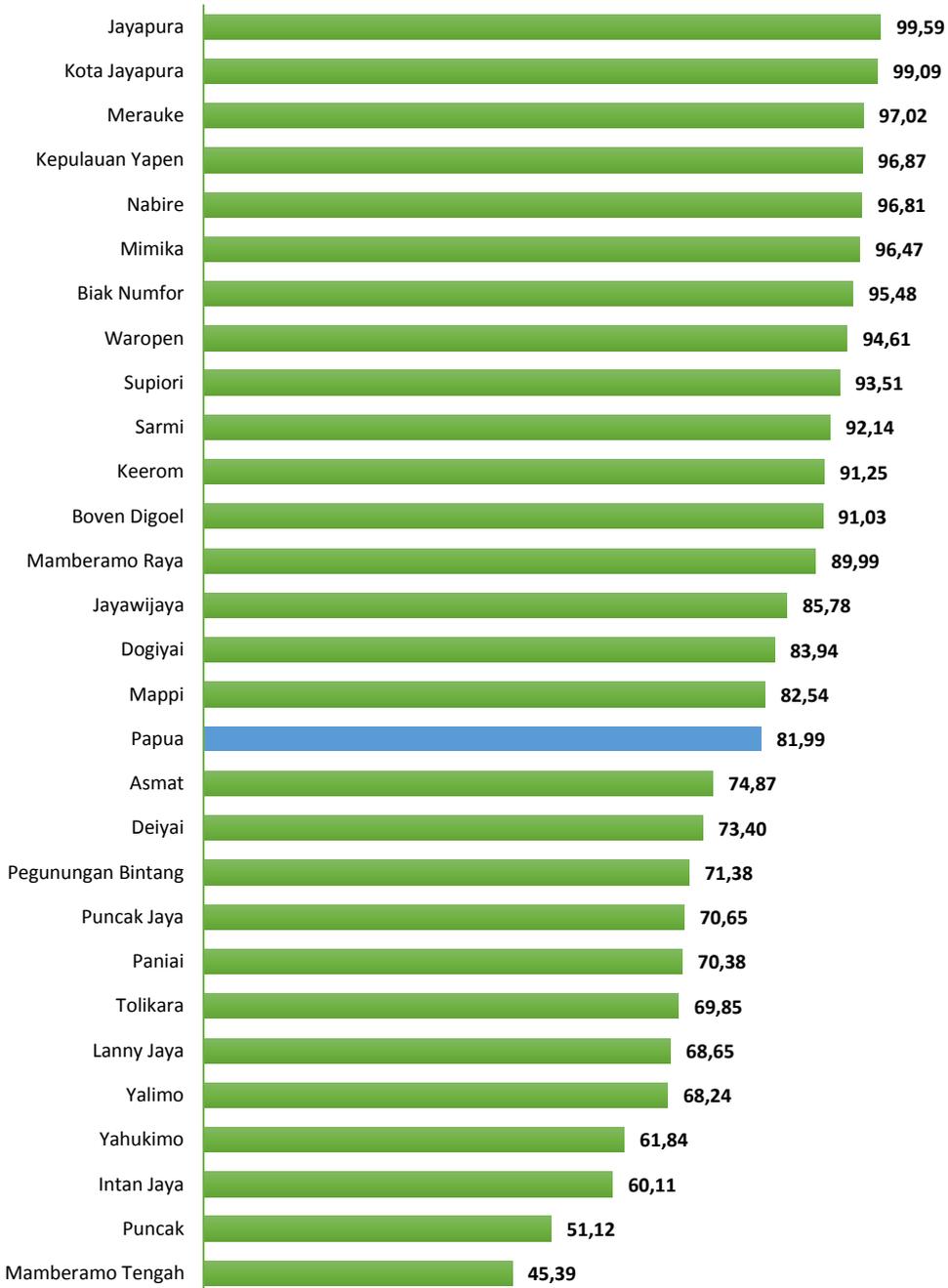
Seiring dengan peningkatan partisipasi sekolah penduduk usia 7-24 tahun akan dibahas pada subbab selanjutnya-kebijakan pendidikan di Papua sudah harus mulai berarah pada peningkatan

kualitas pendidikan. Idealnya, peningkatan partisipasi sekolah penduduk berarti peningkatan kemampuan penduduk, di antaranya kemampuan baca dan tulis. Data di atas menunjukkan bahwa masih ada 13 persen penduduk usia 15-24 tahun yang tidak dapat membaca dan menulis.

Kesenjangan antar wilayah di Papua terlihat jelas pada indikator AMH 7-24 tahun. Penduduk yang tinggal di wilayah pesisir seperti Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Merauke, Kepulauan Yapen,

Nabire, Mimika, dan beberapa kabupaten di wilayah pesisir lainnya relatif memiliki kemampuan baca dan tulis yang lebih baik dari penduduk yang tinggal di wilayah pegunungan seperti Mamberamo Tengah, Puncak, Intan Jaya, dan kabupaten di wilayah pegunungan lainnya. Hal tersebut terlihat dari besarnya persentase penduduk di wilayah pesisir yang dapat membaca dan menulis (lebih dari 90 persen), sementara penduduk di wilayah pegunungan, capaian angka melek huruf berada di bawah angka provinsi yaitu sebesar 82 persen.

Gambar 5.2 Angka Melek Huruf Penduduk 7-24 Tahun Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2015



Keterangan:

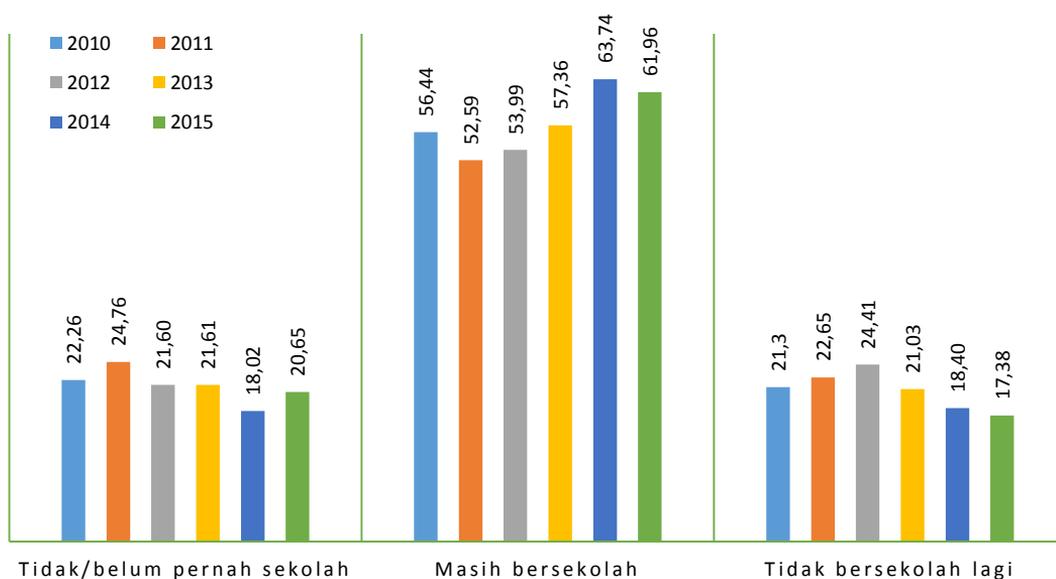
- Angka tahun 2015 tanpa Kabupaten Nduga
- Jumlah penduduk yang digunakan pada tahun 2011-2015 merupakan hasil backcasting Sensus Penduduk 2010 (SP2010)

Status Pendidikan Penduduk Papua

Ukuran yang paling mudah untuk melihat partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di suatu wilayah adalah status pendidikan. Status pendidikan dibedakan menjadi tidak/belum pernah sekolah, masih

bersekolah, dan tidak bersekolah lagi. Dalam upaya pembangunan pendidikan, kondisi ideal yang diharapkan adalah semua penduduk usia 7-24 tahun sedang aktif bersekolah sesuai dengan jenjang pendidikan yang bersesuaian dengan kelompok umur.

Gambar 5.3 Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 7-24 Tahun Menurut Status Pendidikan di Provinsi Papua, 2010-2015



Keterangan:

- Angka tahun 2015 tanpa Kabupaten Nduga
- Jumlah penduduk yang digunakan pada tahun 2011-2015 merupakan hasil backcasting Sensus Penduduk 2010 (SP2010)

Dalam kurun waktu enam tahun terakhir, pemerintah berhasil mendorong partisipasi sekolah penduduk 7-24 tahun. Hal tersebut terlihat dari peningkatan

persentase penduduk yang masih bersekolah sebagaimana yang ditunjukkan oleh Gambar 4.3. Pada tahun 2015 sebesar 61,96 persen penduduk usia

7-24 tahun sedang aktif bersekolah (tanpa memandang pada jenjang pendidikan) di mana secara umum terjadi peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya¹. Meskipun terjadi peningkatan, data tersebut juga menunjukkan bahwa masih banyak penduduk usia sekolah yang tidak atau belum pernah sekolah yaitu sekitar 21 persen, sisanya sekitar 17 persen penduduk dalam rentang usia tersebut sudah tidak bersekolah lagi.

Apabila dibandingkan dengan angka nasional, persentase penduduk 7-24 tahun yang tidak/belum pernah sekolah di Papua sangat tinggi, karena secara nasional hanya 0,84 persen saja penduduk

yang tidak atau belum pernah sekolah. Sangat menarik apabila dikaji berbagai faktor yang dapat menyebabkan tingginya persentase penduduk usia sekolah yang tidak atau belum pernah sekolah maupun yang tidak bersekolah lagi, sayangnya tidak banyak data pendukung yang dapat digunakan untuk melakukan kajian tersebut. Tabel 4.1 dapat digunakan untuk melihat gambaran beberapa faktor yang menyebabkan penduduk usia 7-24 tahun tidak bersekolah atau tidak bersekolah lagi². Tabel tersebut mencatat setidaknya ada tiga alasan yang paling banyak dikemukakan oleh penduduk usia 7-24 tahun yang tidak sekolah atau tidak bersekolah lagi.

Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun yang Tidak Bersekolah atau Tidak Bersekolah Lagi Menurut Alasan Utama dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua, 2015

Tabel 5.1

Alasan utama tidak bersekolah atau tidak bersekolah lagi	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak ada biaya sekolah	22,01	16,23	19,24
Bekerja/mencari nafkah	22,54	8,13	15,62
Menikah	1,81	8,16	4,85
Mengurus rumah tangga	0,80	12,73	6,52

¹ Angka tahun 2015 yang disajikan dalam publikasi ini adalah tanpa Kabupaten Nduga, sehingga perlu berhati-hati terutama dalam membandingkan capaian dengan tahun-tahun sebelumnya.

² Data bersumber dari Susenas Modul Sosial Budaya Pendidikan yang dilakukan BPS setiap tiga tahun sekali, bergantian dengan dua modul lainnya. Susenas MSBP dapat menyajikan data hingga level provinsi.

Tabel 5.1 Lanjutan

Alasan utama tidak bersekolah atau tidak bersekolah lagi	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Merasa pendidikan sudah cukup	10,04	6,32	8,26
Malu karena ekonomi	2,13	3,18	2,63
Sekolah jauh	8,60	9,31	8,94
Cacat/disabilitas	0,22	0,00	0,12
Lainnya	31,86	35,94	33,82
Total	100,00	100,00	100,00

Pertama, hampir 34 persen penduduk usia sekolah tidak pernah sekolah atau tidak bersekolah lagi dikarenakan alasan lainnya. Diduga, alasannya lainnya ini karena tidak ada sekolah maupun tenaga pendidikan di wilayah atau kabupaten tertentu. Angka tersebut cukup tinggi, sehingga perlu dikaji lebih lanjut alasan apa saja (selain alasan yang tersedia) yang menyebabkan penduduk tidak sekolah atau tidak melanjutkan sekolahnya.

Kedua, fakta bahwa masih ada sekitar 20 persen penduduk usia sekolah yang mengaku tidak pernah sekolah maupun tidak bersekolah lagi dikarenakan alasan biaya. Hal tersebut cukup menarik karena berbagai program beasiswa miskin maupun bantuan pendidikan lainnya yang berasal baik dari pusat maupun daerah

telah dilaksanakan secara masif di seluruh wilayah Papua bahkan di beberapa kabupaten biaya pendidikan benar-benar gratis. Kondisi tersebut sangat miris dan patut menjadi fokus pemerintah bahwa sekolah gratis tidak cukup dapat menjangkau seluruh penduduk dan mendorong mereka untuk aktif bersekolah maupun melanjutkan pendidikan lebih tinggi.

Ketiga, sekitar 16 persen penduduk usia 7-24 tahun memilih untuk masuk ke dalam kegiatan ekonomi aktif yaitu bekerja atau mencari nafkah daripada bersekolah atau melanjutkan sekolah. Alasan kemiskinan diduga menjadi alasan utama mereka yang memilih untuk bekerja sebelum masa ideal untuk bekerja. Seringkali masuknya penduduk ke dalam kegiatan

ekonomi aktif dipandang sebagai hal yang positif karena mendapat tambahan tenaga kerja sehingga dapat mendorong kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Akan tetapi, perlu diingat bahwa produktivitas yang dihasilkan tenaga kerja masih sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi kemampuan dan dapat juga pada umumnya keahlian yang mendorong produktivitasnya lebih tinggi daripada mereka dengan pendidikan rendah. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Pasay, Handayani, dan Indrayanti (2016) bahwa investasi terhadap pendidikan masih memberikan imbal hasil privat yang semakin tinggi sejalan dengan peningkatan jenjangnya. Dengan kata lain, masih menguntungkan apabila seseorang memilih untuk berpendidikan tinggi. Selain itu, tidak banyak pilihan sektor pekerjaan yang mau menampung pekerja dengan *skill* yang rendah, sehingga pada akhirnya sektor pertanian yang menjadi tumpuan karena tidak banyak membutuhkan *skill*.

Selain ketiga alasan di atas, masih ada beberapa alasan yang patut diperhatikan

seperti sekolah jauh. Di antaranya, sebesar 8,94 persen penduduk usia sekolah tidak aktif bersekolah dikarenakan mereka merasa sekolah jauh. Ini menjadi indikasi adanya ketimpangan akses penduduk di beberapa wilayah di Papua dalam menjangkau fasilitas pendidikan. Tabel di atas juga menunjukkan adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal alasan untuk tidak sekolah atau tidak bersekolah lagi. Hal ini akan diulas pada subbab lain mengenai gender.

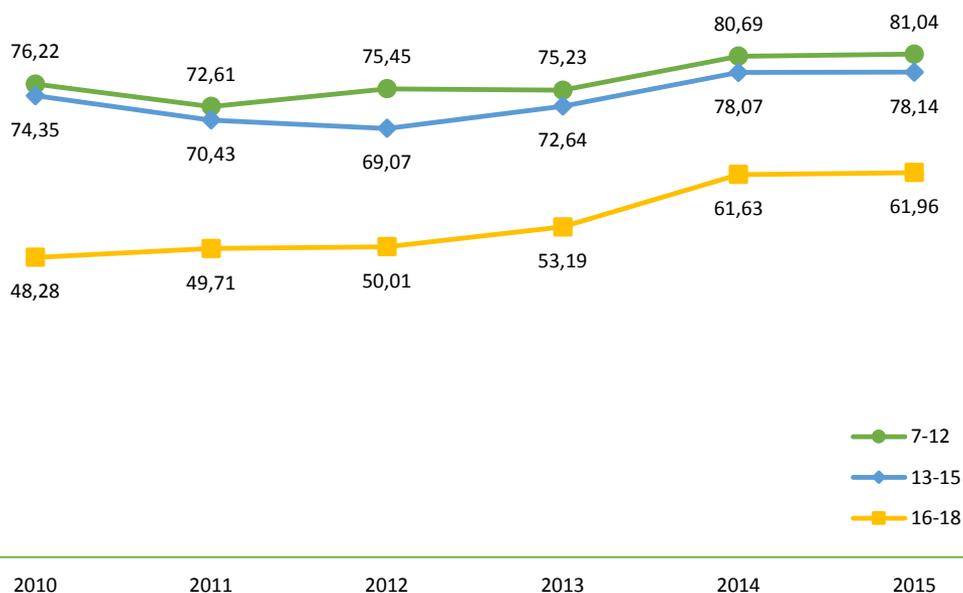
Indikator status sekolah sudah cukup dapat menggambarkan kondisi partisipasi sekolah penduduk, tetapi masih sangat kasar dan tidak cukup dapat menunjukkan partisipasi penduduk menurut kelompok usia sekolah. Dengan mengetahui partisipasi sekolah penduduk menurut kelompok usia sekolah, program pendidikan akan lebih terarah karena dapat diketahui target kelompok penduduk yang partisipasi sekolahnya perlu ditingkatkan.

Untuk itu, indikator yang digunakan adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS)

pada setiap kelompok usia sekolah. APS digunakan untuk melihat seberapa besar (dalam persen) penduduk dalam kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh)

terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Melalui indikator ini dapat diperoleh gambaran seberapa banyak penduduk usia sekolah yang telah memiliki akses terhadap fasilitas pendidikan.

Gambar 5.4 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur di Provinsi Papua, 2015



Perkembangan partisipasi sekolah penduduk di Papua selama kurun waktu enam tahun terakhir menunjukkan tren yang positif. Ini mengindikasikan pembangunan pendidikan telah berada pada jalur yang tepat yaitu membuka akses yang seluas-luasnya kepada

penduduk untuk bersekolah. Partisipasi sekolah penduduk yang ditunjukkan oleh indikator APS 7-12 tahun pada tahun 2015 sebesar 81,04 persen yang berarti dari 100 penduduk usia 7-12 tahun di Papua, 81-82 di antaranya masih bersekolah. Angka tersebut lebih tinggi daripada APS pada

kelompok umur lainnya. Pada kelompok umur 13-15 tahun, hanya sebesar 78,14 persen penduduk yang masih bersekolah, sedangkan pada penduduk kelompok umur 16-18 tahun sebesar 61,96 persen.

Isu Gender Dalam Pendidikan. Seberapa Penting?

Gender perlu dipahami dalam dua konsep yang berbeda namun saling terkait. Pertama, gender sebagai jenis kelamin yang memiliki arti biologis sedangkan konsep yang kedua adalah dalam budaya masyarakat tertentu, faktor biologis tersebut digunakan untuk membentuk kategori sosial gender yaitu maskulin dan feminin yang pada akhirnya perbedaan peran maskulin dan feminin membawa masyarakat pada harapan yang berbeda akan peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat (*gender-role stereotype*). Stereotipe ini lah yang membawa laki-laki dan perempuan pada konsep *sex roles* dan *gender roles*. Kedua peran tersebut sangatlah berbeda. *Sex roles* percaya bahwa melahirkan dan menyusui merupakan peran feminine, sedangkan

membesarkan anak adalah peran gender (*gender roles*). Dalam konsep peran gender tidak secara alami dibentuk tetapi secara budaya dibangun dan meresap pada semua tingkat masyarakat, sehingga dapat didekonstruksi, rekonstruksi, dan diubah oleh masyarakat.

Sex roles dan *gender roles* sama-sama memiliki peran dalam menjelaskan hubungan antara peran gender dalam isu pendidikan di Papua pada khususnya. Isunya adalah perempuan memiliki akses terhadap sumber daya pendidikan yang lebih terbatas dibandingkan laki-laki. Hal tersebut dapat disebabkan adanya perbedaan peran biologis (*sex roles*) di mana fungsi perempuan untuk melahirkan anak mengakibatkan perempuan hanya memiliki sedikit sisa energi untuk meningkatkan kemampuan intelektual mereka melalui pendidikan (Richmond-Abbott, 1992). Ketimpangan gender dalam pendidikan merujuk pada ketimpangan antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh hak-hak dasar mereka secara penuh.

Tabel 5.2 Persentase Penduduk 7-24 Tahun Menurut Partisipasi Sekolah dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua, 2015

Partisipasi Sekolah (1)	Jenis Kelamin		Jumlah (4)
	Laki-laki (2)	Perempuan (3)	
Tidak/belum pernah sekolah	18,74	22,80	20,65
Masih bersekolah	62,98	60,83	61,96
Tidak bersekolah lagi	18,28	16,37	17,38
Total	100,00	100,00	100,00

Hal tersebut terlihat dari capaian beberapa indikator pendidikan yang mengindikasikan bahwa laki-laki memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan, dibandingkan dengan perempuan. Partisipasi sekolah misalnya, sekitar 63 persen laki-laki usia 7-24 tahun masih bersekolah, lebih tinggi dari persentase perempuan yang masih bersekolah pada kelompok usia sekolah yang sama, yaitu sebesar 61 persen. Sejalan dengan itu, pada kelompok umur tersebut, persentase perempuan yang tidak atau belum pernah sekolah (22,80 persen) lebih tinggi daripada laki-laki (18,74 persen). Sebaliknya, persentase

laki-laki yang tidak bersekolah lagi lebih tinggi yaitu 18,28 persen dibandingkan perempuan. Hal ini disebabkan masuknya laki-laki ke dalam kegiatan ekonomi aktif. Sebagaimana yang terlihat pada Tabel 4.1, selain alasan lainnya, alasan bekerja atau mencari nafkah merupakan alasan yang paling banyak menjadi penyebab laki-laki pada usia 7-24 tahun tidak sekolah atau tidak bersekolah lagi. Sementara itu, alasan utama (selain alasan lainnya) yang menyebabkan perempuan 7-24 tahun tidak sekolah atau tidak bersekolah lagi adalah tidak ada biaya sekolah (16,23 persen) dan mengurus rumah tangga (12,73 persen).

Tabel 5.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua, 2015

Angka Partisipasi Sekolah (APS)	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
7 – 12 tahun	80,74	81,36	81,04
13 – 15 tahun	80,85	75,23	78,14
16 – 18 tahun	64,79	58,40	61,96
19 – 24 tahun	24,40	20,43	22,55

Sejalan dengan itu, APS perempuan terlihat lebih rendah hampir pada semua kelompok usia sekolah, kecuali pada kelompok usia 7-12 tahun. APS perempuan pada kelompok usia tersebut sedikit lebih tinggi yaitu 81,36 persen daripada APS laki-laki sebesar 80,74 persen.

Apabila dikaji lebih lanjut, terlihat ketimpangan akses pendidikan antara laki-laki dan perempuan dalam hal partisipasi sekolah. Tingginya persentase perempuan usia 7-24 tahun yang tidak/belum pernah sekolah dibandingkan laki-laki mengindikasikan perbedaan kesempatan bagi perempuan untuk bersekolah. Pada kondisi rumah tangga dengan keadaan

ekonomi terbatas, orang tua cenderung akan mendahulukan anak laki-laknya untuk bersekolah dibandingkan perempuan. Hal tersebut terlihat dari tingginya persentase perempuan yang mengurus rumah tangga (hampir 13 persen) sedangkan laki-laki tidak mencapai satu persen. Sebaliknya, tingginya persentase laki-laki yang tidak bersekolah lagi dibandingkan perempuan lebih menunjukkan karena pilihan untuk bekerja atau mencari nafkah, bukan semata-mata tidak punya kesempatan untuk bersekolah lagi. Memang alasan biaya juga menjadi alasan laki-laki untuk tidak sekolah atau tidak bersekolah lagi, tetapi bukan menjadi alasan prioritas.

Tabel 5.4

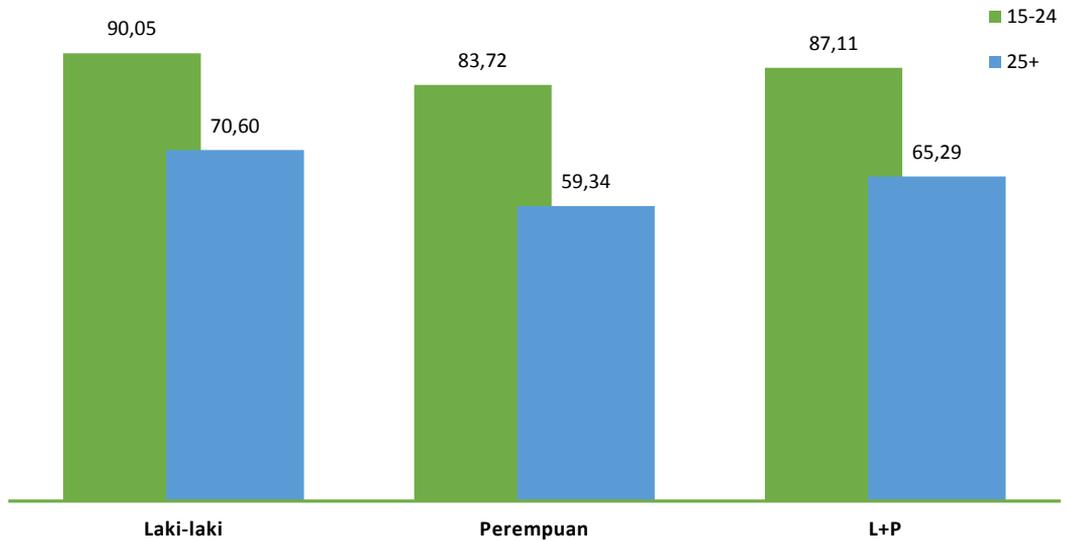
Pendidikan yang Ditamatkan Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah yang Dimiliki dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua, 2015

Pendidikan yang Ditamatkan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/belum pernah sekolah	28,24	39,30	33,44
Tidak punya ijazah SD	5,66	8,67	7,08
Tamat SD/ sederajat	16,64	16,83	16,73
Tamat SMP/ sederajat	19,01	14,30	16,80
Tamat SM/ sederajat	23,72	16,13	20,15
Tamat PT	6,73	4,76	5,81
Total	100,00	100,00	100,00

Partisipasi sekolah pada akhirnya turut mempengaruhi jenjang pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk. Secara umum, tingkat pendidikan perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Lebih dari 40 persen laki-laki berpendidikan tinggi (SMA ke atas) dan 19 persen berpendidikan menengah. Sementara perempuan hanya sekitar 20 persen saja yang berpendidikan tinggi, 14 persen berpendidikan menengah, sebaliknya sekitar 25 persen penduduk perempuan berpendidikan rendah. Sejalan dengan itu, rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan juga cukup jauh perbedaannya, di mana rata-rata lama sekolah laki-laki mencapai hampir 7 tahun sedangkan perempuan tidak lebih dari 5 tahun.

Kualitas pendidikan yang diukur dari kemampuan baca dan tulis antara laki-laki dan perempuan juga terlihat timpang. Lebih dari 90 persen laki-laki usia 15-24 tahun di Papua pada tahun 2015 sudah memiliki kemampuan baca dan tulis yang baik, sementara hanya 84 persen saja perempuan di Papua yang mampu membaca dan menulis, sisanya 16 persen tidak mampu baca dan tulis. Sekilas angka 16 persen terlihat kecil, namun perlu diingat bahwa kemampuan baca dan tulis merupakan modal dasar seseorang untuk dapat berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan baik sosial maupun ekonomi. Angka tersebut bahkan jauh lebih rendah apabila dilihat pada kelompok umur 25 tahun ke atas.

Gambar 5.5 Angka Melek Huruf Penduduk 15-24 Tahun dan 25 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Papua, 2015



Dari paparan di atas, isu gender dalam pendidikan cukup terlihat jelas. Isu gender terjadi apabila laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan kesempatan atau akses terhadap pendidikan yang disebabkan oleh perbedaan peran gender (gender roles) dalam masyarakat. Dalam hal ini, dari gambaran di atas, akses perempuan terhadap pendidikan sedikit lebih terbatas daripada laki-laki. masih kentalnya pandangan atau stigma bahwa urusan domestik atau dapur adalah urusan perempuan menyebabkan banyaknya perempuan yang terpaksa harus mengurus rumah tangga daripada

bersekolah. Bahkan cukup banyak perempuan yang menikah pada umur yang seharusnya masih harus bersekolah.

Tantangan: Disparitas Pendidikan Papua

Dari pembahasan di atas dapat dilihat bahwa kondisi pendidikan di Papua masih cukup memprihatinkan. Meskipun beberapa indikator pendidikan terus mengalami peningkatan selama beberapa tahun terakhir, capaian tersebut masih sangat jauh dibandingkan kondisi pendidikan di wilayah lainnya di Indonesia. Setidaknya ada beberapa hal

yang menjadi tantangan terkait kebijakan pendidikan di Papua.

Pertama, mendorong anak usia sekolah untuk bersekolah. Capaian partisipasi sekolah anak usia 7-18 tahun, khususnya usia 13-18 tahun masih rendah. Bagaimana pun juga, meningkatkan partisipasi sekolah berarti memperoleh pendidikan yang lebih tinggi dan semakin tinggi tingkat pendidikan berarti semakin tingginya kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan upah tinggi.

Kedua, disparitas wilayah pada berbagai indikator pendidikan sangat terlihat. Capaian indikator pendidikan di kabupaten-kabupaten yang berada di wilayah pesisir jauh lebih baik dibandingkan kabupaten lainnya di wilayah pegunungan.

Ketiga, isu gender dalam pendidikan khususnya partisipasi sekolah laki-laki dan

perempuan masih cukup kental. Adanya pandangan atau stigma bahwa urusan rumah tangga merupakan urusan perempuan turut mempengaruhi keputusan rumah tangga untuk menyekolahkan anaknya ketika diperhadapkan dengan keterbatasan ekonomi. Hal tersebut pada akhirnya mempengaruhi capaian pendidikan perempuan seperti pendidikan yang ditamatkan maupun rata-rata lama sekolah yang berada di bawah laki-laki.

Keempat, sementara capaian partisipasi sekolah penduduk terus mengalami peningkatan, masih banyak penduduk usia 15-24 tahun yang tidak dapat membaca dan menulis. Selain mendorong partisipasi sekolah penduduk, tantangan besar yang dihadapi pemerintah selanjutnya adalah meningkatkan kualitas pendidikan di Papua.

**SEMUA DIMULAI
DARI SEHAT**

6

6

SEMUA DIMULAI DARI SEHAT

“Kondisi kesehatan ditentukan dari tahapan konsepsi dan berakhir pada kematian, sehingga status kesehatan merupakan representasi dari berbagai ukuran seperti ukuran-ukuran mortalitas, morbiditas, kondisi kesehatan individu seperti status gizi, disabilitas, kesehatan jiwa, dan lain sebagainya.”

Cita-cita dan harapan untuk memiliki kehidupan yang sejahtera mendorong manusia untuk terus meningkatkan kemampuan atau kapasitasnya, di mana hal itu tidak akan terwujud apabila tidak didukung oleh kesehatan yang baik. Kesehatan menjadi salah satu aset yang sangat penting yang harus dimiliki manusia untuk mampu mengembangkan dirinya sekaligus merupakan modal dasar untuk dapat berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan ekonomi maupun sosial. Dalam konteks pembangunan ekonomi, kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas pekerja. Oleh karenanya kesehatan menjadi salah satu dimensi dalam pengukuran

pembangunan manusia dan menjadi indikator pembangunan di suatu wilayah. Ukuran yang digunakan adalah status kesehatan penduduk.

Pada intinya, berbagai kebijakan program kesehatan pemerintah bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan status kesehatan penduduknya. Oleh sebab itu sangatlah penting untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang turut mempengaruhi kesehatan penduduk di suatu wilayah. Informasi mengenai status kesehatan penduduk di suatu wilayah dapat membantu pembuat kebijakan untuk mengalokasikan berbagai sumber daya kesehatan serta menyediakan jasa

pelayanan kesehatan untuk peningkatan pelayanan kesehatan dengan tujuan akhir yaitu status kesehatan yang lebih baik. Sehingga sesuai dengan konsep pembangunan manusia oleh UNDP, pembangunan kesehatan mampu menciptakan pilihan-pilihan yang lebih banyak sehingga mendorong kapabilitas atau kemampuan manusia untuk memilih apa yang dibutuhkan dan diinginkannya untuk menjadi sehat, dan selanjutnya berkembang hingga potensi maksimalnya.

Kesehatan merupakan persoalan yang kompleks dan multifaktor, sehingga untuk mengukur status kesehatan penduduk di suatu wilayah tidaklah mudah. Kondisi kesehatan ditentukan dari tahapan konsepsi dan berakhir pada kematian, sehingga status kesehatan merupakan representasi dari berbagai ukuran seperti ukuran-ukuran mortalitas, morbiditas, kondisi kesehatan individu seperti status

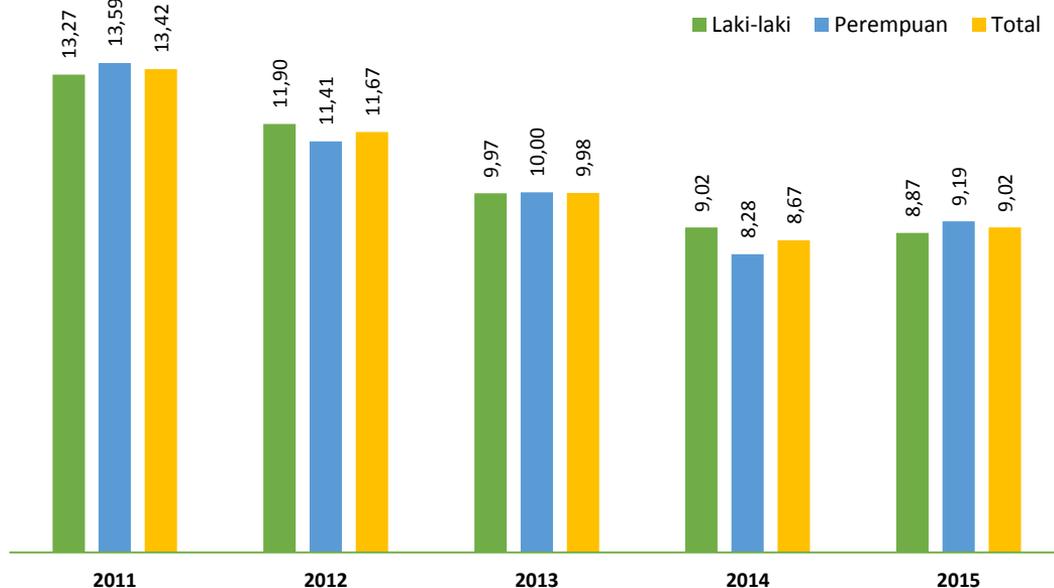
gizi, disabilitas, kesehatan jiwa, dan lain sebagainya. Permasalahan di Indonesia sebagaimana yang terjadi di banyak negara berkembang adalah tidak tersedianya data kesehatan yang lengkap, sehingga dalam publikasi ini hanya beberapa indikator kesehatan saja yang dapat disajikan seperti angka kematian bayi yang digunakan sebagai ukuran mortalitas, angka morbiditas, serta angka harapan hidup.

Morbiditas: Bukan Sekedar Sakit

WHO mendefinisikan sehat sebagai suatu kondisi fisik, mental dan sosial yang lengkap, dan tidak sekedar kondisi di mana tidak ada penyakit dan badan lemah. Definisi tersebut berlaku hingga saat ini, terlepas dari beberapa keterbatasannya. Sementara status kesehatan secara sederhana didefinisikan sebagai kondisi sehat secara menyeluruh.

Gambar 6.1

Tingkat Kesakitan Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Papua, 2011-2015



Indikator sederhana yang digunakan untuk mengukur derajat kesehatan penduduk adalah tingkat morbiditas atau angka kesakitan penduduk yang didefinisikan sebagai persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan merasa terganggu aktivitasnya. Indikator ini menunjukkan adanya gangguan kesehatan atau keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga, maupun melakukan aktivitas lainnya. Pada

umumnya keluhan kesehatan yang mengindikasikan adanya suatu penyakit yang biasa dialami penduduk adalah panas, batuk, pilek, asma/napas sesak, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, campak, dll. Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan, semakin tinggi angka kesakitan dan berarti semakin rendah derajat kesehatan di wilayah tersebut.

Secara umum, tingkat kesakitan penduduk selama kurun waktu lima tahun terakhir mengalami penurunan. Angka kesakitan

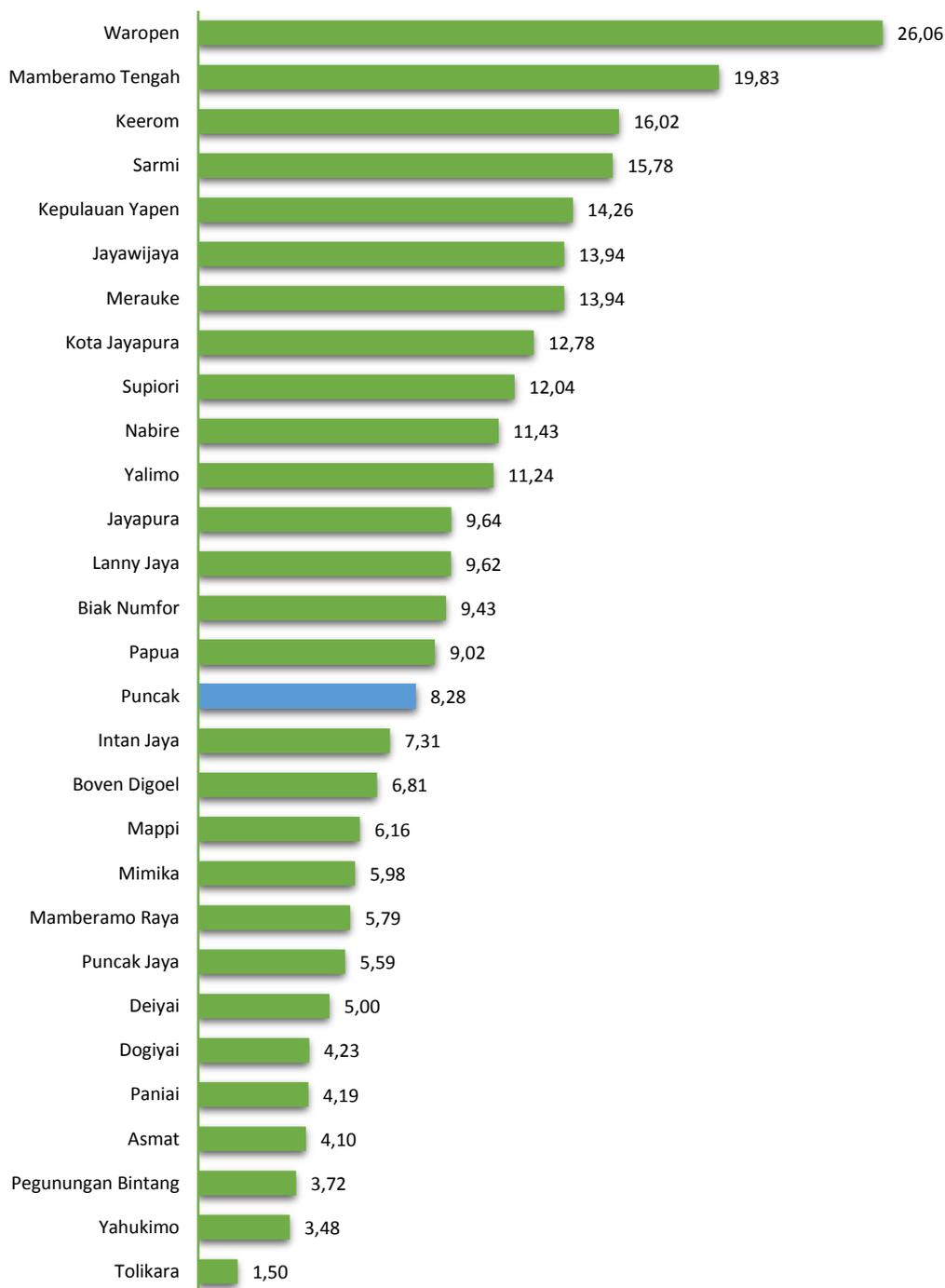
penduduk pada tahun 2011 sebesar 13,42 persen turun menjadi 9,02 persen pada tahun 2015. Ini menunjukkan adanya peningkatan derajat kesehatan penduduk. Gambar di atas juga menunjukkan bahwa tingkat kesakitan laki-laki dan perempuan tidak terlalu jauh berbeda, meskipun pada tahun 2015 persentase penduduk perempuan yang sakit sedikit lebih tinggi dari laki-laki.

Tingkat kesakitan penduduk bervariasi antar wilayah di Papua, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Gambar 5.2. Dari gambar tersebut terlihat bahwa pada umumnya penduduk yang tinggal di wilayah pegunungan seperti Tolikara, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Paniai, dll justru memiliki tingkat kesakitan yang lebih rendah dari penduduk yang berada di wilayah pesisir seperti Waropen, Keerom, Sarmi, Kepulauan Yapen, dll, bahkan wilayah perkotaan seperti Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura.

Apabila hanya melihat dari indikator morbiditas, dapat dikatakan bahwa penduduk di wilayah pegunungan cenderung memiliki derajat kesehatan yang lebih baik dari penduduk di wilayah pesisir. Perlu diingat bahwa angka morbiditas merupakan indikator yang masih sangat kasar dalam menilai status kesehatan penduduk secara menyeluruh. Ukuran seseorang dikatakan sakit dalam publikasi ini adalah berdasarkan pengakuan responden tentang kondisi kesehatan dirinya, bukan berdasarkan diagnosis dokter atau tenaga medis. Seseorang dikatakan sakit apabila memiliki keluhan kesehatan dan merasa aktivitasnya terganggu. Padahal bisa saja seseorang memiliki keluhan kesehatan yang sama namun merasa masih bisa melakukan kegiatannya atau bahkan memaksakan diri untuk tetap beraktivitas, sehingga tidak dikategorikan sakit.

Gambar 6.2

Tingkat Kesakitan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2015



Kesehatan individu merupakan sebuah proses yang berlangsung seumur hidup dimulai dari tahap konsepsi dan berakhir dengan kematian, di mana berbagai perubahan fisik, sosial, emosi, dan intelektual mengiringi proses tersebut. Banyak faktor yang mempengaruhi kesehatan seseorang selama proses tersebut yaitu faktor keturunan, lingkungan fisik, kimia, dan biologis, perilaku sosial budaya, dan pelayanan kesehatan. Termasuk di dalam faktor lingkungan adalah konsumsi gizi yaitu energi (kalori), protein, vitamin, dan mineral. Konsumsi kalori dan protein merupakan asupan gizi yang diperlukan manusia untuk beraktivitas sehari-hari. Kekurangan konsumsi gizi dari standar minimum akan berpengaruh terhadap kondisi kesehatan, aktivitas, dan produktivitas kerja. Bahkan dalam jangka panjang kekurangan konsumsi pangan dari sisi jumlah dan kualitas (terutama pada balita) akan berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia (Ariningsih, 2008). Gambar di bawah menunjukkan konsumsi kalori dan protein penduduk menurut kabupaten/kota di Papua pada tahun 2015.

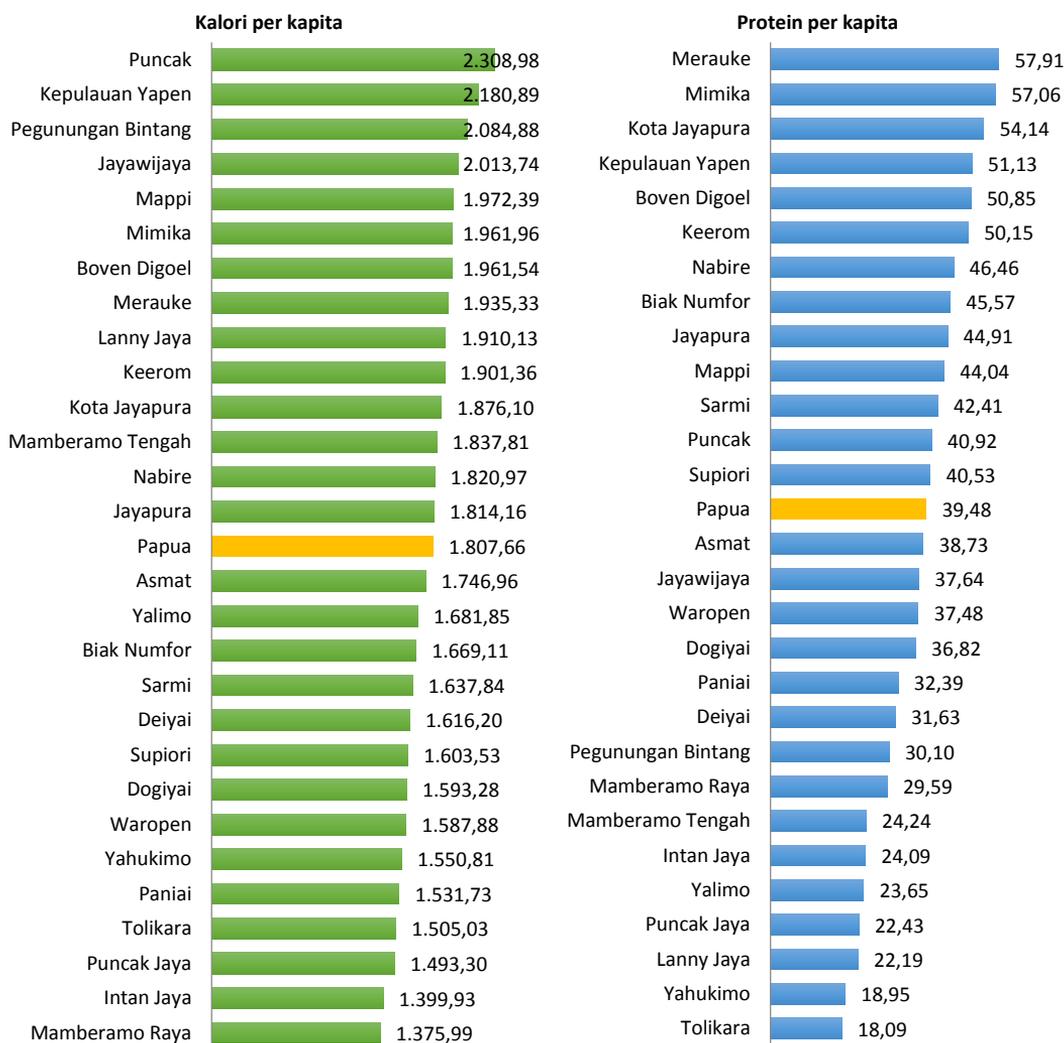
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang angka kecukupan gizi menganjurkan, rata-rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia masing-masing sebesar 2.150 kilo kalori (kkal) dan 57 gram per orang per hari pada tingkat konsumsi. Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015 konsumsi kalori dan protein penduduk Papua pada tahun 2015 masing-masing sebesar 1 807,66 kkal dan 39,48 gram per kapita per hari. Berdasarkan anjuran pemerintah, maka dapat disimpulkan bahwa konsumsi kalori dan protein penduduk Papua masih di bawah standar kecukupan gizi yang ideal.

Beberapa kabupaten seperti Puncak dan Kepulauan Yapen, rata-rata konsumsi kalori penduduknya telah sesuai dengan anjuran Kemenkes RI yaitu masing-masing sebesar 2 308,98 kkal dan 2 180,89 kkal, namun konsumsi protein di kedua kabupaten tersebut masih di bawah standar kecukupan gizi. Sebaliknya, di wilayah Merauke dan Mimika, konsumsi protein penduduk masing-masing sebesar 57,91 gram dan 57,06 gram per kapita per hari atau dengan kata lain telah sesuai

dengan standar kecukupan gizi, meskipun demikian konsumsi kalori di kedua kabupaten tersebut masih berada di bawah standar. Gambar tersebut juga menunjukkan bahwa konsumsi kalori

antar kabupaten/kota di Papua secara umum tidak terlalu jauh berbeda, namun pada konsumsi protein, terlihat variasi yang cenderung tinggi.

Gambar 6.3 Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2015



Secara umum konsumsi protein penduduk yang tinggal di wilayah pesisir lebih tinggi daripada penduduk yang tinggal di wilayah pegunungan atau pesisir sulit. Wilayah geografis diduga sebagai salah satu penyebab timpangnya angka konsumsi protein antar kabupaten di Papua. Kabupaten yang terletak di wilayah pesisir lebih cenderung untuk mengkonsumsi protein lebih tinggi daripada kabupaten yang berada di wilayah pegunungan. Hal ini dapat disebabkan oleh sumber protein hewani (misalnya ikan dan hewan ternak) yang lebih mudah didapatkan di daerah pesisir dibandingkan daerah pegunungan. Apabila konsumsi kalori dan protein tersebut dijadikan sebagai indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dapat disimpulkan bahwa penduduk yang tinggal di daerah pesisir pantai Papua lebih sejahtera dibanding penduduk di wilayah pegunungan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa secara kolektif konsumsi kalori dan protein penduduk Papua pada tahun 2015 masih cukup jauh di bawah standar kecukupan konsumsi kalori dan protein per kapita per hari nasional. Ada banyak

faktor yang dapat mempengaruhi konsumsi kalori dan protein rumah tangga, di antaranya ketersediaan dan distribusi pangan, harga pangan, serta karakteristik demografi rumah tangga seperti pendapatan rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga, jenis kelamin KRT, tingkat pendidikan KRT, dan sebagainya. Konsumsi kalori dan protein rumah tangga sangat mempengaruhi produktivitas seseorang dan daerah pada umumnya. Namun, masih diperlukan kajian yang lebih dalam untuk melihat faktor apa saja yang paling mempengaruhi kekurangan konsumsi kalori dan protein di Provinsi Papua, sehingga pemerintah dapat mengambil kebijakan paling tepat untuk meningkatkan konsumsi kalori dan protein rumah tangga.

**Pertanyaan Kesehatan Mendasar:
Berapa Lama Saya Dapat Berharap
Hidup?**

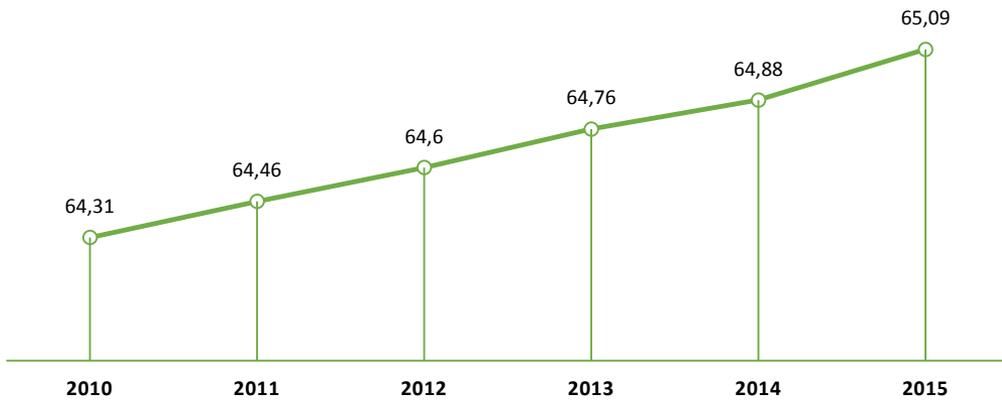
Mengingat kompleksnya ukuran yang digunakan untuk mengukur status kesehatan penduduk di suatu wilayah, Badan Kesehatan Dunia (*World Health Organization/WHO*) dan berbagai

lembaga penelitian kemudian mengembangkan dan mempromosikan ukuran-ukuran ringkasan kesehatan penduduk ke dalam suatu bilangan tunggal sehingga mudah diukur dan dibandingkan antar negara atau antar wilayah. Ukuran yang paling sering digunakan adalah harapan hidup saat lahir. Indikator inilah yang kemudian digunakan oleh PBB dalam penyusunan IPM sebagai indikator untuk mengukur dimensi kesehatan dan digunakan secara luas untuk mengukur status kesehatan penduduk.

Angka harapan hidup didefinisikan sebagai rata-rata tahun hidup yang diharapkan dapat dijalani seseorang, apabila mengikuti pola kematian tertentu. Bagaimana pun juga, harus disadari bahwa

harapan hidup merupakan ukuran dari lama hidup daripada kualitas hidup, karena indikator ini tidak mencakup keseluruhan masalah kesakitan dan disabilitas. Telah disinggung sebelumnya bahwa selain faktor keturunan, faktor lingkungan utamanya konsumsi atau nutrisi, faktor lingkungan fisik dan sosial memainkan peranan yang cukup penting dalam menentukan status kesehatan dan harapan hidup penduduk di suatu wilayah. Lingkungan fisik seperti air minum, sanitasi, polusi dan sampah; serta faktor lingkungan sosial seperti pendidikan, sosial ekonomi, tipe daerah, dsb merupakan variabel-variabel dalam suatu sistem kesehatan. Faktor-faktor tersebut turut ditentukan oleh kebijakan pemerintah.

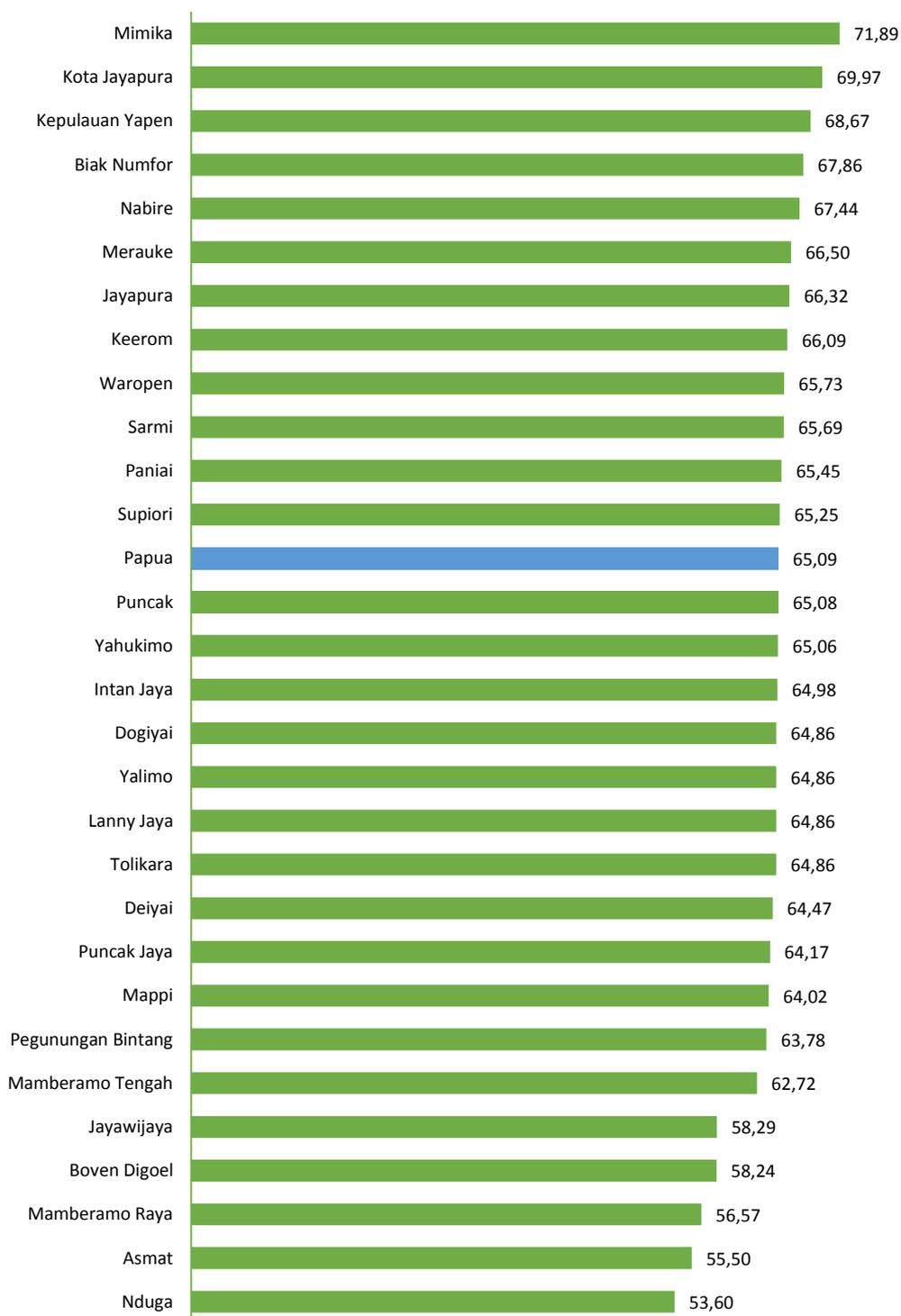
Gambar 6.4 Angka Harapan Hidup Penduduk Provinsi Papua, 2010-2015



Selama kurun waktu enam tahun terakhir angka harapan hidup penduduk Papua telah mengalami peningkatan sebanyak 0,78 poin yaitu meningkat dari 64,31 tahun menjadi 65,09 tahun. angka ini berarti, semua bayi yang dilahirkan pada

tahun 2015 diharapkan dapat menjalani rata-rata 65 tahun hidupnya. Dibandingkan dengan harapan hidup secara nasional yaitu 70,1 tahun, maka harapan hidup penduduk Papua masih tergolong rendah.

Gambar 6.5 Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2015



Angka harapan hidup bervariasi antar kabupaten/kota di Papua. Kabupaten Mimika merupakan kabupaten dengan harapan hidup paling tinggi di Papua yaitu mencapai 71,89 tahun, lebih tinggi daripada harapan hidup rata-rata penduduk Papua, disusul oleh Kota Jayapura dan Kepulauan Yapen masing-masing sebesar 69,97 tahun dan 68,67 tahun. Sebaliknya, Kabupaten Nduga merupakan kabupaten dengan harapan hidup penduduk paling rendah di Papua yaitu sebesar 53,60 tahun.

Variasi juga terlihat jelas antar wilayah pegunungan dan pesisir. Angka harapan hidup kabupaten/kota yang berada di wilayah pesisir seperti Mimika, Kep. Yapen, Kota Jayapura, Biak Numfor, Nabire, Merauke, Jayapura, Keerom, Sarmi, dan Supiori berada di atas rata-rata angka harapan hidup Papua dan lebih tinggi daripada kabupaten-kabupaten di wilayah pegunungan. Variasi tersebut mencerminkan adanya variasi alam atau geografis antara kedua wilayah tersebut yang secara tidak langsung turut mempengaruhi kondisi ekologi, ekonomi (kesejahteraan), infrastruktur, sosial dan

budaya, situasi politik, serta kesehatan penduduk yang pada dasarnya dipengaruhi oleh kondisi-kondisi tersebut. Kondisi ekologi mendukung tingginya kasus malaria di hampir seluruh wilayah Papua; rendahnya variasi konsumsi penduduk khususnya masyarakat pegunungan sebagai akibat dari produksi bahan makanan (protein) yang memang terbatas; infrastruktur yang terbatas mempengaruhi rendahnya akses masyarakat ke fasilitas-fasilitas kesehatan; dan berbagai akibat yang timbul dari kemiskinan seperti tingkat pendidikan yang rendah, sanitasi yang buruk, dsb. Maka tidak heran apabila kondisi kesehatan dan harapan hidup penduduk Papua tergolong rendah.

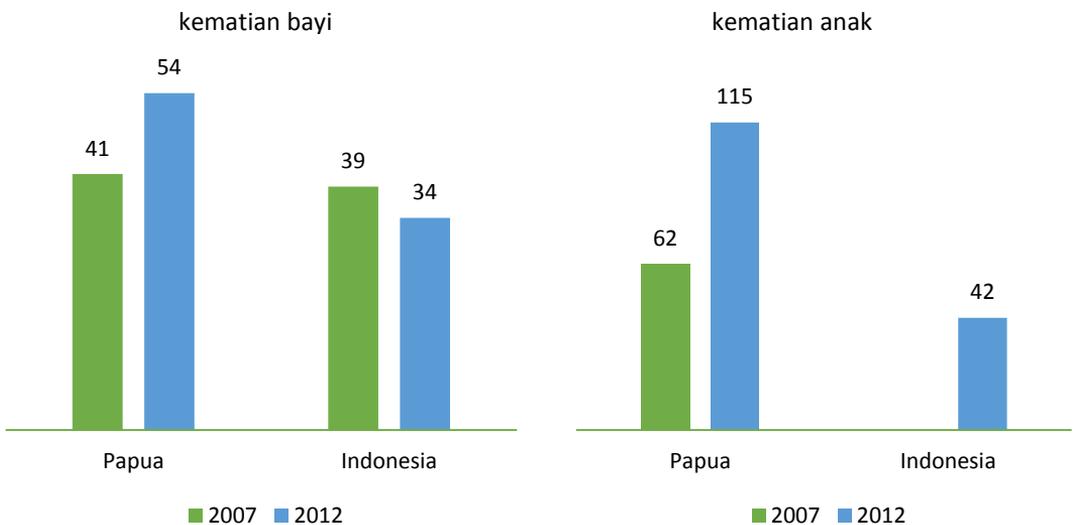
Kematian Bayi: Mati Sebelum Bertumbuh

Rendahnya harapan hidup penduduk di kebanyakan negara berkembang termasuk Indonesia biasanya berhubungan dengan tingginya kasus atau insiden penyakit termasuk tingginya angka kematian bayi. Secara nasional, terjadi penurunan angka kematian bayi dari 39

menjadi 34 bayi per 1000 kelahiran, namun tren tersebut tidak berlaku di Papua. Hasil SDKI menunjukkan bahwa AKB di Provinsi Papua mengalami peningkatan hampir sebesar 32 persen, dari 41 kematian bayi menjadi 54 per 1000 kelahiran hidup. Sementara itu, angka kematian anak (di bawah usia lima tahun)

juga masih sangat tinggi. Pada tahun 2012 angka kematian anak di Papua sebesar 115 per 1000 kelahiran hidup, merupakan yang tertinggi di Indonesia. Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2007 yaitu sebesar 62 kematian per 1000 kelahiran hidup.

Gambar 6.6 Angka Kematian Bayi dan Anak di Provinsi Papua dan Indonesia, 2007 dan 2012



Kematian bayi dan anak dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor endogen yaitu kematian yang disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, diwarisi orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat dari ibunya selama kehamilan. Sementara kematian bayi eksogen yaitu disebabkan faktor-faktor

yang berkaitan dengan pengaruh lingkungan misalnya kondisi higienis, sanitasi, dan sosial ekonomi. Di banyak negara berkembang kematian bayi di atas 1 bulan (*post-neonatum*) lebih tinggi daripada kematian bayi di bawah 1 bulan (*neonatum*), oleh karena kondisi lingkungan yang masih buruk.

Demikian halnya dengan pola kematian bayi dan anak di Papua, ditengarai buruknya faktor lingkungan termasuk kondisi sosial dan ekonomi mempengaruhi tingginya kematian bayi. Berdasarkan hasil Susenas, hampir 40 persen kelahiran bayi di Papua ditolong oleh tenaga bukan medis, dua persen di antaranya bahkan tidak ada yang menolong, padahal resiko kematian bayi lebih tinggi apabila tidak ditolong oleh tenaga medis. Selain itu, pemberian imunisasi juga merupakan faktor penting terutama imunisasi campak. Masih dari data Susenas, pemberian imunisasi di Papua juga masih rendah yaitu hanya sebesar 39,22 persen balita di Papua yang pernah diberi imunisasi lengkap, sementara 71,34 persen balita di Papua pernah mendapatkan imunisasi campak.

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa diare, kurang gizi (malnutrisi), campak, infeksi saluran, pernapasan, dan tetanus merupakan penyebab kematian bayi dan anak, di mana pada kematian bayi *post-neonatum*, diare menjadi penyebab utamanya. Apabila dilihat dari faktor lingkungan, penggunaan air minum

layak dan sanitasi layak di Papua masih sangat memprihatinkan. Pada tahun 2015, sebesar 44,50 persen rumah tangga di Papua menggunakan air tidak layak sebagai sumber utama air minum sehari-hari, kondisi tersebut bahkan lebih buruk di beberapa kabupaten terutama di wilayah pegunungan. Penggunaan sanitasi layak bahkan jauh lebih memprihatinkan. Data Susenas menunjukkan bahwa hampir 80 persen rumah tangga di Papua tidak memiliki akses terhadap sanitasi layak. Tingkat kemiskinan di Papua yaitu sebesar 28 persen merupakan yang tertinggi di Indonesia, menambah panjang faktor yang mempengaruhi tingginya kematian bayi dan anak di Papua.

Dilayani dan Terlayani: Pelayanan Dasar Kesehatan

Pencapaian berbagai indikator kesehatan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, tidak terlepas dari akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan. Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai indikator-indikator sumber daya manusia, termasuk dalam bidang kesehatan melalui kesepakatan-

kesepakatan global seperti *Millenium Development Goals* (MDGs) yang dilanjutkan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada 2015, Deklarasi Alma Ata pada tahun 1990an, dan *A World Fit for Children* (WFC). Meskipun tidak mudah untuk mewujudkan komitmen tersebut, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, salah satunya menetapkan standar pelayanan minimal berbagai pelayanan kesehatan. Upaya tersebut dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan sekaligus mencapai tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan penduduk.

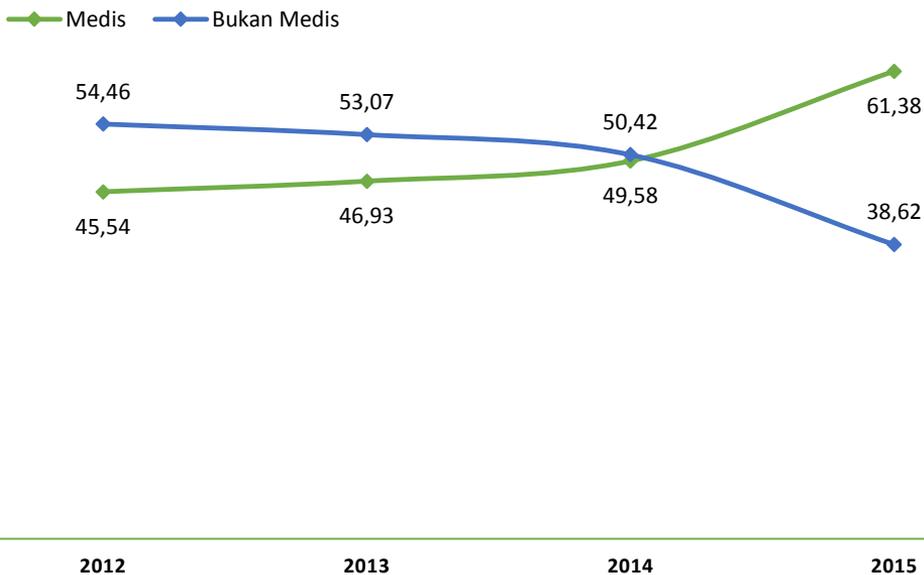
Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1457 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bahwa berbagai pelayanan kesehatan yang menjadi kewenangan daerah harus disertai dengan standar minimal untuk setiap pelayanan tersebut. Ada enam jenis kesehatan dasar yang menjadi kewenangan wajib daerah, yaitu sebagai berikut.

1. Cakupan kesehatan ibu dan anak (KIA) yang diukur melalui indikator cakupan kunjungan ibu hamil K4; cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan; cakupan ibu hamil resiko tinggi yang dirujuk.
2. Cakupan program gizi yang diukur oleh cakupan balita yang menerima kapsul vitamin A dua kali setahun; cakupan ibu hamil yang mendapat tablet Fe; dan persentase balita dengan berat di bawah garis merah (BGM).
3. Cakupan program pemberantasan penyakit menular (P2M) yang diukur oleh persentase penderita DBD yang dilacak; penderita pneumonia yang dirujuk; dan persentase kesembuhan penderita TBC BTA positif.
4. Cakupan program imunisasi yaitu cakupan imunisasi campak, hepatitis B3; dan cakupan vaksinasi TT2 pada ibu hamil.
5. Cakupan program kesehatan lingkungan yaitu proporsi tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan.
6. Cakupan program promosi kesehatan, seperti bayi yang mendapat ASI eksklusif dan posyandu purnama.

Dari berbagai jenis pelayanan kesehatan dasar dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya, hanya ada beberapa indikator yang dapat disajikan dalam

publikasi ini, yaitu penolong persalinan oleh tenaga medis, persentase balita menurut berat badan lahir, pemberian imunisasi, dan pemberian ASI eksklusif.

Gambar 6.7 Persentase Penolong Kelahiran di Provinsi Papua, 2012-2015



Salah satu faktor yang berkaitan erat dengan kematian bayi adalah penolong persalinan. Resiko bayi mengalami kematian lebih tinggi pada penolong persalinan bukan medis seperti dukun bersalin, keluarga, dsb. Sebagaimana yang telah dibahas pada subbab sebelumnya, persentase perempuan yang kelahirannya ditolong oleh tenaga bukan medis di

Papua masih cukup besar yaitu 38,62 persen. Meskipun mengalami penurunan dari tahun ke tahun, angka tersebut masih cukup tinggi.

Lebih dari 20 juta bayi di dunia lahir dengan berat badan rendah setiap tahun. Berat badan bayi dikategorikan rendah apabila berat badan bayi pada saat lahir

kurang dari 2,5 kg. Di Papua, dari hasil Susenas, persentase perempuan 15-49 tahun yang melahirkan bayi dengan berat badan normal (lebih dari 2,5 kg) sebesar 46,26 persen sedangkan bayi dengan berat lahir rendah sebesar 15,26 persen. Angka tersebut mungkin jauh lebih tinggi dari karena masih ada sekitar 38 persen perempuan yang tidak tahu berat badan bayinya ketika dilahirkan.

Faktor yang dapat menyebabkan berat badan lahir rendah diantaranya adalah kekurangan gizi ibu pada saat kehamilan. Berat badan lahir rendah sangat beresiko terhadap kematian bayi di bawah satu bulan. Faktanya, peluang bayi meninggal dengan berat kurang dari 20 kg sama dengan 10 kali probabilitas bayi meninggal dengan berat badan lahir normal, bahkan 90 persen bayi dengan berat badan kurang dari 1 kg akan meninggal sebelum berusia satu bulan.

Indikator selanjutnya adalah pemberian imunisasi dan pemberian ASI. Indikator ini merupakan bagian dari program kesehatan untuk menurunkan kematian bayi dan anak. imunisasi dapat

memberikan perlindungan terhadap penyakit-penyakit infeksi seperti difteria, batuk rejan, tetanus, polio, TBC, dan campak. Sementara pemberian ASI merupakan makanan terbaik bagi bayi di bawah 6 bulan (ASI eksklusif) yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh bayi. Data Susenas menunjukkan bahwa pemberian imunisasi lengkap di Papua masih cukup rendah yaitu sebesar 39,22 persen. Sementara itu, persentase balita yang pernah diberikan imunisasi campak dan hepatitis B sudah cukup tinggi yaitu masing-masing sebesar 71,34 persen dan 75,66 persen. Sebaliknya, persentase anak di bawah dua tahun yang pernah diberi ASI cukup tinggi yaitu hampir 95 persen, dengan rata-rata lama pemberian ASI adalah 10 hingga 11 bulan.

Tantangan: Mengapa Susah Membangun Sehat?

Blum (1981) menyatakan empat faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat, yaitu faktor yang berkaitan dengan keturunan, misalnya umur, jenis kelamin, dan tinggi badan; faktor pelayanan kesehatan; faktor perilaku

kesehatan; dan faktor lingkungan. Dari keempat faktor tersebut, faktor lingkungan dan perilaku kesehatan merupakan faktor penentu yang mempunyai pengaruh besar terhadap status kesehatan masyarakat. Dengan demikian apabila ingin meningkatkan status kesehatan masyarakat, intervensi atau kebijakan program kesehatan yang paling tepat adalah peningkatan akses masyarakat terhadap lingkungan yang sehat dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan perilaku hidup sehat.

Dari uraian di atas, setidaknya ada beberapa faktor menjadi tantangan dalam mencapai tujuan pembangunan

kesehatan di Papua. Pertama, akses masyarakat terhadap air minum layak dan sanitasi layak, karena capaian kedua indikator tersebut masih sangat memprihatinkan. Kedua, peningkatan pelayanan kesehatan dasar seperti pemeriksaan ibu pada saat hamil dan anak pasca dilahirkan, serta peningkatan akses masyarakat terhadap fasilitas tenaga medis sebagai penolong persalinan. Selain itu, mendorong pertumbuhan ekonomi tetap harus menjadi prioritas karena dapat membantu mendorong pendapatan rumah tangga sehingga dapat dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan gizi rumah tangga.

**PAPUA YANG
KAYA, JADI
MANA YANG
MISKIN?**

7

7

PAPUA YANG KAYA, JADI MANA YANG MISKIN?

“Tidak ada masyarakat yang makmur dan bahagia, jika sebagian besar penduduknya berada dalam kemiskinan dan kesengsaraan.”
————— (Adam Smith, 1776)

Sangat jelas bahwa pembangunan memerlukan pertumbuhan pendapatan (PDRB) yang tinggi. Permasalahan dasarnya adalah siapa yang akan menumbuhkan PDRB, sejumlah besar masyarakat yang ada dalam suatu wilayah atau hanya segelintir orang di dalamnya (Todaro dan Smith, 2006). Apabila yang menumbuhkannya hanyalah orang-orang kaya yang berjumlah sedikit maka yang akan menikmati pertumbuhan itu adalah mereka saja. Tidak mengherankan apabila peningkatan PDRB tidak serta merta menurunkan tingkat kemiskinan di suatu wilayah. Kondisi tersebut juga terlihat di Papua, pertumbuhan pendapatan yang tinggi tidak mampu menurunkan tingkat

kemiskinan dengan cepat. Masih banyak masyarakat yang hidup dalam kemiskinan, kekurangan gizi, tingkat kesehatan yang buruk, pendidikan rendah, angka melek huruf yang rendah, hidup di lingkungan yang buruk, memperoleh penghasilan rendah di sektor pertanian, dan kondisi ketidakmampuan lainnya. Tidak ada masyarakat yang makmur dan bahagia, jika sebagian besar penduduknya berada dalam kemiskinan dan kesengsaraan (Adam Smith, 1776), sehingga penanggulangan kemiskinan tetap menjadi tujuan utama pembangunan di berbagai negara.

Masalah ketimpangan pendapatan (moneter) hanyalah sebagian kecil dari persoalan kemiskinan di negara atau wilayah berkembang. Permasalahan yang lebih kompleks adalah ketimpangan kekuasaan, status, gender, partisipasi, kebebasan memilih, dan berbagai dimensi lain yang berkaitan dengan harga diri dan kebebasan untuk memilih. Inilah yang kemudian mendorong berbagai pemikiran mengenai konsep kemiskinan yang lebih luas bahwa sumber moneter (pendapatan) merupakan saran untuk mencapai hasil akhir yang lebih berharga, yaitu kapabilitas. Amartya Sen (1985) mengemukakan bahwa kemiskinan berarti kegagalan untuk memenuhi kapabilitas dasar yaitu kebebasan untuk memenuhi fungsi tertentu, di mana fungsi tersebut terdiri dari berbagai dimensi. Kemiskinan atau kesejahteraan mulai disadari sebagai fenomena multidimensi.

Kemiskinan secara konvensional diukur oleh dimensi moneter (unidimensional) seperti besarnya pendapatan, pengeluaran, atau konsumsi, sehingga seseorang dikatakan miskin apabila tidak mampu memenuhi standar tertentu

seperti garis kemiskinan atau kebutuhan kalori minimum. Menyadari bahwa kemiskinan bersifat multidimensi dan tidak terkait dimensi moneter (ekonomi) saja tetapi juga dimensi sosial bahkan politik, pengukuran kemiskinan nonmoneter (multidimensi) semakin berkembang. Selain menyajikan mengenai perkembangan tingkat kemiskinan yang diukur secara moneter, bab ini juga akan menguraikan pengukuran kemiskinan nonmoneter (multidimensi) di Papua.

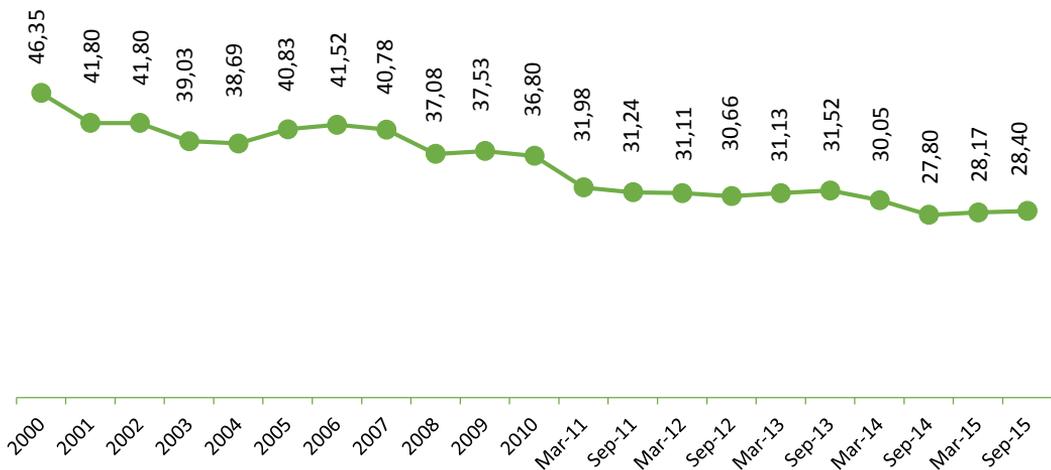
Penduduk Miskin Papua: Permasalahan Pembangunan

Selama lima belas tahun terakhir (2000 – 2015) keadaan kemiskinan di Papua menunjukkan penurunan yang relatif signifikan. Di tahun 2000, persentase penduduk miskin di Papua mencapai 46,35 persen; adapun pada September 2015, persentasenya sebesar 28,40 persen atau turun hampir 18 persen. Meskipun begitu, tingkat kemiskinan di Papua selalu menjadi yang tertinggi di tingkat nasional. Sementara yang terendah adalah di DKI Jakarta dengan persentase penduduk miskin hanya 3,61

persen. Rendahnya tingkat pendidikan, minimnya infrastruktur, dan banyaknya daerah terpencil yang sulit dijangkau dipercaya sebagai faktor penyebab tingginya tingkat kemiskinan di Papua. Hal ini terjadi akibat tidak meratanya

pembangunan antar daerah sehingga timbul disparitas tingkat kemiskinan yang cukup tinggi antara wilayah barat Indonesia dengan wilayah timur Indonesia.

Gambar 7.1 Perkembangan Penduduk Miskin Provinsi Papua, 2000 - 2015



Meskipun mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam 15 tahun terakhir, namun laju penurunan tingkat kemiskinan di Papua melambat selama beberapa tahun terakhir. Persentase penduduk miskin di Papua kondisi Maret 2015 adalah 28,17 persen atau 0,37 persen lebih tinggi dari angka kemiskinan September 2014. Kemudian pada September 2015, angka kemiskinan kembali meningkat 0,23

persen dibandingkan kondisi Maret 2015 menjadi 28,40 persen.

Dilihat menurut daerah tempat tinggalnya, kenaikan angka kemiskinan tersebut dipicu oleh meningkatnya tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan, yakni dari 36,66 persen pada Maret 2015 menjadi sebesar 37,34 persen pada September 2015. Sementara tingkat

kemiskinan di wilayah perkotaan sudah berada di level yang jauh lebih rendah, yakni 3,61 persen. Padahal wilayah perkotaan didiami oleh hanya 28,46 persen penduduk Papua di tahun 2015;

sedangkan 71,54 persen sisanya berada di wilayah perdesaan. Ini menunjukkan betapa luasnya persoalan kemiskinan di wilayah perdesaan Papua.

Tabel 7.1 Perkembangan Penduduk Miskin Menurut Daerah Tempat Tinggal Provinsi Papua, 2010-2015

Tahun	Daerah Tempat Tinggal		Perkotaan + Perdesaan
	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)
2010	5,55	46,02	36,80
Mar-11	4,60	41,58	31,98
Sep-11	4,75	40,53	31,24
Mar-12	4,24	40,55	31,11
Sep-12	5,81	39,39	30,66
Mar-13	6,11	39,92	31,13
Sep-13	5,22	40,71	31,52
Mar-14	4,47	38,92	30,05
Sep-14	4,46	35,87	27,80
Mar-15	4,61	36,66	28,17
Sep-15	3,61	37,34	28,40

Menentukan Jumlah Penduduk Miskin di Papua

Banyaknya penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan (GK) karena penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah GK. GK merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM)

dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). GKM adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi. Sementara GKBM merupakan kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar

nonmakanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 komoditi di perdesaan. Kenaikan harga barang yang terjadi dari tahun ke tahun berpengaruh terhadap besaran GK. Ini karena GK mencerminkan pengeluaran kebutuhan minimum makanan dan nonmakanan yang perlu dikeluarkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Sehingga jika terjadi kenaikan harga pada paket komoditi yang termasuk dalam kebutuhan dasar tersebut maka GK juga akan mengalami kenaikan.

Selama Maret 2015 – September 2015 terjadi kenaikan GK sebesar Rp4.354,- atau sebesar 1,08 persen. Ini sejalan dengan inflasi yang terjadi pada periode tersebut yang berada pada kisaran 1,01 persen. Menurut tipe daerahnya, GK wilayah perkotaan pada September 2015 senilai Rp445.057,- lebih tinggi

dibandingkan GK daerah perdesaan yang hanya Rp392.446,-. Ini menggambarkan penduduk perkotaan perlu mengeluarkan biaya yang lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal yang layak untuk makanan dan bukan makanan dibandingkan penduduk perdesaan. Meskipun begitu, tingkat kemiskinan di perdesaan jauh lebih tinggi dibandingkan persentasenya di perkotaan.

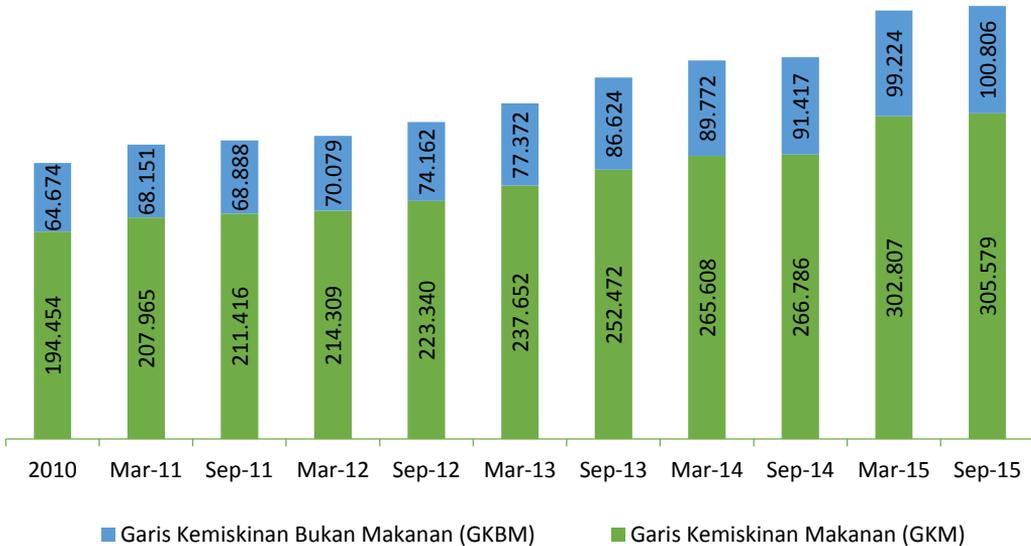
Meneliti peranan pembentuk GK, komponen makanan memiliki peran yang jauh lebih besar daripada peranan komoditi nonmakanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Di bulan September 2015, GKM memberikan kontribusi 75,19 persen (Rp305.579/kapita/bulan) terhadap total GK; adapun sumbangan GKBM terhadap GK adalah 24,81 persen (Rp100.806/kapita/bulan).

Garis Kemiskinan Menurut Daerah Tempat Tinggal Provinsi Papua, 2010-2015

Tabel 7.2

Tahun	Daerah Tempat Tinggal		Perkotaan + Perdesaan
	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)
2010	298 285	247 563	259 128
Mar-11	314 606	262 626	276 116
Sep-11	320 321	266 271	280 302
Mar-12	321 228	271 431	284 388
Sep-12	344 415	281 022	297 502
Mar-13	362 401	298 395	315 025
Sep-13	387 789	322 079	339 096
Mar-14	404 944	338 206	355 380
Sep-14	408 419	340 846	358 204
Mar-15	440 697	388 095	402 031
Sep-15	445 057	392 446	406 385

Gambar 7.2 Garis Kemiskinan Menurut Komponen di Provinsi Papua, 2010 - 2015



Seberapa Parah dan Seberapa Dalam Kemiskinan di Papua?

Persoalan kemiskinan tidak hanya terkait jumlah dan persentase penduduk miskin, tetapi juga perlu dilihat seberapa dalam tingkat kemiskinan masyarakat terhadap garis kemiskinan (kedalaman kemiskinan) dan seberapa besar kesenjangan pendapatan antara penduduk miskin tersebut (keparahan kemiskinan). Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sementara Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index) mencerminkan penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan dari Maret 2007 – September 2015 menunjukkan dua tren berbeda. Pada periode Maret 2007 – September 2014, Indeks Kedalaman Kemiskinan

menunjukkan tren menurun, yakni dari 10,84 pada Maret 2007 menjadi hanya 6,40 pada September 2014. Namun dari periode September 2014 – September 2015, nilainya kembali meningkat bahkan dengan indeks yang lebih tinggi dari indeks di tahun 2009. Ini berarti selama setahun terakhir rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin menjauh dari standar kebutuhan minimum kehidupan layak yang sudah ditentukan. Begitu juga dengan Indeks Keparahan Kemiskinan yang menunjukkan tren meningkat bahkan sejak Maret 2007 – September 2015. Hal ini mengindikasikan semakin lebarnya ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin.

Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan di wilayah perdesaan selalu jauh lebih tinggi dari nilainya di daerah perkotaan. Pada September 2015, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan di wilayah perkotaan hanya 0,35; sedangkan di perdesaan nilainya mencapai 12,46. Ini berarti rata-rata pengeluaran penduduk miskin di daerah perdesaan lebih jauh di bawah garis kemiskinan dibandingkan di wilayah perkotaan. Dengan kata lain, untuk

mengentaskan kemiskinan (membuat rata-rata pengeluaran penduduk miskin setidaknya pada tingkat yang sama dengan garis kemiskinan) di perdesaan diperlukan biaya yang jauh lebih besar. Sama halnya dengan nilai Indeks Keparahan Kemiskinan, dimana pada September 2015 indeks di perkotaan hanya 0,05, namun di daerah perdesaan nilainya mencapai 7,31. Ini

menggambarkan bahwa ketimpangan tingkat pengeluaran antar penduduk miskin di perdesaan lebih besar dari ketimpangan di perkotaan. Dari nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan dapat disimpulkan bahwa masalah kemiskinan di daerah perdesaan jauh lebih memprihatinkan dibandingkan kemiskinan di daerah perkotaan.

Tabel 7.3 **Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Menurut Daerah Tempat Tinggal, Provinsi Papua Maret 2007 - September 2015**

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan			Indeks Keparahan Kemiskinan		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2010	0,78	11,89	9,36	0,17	4,32	3,37
Mar-11	0,70	10,37	7,86	0,15	3,74	2,80
Sep-11	0,84	10,41	7,93	0,24	3,65	2,76
Mar-12	0,65	10,47	7,91	0,14	3,72	2,79
Sep-12	1,27	9,49	7,35	0,48	3,13	2,44
Mar-13	1,11	8,92	6,89	0,29	2,88	2,21
Sep-13	0,48	8,69	6,56	0,10	2,67	2,01
Mar-14	0,72	8,96	6,84	0,17	3,04	2,30
Sep-14	0,48	8,48	6,40	0,10	2,91	2,19
Mar-15	0,79	11,72	8,82	0,21	5,07	3,78
Sep-15	0,35	12,46	9,25	0,05	7,31	5,39

Kemiskinan Kabupaten/Kota di Papua: Semakin Jauh, Semakin Miskin

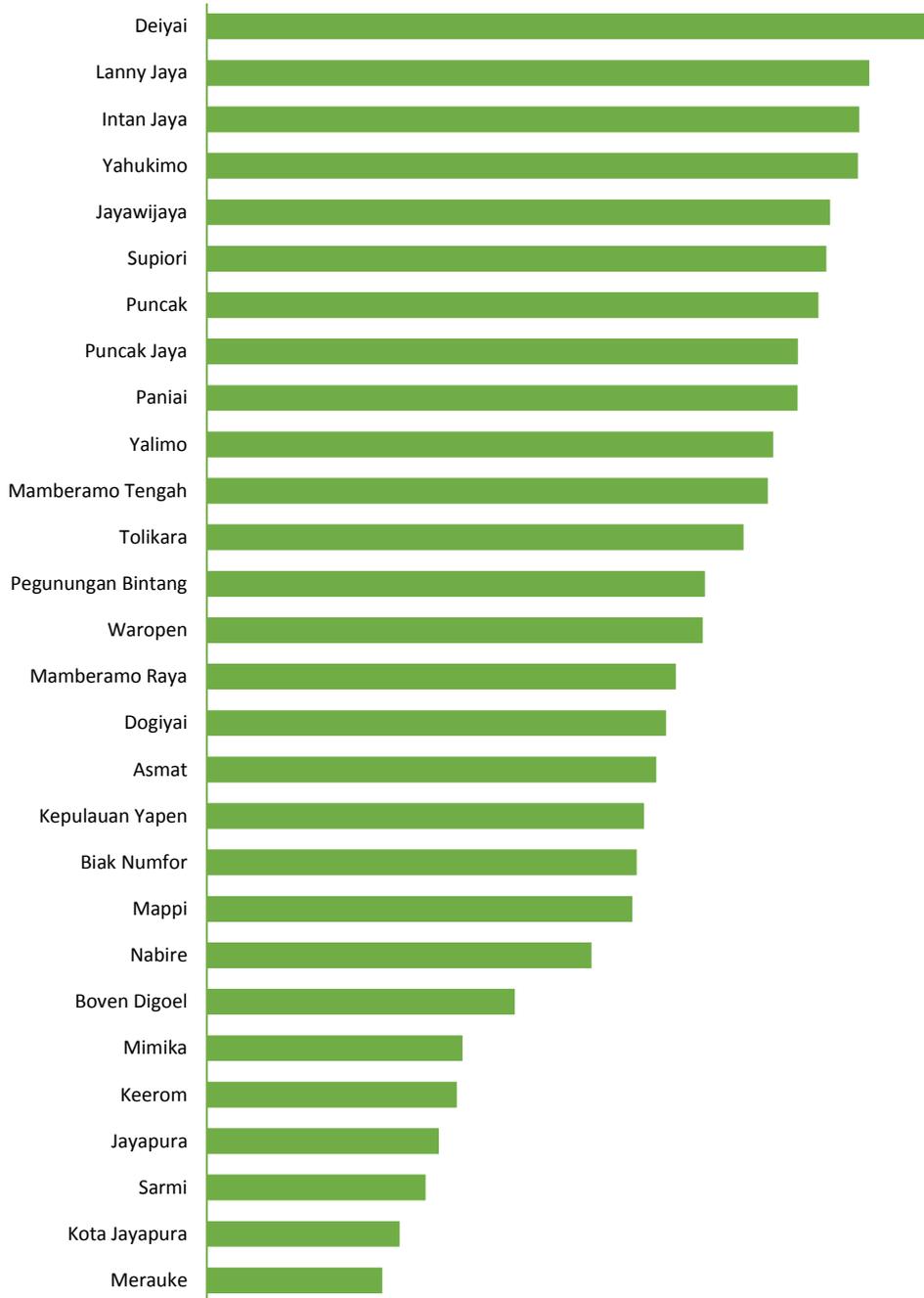
Jumlah penduduk miskin di Papua keadaan bulan september 2013 sebesar 960,56 ribu jiwa, paling banyak berada di kabupaten Jayawijaya (8,85 persen) dan kabupaten Yahukimo (7,92 persen). Apabila dilihat dari besar persentasenya, penduduk miskin Papua sebesar 31,52 persen meningkat dari tahun 2012 (30,66 persen) dengan diikuti peningkatan garis kemiskinan 13,98 persen.

Dari jumlah penduduk masing-masing Kabupaten/ Kota se Papua, Kabupaten Deiyai merupakan kabupaten di Papua dengan persentase penduduk miskin terbanyak, yang mencapai 47,52 persen. Kabupaten Merauke merupakan kabupaten yang memiliki persentase penduduk miskin terkecil, sebesar 12,33 persen. Selain Kabupaten Supiori, sepuluh

kabupaten lain yang mempunyai persentase penduduk miskin terbanyak berada di daerah pegunungan.

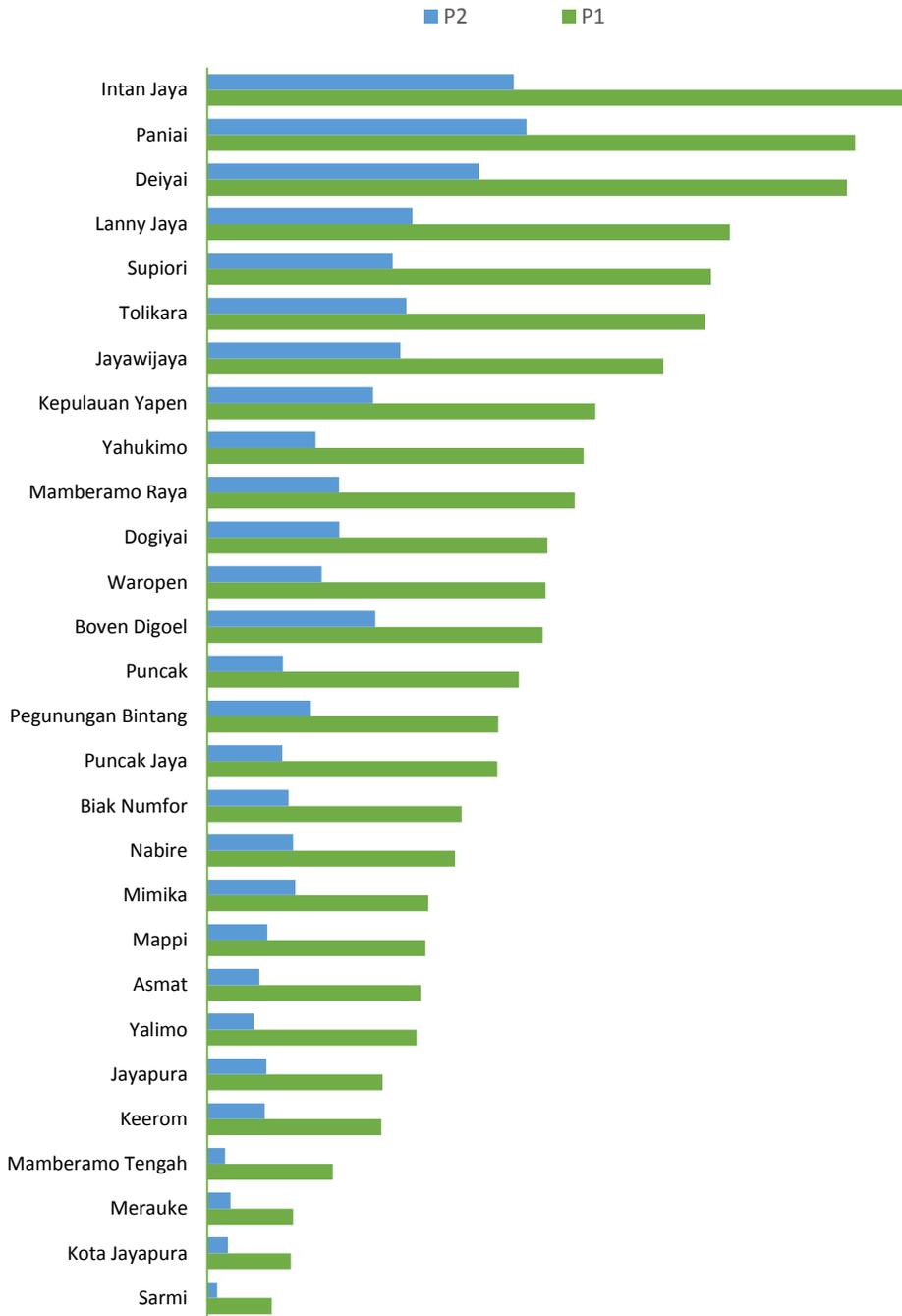
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) tertinggi terdapat di Kabupaten Deiyai, yakni sebesar 16,82 menurun dibanding tahun 2012 (17,94) dengan peningkatan garis kemiskinan 11,11 persen. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) tertinggi terdapat di Kabupaten Intan Jaya, yakni sebesar 8,62 menurun dibanding tahun 2012 (8,85) dengan peningkatan garis kemiskinan 17,15 persen. Penurunan nilai P1 memberi indikasi bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Deiyai semakin mendekati garis kemiskinan. Sedangkan penurunan P2 di Kabupaten Intan Jaya mengindikasikan ketimpangan pengeluaran penduduk miskinnya semakin rendah.

Gambar 7.3 Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2010 - 2015



Keterangan: Data Kabupaten Nduga tidak tersedia

Gambar 7.4 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2010 - 2015



Keterangan: Data Kabupaten Nduga tidak tersedia

Kemiskinan Multidimensi

Provinsi Papua telah mengalami penurunan tingkat kemiskinan yang selama beberapa tahun terakhir di mana tingkat kemiskinan pada tahun 2015 sebesar 28,4 persen. Meskipun demikian, penurunan tingkat kemiskinan cenderung berjalan lambat. Selama lima tahun terakhir, rata-rata penurunan tingkat kemiskinan di Papua sebesar 0,84 persen per tahun. Salah satu penyebab lambatnya tingkat kemiskinan menurut Kartasasmita (2006) adalah masyarakat miskin yang tersisa dan belum dapat dikeluarkan dari kemiskinan adalah mereka yang benar-benar miskin (*poorest of the poor*) yang biasanya telah mengalami kemiskinan dalam jangka waktu yang panjang. Mereka yang tinggal dalam kemiskinan ini pada umumnya mengalami kemiskinan bukan hanya dari segi pendapatan atau moneter namun juga mengalami berbagai kekurangan termasuk kelaparan, malnutrisi, buta huruf, keterbatasan akses terhadap air bersih dan layanan kesehatan,

diskriminasi sosial dan politik, dan rasa tidak aman³. Melihat capaian pembangunan di Papua sejauh ini, ciri kemiskinan seperti inilah yang sangat erat dengan kondisi masyarakat di Papua. Pengukuran kemiskinan secara moneter (pendapatan/pengeluaran/konsumsi) belum cukup mampu memotret kemiskinan yang sifatnya multidimensi yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, budaya, dan dimensi lainnya dalam masyarakat.

Kompleksnya permasalahan kemiskinan mendorong berkembangnya berbagai metode pengukuran kemiskinan nonmoneter, salah satunya adalah metode Alkire-Foster yang juga digunakan UNDP untuk mengukur *Multidimensional Poverty Index (MPI)* atau indeks kemiskinan multidimensi. Metode ini menggunakan pendekatan kapabilitas Amartya Sen, yaitu seseorang dikatakan mengalami kemiskinan secara multidimensi apabila mengalami deprivasi (kekurangan) kapabilitas (kemampuan), sehingga pemilihan dimensi untuk

³ The Chronic Poverty Report 2008-09: Escaping Poverty Traps, CPRC

mengukur deprivasi menjadi sangat penting.

Dimensi yang digunakan untuk mengukur kemiskinan multidimensi di Papua mengacu pada dimensi yang digunakan Alkire dan Foster (2007) untuk menghitung MPI dalam publikasi Laporan Pembangunan Manusia, yaitu dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup dengan beberapa modifikasi. Modifikasi terletak pada titik potong (*cut off*) kemiskinan pada indikator lama sekolah dan partisipasi sekolah, serta indikator yang digunakan dalam dimensi kesehatan.

Setiap dimensi yang digunakan untuk mengukur kemiskinan multidimensi disusun oleh indikator-indikator. Untuk mengukur dimensi pendidikan, indikator yang digunakan adalah lama sekolah dan partisipasi sekolah. Dimensi kesehatan diukur oleh konsumsi kalori dan protein, sementara dimensi standar hidup disusun oleh akses listrik, sumber air minum,

sanitasi, jenis lantai, bahan bakar untuk memasak, dan kepemilikan aset.

Multiple Deprivasi

Multidimensional Poverty Index (MPI) didesain untuk mengukur kemiskinan akut yang mengandung dua karakteristik utama yaitu, pertama, penduduk yang tinggal dalam kondisi di mana mereka tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi standar minum fungsi-fungsi⁴ dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Kedua, penduduk yang hidup dalam kondisi di mana mereka tidak mampu memenuhi standar dalam beberapa fungsi pada saat yang bersamaan. Dengan kata lain, MPI mengukur mereka yang mengalami multi deprivasi (*multiple deprivation*), sebagai contoh, mereka yang kekurangan air bersih, tidak punya sanitasi layak, dan kekurangan konsumsi kalori pada saat yang bersamaan.

⁴ Dalam pendekatan kapabilitas oleh Amartya Sen, fungsi tertentu berarti menjadi dan melakukan apa yang mampu dicapai seseorang.

Tabel 7.4 Persentase Rumah Tangga yang Mengalami Deprivasi Menurut Banyaknya Indikator di Provinsi Papua, 2015

Jumlah Indikator	Daerah Tempat Tinggal		Perkotaan + Perdesaan
	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)
0	36,43	2,61	9,70
1	25,19	4,61	8,93
2	18,01	4,75	7,53
3	10,26	6,08	6,96
4	5,23	9,29	8,44
5	2,15	12,22	10,11
6	0,97	16,24	13,04
7	0,92	18,97	15,18
8	0,77	17,20	13,75
9	0,05	6,59	5,22
10	0,00	1,44	1,14

Kata deprivasi merujuk pada kondisi ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi fungsi-fungsi kapabilitas (kemampuan) dasar yang diwakili oleh sepuluh indikator yaitu lama sekolah, partisipasi sekolah, konsumsi kalori dan protein, akses listrik, sumber air minum, sanitasi, jenis lantai, bahan bakar untuk memasak, dan kepemilikan aset. Rumah tangga dikatakan terdeprivasi apabila tidak mampu memenuhi kondisi tertentu pada setiap indikator dan selanjutnya dikatakan mengalami kemiskinan multidimensi jika mengalami deprivasi minimal pada satu dimensi. Dengan demikian, pengukuran kemiskinan

multidimensi dapat memberikan informasi bahwa rumah tangga dapat mengalami deprivasi atau kemiskinan tidak hanya pada satu dimensi saja.

Hanya sebanyak 9,70 persen rumah tangga di Papua yang sama sekali tidak mengalami deprivasi pada dimensi pendidikan, kesehatan dan nutrisi, maupun standar hidup; sedangkan sisanya mengalami deprivasi minimal pada satu indikator kemiskinan multidimensi. Secara umum, kebanyakan rumah tangga di Papua mengalami kekurangan pada lima hingga delapan indikator.

Ketimpangan antara daerah perkotaan dan perdesaan terlihat jelas dari tabel di atas. Sebesar 36,43 persen rumah tangga di perkotaan tidak mengalami deprivasi pada dimensi manapun sementara di daerah perdesaan, hanya sekitar 3 persen saja rumah tangga yang sama sekali tidak mengalami deprivasi pada dimensi-dimensi tersebut. Rumah tangga perdesaan lebih banyak mengalami kekurangan daripada rumah tangga di perkotaan. Kebanyakan rumah tangga di perdesaan mengalami lima hingga delapan deprivasi, sedangkan rumah tangga di perkotaan terdeprivasi hanya pada satu hingga tiga indikator saja.

Pemerintah sepertinya perlu kerja sedikit lebih keras untuk mencapai tujuan pembangunan mewujudkan Papua bangkit, mandiri, dan sejahtera di segala dimensi. Beberapa capaian indikator kunci pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masih rendah, meskipun mengalami

peningkatan dari tahun ke tahun, sebagaimana yang ditunjukkan oleh tabel di bawah. Dari dimensi pendidikan, capaian partisipasi sekolah sudah cukup baik, hanya 13,4 persen saja rumah tangga di Papua yang dalam satu rumah tangga terdapat anak 7-15 tahun yang tidak bersekolah. Akan tetapi perlu diingat bahwa dalam penghitungan MPI, rumah tangga yang tidak memiliki anak usia sekolah dikategorikan sebagai rumah tangga yang terdeprivasi pada indikator ini. Ini menunjukkan upaya pemerintah untuk mendorong partisipasi sekolah anak melalui berbagai program beasiswa atau sekolah gratis cukup berhasil. Meskipun demikian, pada indikator lama sekolah, sebesar 47 persen rumah tangga di Papua terdeprivasi atau tidak mampu memenuhi fungsi ini. Dengan kata lain, terdapat 47 persen rumah tangga di Papua, dalam satu rumah tangga tidak ada anggota rumah tangga usia 15 tahun ke atas yang menyelesaikan pendidikan sembilan tahun atau lebih.

Status Deprivasi Menurut Indikator Kemiskinan Multidimensi
Provinsi Papua, 2015

Tabel 7.5

Indikator Kemiskinan Mutidimensi	Status		Total
	Tidak terdeprivasi	Terdeprivasi	
(1)	(2)	(3)	(4)
Lama sekolah	53,0	47,0	100,0
Partisipasi sekolah	86,6	13,4	100,0
Kalori	67,1	32,9	100,0
Protein	34,2	65,8	100,0
Akses listrik	51,2	48,8	100,0
Sumber air minum	55,5	44,5	100,0
Sanitasi	24,4	75,6	100,0
Jenis lantai	77,3	22,7	100,0
Bahan bakar memasak	28,0	72,0	100,0
Kepemilikan aset	40,6	59,4	100,0
Lama sekolah	53,0	47,0	100,0

Kesehatan sebagai salah satu modal dasar manusia diukur melalui kecukupan nutrisi terutama yang berasal dari konsumsi kalori dan protein rumah tangga. Pada tahun 2015, masih terdapat 33 persen rumah tangga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nutrisi kalori dan sekitar 66 persen rumah tangga tidak mampu memenuhi kebutuhan protein. Konsumsi protein yang sesuai dengan angka kecukupan gizi merupakan isu yang penting dalam kemiskinan karena erat kaitannya dengan kemungkinan seseorang mengalami malnutrisi terutama pada anak-anak. anak-anak yang berasal

dari rumah tangga dengan status nutrisi buruk cenderung memiliki performa akademik yang lebih rendah daripada anak-anak dengan status nutrisi yang baik (Hamid *et al.*, 2011).

Status kemiskinan erat kaitannya dengan karakteristik perumahan seperti jenis atap, dinding, lantai, air layak minum, sanitasi, dan akses terhadap listrik. Persentase rumah tangga di Papua yang terdeprivasi pada indikator-indikator tersebut masih sangat besar. Akses terhadap listrik merupakan indikasi awal kemajuan pembangunan suatu wilayah.

Data di atas menunjukkan, hampir separuh rumah tangga di Papua tidak memiliki akses terhadap listrik, padahal listrik sangat penting sebagai penunjang pendidikan, khususnya bagi rumah tangga yang memiliki anak sekolah.

Persentase rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap sumber air minum layak juga masih cukup besar. Sekitar 45 persen rumah tangga di Papua mengkonsumsi air tidak layak sebagai sumber utama air minum sehari-hari. Kondisi tersebut diperparah dengan kurangnya akses masyarakat terhadap sanitasi layak. Lebih dari 75 persen rumah tangga tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan mereka terhadap sanitasi layak. Padahal persoalan air dan sanitasi layak sangat erat kaitannya dengan status kesehatan rumah tangga yang akan berdampak pada pencapaian kesejahteraan rumah tangga. Di Indonesia pada umumnya, diare masih merupakan penyebab utama kematian anak di bawah lima tahun, di mana penyebab terbesar kejadian diare adalah ketiadaan akses terhadap sumber air minum dan sanitasi layak (Unicef, 2012).

Indikator selanjutnya adalah kepemilikan aset dan bahan bakar untuk memasak. Hampir 60 persen rumah tangga di Papua tidak memiliki lebih dari satu aset rumah tangga seperti tabung gas 5,5 kg atau lebih; lemari es; AC; pemanas air; telepon rumah; komputer/laptop; emas/perhiasan; sepeda motor; perahu; perahu motor; dan mobil. Kepemilikan aset merupakan indikator yang dapat mencerminkan kemampuan finansial rumah tangga dan akses terhadap berbagai fasilitas seperti listrik. Selanjutnya, UNDP (2005) menyatakan, selain sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, energi diperlukan sebagai sumber memasak dan penerangan sehingga apabila rumah tangga tidak mampu memenuhi kebutuhan bahan bakar memasak yang modern, rumah tangga tersebut dikatakan mengalami kemiskinan energi (Tumiwa dan Imelda, 2011). Pada kenyataannya, lebih dari 70 persen rumah tangga di Papua masih menggunakan kayu bakar dan sejenisnya sebagai bahan bakar utama untuk memasak, padahal penggunaannya dalam jangka waktu yang lama akan mengganggu kesehatan anggota rumah tangga

khususnya perempuan, yang frekuensi terpaparnya lebih tinggi daripada laki-laki. Selain itu, penggunaan kayu sebagai bahan bakar yang tidak terkontrol dapat mengganggu keberlanjutan sumber daya hutan. Tingginya persentase rumah tangga yang masih menggunakan biomassa sebagai bahan bakar untuk memasak juga mengindikasikan tingkat kemiskinan yang tinggi, karena jenis ini harganya cenderung lebih murah dan mudah didapat di pasaran.

Gambaran di atas ingin menunjukkan bahwa apabila kemiskinan dipandang sebagai suatu bentuk kekurangan atau deprivasi dari salah satu indikator di atas, maka dengan melihat tingginya proporsi rumah tangga yang mengalami deprivasi pada berbagai indikator tersebut, kemiskinan akan tetap menjadi isu utama di Papua apabila inti penyebab kemiskinan tidak diselesaikan.

Tingkat Kemiskinan Multidimensi:

Fenomena Perdesaan

Rumah tangga dikatakan mengalami kemiskinan multidimensi apabila

terdeprivasi minimal pada satu dimensi manapun. Dengan melakukan perbandingan terhadap titik potong tertentu, maka diperoleh tiga indikator kemiskinan multidimensi yaitu *headcount ratio* atau proporsi rumah tangga miskin multidimensi (H), intensitas kemiskinan atau rata-rata deprivasi rumah tangga miskin (A), dan tingkat kemiskinan multidimensi yang telah disesuaikan intensitasnya (MPI).

Headcount ratio memiliki arti yang sama seperti pada pengukuran moneter yaitu menunjukkan seberapa banyak penduduk yang berada di bawah titik potong (*cut off*) atau dalam pengukuran ini adalah proporsi penduduk yang tidak mampu memenuhi minimal satu fungsi dimensi. Intensitas kemiskinan menunjukkan rata-rata deprivasi yang dialami penduduk miskin, yang juga dapat menunjukkan kedalaman (*breath of deprivation*). Indikator ini akan lebih bermakna ketika dibandingkan pada dua populasi atau subpopulasi, misalkan perkotaan dan perdesaan; laki-laki dan perempuan; antar provinsi; dan lain sebagainya. Apabila kedua indikator tersebut dikombinasikan

maka diperoleh tingkat kemiskinan multidimensi yang telah disesuaikan intensitasnya. Tidak seperti *headcount ratio* yang tidak akan mengalami perubahan ketika penduduk miskin terdeprivasi pada indikator yang lebih banyak, indikator ini akan mengalami perubahan apabila penduduk miskin mengalami pengurangan atau penambahan deprivasi.

Pada tahun 2015, hampir 71 persen penduduk di Papua miskin secara multidimensi. Dalam konsep MPI, ini berarti mereka berada dalam kemiskinan akut. Penduduk miskin multidimensi dapat terdeprivasi minimal pada satu dimensi tunggal, misalkan hanya pada dimensi pendidikan, atau kombinasi dari beberapa indikator dari ketiga dimensi. Apabila 71 persen penduduk miskin tersebut semuanya terdeprivasi pada seluruh indikator maka intensitas kemiskinan akan sama dengan satu, sehingga MPI akan bernilai sama dengan *headcount ratio*. Dari hasil pengukuran, dari 71 persen penduduk yang miskin multidimensi, tidak semua penduduk terdeprivasi pada semua indikator atau

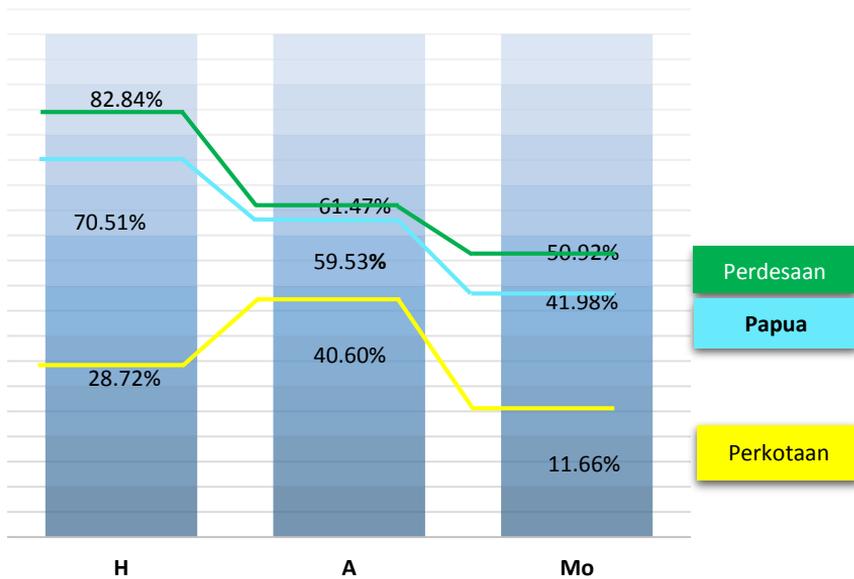
semua dimensi tersebut, rata-rata penduduk miskin terdeprivasi sebesar 59,53 persen dari sepuluh indikator yang digunakan dalam pengukuran ini, sehingga tingkat kemiskinan multidimensi yang telah disesuaikan intensitasnya (MPI) sebesar 41,98 persen.

World Bank (2009) mengemukakan bahwa kemiskinan di Asia pada dasarnya merupakan fenomena perdesaan bahkan di beberapa negara, 80 hingga 90 persen penduduk miskin berada di daerah perdesaan. Fenomena tersebut juga terlihat di Papua. Proporsi penduduk miskin multidimensi di perdesaan jauh lebih tinggi daripada perkotaan. Gambar di atas menunjukkan bahwa sebesar 82,84 persen penduduk perdesaan miskin secara multidimensi sementara hanya 28,72 persen saja penduduk perkotaan yang miskin multidimensi. Bahkan kemiskinan yang dialami penduduk miskin perdesaan lebih dalam daripada penduduk miskin di perkotaan. Ini terlihat dari besarnya intensitas kemiskinan di perdesaan yaitu 61,47 persen dibandingkan intensitas kemiskinan perkotaan yang hanya sebesar 40,60

persen. dengan kata lain, penduduk miskin perdesaan mengalami deprivasi pada indikator yang lebih banyak daripada penduduk miskin perkotaan. Dengan proporsi dan intensitas kemiskinan yang

lebih tinggi dari daerah perkotaan, maka tingkat kemiskinan multidimensi di daerah perdesaan sebesar 50,92 persen, jauh lebih tinggi daripada daerah perkotaan sebesar 11,66 persen.

Gambar 7.5 Komposisi Headcount Ratio (H), Intensitas Kemiskinan (A), dan Tingkat Kemiskinan Multidimensi (MPI) Provinsi Papua, 2015



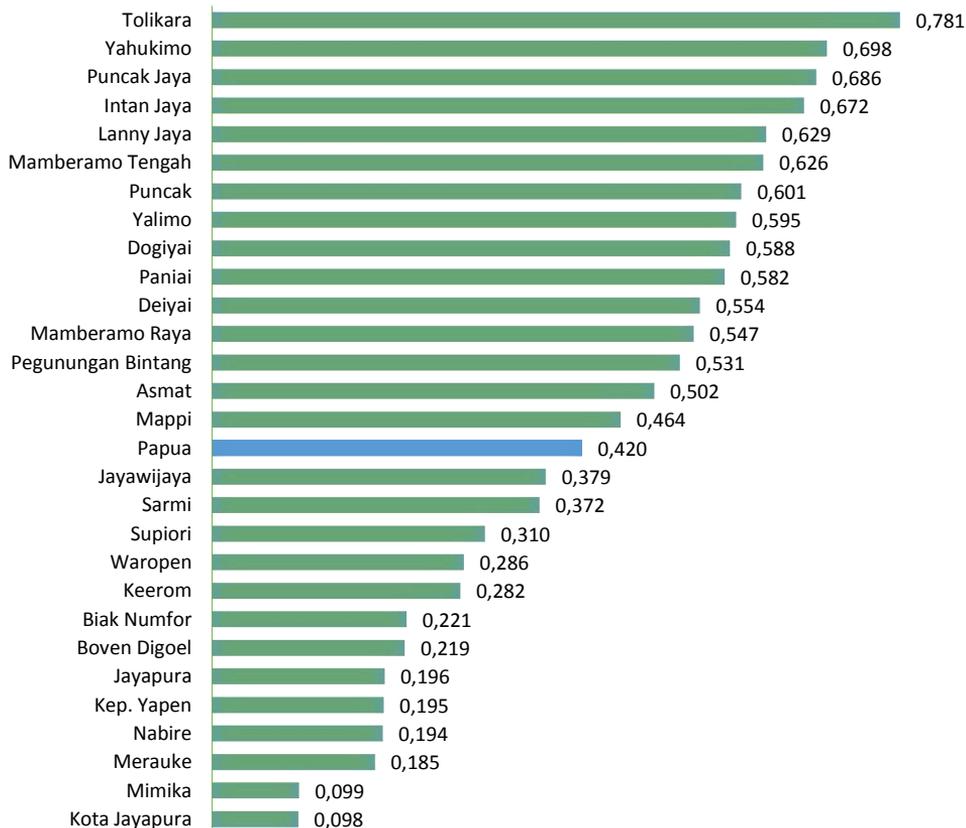
Gambar di atas juga dapat digunakan untuk menentukan arah kebijakan dalam rangka mereduksi tingkat kemiskinan multidimensi menurut daerah tempat tinggal di Indonesia. Garis merah menunjukkan nilai indikator H dan A pada daerah perkotaan dan garis ungu menunjukkan nilai indikator H dan A pada daerah perdesaan. Terlihat bahwa di

daerah perdesaan, selain proporsi rumah tangga miskin yang tinggi, intensitas kemiskinan juga relatif tinggi dan tidak terlalu jauh berbeda, sementara rumah tangga di daerah perkotaan memiliki proporsi penduduk miskin yang tidak terlalu besar dengan intensitas kemiskinan yang relatif lebih rendah daripada intensitas kemiskinan daerah

perdesaan. Dengan demikian, untuk mereduksi tingkat kemiskinan multidimensi (MPI) di daerah perdesaan adalah dengan terlebih dahulu mereduksi proporsi penduduk miskin multidimensi kemudian intensitas kemiskinan yang

dialami, sementara di daerah perkotaan adalah mereduksi terlebih dahulu intensitas kemiskinan kemudian mereduksi proporsi rumah tangga miskin multidimensi.

Gambar 7.6 Tingkat Kemiskinan Multidimensi (MPI) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua, 2015



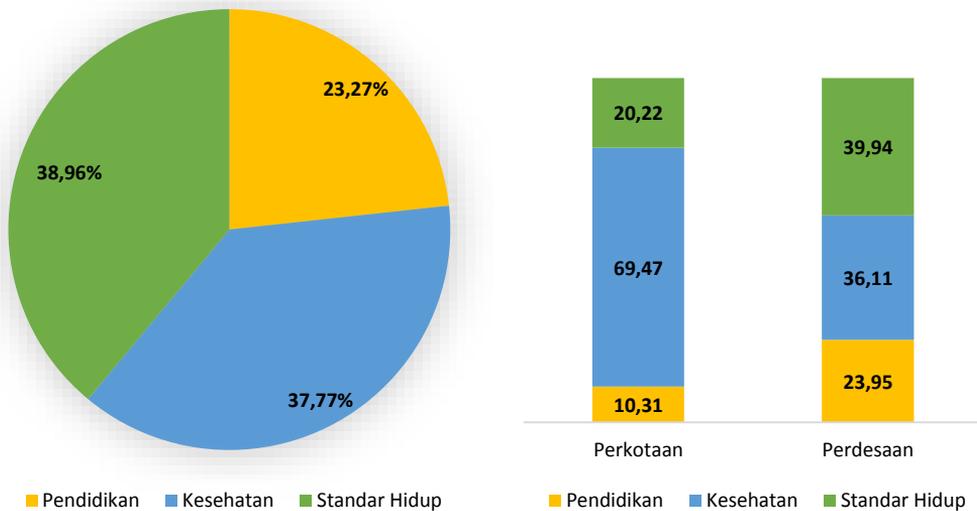
Variasi tingkat kemiskinan multidimensi (MPI) juga terlihat antar kabupaten/kota di wilayah Papua. secara umum, wilayah

pegunungan memiliki tingkat kemiskinan multidimensi yang relatif lebih tinggi daripada wilayah pesisir. Pada tahun

2015, Kota Jayapura merupakan kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan multidimensi paling rendah yaitu 9,8 persen, bahkan jauh lebih rendah daripada angka provinsi. Sementara Kabupaten Tolikara merupakan kabupaten dengan tingkat kemiskinan multidimensi tertinggi di Papua yaitu

sebesar 78,1 persen. Timpangnya akses masyarakat terhadap berbagai infrastruktur dasar untuk pendidikan dan kesehatan diduga menjadi faktor penyebab tingginya kemiskinan multidimensi di wilayah pegunungan dibandingkan wilayah pesisir.

Gambar 7.7 Kontribusi Dimensi Terhadap Tingkat Kemiskinan Multidimensi Menurut Tempat Tinggal Provinsi Papua, 2015



Dimensi pendidikan memberikan kontribusi paling besar terhadap tingkat kemiskinan multidimensi di Papua, meskipun tidak terlalu jauh berbeda dengan kontribusi dimensi kesehatan. Pendidikan memberikan kontribusi

sebesar 38,96 persen sedangkan kesehatan memberikan kontribusi sebesar 37,77 persen. sementara itu, dimensi standar hidup memberikan sumbangan sebesar 23,27 persen terhadap kemiskinan multidimensi yang dialami

oleh penduduk miskin di Papua. ini mengindikasikan bahwa persoalan pendidikan dan kesehatan masih menjadi isu yang sangat penting dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan yang tinggi di Papua. sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, ciri kemiskinan di Papua adalah kemiskinan akut yang sudah berlangsung antar generasi sehingga untuk memutus rantai kemiskinan, upaya yang harus dilakukan adalah meningkatkan modal dasar manusia lewat pembangunan pendidikan dan kesehatan yang terus menerus.

Ada perbedaan penyebab kemiskinan multidimensi yang dialami penduduk perkotaan dan perdesaan. Kontribusi dimensi pendidikan, kesehatan dan nutrisi, serta standar hidup terhadap kemiskinan multidimensi penduduk perdesaan hampir merata yaitu masing-masing sekitar 30 persen, sedangkan di perkotaan kontribusi dimensi kesehatan dan nutrisi sangat dominan. Hampir 70 persen kemiskinan multidimensi yang dialami penduduk perkotaan disebabkan ketidakmampuan penduduk kota untuk memenuhi fungsi kesehatan dan nutrisi

dalam hal ini kebutuhan kalori dan protein ideal. Ini berarti permasalahan kemiskinan multidimensi di perdesaan lebih kompleks daripada di perkotaan karena penduduk miskin multidimensi di perdesaan terdeprivasi pada hampir semua dimensi. Sementara fokus pemerintah untuk daerah perkotaan adalah pada masalah memenuhi kemampuan penduduk untuk mencukupi kebutuhan kesehatan dan nutrisinya.

Alarm Pembangunan: Ketimpangan

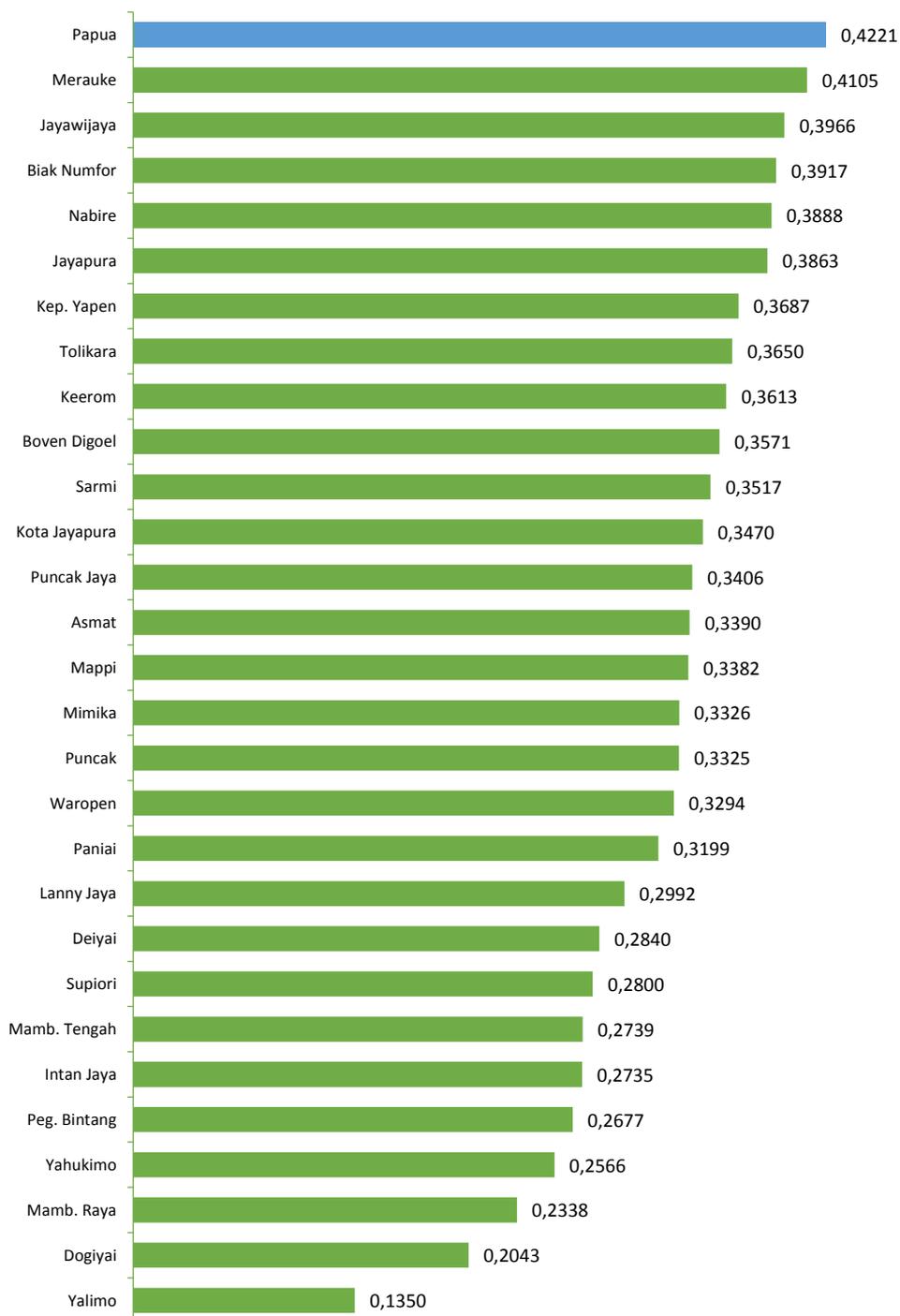
Salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh adalah koefisien Gini. Koefisien ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu dengan distribusi Uniform yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1, jika koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan jika koefisien Gini bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna.

Berdasarkan hasil Susenas, nilai koefisien Gini Papua pada tahun 2015 adalah 0,4221 yang berarti ketimpangan pendapatan di provinsi ini digolongkan dalam kelompok ketimpangan menengah. Nilai koefisien Gini di Papua cukup bervariasi antar kabupaten/kota. Ketimpangan pendapatan paling tinggi yang ditunjukkan oleh nilai koefisien Gini yang lebih tinggi ada di Kabupaten Merauke yaitu sebesar 0,4105; Jayawijaya sebesar 0,3966; dan Biak Numfor sebesar 0,3917, sedangkan ketimpangan

pendapatan paling rendah adalah Kabupaten Yalimo yaitu sebesar 0,1350.

Angka gini rasio mengindikasikan adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Gini rasio juga digunakan untuk melihat apakah pemerataan pengeluaran penduduk semakin baik atau buruk. Dibandingkan tahun sebelumnya, gini rasio Provinsi Papua mengalami peningkatan dari 0,410 menjadi 0,4221, ini mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran penduduk pada periode tersebut semakin memburuk.

Gambar 7.8 Gini Ratio Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2015



Tantangan: Mengurangi si Miskin

Persoalan kemiskinan di Papua merupakan hal yang kompleks. Pengukuran kemiskinan secara moneter maupun non moneter (multidimensi) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Papua sangat tinggi. Ini berarti penduduk miskin di Papua adalah mereka yang memiliki pendapatan rendah dan standar hidup yang buruk, yang tercermin dari kesehatan dan gizi, dan pendidikan yang rendah. Akibatnya adalah rendahnya produktivitas ekonomi mereka dan akibat secara tidak langsung maupun langsung adalah perekonomian dapat tumbuh lambat, sehingga tantangan yang dihadapi ke depan adalah meningkatkan pendapatan dan standar hidup mereka. Ini tidak hanya akan memperbaiki tingkat kesejahteraan mereka bahkan dapat mendorong produktivitas dan pendapatan seluruh perekonomian Papua. Untuk meningkatkan standar hidup penduduk miskin adalah melalui peningkatan kapasitas atau modal dasar melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan. Hasil pengukuran kemiskinan multidimensi menunjukkan bahwa kedua

dimensi tersebut merupakan permasalahan utama kemiskinan akut di Papua. Indikator kemiskinan multidimensi yaitu *headcount ratio* (H) dan intensitas kemiskinan (A) memberikan implikasi kebijakan yang berbeda. Di daerah perdesaan, *headcount ratio* relatif lebih tinggi daripada intensitas kemiskinan, sehingga kebijakan yang dapat diambil untuk mereduksi tingkat kemiskinan di daerah perdesaan adalah dengan mereduksi proporsi penduduk yang miskin multidimensi, kemudian intensitas kemiskinan yang dialami rumah tangga miskin, sehingga tingkat kemiskinan multidimensi akan turun. Salah satu cara untuk mereduksi proporsi rumah tangga miskin di perdesaan adalah pemberian bantuan pengentasan kemiskinan yang langsung diterima rumah tangga, misalnya beasiswa untuk siswa miskin. Sementara itu, karena intensitas kemiskinan konteksnya adalah daerah maka kebijakannya, sebagai contoh dapat melalui pembangunan infrastruktur pendidikan, seperti sekolah khususnya untuk pendidikan menengah ke atas, dan penyaluran air layak konsumsi bagi rumah tangga perdesaan.

**EKONOMI
PAPUA:
MASIHKAH
PERTANIAN?**

8

EKONOMI PAPUA: MASIHKAH PERTANIAN?

“Teori pertumbuhan tradisional mengasumsikan adanya fungsi agregat yang menggambarkan alokasi optimal dari sumber daya dalam perekonomian.”

————— (Banerjee & Duflo, 2004)

Pada hakikatnya, pembangunan ekonomi adalah seluruh rangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional, dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Artinya, pembangunan ekonomi mengusahakan peningkatan pendapatan masyarakat yang disertai dengan pemerataan yang sebaik mungkin.

Sejak dahulu para ekonom telah mencoba mengembangkan berbagai pemikiran

mengenai proses pertumbuhan suatu negara, sumber-sumber pertumbuhan dan mekanismenya. Teori pertumbuhan tradisional mengasumsikan adanya fungsi agregat yang menggambarkan alokasi optimal dari sumber daya dalam perekonomian (Banerjee & Duflo, 2004). Upaya untuk mendefinisikan pertumbuhan ekonomi pun semakin banyak dilakukan oleh para ekonom dan peneliti, di mana modal manusia mulai ditempatkan sebagai bagian penting dari komponen pertumbuhan.

Dasar pemikiran mengenai modal manusia ini bersandar pada teori Schultz pada tahun 1960an bahwa investasi pada

pendidikan akan meningkatkan output pertanian. Schultz menunjukkan bahwa kontribusi modal manusia pada perekonomian Amerika Serikat lebih besar daripada kontribusi modal fisik seperti tanaman baru atau mesin. Adapun menurut Becker (1992) investasi pada modal manusia dapat berupa pengeluaran pada pendidikan, pelatihan, dan pemeliharaan kesehatan.

Pembangunan seringkali diukur melalui angka pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, semakin baik pembangunan berlangsung di suatu negara, meskipun pertumbuhan ekonomi yang tinggi seringkali tidak disertai dengan pembangunan di sektor lain, misalnya tingkat pengangguran dan kemiskinan yang masih tinggi, masih banyak penduduk yang tidak memiliki akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang layak, maupun berbagai dimensi pembangunan yang lain.

Dengan demikian, tidak cukup mengukur perkembangan ekonomi di suatu wilayah melalui satu indikator misalnya pertumbuhan ekonomi, karena pada

dasarnya sumber pertumbuhan ekonomi juga berasal dari faktor-faktor sosial bahkan kebijakan politik. Bab ini akan menguraikan kondisi perekonomian Papua yang dilihat dari indikator pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita, sementara faktor-faktor lain terkait perekonomian Papua seperti ketenagakerjaan, pendidikan, maupun kemiskinan akan diuraikan pada bab lainnya.

Perekonomian Papua: Gambaran Umum

Perekonomian Papua pada tahun 2015 mencatat perkembangan yang positif, yang ditunjukkan oleh peningkatan beberapa indikator ekonomi. *Pertama*, pertumbuhan ekonomi dengan tambang mengalami percepatan hingga 7,97 persen sementara pertumbuhan ekonomi tanpa tambang tumbuh lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 laju pertumbuhan ekonomi Papua tanpa tambang tercatat sebesar 8,11 persen, sedikit lebih rendah daripada laju pertumbuhan tahun 2014 yaitu sebesar 8,81 persen.

Untuk menggambarkan perekonomian Papua yang lebih *real*, sektor pertambangan dan penggalian perlu dieliminir karena sebagian besar nilai tambah dari sektor tersebut tidak dinikmati oleh masyarakat Papua. Jika demikian, struktur ekonomi Papua masih didominasi oleh sektor pertanian. Hal tersebut tercermin dari besarnya kontribusi sektor tersebut (13,38 persen) terhadap nilai PDRB Papua.

Kedua, neraca perdagangan Papua menunjukkan surplus sebesar 1.260,7 USD di mana nilai ekspor Papua pada tahun 2015 tercatat sebesar 2.007,37 juta USD mengalami peningkatan sekitar 31,23 persen dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 1.529,67 USD. Sementara itu, nilai impor Papua pada tahun yang sama turun sekitar 26 persen dari 1.014,47 USD pada tahun 2014 menjadi 746,72 USD di tahun 2015.

Tabel 8.1 Perkembangan Beberapa Indikator Ekonomi Papua, 2011-2015

Indikator Ekonomi	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertumbuhan Ekonomi (%)					
Dengan tambang	-4,28	1,72	8,55	3,81	7,97
Tanpa tambang	9,67	8,98	8,21	8,81	8,11
PDRB Harga Berlaku (Juta Rp)					
Dengan tambang	108 188 756,4	112 812 560,5	122 857 170,5	133 539 410,7	152 125 954,9
Tanpa tambang	57 867 288,36	66 200 779,31	74 601 795,16	87 399 803,16	102 540 120,40
PDRB Harga Konstan (Juta Rp)					
Dengan tambang	106 066 723,39	107 890 942,59	117 118 818,90	121 580 118,76	131 270 876,27
Tanpa tambang	56 057 784,99	61 089 708,40	66 107 672,48	71 930 945,90	77 764 599,15
PDRB per kapita harga berlaku (Juta Rp)					

Tabel 8.1 Lanjutan

Indikator Ekonomi	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Dengan tambang	37 111,15	37 935,01	40 513,65	43 202,00	48 303,54
Inflasi (%)	3,40	4,52	8,27	7,98	2,79
Neraca Perdagangan Luar					
Ekspor (Juta US\$)	3 657,4	2 116,5	2 728,0	1 529,7	2 007,4
Impor (Juta US\$)	1 112,9	1 022,8	506,4	1 014,5	746,7
Investasi					
PMDN (Miliar Rp)	3 263,4	8 535,5	10 679,6	19 137,38	n.a.
PMA (Juta US\$)	8 596,4	11 120,0	18 545,1	29 563,67	n.a.

Indikator ketiga adalah inflasi yang menunjukkan pergerakan harga barang dan jasa di kota inflasi. Inflasi Kota Jayapura pada tahun 2015 (yoy) sebesar 2,79 persen dan berada dalam kisaran sasaran inflasi 2015 yaitu 4±1%. Selanjutnya, kondisi perbankan dan penanaman modal Papua juga menunjukkan peningkatan positif. Nilai investasi dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PDMA) dan Penanaman Modal Asing (PMA) tahun 2014 meningkat masing-masing sekitar 80 persen dan 60 persen. Pada tahun 2014 PMDN mencapai

19,14 triliun rupiah sementara PMA mencapai 29,56 miliar USD.

Struktur Ekonomi Papua: Dominasi Sektor Pertanian

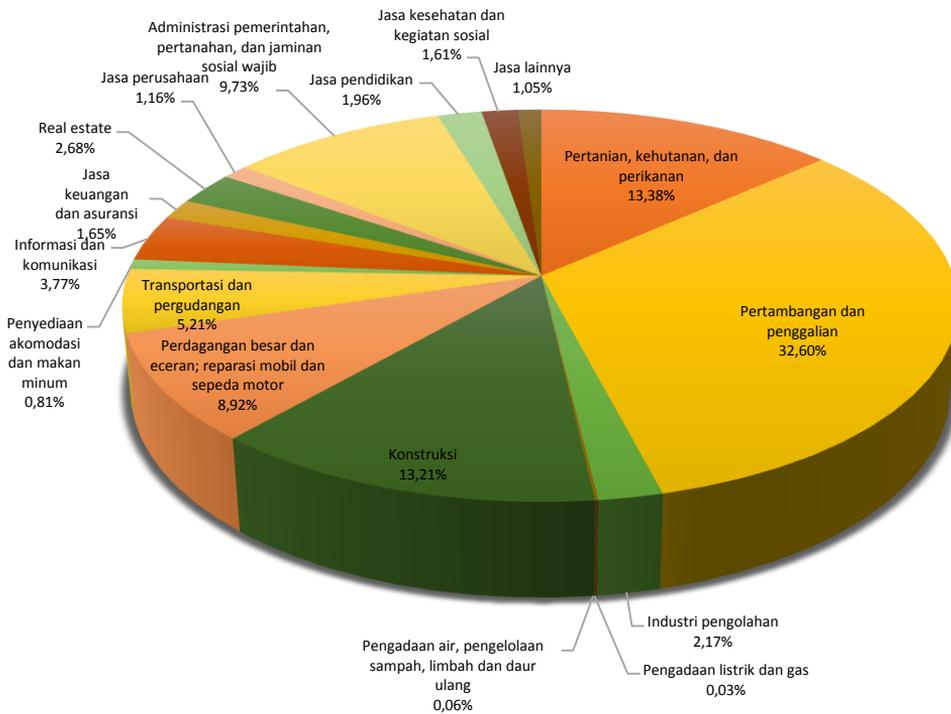
Ketika menilai apakah perekonomian di suatu wilayah berlangsung baik atau buruk, yang dilihat adalah total pendapatan yang diperoleh semua orang dalam perekonomian. Inilah yang diukur oleh Produk Domestik Bruto (PDB). PDB mengukur dua hal pada saat yang bersamaan yaitu total pendapatan semua

orang dalam perekonomian dan total pembelanjaan negara untuk membeli barang dan jasa hasil dari perekonomian, karena pada dasarnya untuk suatu perekonomian secara keseluruhan, pendapatan akan sama persis dengan pengeluaran. Selanjutnya, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) didefinisikan sebagai nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul sebagai akibat dari berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan faktor produksi yang dimiliki residen atau bukan residen.

Untuk mendapatkan ukuran dari jumlah produksi yang tidak dipengaruhi oleh perubahan harga, digunakan ukuran PDRB riil yang menilai produksi barang dan jasa pada harga tetap (konstan), sementara PDRB nominal digunakan untuk menilai produksi barang dan jasa dengan harga-harga di masa sekarang. Dengan demikian PDRB riil dapat digunakan untuk

mengukur laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor sedangkan PDRB nominal bertujuan untuk melihat struktur perekonomian suatu daerah.

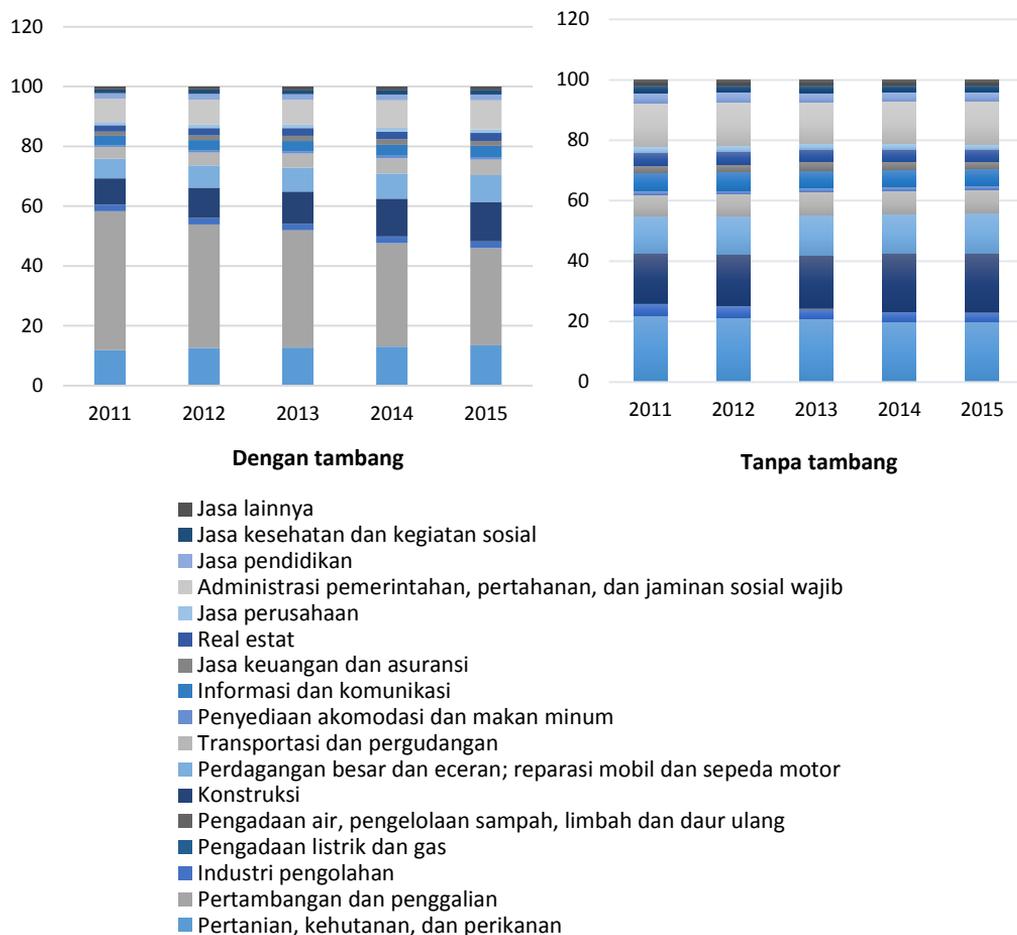
Nilai PDRB nominal Papua selama periode 2011 hingga 2015 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, PDRB Papua sebesar 152.125,95 miliar rupiah meningkat sebesar 40,61 persen dibandingkan tahun 2011. Peningkatan nilai tersebut berasal dari perubahan harga dan juga perubahan volume produksi. Sementara itu, apabila dilihat menurut nilai riil, perkembangan ekonomi Papua juga mengalami perkembangan yang positif di mana nilai PDRB riil Papua pada periode yang sama juga menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2015, PDRB riil Papua sebesar 131.270,88 miliar rupiah meningkat 23,76 persen dari tahun 2011. Berbeda dengan nilai PDRB nominal, peningkatan nilai tersebut berasal hanya dari peningkatan volume produksi.



Dominasi perekonomian Papua pada tahun 2015 masih berasal dari sektor pertambangan dan penggalian (32,60 persen) diikuti oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (13,38 persen); sektor konstruksi (13,21 persen); sektor administrasi pemerintahan, pertanahan, dan jaminan sosial wajib (9,73 persen); dan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor yaitu sebesar 8,92 persen. Sementara kontribusi sektor lainnya masing-masing

di bawah enam persen. Selanjutnya, Gambar 7.3 menunjukkan perkembangan peranan atau kontribusi masing-masing sektor selama kurun waktu lima tahun terakhir. Dari gambar tersebut terlihat bahwa kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap perekonomian Papua mengalami penurunan sementara kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan serta sektor konstruksi terus mengalami peningkatan.

Gambar 8.2 Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Papua, 2011-2015



Nilai produksi dari sektor pertambangan dan penggalian sangat besar sehingga struktur perekonomian Papua sangat dipengaruhi oleh sektor ini. Produksi dari sektor pertambangan dan penggalian tidak stabil karena tergantung dari kandungan tambang yang tidak pasti, sehingga ketika produksi dari tambang dan penggalian turun, perekonomian Papua secara keseluruhan akan terlihat

seolah-olah tidak stabil. Oleh sebab itu, untuk melihat peranan maupun perkembangan perekonomian Papua yang ‘sebenarnya’, sektor pertambangan dan penggalian perlu dikeluarkan dari analisis.

Struktur ekonomi Papua tanpa pertambangan dan penggalian selama periode 2011 hingga 2015 tidak mengalami pergeseran. Sektor pertanian,

kehutanan, dan perikanan masih memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Papua, meskipun selama periode tersebut peranan sektor tersebut terus mengalami penurunan dari 22,06 persen pada 2011 menjadi 19,85 persen pada 2015. Kontributor terbesar kedua terhadap PDRB Papua selama kurun waktu lima tahun terakhir adalah sektor konstruksi. Peranan sektor ini terhadap perekonomian Papua mengikuti tren positif yang ditunjukkan oleh meningkatnya kontribusi sektor tersebut dari 17,16 persen pada 2011 menjadi 19,39 persen pada tahun 2015. Hal ini menjadi indikasi bahwa kegiatan pembangunan fisik di Papua terus mengalami peningkatan.

Selama lima tahun terakhir, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib menempati urutan ketiga sebagai kontributor terhadap PDRB Papua. Sektor ini memberikan andil sebesar 14,44 persen pada tahun 2015 berfluktuasi selama lima tahun terakhir. Fluktuasi juga terlihat pada sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor yang

memberikan kontribusi sebesar 13,24 persen pada tahun 2015.

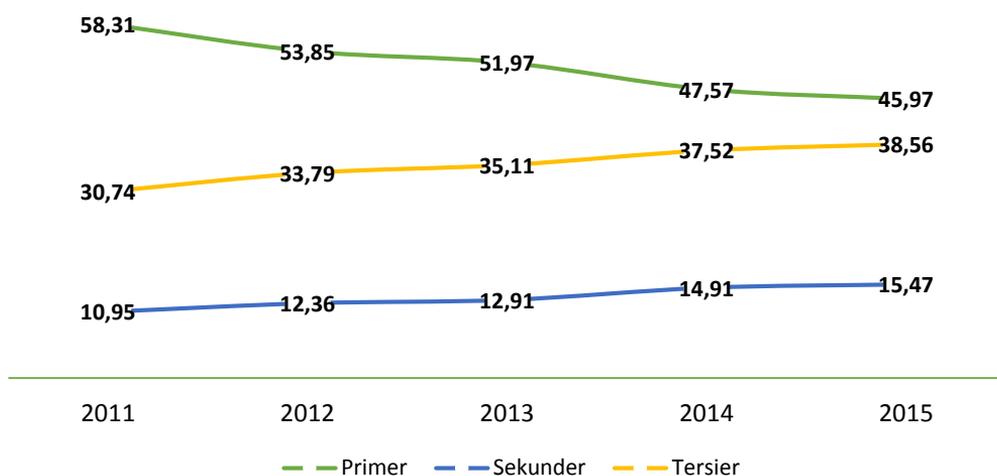
Dua sektor lainnya yang memberikan andil cukup besar terhadap perekonomian Papua selama periode 2011-2015 adalah sektor transportasi dan pergudangan serta sektor informasi dan komunikasi. Peranan dua sektor ini terhadap perekonomian Papua pada tahun 2015 masing-masing sebesar 7,72 persen dan 5,60 persen. Sementara itu, peranan 11 sektor lainnya terhadap total PDRB Papua pada periode yang sama masing-masing kurang dari empat persen.

Dari Sektor Primer ke Sektor Sekunder dan Tersier

Pada awal bab ini telah dikemukakan bahwa hakikat pembangunan ekonomi adalah peningkatan pendapatan masyarakat melalui pergeseran struktur ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Kedua sektor tersebut menjadi indikator pembangunan ekonomi di suatu wilayah karena dalam menghasilkan output mengolah bahan baku dan tidak

bergantung sumber-sumber daya alam di dalamnya, sehingga dianggap lebih seperti tanah dan segala yang terkandung di dalamnya yang terkandung stabil.

Gambar 8.3 Struktur Perekonomian Menurut Sektor Primer, Sekunder, dan Tersier Provinsi Papua, 2011-2015



Untuk melihat ada tidaknya transformasi atau pergeseran struktur ekonomi Papua, maka 17 sektor dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, sebagai berikut.

1. Sektor primer, yaitu sektor yang tidak mengolah bahan baku melainkan hanya mendayagunakan sumber-sumber alam seperti tanah dan segala yang terkandung di dalamnya, meliputi sektor pertanian, kehutanan,

dan perikanan; serta sektor pertambangan dan penggalian.

2. Sektor sekunder, yaitu sektor yang mengolah bahan baku baik dari sektor primer maupun sektor sekunder itu sendiri menjadi barang yang lebih tinggi nilainya. Sektor ini meliputi industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang; serta sektor konstruksi.

3. Sektor tersier, yaitu sektor yang produksinya bukan dalam bentuk fisik melainkan dalam bentuk jasa, meliputi sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; sektor transportasi dan pergudangan; sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; sektor informasi dan komunikasi; sektor jasa keuangan dan asuransi; sektor real estat; sektor jasa perusahaan; sektor administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib; sektor jasa pendidikan; sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial; serta sektor jasa lainnya.

Selama periode 2011 hingga 2015 sektor primer masih menjadi “primadona” dalam kegiatan ekonomi Papua. Hal ini terlihat dari kontribusi sektor tersebut dalam penciptaan nilai tambah ekonomi di Papua. Pada kurun waktu 2011 hingga 2013 peranan sektor primer terhadap perekonomian Papua bahkan mencapai lebih dari 50 persen atau lebih dari separuh total nilai tambah ekonomi Papua. Peranan sektor tersebut kemudian perlahan menurun pada periode

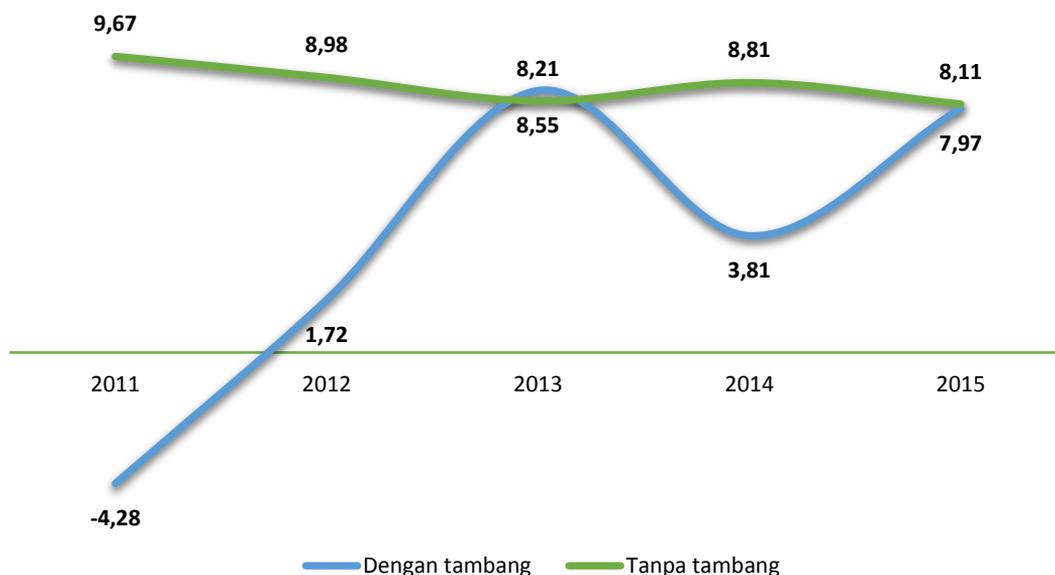
selanjutnya hingga tahun 2015 kontribusi sektor primer terhadap perekonomian Papua “hanya” 45,97 persen. Sebaliknya, kontribusi sektor sekunder dan tersier perlahan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hingga pada tahun 2015 kontribusi kedua sektor tersebut masing-masing sebesar 15,47 persen dan 38,56 persen. Kondisi tersebut cukup menggembirakan karena menjadi indikasi bahwa dalam kurun waktu lima tahun terjadi pergeseran struktur ekonomi di Papua dari sektor primer menjadi sektor sekunder dan tersier.

Pertumbuhan Ekonomi

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, laju pertumbuhan ekonomi Papua berfluktuasi. Meskipun demikian, perekonomian Papua pada tahun 2015 terlihat menunjukkan pergerakan yang positif. Fluktuasi tersebut disebabkan oleh produksi yang berasal dari sektor pertambangan dan penggalian. Secara umum, ekonomi Papua mampu tumbuh sebesar 7,97 persen, lebih tinggi daripada laju pertumbuhan PDRB pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,81 persen, di

mana sektor pertambangan dan persen terhadap total pertumbuhan penggalan menyumbang sebesar 3,17 tersebut.

Gambar 8.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua, 2011-2015



Sebagai penyumbang terbesar kedua bagi perekonomian Papua, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan kontribusi sebesar 0,80 persen terhadap pertumbuhan ekonomi Papua pada tahun 2015, sedikit lebih rendah daripada sektor konstruksi dan sektor administrasi pemerintahan, pertanahan, dan jaminan sosial wajib yang memberikan kontribusi masing-masing sebesar 1,13 persen dan 0,92 persen terhadap total pertumbuhan

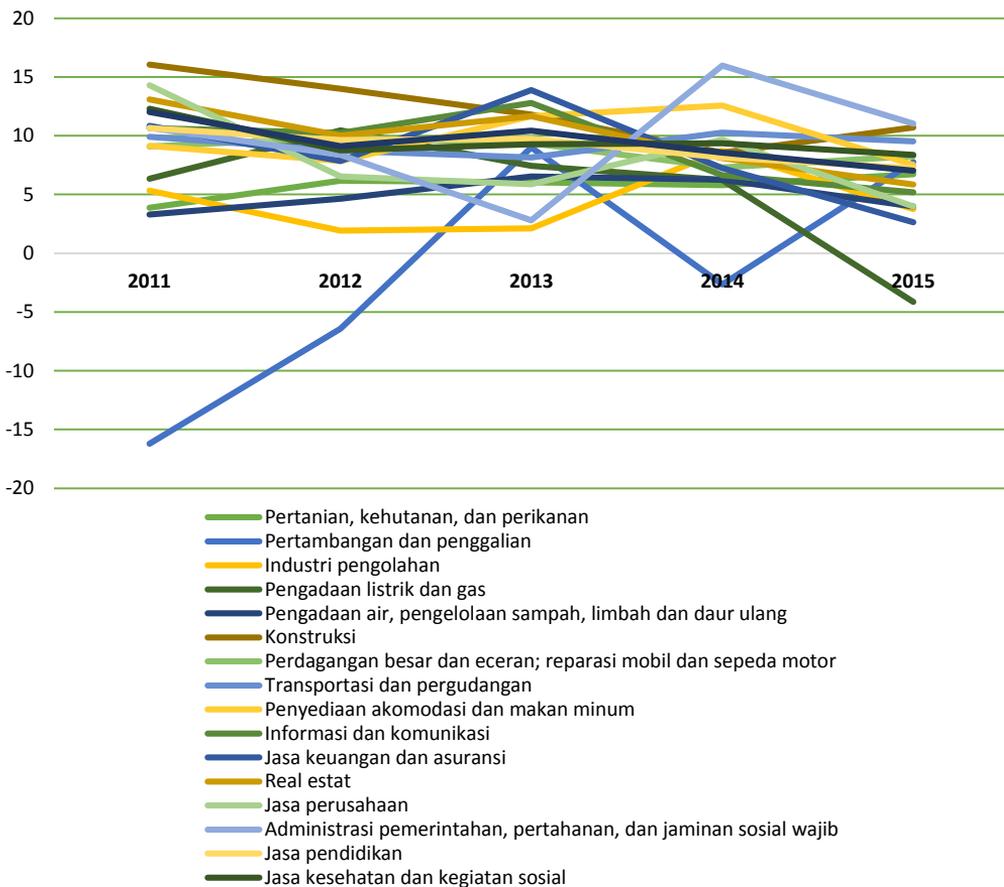
ekonomi Papua. hal ini disebabkan pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di tahun 2014 yang lebih lambat dibandingkan kedua sektor tersebut.

Apabila pengaruh sektor pertambangan dan penggalan dikeluarkan, maka laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 sedikit lebih rendah daripada laju pertumbuhan tahun 2014. Pada tahun

2015, tercatat ekonomi Papua mampu tumbuh sebesar 8,11 persen sedangkan tahun sebelumnya sebesar 8,81 persen. Angka tersebut merupakan yang terendah selama kurun waktu lima tahun terakhir,

setelah pada tahun 2011 ekonomi Papua mencapai titik pertumbuhan tertinggi selama periode 2011-2015 yaitu sebesar 9,67 persen.

Gambar 8.5 Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Papua, 2011-2015



Sektor administrasi, pemerintahan, pertanian, dan jaminan sosial memiliki pertumbuhan tertinggi dibanding sektor-

sektor lainnya. Sektor ini mampu tumbuh hingga 11,03 persen pada tahun 2015. Pertumbuhan positif juga ditunjukkan

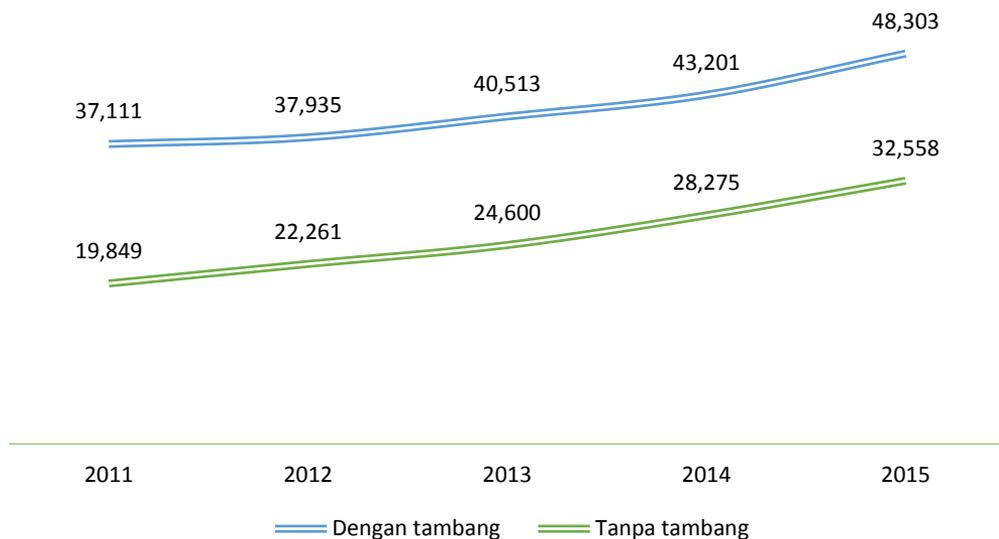
oleh sektor-sektor lainnya kecuali sektor pengadaan listrik dan gas yang tumbuh negatif sebesar 4,15 persen. Sektor-sektor lain yang mencatat pertumbuhan positif pada tahun 2015 secara berurutan yaitu sektor konstruksi (10,07 persen); sektor transportasi dan pergudangan (9,53 persen); sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (8,36 persen); sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (8,25 persen); sektor pertambangan dan penggalian (7,77 persen); sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (7,52 persen); sektor jasa pendidikan (7,24 persen); dan sektor jasa lainnya yang mampu tumbuh sebesar 7,04 persen.

Sementara itu, sektor-sektor yang tumbuh positif di bawah enam persen yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan

(6,73 persen); sektor real estat (5,86 persen); sektor informasi dan komunikasi (5,19 persen); sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang (3,99 persen); sektor jasa perusahaan (3,97 persen); sektor industri pengolahan (3,77 persen); dan sektor jasa keuangan dan asuransi yang tumbuh sebesar 2,63 persen.

Rata-rata Pendapatan Penduduk Papua

Apabila PDRB suatu wilayah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di wilayah tersebut, maka akan dihasilkan suatu indikator yaitu PDRB per kapita. PDRB per kapita nominal menunjukkan nilai PDRB nominal per kepala atau per satu orang penduduk. Indikator ini juga dapat menunjukkan rata-rata pendapatan penduduk.



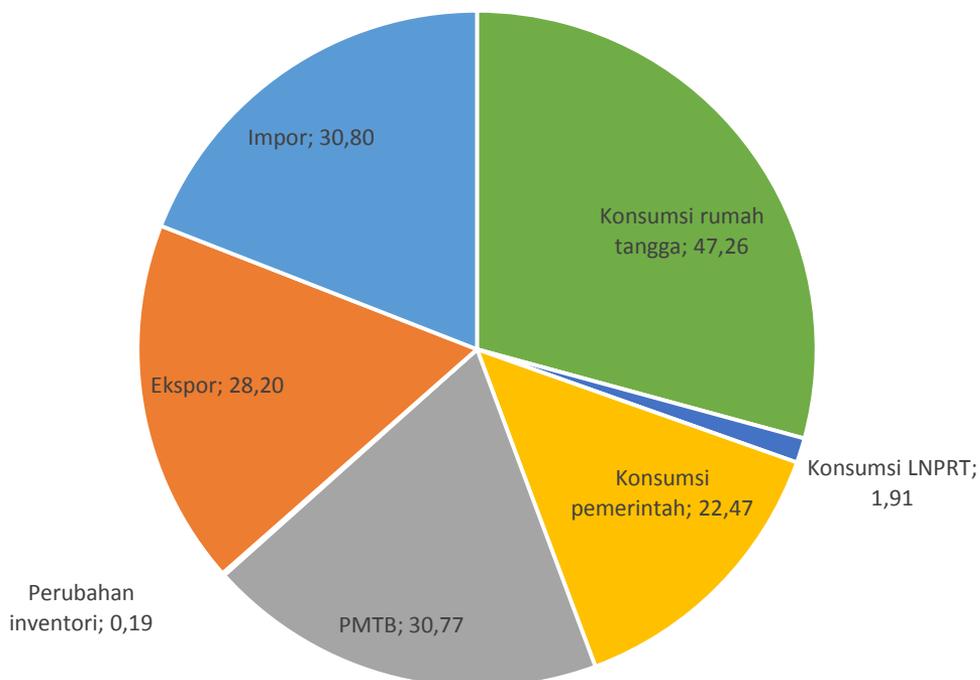
Secara umum, PDRB per kapita penduduk Papua selama periode 2011 hingga 2015 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, PDRB per kapita penduduk Papua mencapai 48,3 juta rupiah, mengalami peningkatan sebesar 11,81 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya, apabila dilihat tanpa sektor pertambangan dan penggalian, maka PDRB per kapita penduduk Papua meningkat sebesar 15,15 persen dibandingkan tahun sebelumnya, menjadi 32,56 juta rupiah pada tahun 2015.

PDRB Pengeluaran: Kebutuhan Konsumsi Rumah Tangga

Selain mengukur total pendapatan semua orang dalam perekonomian, PDRB juga sekaligus mengukur total pengeluaran yang dibelanjakan negara untuk memperoleh barang dan jasa hasil dari perekonomian. Pengeluaran negara tersebut terdiri dari pengeluaran untuk konsumsi akhir rumah tangga; pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga; pengeluaran konsumsi akhir pemerintah; pembentukan modal tetap domestik

bruto (PMTB); perubahan inventori; dan ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Gambar 8.7 Komponen Pengeluaran PDRB Provinsi Papua, 2015



Produk yang dikonsumsi (rumah tangga, LNPRT, pemerintah) di wilayah domestik Papua sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga. Pada tahun 2015, sebesar 47,26 persen PDRB Papua ditujukan untuk konsumsi rumah tangga. Selanjutnya, pengeluaran untuk modal (PMTB) memberikan kontribusi terbesar kedua

terhadap total pengeluaran selama tahun 2015, yaitu sebesar 30,77 persen. Ekspor dan impor juga mempunyai peran yang cukup besar pada tahun tersebut, masing-masing sebesar yaitu sebesar 28,20 persen dan 30,80 persen. Tingginya persentase pengeluaran untuk impor mengindikasikan permintaan domestik Papua masih dipenuhi oleh produk impor.

Konsumsi pemerintah memberikan andil sebesar 22,47 persen terhadap total pengeluaran PDRB Papua, ini

menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap PDRB juga cukup besar.

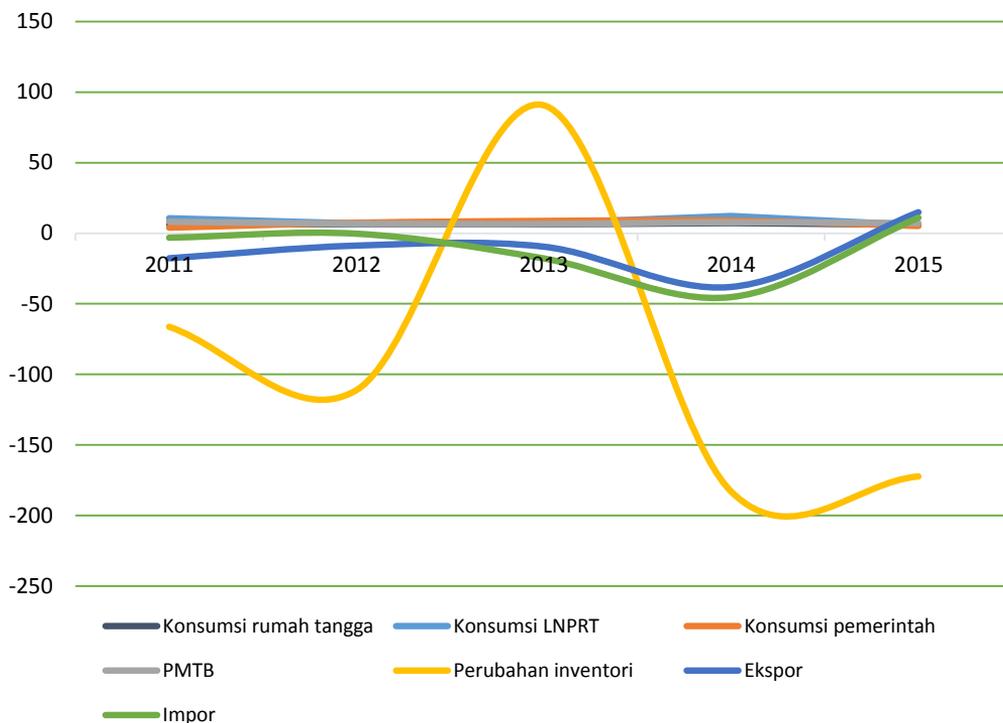
Tabel 8.2 Distribusi PDRB Nominal Menurut Pengeluaran Provinsi Papua, 2011-2015

Komponen Pengeluaran	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi rumah tangga	41,42	44,47	46,66	49,04	47,26
Konsumsi LNPRT	1,52	1,66	1,76	1,94	1,91
Konsumsi pemerintah	18,81	20,15	21,31	22,88	22,47
PMTB	26,44	28,43	29,58	31,12	30,77
Perubahan inventori	-1,06	0,15	0,27	-0,28	0,19
Ekspor	59,43	51,65	43,96	28,85	28,20
Impor	46,57	46,51	43,54	33,55	30,80
Total PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Pada periode 2011-2013 perdagangan antar wilayah Papua yang direpresentasikan oleh transaksi ekspor dan impor menunjukkan nilai ekspor Papua cenderung lebih tinggi dari nilai impor. Kecenderungan perdagangan antar wilayah Papua dalam periode tersebut selalu menunjukkan kondisi surplus.

Sementara itu, pada periode 2014 hingga 2015, perdagangan antar wilayah Papua menunjukkan nilai ekspor lebih rendah daripada nilai impor. Ini menunjukkan bahwa pada periode tersebut, perdagangan antar wilayah berada dalam kondisi defisit.

Gambar 8.8 Pertumbuhan PDRB Riil Menurut Pengeluaran Provinsi Papua, 2011-2015



Selama kurun waktu 2011 hingga 2015 terjadi fluktuasi dalam penggunaan konsumsi PDRB Papua. Pada tahun 2015, hampir semua komponen pengeluaran (kecuali perubahan inventori) menunjukkan pertumbuhan yang positif, meskipun pertumbuhan pengeluaran untuk konsumsi akhir rumah tangga, konsumsi LNPRT, konsumsi pemerintah, dan PMTB pada tahun 2015 lebih rendah daripada tahun sebelumnya. Secara rata-rata, pada periode tersebut ekonomi Papua telah tumbuh sebesar 3,55 persen

di mana pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 8,55 persen sedangkan pertumbuhan terendah pada 2011 yaitu minus 4,28 persen.

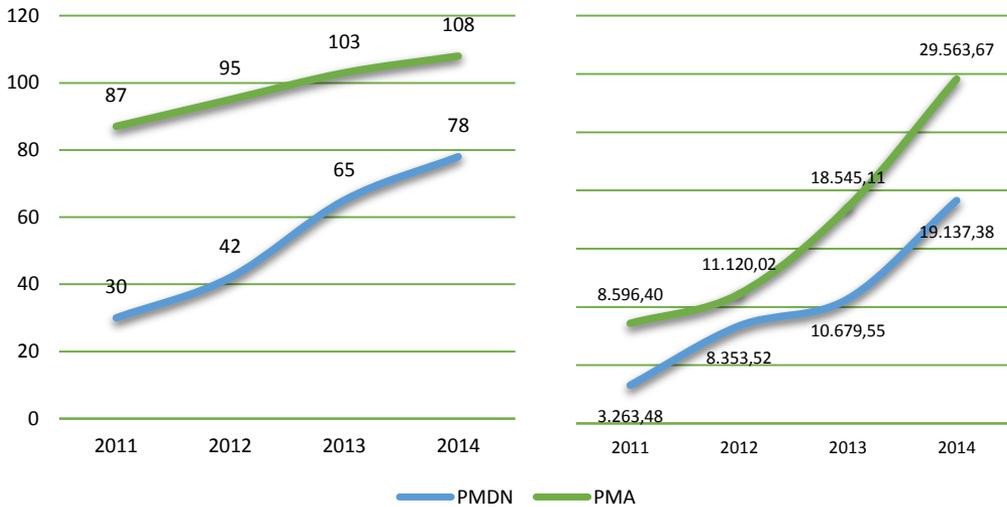
Investasi

Secara umum, investasi dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) membutuhkan iklim yang sehat, kemudahan dan kejelasan prosedur penanaman modal. Iklim investasi daerah

juga dipengaruhi oleh kondisi mikro ekonomi daerah yang bersangkutan. Apabila kondisi tersebut tercapai maka sektor swasta akan terlibat aktif dalam menggerakkan roda perekonomian. Saat ini Papua sudah diperhitungkan sebagai salah satu daerah tujuan investasi. Selama kurun waktu 2008 hingga 2013, investasi di Papua terus meningkat baik investasi yang berasal dari PMDA maupun PMA, bahkan perkembangan investasi PMA Papua menempati urutan keempat di Indonesia.

Penanaman modal asing merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal

asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, jumlah proyek masuk ke Papua yang berasal dari PMA terus mengalami peningkatan. Selama kurun waktu tersebut, PMA ke Papua meningkat sebesar 24,13 persen hingga pada tahun 2015 mencapai 108 proyek. Setiap tahunnya, nilai realisasi investasi modal asing di Papua juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2014, nilai investasi proyek PMA sebesar 29.563,67 juta USD meningkat sebesar 59,41 persen dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 18.545,11 juta USD.



Sementara itu, penanaman modal dalam negeri merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Dalam kurun waktu 2011 hingga 2014, jumlah proyek masuk ke Papua yang berasal dari PMDN telah mengalami peningkatan lebih dari dua kali lipat jumlah proyek pada tahun 2011. Nilai investasi dari total proyek tersebut mencapai 19.137,38 miliar rupiah pada tahun 2014.

Penanaman modal yang dilakukan oleh investor baik dalam maupun luar negeri tidak terjadi dengan sendirinya, namun

dipengaruhi oleh banyak faktor. Di Indonesia pada umumnya, faktor penarik tersebut diantaranya jumlah penduduk yang besar sehingga tersedia angkatan kerja dengan produktivitas yang masih dapat ditingkatkan; tersedia bahan baku; stabilitas politik dan ruang bagi penerapan mekanisme pasar semakin luas; dan biaya yang tak terkait langsung dengan kegiatan ekonomi makin kecil (*clean goverment* atau *good corporate governance*). Belajar dari situ, upaya yang bisa dilakukan pemerintah daerah untuk menarik minat investor menanamkan modalnya di Papua adalah dengan meningkatkan promosi potensi daerah, menjamin iklim ekonomi dan politik yang kondusif, serta

mendukung kelancaran investasi melalui pembangunan infrastruktur yang memadai.

Perbandingan Antar Kabupaten/Kota

Besaran nilai IPM dapat memberikan gambaran pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan di suatu wilayah. Semakin tinggi nilai IPM maka semakin baik pencapaian pembangunan manusia di wilayah tersebut. Hasil pembangunan ekonomi juga seharusnya sampai kepada pembangunan manusia. Idealnya, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka semakin tinggi angka harapan hidup, semakin tinggi tingkat pendidikan, serta semakin baik standar hidup penduduk.

Pada kenyataannya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu disertai dengan pembangunan di dimensi lainnya,

misalnya pendidikan dan kesehatan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi mengapa pendapatan masyarakat yang tinggi tidak serta merta diikuti oleh membaiknya status kesehatan penduduk, semakin baiknya asupan gizi yang dikonsumsi masyarakat, atau semakin lama seseorang mengenyam bangku pendidikan, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam politik, dan berbagai dimensi sosial lainnya. Itulah mengapa UNDP kemudian mendefinisikan pembangunan sebagai proses dalam memperluas pilihan-pilihan manusia bukan semata-mata pendapatan riil per kapita atau pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Tabel berikut menyajikan perbandingan capaian IPM dan pertumbuhan ekonomi menurut kabupaten/kota di Papua sebagai gambaran awal capaian pembangunan antar wilayah di Papua.

Capaian IPM dan Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota Papua, 2015

Tabel 8.3

Kabupaten/Kota	IPM	Pertumbuhan Ekonomi
(1)	(2)	(3)
Merauke	67,75	7,04
Jayawijaya	54,18	6,22
Jayapura	70,04	9,98
Nabire	66,49	8,23
Kep. Yapen	65,28	6,34
Biak Numfor	70,85	8,89
Paniai	54,20	9,82
Puncak Jaya	44,87	6,41
Mimika	70,89	7,68
Boven Digoel	59,02	5,60
Mappi	56,11	6,89
Asmat	46,62	5,73
Yahukimo	46,63	6,96
Pegunungan Bintang	40,91	6,11
Tolikara	46,38	5,50
Sarmi	60,99	7,25
Keerom	63,43	7,07
Waropen	62,35	9,67
Supiori	60,09	5,14
Mamberamo Raya	48,29	10,25
Mamberamo Tengah	25,47	7,82
Yalimo	44,18	6,60
Lanny Jaya	43,55	6,35
Nduga	44,32	8,88
Puncak	39,41	10,32
Dogiyai	52,78	9,16
Deiyai	44,35	12,18
Intan Jaya	48,28	12,94
Kota Jayapura	78,05	9,29
Papua	57,25	7,97

Pada tahun 2015, dari 34 provinsi di Indonesia, Papua merupakan satu-satunya provinsi dengan capaian IPM yang masih berstatus “rendah” (IPM kurang dari 60) yaitu sebesar 57,25, meskipun

demikian IPM Papua terus mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Capaian pembangunan manusia di kabupaten/kota di Papua cukup bervariasi. Mayoritas kabupaten di

Papua masih berstatus IPM rendah. Meskipun demikian, pada periode 2014 hingga 2015, seluruh kabupaten/kota di Papua mengalami peningkatan.

Apabila dikaitkan dengan pembangunan ekonomi yang diukur oleh indikator tunggal yaitu pertumbuhan ekonomi, maka dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu berdampak pada peningkatan kesejahteraan penduduk di Papua. Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015, kabupaten/kota dengan IPM menengah atas (IPM=66,0–79,9) seperti Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Merauke, Nabire, Biak Numfor, dan Mimika memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi (di atas 7 persen). Akan tetapi, pada tahun yang sama, beberapa kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi (di atas 10 persen) seperti Kabupaten Mamberamo Raya, Puncak, Deiyai, dan Intan Jaya justru memiliki capaian IPM yang rendah (di bawah 50). Ini dapat menjadi indikasi bahwa pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah tersebut belum dinikmati seluruh lapisan masyarakat secara merata. Salah satu

indikator yang dapat digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan penduduk adalah Gini Rasio. Pembahasan mengenai indikator tersebut akan disajikan pada bab lain dalam publikasi ini.

Tantangan: Menyelaraskan Pembangunan Ekonomi dan Pembangunan Manusia

Untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi perlu disusun strategi yang dapat memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian Papua. Strategi yang disusun perlu dibangun berdasarkan prioritas yang mengacu pada hambatan utama. Di Papua, aspek kewilayahan perlu menjadi pertimbangan karena karakteristik sumber daya yang tersedia di masing-masing wilayah di Papua berbeda-beda.

Secara umum, hambatan utama di hampir seluruh wilayah Papua adalah terbatasnya infrastruktur yang memadai seperti listrik, jalan, jembatan, pelabuhan, maupun bandara. Padahal infrastruktur yang baik sangat diperlukan untuk meningkatkan investasi yang dapat mendorong

pertumbuhan ekonomi Papua. Kegiatan ekonomi di berbagai sektor juga sangat tergantung dengan tersedianya infrastruktur yang baik.

Selanjutnya, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang terbatas di Papua juga merupakan faktor penting yang menunjang terlaksananya kegiatan ekonomi Papua. Hal ini perlu mendapat perhatian karena untuk bertransformasi dari sektor primer ke sektor sekunder membutuhkan banyak tenaga kerja teknis yang berpendidikan tinggi khususnya dalam memperkuat struktur ekonomi pada sektor sekunder terkait teknologi

menengah dan tinggi. Selain itu, ketersediaan tenaga kerja ahli juga diperlukan untuk memperkuat diversifikasi sektor ekonomi bernilai tambah tinggi. Kualitas tenaga kerja yang rendah di sektor pertanian dapat menghambat proses peningkatan produktivitas pertanian.

Hambatan selanjutnya dapat berasal dari birokrasi maupun kondisi politik dan keamanan di beberapa wilayah. Bagaimana pun juga faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi proses produksi barang dan jasa serta minat investasi di Papua.

TENAGA KERJA PAPUA

9

9

TENAGA KERJA PAPUA

“Pertumbuhan ekonomi disertai dengan proses penggunaan sumber daya dan dana untuk meningkatkan kapasitas produksi perekonomian suatu negara.”
————— (Chenery dan Syrquin, 1975)

Perkembangan ekonomi yang ditunjukkan oleh peningkatan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi biasanya disertai dengan berbagai proses transformasi sosial dan ekonomi, diantaranya peningkatan kualitas hidup manusia. Angka IPM sebagai indikator yang mengukur kualitas hidup manusia di Papua menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun masih dikategorikan rendah, IPM Papua tumbuh dengan cepat. Selain itu proses transformasi tersebut pada umumnya juga mempengaruhi struktur perekonomian daerah yang ditandai dengan pergeseran struktur produksi atau perubahan komposisi Produk Domestik Bruto (PDB) menurut sektor dan lapangan

usaha. Perubahan dalam struktur produksi tersebut erat kaitannya dengan perubahan alokasi sumber daya dan dana yang terjadi selama pertumbuhan ekonomi, yang biasanya terjadi karena tiga hal, yaitu: (1) pergeseran dalam pola permintaan atau konsumsi barang dan jasa; (2) perubahan dalam kuantitas, kualitas, dan komposisi barang modal dan/atau teknologi; dan (3) peningkatan spesialisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi baik antar sektor dan unit usaha

maupun dalam tiap unit usaha (Anwar & Pungut, 1993)⁵.

Semakin meningkatnya pendapatan, persentase pendapatan yang dibelanjakan untuk bahan makanan semakin menurun sedangkan pendapatan yang digunakan untuk konsumsi bukan makanan semakin meningkat, atau dikenal dengan Hukum Engel. Hal ini dapat menjadi indikasi tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah. Selanjutnya perubahan dalam kuantitas, kualitas, dan komposisi barang modal terkait dengan perubahan struktur tenaga kerja. Menurut Chenery dan Syrquin (1975), pertumbuhan ekonomi disertai dengan proses penggunaan sumber daya dan dana untuk meningkatkan kapasitas produksi perekonomian suatu negara. Hal ini tercermin dari: pertama, meningkatnya kuantitas dan kualitas stok barang modal per tenaga kerja; kedua, meningkatnya pendidikan formal dan nonformal dari tenaga kerja yang pada gilirannya terjelma dalam kenaikan persentase tenaga

terdidik dan terampil serta kemampuan dalam menguasai teknologi; dan ketiga, makin baiknya keadaan sarana dan prasarana perhubungan serta sarana dan prasarana lainnya.

Selama periode 2011 hingga 2015, PDRB menurut harga konstan meningkat dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar tiga persen per tahun. Tahun 2015, ekonomi Papua mampu tumbuh sebesar 7,97 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,81 persen. Bab ini akan menguraikan struktur tenaga kerja, sebagai bagian dari proses produksi ekonomi di Papua.

Tren Kondisi Ketenagakerjaan Papua

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, penduduk usia kerja juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 jumlah penduduk usia kerja adalah sebanyak 1.375.169 orang, meningkat sebesar 27 persen

⁵ Pertumbuhan Ekonomi dan Transformasi Struktur Tenaga Kerja Antar Wilayah di Indonesia 1971-1990 dalam Ciri Demografis

Kualitas Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi.

menjadi 2.189.230 orang pada tahun 2015. Selama kurun waktu 2011 hingga 2015, peningkatan penduduk usia kerja selalu berbanding lurus dengan peningkatan jumlah angkatan kerja.

Tabel 9.1 Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan di Provinsi Papua, 2011-2015

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Angkatan Kerja	1 375 169	1 557 089	1 610 484	1 675 113	1 741 945
Bukan Angkatan Kerja	622 204	432 314	462 222	454 291	447 285
Usia Kerja	1 997 373	1 989 403	2 072 706	2 129 404	2 189 230
TPAK	68,8	78,27	77,7	78,7	79,57
TPT	8,8	3,65	3,15	3,4	3,99
TKK	91,2	96,4	96,8	96,6	96,01

Selanjutnya, pada tahun 2015, jumlah penduduk bukan angkatan kerja mengalami penurunan sebesar 1,54 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, kegiatan sebagian besar penduduk bukan angkatan kerja di Papua adalah mengurus rumah tangga yaitu sebesar 51,49 persen, bersekolah sebesar 39,11 persen dan yang melakukan kegiatan lainnya ada sebesar 9,4 persen.

Menurunnya angka pengangguran yang disertai dengan meningkatnya TPAK adalah pencapaian ideal yang diharapkan.

Pada tahun 2011, TPT mencapai sekitar 8 persen dan sepanjang tahun 2012-2015 turun menjadi 3,99 persen. Kondisi ini diiringi juga dengan peningkatan TPAK dari 68,8 persen menjadi 79,57 persen. Hal ini mengindikasikan adanya perubahan kondisi ketenagakerjaan dibanding tahun sebelumnya.

TPAK adalah ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat secara aktif di pasar kerja, baik dengan bekerja, mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha. Ukuran ini merupakan indikasi relatif dari

pasokan tenaga kerja tersedia yang terlibat dalam produksi barang dan jasa. Semakin tinggi nilai TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*). Secara keseluruhan, TPAK Provinsi Papua pada tahun 2015 adalah sebesar 79,57 persen. Umumnya TPAK laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan. Pada level provinsi, TPAK laki-laki adalah 87,66 persen sementara perempuan 70,3 persen. Begitu juga TPAK pada seluruh kabupaten/kota, partisipasi laki-laki lebih tinggi daripada perempuan.

Menurut kabupaten/kota, TPAK paling tinggi terdapat di Kabupaten Yalimo yaitu 99,69 persen dan terendah di Kabupaten Waropen sebesar 55,12 persen. Tingginya TPAK di beberapa kabupaten di wilayah pegunungan antara lain dipengaruhi oleh dominasi sektor pertanian terhadap perekonomian di wilayah tersebut, yang mengakibatkan hampir seluruh penduduk usia kerja masuk dalam angkatan kerja sehingga mempengaruhi besaran nilai TPAK yang bahkan mendekati nilai 100 persen.

Tabel 9.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua, 2015

Kabupaten/Kota (1)	TPAK		Total (4)
	Laki-laki (2)	Perempuan (3)	
Merauke	87,32	51,32	70,30
Jayawijaya	89,20	87,08	88,17
Jayapura	75,74	42,38	60,32
Nabire	83,71	51,42	69,02
Kep. Yapen	82,13	54,31	68,69
Biak Numfor	76,52	41,33	59,66
Paniai	93,01	95,01	93,97
Puncak Jaya	96,55	91,59	94,28
Mimika	86,45	36,57	65,75
Boven Digoel	89,23	55,15	74,27
Mappi	87,10	75,81	81,60
Asmat	86,30	67,68	77,18
Yahukimo	92,87	87,75	90,41
Pegunungan Bintang	95,60	95,83	95,71
Tolikara	97,28	96,76	97,04
Sarmi	81,13	61,38	72,20
Keerom	88,53	65,37	78,22

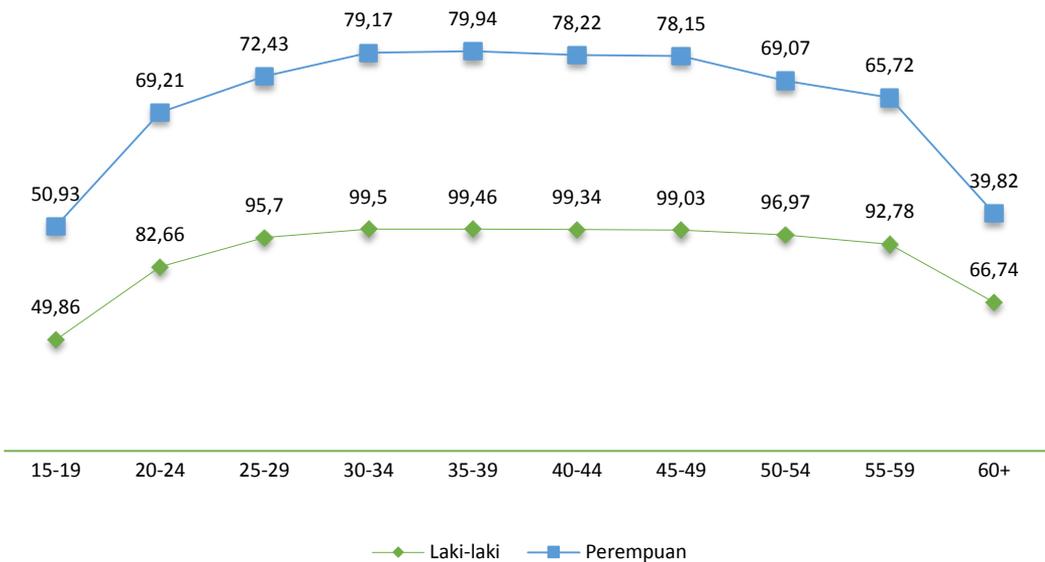
Tabel 8.3 Lanjutan

Kabupaten/Kota	TPAK		Total
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Waropen	80,33	26,21	54,12
Supiori	73,92	41,52	57,99
Mamberamo Raya	89,20	71,10	80,36
Nduga	98,38	98,81	98,57
Lanny Jaya	92,76	94,80	93,71
Mamberamo Tengah	98,60	99,36	98,95
Yalimo	100,00	99,34	99,69
Puncak	92,77	82,11	87,66
Dogiyai	91,81	94,94	93,39
Intan Jaya	91,63	77,97	84,98
Deiyai	89,66	89,80	89,73
Kota Jayapura	74,36	42,29	59,72
Papua	87,66	70,33	79,57

Jika dilihat berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin, maka tingkat partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi selalu lebih rendah daripada laki-laki. Hal ini terjadi pada setiap kelompok umur. Kondisi ini sangat memungkinkan terjadi di Indonesia khususnya Papua karena tanggung jawab untuk mencari nafkah biasanya dilakukan oleh laki-laki sehingga

perempuan cenderung lebih sedikit masuk dalam angkatan kerja. Partisipasi laki-laki paling tinggi adalah pada usia 30-34 tahun (99,5 persen). Hal ini berarti usia puncak laki-laki untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi adalah antara umur 30-34 tahun, sedangkan untuk perempuan antara umur 35-39 tahun.

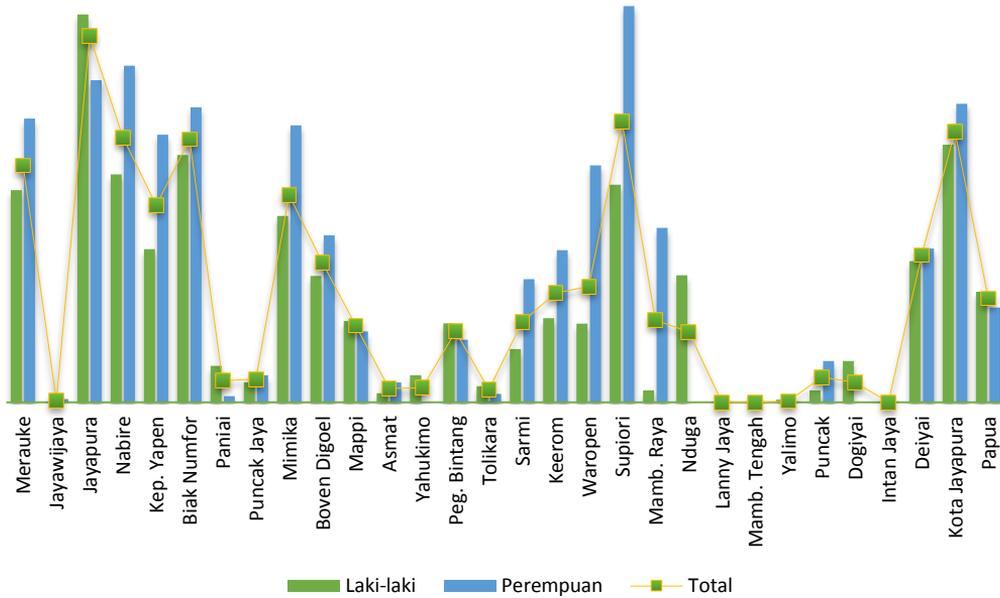
Gambar 9.1 TPAK Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua, 2015



Perempuan masuk ke pasar kerja lebih cepat daripada laki-laki. Hal ini tercermin dari tingginya persentase perempuan yang masuk ke dalam kegiatan ekonomi pada kelompok umur muda. Pada tahun 2015, lebih dari separuh penduduk perempuan usia 15-19 tahun sudah aktif dalam kegiatan ekonomi. Dibandingkan laki-laki, pada kelompok umur yang sama, hanya 49,86 persen saja penduduk laki-laki yang masuk ke pasar kerja. Akan tetapi, perempuan juga lebih cepat meninggalkan kegiatannya di pasar kerja dibandingkan

laki-laki. Data di atas menunjukkan, partisipasi kerja perempuan mulai turun pada kelompok usia 40 tahun dengan penurunan yang lebih cepat dibandingkan dengan laki-laki yang terlihat lebih stabil hingga pada usia kurang dari 60 tahun. ada banyak faktor yang dapat menyebabkannya, di antaranya adalah kondisi fisik. Fisik perempuan yang secara alamiah mengalami menopause mempengaruhi kekuatan fisiknya dan kemampuan produktifnya dalam kegiatan ekonomi aktif.

Gambar 9.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua, 2015



Indikator penting berikutnya adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Indikator ini mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. TPT Provinsi Papua pada tahun 2015 adalah sebesar 3,99 persen terhadap total angkatan kerja. Dapat diartikan bahwa dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan

kerja) yang ada di Papua, sebanyak empat orang merupakan pengangguran.

Jika ditinjau per kabupaten/kota, tingkat pengangguran paling tinggi ada di Kabupaten Supiori sebesar 14 persen. Menyusul berikutnya adalah Kabupaten Supiori sebesar 10,75 persen. Di sisi lain, pada kabupaten di daerah pegunungan, seperti Kabupaten Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, dan Intan Jaya

memiliki TPT nol persen⁶. Semakin kecil persentase TPT menunjukkan semakin besarnya tenaga kerja yang terserap dalam lapangan usaha/sector, juga mencerminkan kestabilan suatu daerah di bidang ketenagakerjaan. Apabila terlalu banyak tenaga kerja yang tidak tertampung di lapangan usaha, atau lapangan usaha sangat terbatas untuk menyerap tenaga kerja yang terindikasi melalui TPT yang tinggi, maka masalah sosial (kejahatan, demonstrasi dan lainnya) akan sangat rawan.

Selain TPAK dan TPT, masih ada satu indikator ketenagakerjaan yaitu Tingkat Kesempatan Kerja (TKK), merupakan persentase tenaga kerja yang terserap pada seluruh sector-sector yang ada terhadap angkatan kerja. Dengan kata lain, TKK merupakan selisih TPT terhadap 100 persen. Semakin tinggi TKK, semakin banyak tenaga kerja yang terserap, akhirnya semakin stabil keadaan suatu daerah dalam hal ketenagakerjaan. Secara umum TKK di Provinsi Papua tergolong

tinggi, bahkan beberapa kabupaten di daerah pegunungan mempunyai TKK sebesar 100 persen, seperti Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, dan Intan Jaya. Tingginya TKK di Papua disebabkan sebagian besar tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian atau tingkat pendidikan yang cukup, tidak langsung menganggur, karena mereka diserap oleh sector pertanian yang masih tradisional dan tidak memerlukan keahlian khusus.

Produktivitas Pekerja

Istilah produktivitas mengacu pada jumlah barang dan jasa yang dihasilkan seorang pekerja per jamnya. Dalam kasus perekonomian, produktivitas menjadi faktor penentu dari standar hidup dan pertumbuhan produktivitas adalah faktor penentu peningkatan standar hidup. Sebuah wilayah dapat menikmati standar hidup yang tinggi jika hanya wilayah tersebut dapat menghasilkan barang dan jasa dalam jumlah yang besar.

⁶ Hal tersebut bukan berarti tidak ada sama pengangguran di kabupaten tersebut, tetapi angkanya terlalu kecil. Jumlah sampel yang

digunakan dalam survei tidak memungkinkan untuk menangkap fenomena tersebut.

Tabel 9.3 Produktivitas Tenaga Kerja Menurut Sektor di Provinsi Papua, 2014-2015 (Juta Rupiah)

Sektor Usaha	Dengan tambang		Tanpa tambang	
	2014	2015	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Primer	52,03	55,90	14,24	16,26
Sekunder	364,76	378,35	364,76	378,35
Tersier	141,44	163,34	141,44	163,34
PDRB	81,94	90,96	53,63	61,31

Secara umum, terjadi peningkatan produktivitas tenaga kerja pada tahun 2015 dibandingkan tahun sebelumnya, baik pada sektor PDRB dengan tambang maupun tanpa tambang. Pada tahun 2015 setiap tenaga kerja di Papua mampu menghasilkan barang dan jasa senilai 90,96 juta rupiah (dengan tambang) atau naik sebesar 11 persen dari tahun 2014. Sementara itu, tanpa menyertakan sektor tambang, produktivitas masing-masing tenaga kerja di Papua sebesar 61,31 juta rupiah atau meningkat sebesar 14,32 persen dari tahun sebelumnya.

Produktivitas pekerja yang bekerja di sektor sekunder yaitu industri pengolahan; listrik, gas, dan air; serta konstruksi jauh lebih tinggi daripada sektor lainnya. Pada tahun 2015 tercatat bahwa tenaga kerja yang bekerja di sektor

tersebut mampu menghasilkan barang dan jasa sebesar 378,35 juta rupiah. Sebaliknya, sektor pertanian merupakan sektor dengan produktivitas pekerja terendah di Papua yaitu sebesar 55,90 juta rupiah, bahkan di tanpa sektor tambang, artinya hanya berasal dari sektor pertanian, produktivitas pekerja di sektor tersebut hanya 16,26 juta rupiah. Ini menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang menghasilkan produktivitas tenaga kerja yang paling rendah dibandingkan sektor-sektor lainnya.

Ada banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan suatu negara atau wilayah dalam menghasilkan barang dan jasa, yaitu modal fisik, modal manusia, sumber daya alam, dan pengetahuan teknologi. Dalam kasus ini, tingginya produktivitas

yang dihasilkan pekerja di sektor pertambangan dan penggalian disebabkan oleh tingginya nilai tambang yang dihasilkan PT. Freeport. Rendahnya produktivitas pekerja di sektor pertanian antara lain disebabkan oleh modal manusia (terutama pendidikan), dan teknologi yang digunakan di sektor tersebut masih tradisional.

Struktur Demografi Penduduk Usia Kerja

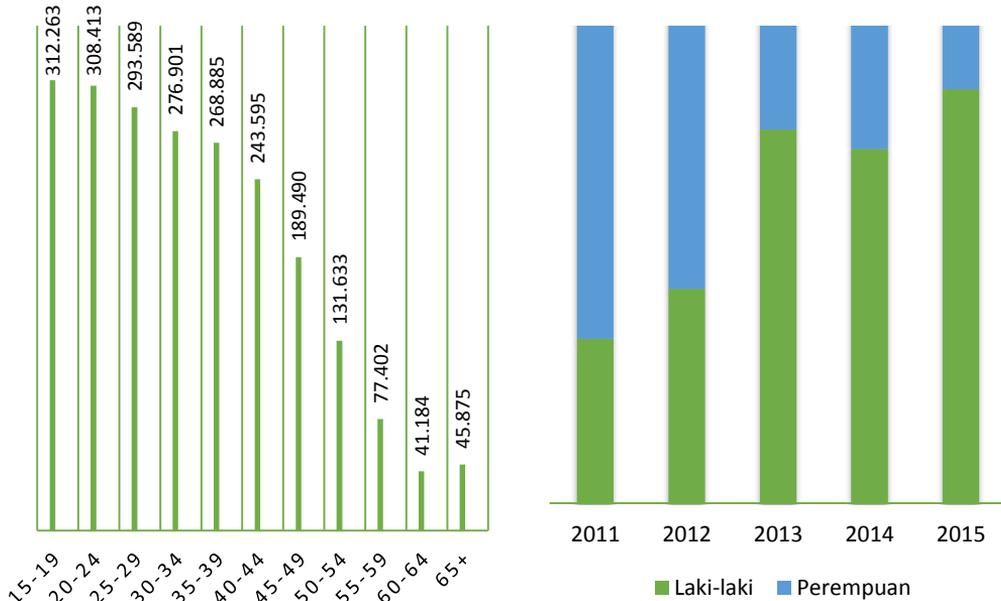
Papua: Dominasi Pekerja Muda dan Pekerja Laki-laki

Dalam istilah ketenagakerjaan, penduduk usia kerja biasa disebut sebagai tenaga kerja. Tenaga kerja adalah bagian dari penduduk yang dari sisi usia dipandang telah mampu bekerja memproduksi barang dan jasa baik untuk kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Menurut Sumitro Djojohadikusumo (1987) tenaga kerja adalah semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja, termasuk mereka yang menganggur meskipun bersedia dan sanggup bekerja dan mereka yang menganggur terpaksa akibat tidak

adanya kesempatan kerja. Banyaknya tenaga kerja menyimpan potensi ekonomi yang sangat besar dimiliki suatu wilayah. Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang sangat penting di samping faktor alam dan faktor modal. Karena meskipun suatu wilayah memiliki sumber daya alam dan modal yang besar, ia tetap membutuhkan tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksinya.

Batasan umur yang digunakan Indonesia dalam mengelompokkan penduduk usia kerja mengacu pada konsep *International Labour Organization (ILO)*, yaitu 15 tahun ke atas, sedangkan penduduk yang berusia di bawah 15 tahun digolongkan sebagai penduduk bukan usia kerja. Pada tahun 2015, jumlah penduduk usia kerja di Provinsi Papua mencapai 2.189.230 orang. Dominasi penduduk muda terlihat jelas, di mana 77,80 persen penduduk usia kerja di Papua adalah penduduk usia muda (15 sampai 44 tahun). Hanya sebesar 22,20 persen saja yang merupakan penduduk berumur 45 tahun ke atas.

Gambar 9.3 Penduduk Usia Kerja Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua, 2015



Dominasi peran penduduk usia muda merupakan sebuah keuntungan sekaligus dapat menjadi tantangan dalam pembangunan ekonomi di Provinsi Papua. Penduduk usia muda dengan kualitas yang memadai dapat menjadi *source of growth* dalam pembangunan ekonomi. Sebaliknya penduduk usia muda yang tidak memiliki *skill* dan kemampuan yang tidak memadai justru akan memberikan masalah baru dalam pembangunan ekonomi seperti masalah pengangguran, kemiskinan, dan berbagai masalah sosial lainnya.

Oleh karena itu perlu diperhatikan mengenai pendidikan dan keterampilan dari penduduk usia muda tersebut, sehingga bukan hanya dominan dalam hal jumlah namun juga dalam sisi kualitas. Kualitas tenaga kerja inilah yang menjadi poin penting dalam meningkatkan produktivitas kerja yang akan berdampak pada kemajuan ekonomi. Usaha ini dapat dilakukan antara lain dengan membekali mereka dengan pendidikan dan keterampilan melalui pendidikan formal maupun pelatihan-pelatihan yang memadai, sesuai dengan keinginan pasar

kerja, serta didukung oleh kebijakan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja, fleksibilitas pasar tenaga kerja, keterbukaan perdagangan, serta dukungan sarana dan prasarana.

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2011-2015) terlihat bahwa penduduk usia kerja penduduk laki-laki lebih besar dari perempuan. Hal ini sejalan dengan rasio jenis kelamin penduduk Provinsi Papua di atas 100, yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Ukuran besar kecilnya penduduk usia kerja sangat dipengaruhi oleh besaran jumlah penduduk dan komposisi umur penduduk suatu wilayah.

Jumlah penduduk usia kerja tertinggi berada pada Kota Jayapura yakni sebesar 2015.761 orang atau 9,71 persen penduduk usia kerja di Papua, diikuti oleh Kabupaten Merauke dan Kabupaten Jayawijaya yakni sebesar 154.389 (7,05%) dan 151.382 (6,91 persen). Sedangkan jumlah penduduk usia kerja paling sedikit berada di Kabupaten Supiori dengan jumlah penduduk sebanyak 11.617 atau sekitar 0,53 persen dari jumlah penduduk

usia kerja di Provinsi Papua. Sementara jika ditinjau menurut jenis kelamin, hampir seluruh kabupaten/kota didominasi oleh penduduk usia kerja laki-laki. Sebaran penduduk usia kerja menurut kabupaten/kota dan jenis kelamin selengkapnya dapat dilihat pada lampiran.

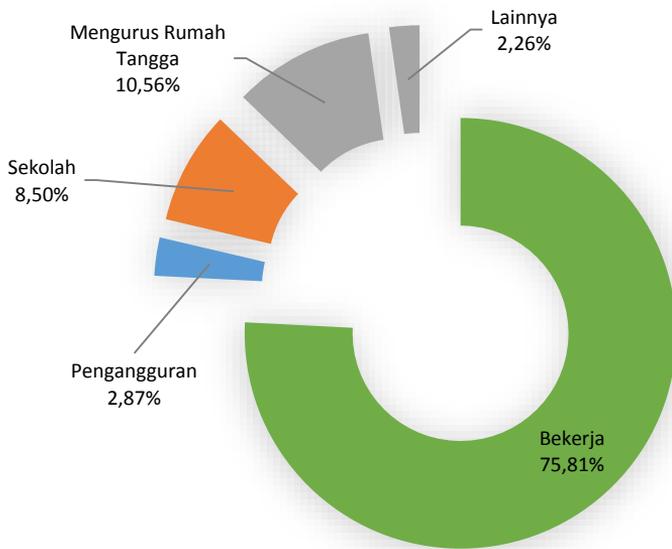
Berdasarkan kegiatan utama yang dilakukan, penduduk usia kerja dibagi menjadi dua kelompok, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah mereka yang aktif secara ekonomi dalam pasar kerja. Sementara bukan angkatan kerja adalah mereka yang sekolah, mengurus rumah tangga, dan melakukan kegiatan lainnya.

Kelemahan dalam konsep ini adalah untuk kondisi secara umum yang terjadi di Indonesia termasuk Papua masih banyak ditemukan adanya pekerja anak (15 tahun kebawah) meskipun mereka aktif secara ekonomi tidak digolongkan sebagai angkatan kerja karena tidak memenuhi konsep batasan umur penduduk usia kerja. Kelemahan lain pada konsep ini adalah pengklasifikasian kegiatan utama

pada penduduk usia kerja masih menganut asas eksklusifitas di mana seorang penduduk hanya dapat digolongkan dalam satu kategori. Sebagai contoh, seorang mahasiswa yang kuliah

sambil bekerja. Mereka hanya dapat dimasukkan dalam salah satu kategori, bekerja atau sekolah. Meskipun pada kenyataannya mereka melakukan kedua kegiatan tersebut.

Gambar 9.4 Persentase Penduduk Usia Kerja Menurut Kegiatan Utama di Provinsi Papua, 2015



Kegiatan utama sebagian besar penduduk Papua adalah bekerja (75,81 persen), pengangguran sebanyak 2,87 persen. sementara 21 persen penduduk usia kerja yang tidak terlibat aktif dalam perekonomian sebanyak 21 persen yaitu mereka yang mengurus rumah tangga, sekolah dan melakukan kegiatan lainnya

masing-masing sebesar 10,56 persen, 8,50 persen dan 2,26 persen.

Karakteristik Penduduk Usia Kerja: Pendidikan yang Rendah

Rendahnya tingkat pendidikan dan ketidakseuaian keahlian dan

keterampilan yang dimiliki para pencari kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan lapangan usaha dapat memicu rendahnya penyerapan tenaga kerja di suatu wilayah. Pada tahun 2015 tercatat lebih dari setengah penduduk usia kerja di Papua (56,78 persen) berpendidikan rendah. Sebesar 39,42 persen penduduk usia kerja adalah mereka yang belum tamat SD atau

bahkan belum pernah bersekolah, selanjutnya sebanyak 17,36 persen berpendidikan SD, sebesar 16,56 persen berpendidikan SMP dan 20,68 persen berpendidikan SMA. Sementara itu, penduduk usia kerja yang berpendidikan tinggi (Diploma/Sarjana) hanya 5,97 persen saja.

Tabel 9.4 Penduduk Usia Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua, 2015

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Di bawah SD	390 462 (45,2)	472 576 (54,8)	863 038 (100,0)
SD	202 036 (53,2)	178 018 (46,8)	380 054 (100,0)
SLTP	208 319 (57,4)	154 336 (42,6)	362 655 (100,0)
SLTA	287 431 (63,5)	165 312 (36,5)	452 743 (100,0)
PT	78 544 (60,1)	52 196 (39,9)	130 740 (100,0)
Total	1 166 792 (53,3)	1 022 438 (46,7)	2 189 230 (100,0)

Jika dilihat menurut jenis kelamin, persentase perempuan usia kerja yang berpendidikan di bawah SD (54 persen) lebih tinggi dibanding laki-laki. Sebaliknya untuk pendidikan SD ke atas, secara persentase perempuan lebih rendah dibanding laki-laki. Hal ini

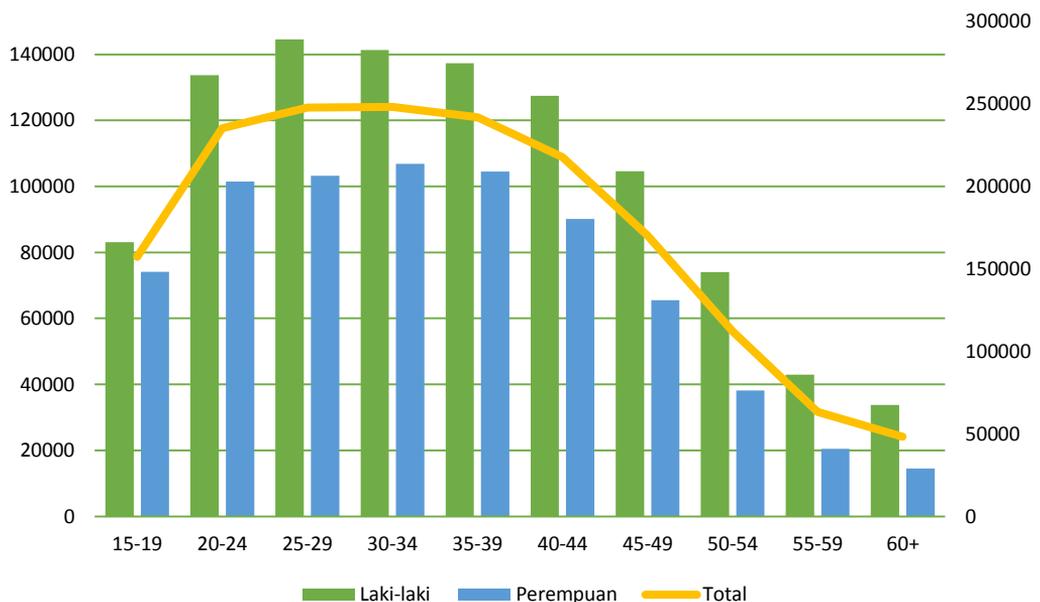
mengindikasikan bahwa di Papua secara umum penduduk usia kerja laki-laki mempunyai pendidikan yang lebih tinggi dibanding perempuan.

Struktur Demografi Angkatan Kerja Papua

Penduduk usia kerja selanjutnya digolongkan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah mereka yang mempunyai pekerjaan, baik sedang bekerja maupun yang sementara tidak sedang bekerja karena suatu sebab, seperti petani yang sedang menunggu panen/hujan, pegawai yang sedang cuti, sakit, dan sebagainya. Di samping itu mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang

mencari pekerjaan/mengharapkan dapat pekerjaan atau bekerja secara tidak optimal disebut pengangguran. Pengangguran tetap digolongkan ke dalam angkatan kerja karena meskipun mereka belum menghasilkan pendapatan, namun mereka berusaha mendapatkan pekerjaan. Sementara itu, bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang tidak bekerja maupun sementara tidak bekerja. Dengan kata lain yang dikerjakan oleh penduduk bukan angkatan kerja adalah sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya.

Gambar 9.5 Jumlah Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Provinsi Papua, 2015



Pertumbuhan angkatan kerja di satu wilayah tidak selalu dipengaruhi oleh besarnya pertumbuhan jumlah penduduk yang sudah memasuki usia kerja, struktur penduduk berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan pendidikan juga dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan angkatan kerja. Angkatan kerja yang besar jika dapat dimanfaatkan dengan baik diharapkan akan mampu meningkatkan kegiatan perekonomian yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat dicapai apabila angkatan kerja seluruhnya terserap oleh lapangan pekerjaan yang ada.

Pada tahun 2015, jumlah angkatan kerja di Provinsi Papua mencapai 1.741.945 orang. Hampir 58,72 persen dari jumlah tersebut berjenis kelamin laki-laki, sisanya 41,28 persen adalah perempuan, artinya penduduk laki-laki lebih banyak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi aktif daripada perempuan. Menurut kelompok umur terlihat bahwa umur 20-24 tahun merupakan kelompok umur di mana penduduk usia kerja di Papua mulai banyak yang masuk ke dalam angkatan

kerja. Jumlah angkatan kerja semakin bertambah seiring bertambahnya umur dan memasuki puncaknya pada kelompok umur 30-34 tahun, kemudian kembali menurun pada kelompok umur yang lebih tua yang dapat disebabkan karena pensiun.

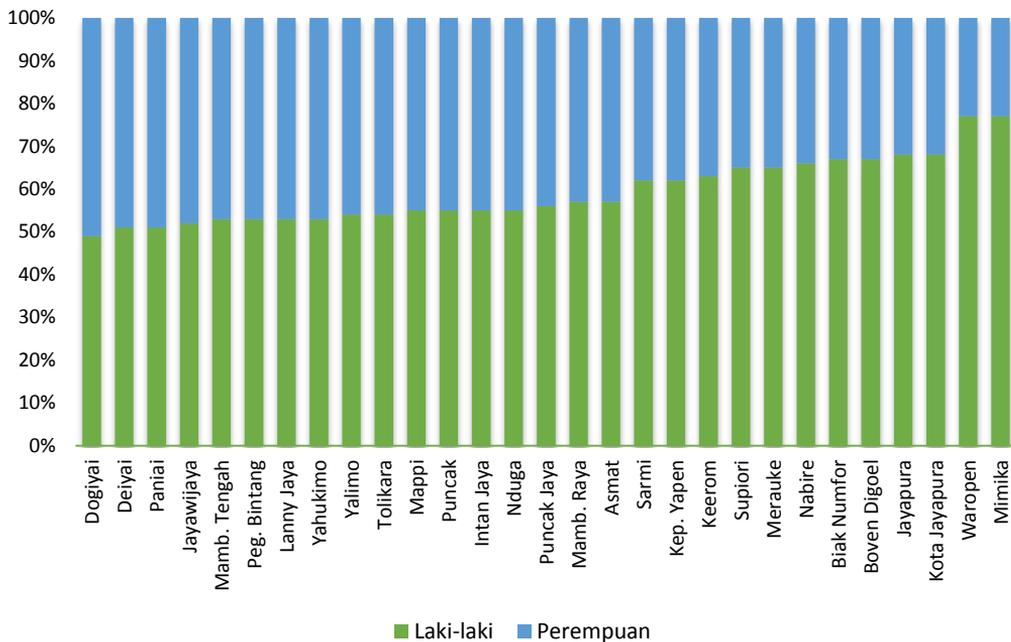
Hal yang menarik dari gambar tersebut adalah pada awalnya yaitu pada kelompok umur 15-19 tahun, selisih jumlah pekerja laki-laki dan perempuan yang masuk ke dalam angkatan kerja tidak terlalu besar. Selisih tersebut terlihat semakin besar pada seiring dengan bertambahnya umur terutama pada kelompok umur 20-29 tahun. Diduga hal tersebut dikarenakan kelompok usia tersebut adalah rata-rata usia kawin perempuan sehingga mereka masuk ke dalam kegiatan domestik yaitu mengurus rumah tangga dan menjadi bagian dari bukan angkatan kerja. Akan tetapi pada kelompok umur 30-34 tahun jumlah angkatan kerja perempuan kemudian kembali meningkat, yang dapat disebabkan oleh ibu rumah tangga yang kembali aktif bekerja maupun perempuan yang baru menamatkan pendidikannya. Sementara itu, jumlah angkatan kerja laki-

laki memuncak pada kelompok umur 25-29 tahun.

Sebaran angkatan kerja di Papua tidak bergantung pada jumlah penduduk usia kerjanya, meskipun secara umum berlaku demikian. Jumlah penduduk usia kerja yang unggul secara kuantitas, seperti di Kota Jayapura tidak serta merta memiliki jumlah angkatan kerja yang besar pula. Hal ini dapat disebabkan oleh di kota atau kabupaten yang lebih maju, kemungkinan

besar penduduk usia kerja utamanya penduduk pada kelompok umur 15-24 tahun masih bersekolah sehingga dikategorikan bukan angkatan kerja. Menurut kabupaten/kota, angkatan kerja paling tinggi terdapat di Kabupaten Jayawijaya yaitu sebanyak 133.436 orang. Menyusul berikutnya adalah Kota Jayapura dengan angkatan kerja sebanyak 126.939 orang, sedangkan Kabupaten Supiori mempunyai jumlah angkatan kerja paling kecil yaitu sebesar 6.737 orang.

Gambar 9.6 Persentase Penduduk Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Papua, 2015



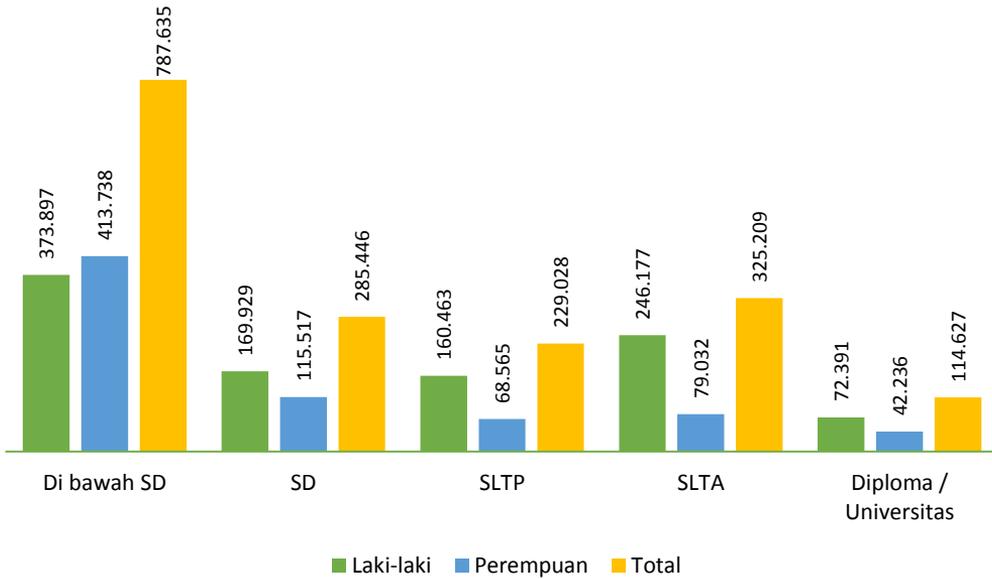
Jumlah angkatan kerja menurut jenis kelamin pada masing-masing kabupaten/kota bervariasi dan tergantung pada topografi wilayahnya. Kabupaten/kota yang termasuk dataran rendah, jumlah angkatan kerja laki-laki lebih mendominasi dibanding perempuan, minimum perbandingannya adalah 6 dibanding 4. Begitu pula untuk kabupaten dataran tinggi, laki-laki masih mendominasi angkatan kerja. Sementara itu, di daerah pegunungan jumlah angkatan kerja hampir sepadan/sama antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dapat disebabkan karena faktor budaya di daerah pegunungan di mana perempuan atau “mama-mama” Papua pada umumnya membantu suaminya bekerja di ladang sebagai pekerja keluarga atau tak dibayar.

Tingkat Pendidikan Angkatan Kerja Papua

Secara umum kualitas angkatan kerja di Papua masih rendah. Hal ini terlihat dari tingkat pendidikan sebagian

besar angkatan kerja di Papua yang memiliki tingkat pendidikan di bawah SD. Persentase angkatan kerja yang tidak tamat SD atau bahkan yang belum pernah sekolah pada tahun 2014 sebesar 39,4 persen, meningkat menjadi 45,22 persen pada tahun 2015. Selain itu, ketimpangan gender dalam hal pendidikan juga masih terlihat. Tingkat pendidikan angkatan kerja perempuan lebih rendah dibanding laki-laki. Pada tingkat pendidikan di bawah SD terlihat dominasi angkatan kerja perempuan, namun semakin tinggi tingkat pendidikan, ternyata laki-laki lebih beruntung dalam mengenyam pendidikan dibanding perempuan. Sebagai contoh pada level pendidikan SLTA, persentase laki-laki adalah sebanyak 75,7 persen, sedangkan perempuan hanya 24,3 persen begitu pula pada level pendidikan yang lebih tinggi. Potret keadaan pendidikan angkatan kerja ini hendaknya dapat menjadi acuan dalam penentuan kebijakan dalam bidang pendidikan terutama bagi perempuan.

Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua, 2015
Gambar 9.7



Jumlah angkatan kerja dengan pendidikan rendah (tidak tamat SD) masih sangat tinggi dan terjadi hampir di seluruh kabupaten di Provinsi Papua, kecuali pada Kabupaten Jayapura dan Nabire yang masing-masing hanya 6,8 persen dan 7,5 persen (lampiran). Bahkan kabupaten-kabupaten di wilayah pegunungan, lebih dari separuh penduduk angkatan kerjanya berpendidikan rendah. Kabupaten Puncak dan Intan Jaya merupakan kabupaten dengan jumlah angkatan kerja yang pendidikan tidak tamat SD paling besar yaitu mencapai 77,8 persen. Hal ini dapat

disebabkan oleh minimnya fasilitas pendidikan di daerah tersebut, diperparah oleh wilayah geografis yang sangat sulit sehingga menghambat masyarakat untuk mengakses ke fasilitas pendidikan yang lebih memadai.

Di sisi lain, kabupaten dengan persentase angkatan kerja yang berpendidikan SLTA ke atas yang cukup tinggi adalah Kota Jayapura (72,3 persen), Kabupaten Biak Numfor (54,4 persen), dan Kabupaten Mimika (54 persen). Ketiga daerah ini relatif lebih maju dibanding daerah

lainnya, selain itu sebagai daerah yang berstatus kota, biasanya memiliki fasilitas pendidikan yang lebih lengkap serta kesadaran masyarakat dalam hal pendidikan juga relatif lebih baik.

Kota Jayapura yang merupakan ibu kota Provinsi Papua dan menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi mempunyai kuantitas dan kualitas angkatan kerja yang terbilang maju dibanding kabupaten lainnya di Papua. Hal ini akan menjadi sebuah modal dasar penggerak laju pertumbuhan ekonomi. Di lain pihak, tentunya akan menjadi catatan sendiri bagi pemerintah dalam membangun dan mendongkrak pendidikan terutama di daerah pegunungan agar kualitas tenaga kerjanya dapat ditingkatkan.

Struktur Demografi Penduduk Bekerja

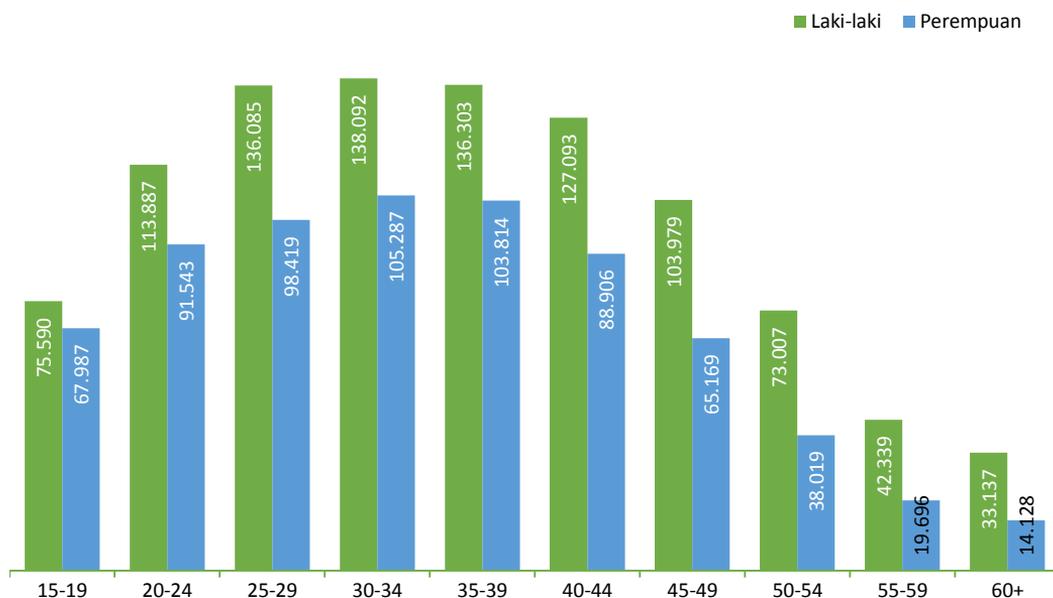
Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak

terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi. Pada tahun 2015 jumlah penduduk bekerja di Provinsi Papua sebanyak 1.672.480 orang atau sebesar 96 persen dari seluruh angkatan kerja yang ada. Dari jumlah tersebut sekitar 59 persen adalah laki-laki sisanya 41 persen adalah perempuan.

Dalam menganalisis ketenagakerjaan, penduduk yang bekerja dapat dibedakan menurut kelompok umur. Tujuannya adalah untuk melihat kontribusi pekerja berdasarkan kelompok umur dalam dunia pasar kerja. Idealnya, mayoritas penduduk yang bekerja dalam pasar kerja adalah mereka yang berusia prima. Namun tidak menutup kemungkinan penduduk usia muda dan tua dapat ikut andil dalam pasar tenaga kerja tersebut. Hal ini antara lain disebabkan adanya rasa tanggung jawab untuk mencari nafkah dan membantu ekonomi rumah tangga dan keluarga.

Gambar 9.8

Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Provinsi Papua, 2015



Secara umum rata-rata usia pekerja di Papua sekitar 30-34 tahun, terlihat dari besarnya jumlah penduduk yang bekerja pada kelompok umur tersebut. Pada kelompok umur muda belum banyak penduduk yang terjun ke pasar kerja. Hal ini disebabkan karena mereka lebih cenderung memilih untuk bersekolah dibanding bekerja. Selanjutnya, memasuki usia prima (25 tahun ke atas) jumlah penduduk yang bekerja pun meningkat, sampai mencapai puncaknya pada kelompok usia 30-34 tahun yang mencapai 343.379 orang atau sekitar

14,55 persen. Semakin tinggi kelompok umur, semakin sedikit jumlah penduduk yang bekerja, namun dari gambar tersebut terlihat bahwa masih ada penduduk bukan usia produktif (60 tahun ke atas) yang masih aktif bekerja.

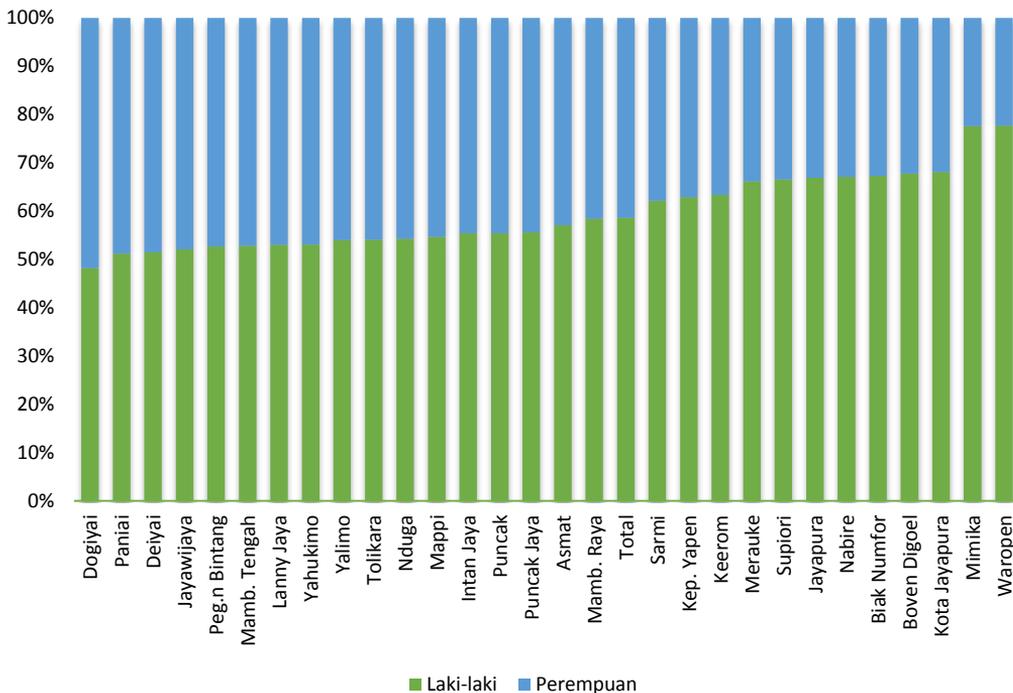
Tidak terlihat perbedaan pola antara penduduk laki-laki yang bekerja dan perempuan pada setiap kelompok umur. Gambar di atas menunjukkan bahwa penduduk laki-laki yang bekerja lebih banyak daripada perempuan, di mana puncak umur penduduk yang bekerja baik

laki-laki maupun perempuan adalah 30 hingga 34 tahun. Sejalan dengan pola angkatan kerja sebelumnya, selisih jumlah pekerja laki-laki dan perempuan pada kelompok umur 15-19 tahun pada awalnya tidak berbeda jauh. Semakin tinggi kelompok umur, semakin besar selisih jumlah antara pekerja laki-laki dan perempuan.

Kondisi tersebut, persentase perempuan yang terlibat dalam dunia kerja juga

mengalami penurunan seiring dengan peningkatan umurnya. Sebaliknya, persentase laki-laki yang bekerja pada setiap kelompok umur justru mengalami peningkatan. Sebagai ilustrasi tampak pada kelompok usia 45-49 tahun, persentase laki-laki dan perempuan yang bekerja berturut-turut adalah 61 persen dan 39 persen. Kemudian pada kelompok usia 60 tahun ke atas persentasenya menjadi 70 persen dan 30 persen.

Gambar 9.9 Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua, 2015



Pola sebaran penduduk bekerja di Provinsi Papua menurut kabupaten/kota mengikuti pola sebaran angkatan kerja yang telah dibahas sebelumnya. Gambar di atas menunjukkan bahwa pada kabupaten dengan topografi berupa dataran yang mudah dijangkau seperti Kota Jayapura, Mimika, dan Biak Numfor, persentase penduduk laki-laki yang bekerja lebih banyak dibanding perempuan. Demikian halnya dengan kabupaten yang tergolong bertopografi dataran sulit, jumlah penduduk yang bekerja didominasi oleh laki-laki. Sebaliknya, pada beberapa kabupaten di pegunungan selisih persentase laki-laki dan perempuan yang bekerja semakin kecil. Bahkan di Kabupaten Dogiyai, persentase perempuan yang bekerja (52 persen) sedikit lebih tinggi daripada laki-laki (48 persen).

Mayoritas Pekerja di Papua Berpendidikan Rendah

Selain dapat dibedakan menurut kelompok umur, dalam ketenagakerjaan penduduk yang bekerja juga dapat dibedakan menurut tingkat pendidikan.

Salah satu tujuannya adalah untuk melihat seberapa besar pasar tenaga kerja dapat menyerap tenaga kerja dengan tingkat keahlian atau keterampilan tertentu sesuai dengan tingkat pendidikannya. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang tidak menjamin semakin mudah baginya untuk memperoleh pekerjaan apalagi yang sesuai dengan pendidikannya. Adanya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup menyebabkan pasar tenaga kerja yang dimasuki seseorang yang berpendidikan tinggi tak jarang menjadi tidak tepat.

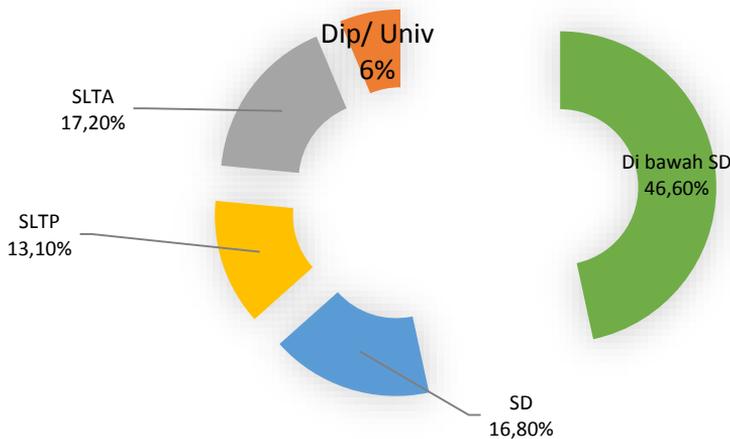
Pada tahun 2015, lebih dari separuh penduduk yang bekerja berpendidikan rendah, bahkan 46 persennya merupakan tidak tamat SD atau belum pernah sekolah. Persentase pekerja dengan pendidikan menengah yaitu SLTP hanya sekitar 13 persen sementara pekerja dengan pendidikan tinggi yaitu SMA dan Perguruan Tinggi sekitar 23 persen.

Kondisi tersebut berlaku hampir di seluruh kabupaten/kota yang ada di wilayah Papua kecuali di Kota Jayapura dan Kabupaten Mimika. Di kedua

kabupaten/kota tersebut, persentase pekerja yang berpendidikan rendah kurang dari satu persen. Kualitas pendidikan pekerja yang masih rendah ini terutama terjadi di daerah pegunungan yang minim fasilitas pendidikan. Bahkan di Kabupaten Deiyai lebih dari 80 persen penduduk yang bekerja berpendidikan

rendah. Diduga mereka yang berpendidikan rendah ini adalah pekerja di sektor pertanian, di mana sektor tersebut merupakan sektor yang paling mendominasi struktur perekonomian kabupaten-kabupaten di wilayah pegunungan.

Gambar 9.10 Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Papua, 2015



Dominasi Sektor Pertanian

Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha akan menunjukkan sektor ekonomi apa yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Untuk memudahkan analisis, publikasi ini menggunakan pengelompokan lapangan

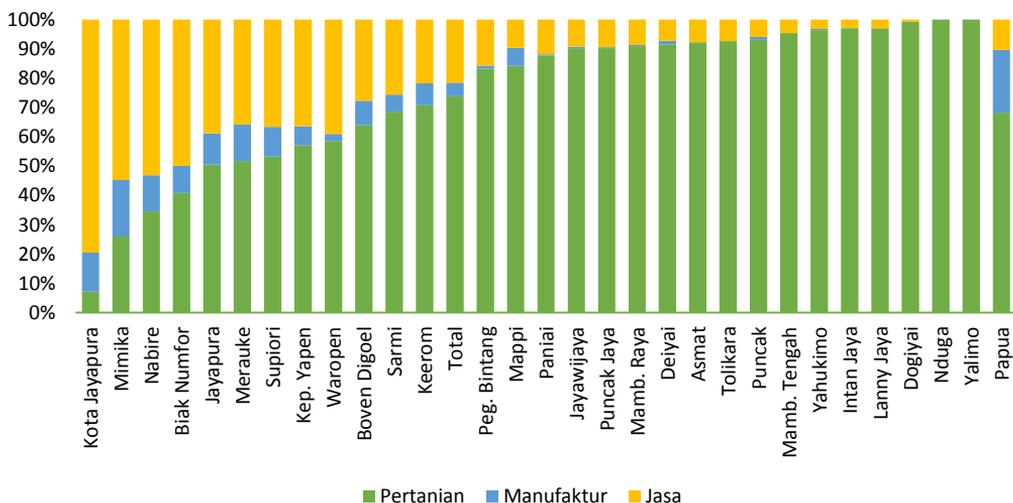
usaha ke dalam tiga kelompok, yaitu pertanian, industri, dan jasa. Gambar 7.11 menunjukkan bahwa sektor pertanian adalah sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Papua. Pada tahun 2015 sektor ini mampu menyerap hingga 1,14 juta orang atau sekitar 68 persen dari total pekerja. Selanjutnya

adalah sektor jasa-jasa yang mampu menyerap hingga 21 persen pekerja, sisanya diserap ke dalam sektor manufaktur. Meskipun sektor manufaktur merupakan sektor yang menyumbang nilai PDRB paling besar di Papua, sektor ini tidak mampu menyerap banyak tenaga kerja. Hal ini dapat disebabkan karena sektor ini memerlukan tenaga kerja dengan kualifikasi tertentu yang biasanya memiliki tingkat pendidikan tinggi, pengalaman kerja, dan keahlian tertentu, sementara mayoritas angkatan kerja di Papua adalah pendidikan rendah. Di sisi lain, besarnya sumbangan sektor ini

terhadap PDRB Papua dan minimnya kemampuan sektor ini menyerap tenaga kerja mengindikasikan tingginya produktivitas pekerja yang terserap di sektor ini.

Pertanian masih merupakan sektor yang paling dominan di mayoritas kabupaten/kota di Papua. Apabila dilihat menurut kabupaten/kota, ada beberapa kabupaten/kota di mana sektor pertanian bukan merupakan sektor unggulan karena telah mengalami pergeseran ke sektor sekunder.

Gambar 9.11 Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Usaha di Provinsi Papua, 2015



Pergeseran struktur perekonomian dari pertanian ke sektor industri dan jasa umumnya terjadi di daerah dataran rendah. Kota Jayapura sebagai ibukota Provinsi Papua, sebagian besar pekerja berada pada sektor jasa (80 persen), sedangkan sektor pertanian hanya sekitar 7,20 persen. Hal yang sama juga terjadi pada Kabupaten Biak Numfor, Nabire, dan Mimika di mana lebih dari separuh pekerja terserap di sektor jasa. Di sisi lain, sektor pertanian masih menjadi mata pencarian utama bagi penduduk di kabupaten-kabupaten dengan topografi pegunungan. Kabupaten tersebut mempunyai persentase pekerja pertanian lebih dari 95 persen. Di antaranya adalah Kabupaten Nduga, Yalimo, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Yahukimo, Dogiyai, dan Intan Jaya.

Jika ditinjau berdasarkan pendidikannya, pekerja dengan pendidikan SD ke bawah masih mendominasi pekerja di sektor pertanian, meskipun masih terdapat pekerja dengan pendidikan tinggi yang termasuk ke dalam sektor ini, yaitu sekitar 0,6 persen. Ada dua kemungkinan yang terjadi, yang pertama adalah terbatasnya

lapangan usaha, sehingga mereka terpaksa bekerja di sektor pertanian. Kedua, bisa jadi mereka berperan sebagai pengusaha di bidang pertanian (bukan sebagai buruh tani).

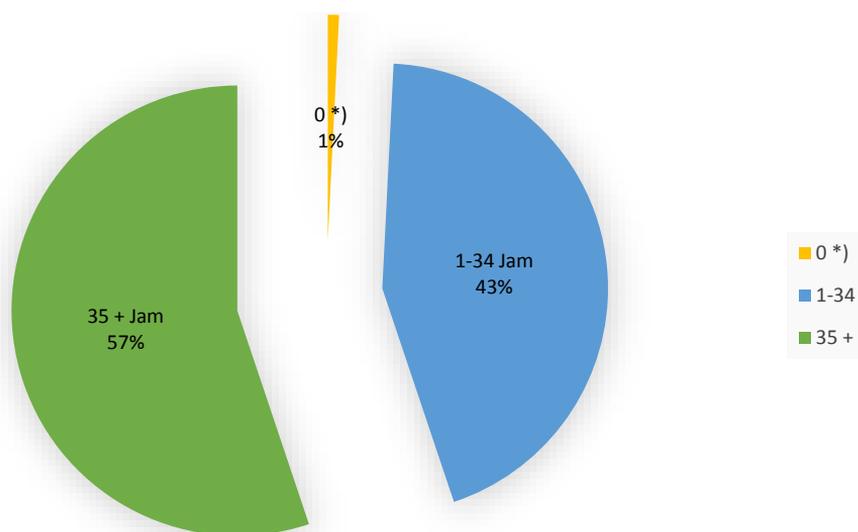
Jika lapangan usaha dikategorikan menjadi sembilan sektor, secara umum tampak bahwa sektor-sektor selain sektor pertanian, lebih membutuhkan spesifikasi pendidikan dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dari SD. Misalnya pada sektor pertambangan, mayoritas pekerja yang terserap sekitar 60 persen adalah lulusan SLTA. Sama halnya dengan sektor industri, listrik dan gas, konstruksi, transportasi, lembaga keuangan, dan jasa di mana hampir 50 persennya menyerap pekerja dengan pendidikan minimal SLTA.

Karakteristik Pekerja: Jam Kerja

Salah satu indikator untuk melihat kinerja pekerja adalah dengan melihat jumlah jam kerja. Hal ini berguna untuk mengetahui proporsi penduduk bekerja yang dapat dikategorikan sebagai pekerja “murni” dan proporsi penduduk bekerja namun dikategorikan pengangguran karena

jumlah jam kerjanya kurang dari jumlah jam kerja normal.

Gambar 9.12 Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Jam Kerja di Provinsi Papua, 2015



Keterangan *) Sementara tidak bekerja

Di Indonesia seseorang dikatakan murni bekerja apabila bekerja minimal 35 jam selama seminggu dengan konsep jumlah jam kerja yang digunakan untuk bekerja tidak termasuk jam istirahat resmi dan jam kerja yang digunakan untuk hal-hal di luar pekerjaan. Jumlah jam kerja tersebut merupakan kumulatif selama satu minggu. Gambar 7.12 menunjukkan bahwa lebih dari 50 persen pekerja di Papua adalah pekerja murni, sisanya dapat dikategorikan sebagai setengah

penganggur. Adapun sebesar satu persen pekerja di Papua sementara tidak bekerja pada tahun 2015.

Selanjutnya menurut sektor, sebagian besar pekerja memiliki jam kerja normal (di atas 35 jam) hampir di semua sektor, kecuali sektor pertanian. Di sektor pertanian, sebesar 54 persen pekerja bekerja di bawah jam kerja normal. Hal ini dikarenakan pada umumnya di bekerja di sektor pertanian tidak dibatasi waktu.

Tabel 9.5 Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jumlah Jam Kerja di Provinsi Papua, 2015

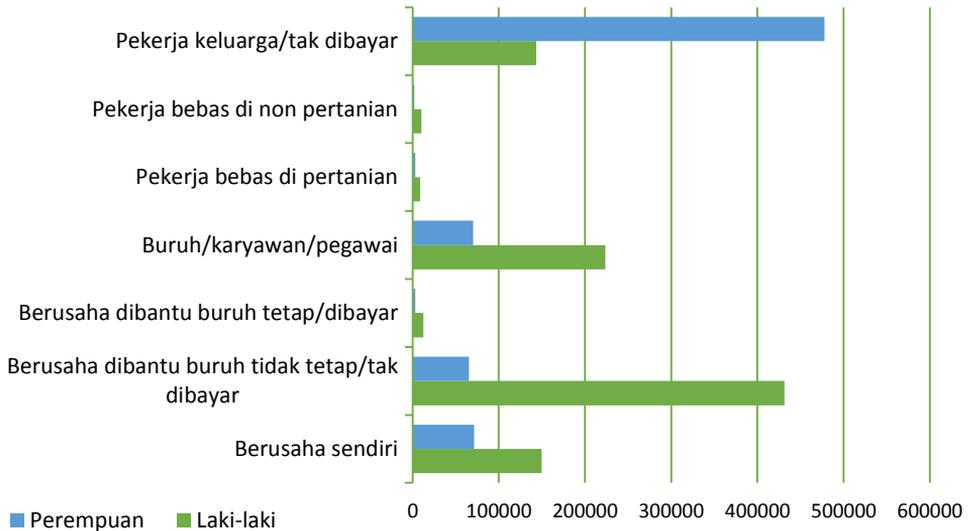
Lapangan Usaha	Jumlah Jam Kerja			Jumlah
	Sementara tidak bekerja (0 jam)	Di bawah jam kerja normal (1-34 jam)	Jam kerja normal (≥ 35 jam)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pertanian	7 406	668 148	560 983	1 236 537
Pertambangan	123	1 460	13 040	14 623
Industri	253	5 439	10 490	16 182
LGA	0	93	2 833	2 926
Konstruksi	789	3 138	39 164	43 091
Perdagangan	1 590	22 913	101 082	125 585
Transportasi	330	3 874	41 001	45 205
Lembaga Keuangan	0	1 804	16 009	17 813
Jasa	2 615	30 002	137 901	170 518
Jumlah	1 3106	736 871	922 503	1 672 480

Karakteristik Pekerja: Status Pekerjaan

Status pekerjaan merupakan kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Salah satu kegunaan dalam menganalisis status pekerjaan pekerja adalah untuk mengetahui pekerja di sektor informal.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh BPS pada tahun 2015, tercatat bahwa status pekerjaan mayoritas pekerja di Papua adalah sebagai pekerja keluarga/tidak dibayar dan berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar yang berturut-turut mempunyai persentase 37,14 persen dan 29,7 persen. Selanjutnya adalah sebagai buruh/karyawan/pegawai sebesar 16,5 persen.

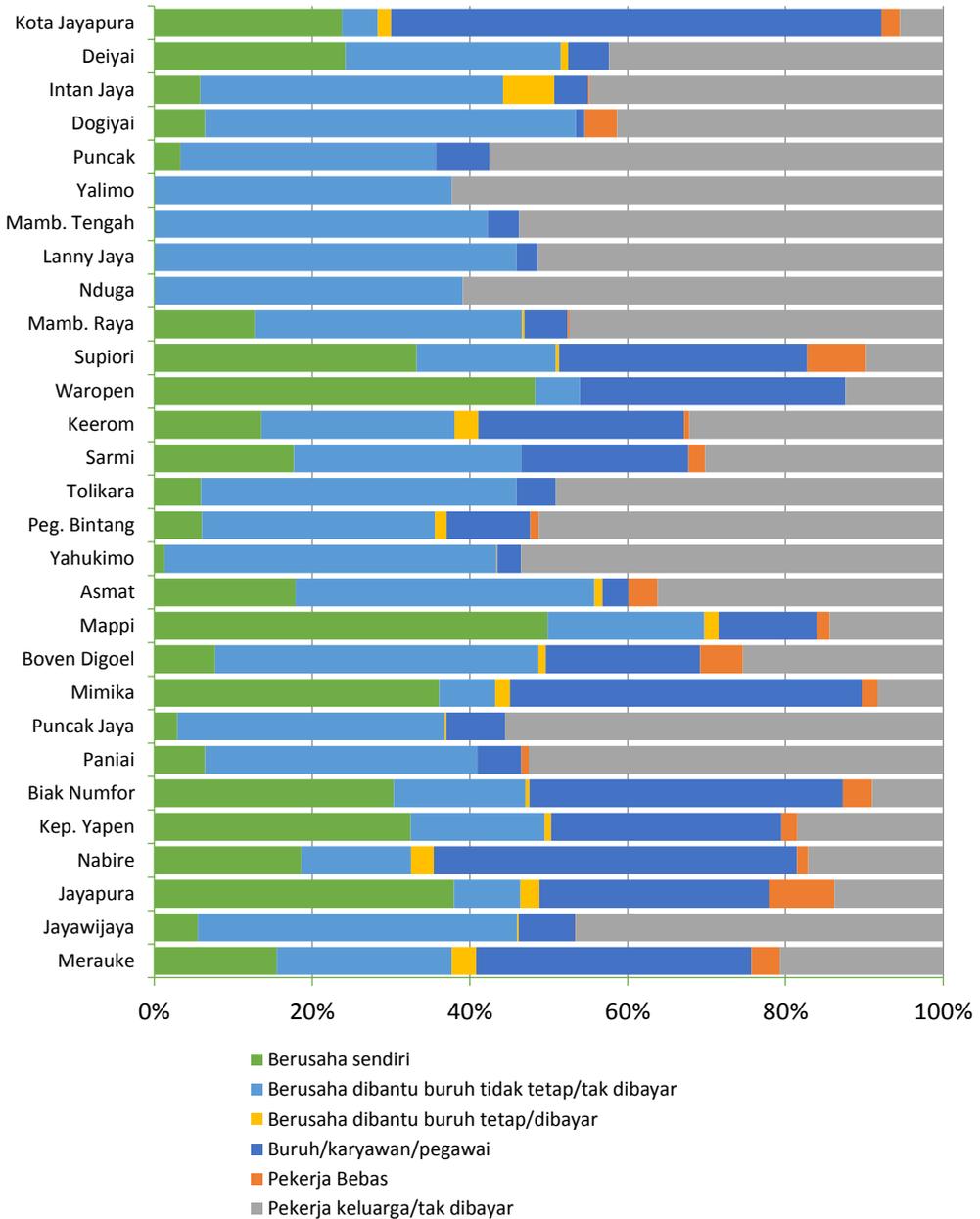
Gambar 9.13 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua, 2015



Mayoritas pekerja tak dibayar atau pekerja keluarga adalah perempuan yaitu sebesar 77 persen. Ketimpangan lain terjadi pada status buruh/karyawan/pegawai, di mana lebih banyak laki-laki dibanding perempuan. Laki-laki yang berstatus sebagai buruh/karyawan ada sebanyak 223.515 orang (76 persen), sementara perempuan hanya sebanyak 70.230 orang (24 persen). Hal ini memberikan kesimpulan bahwa secara umum laki-laki memiliki kesempatan dan akses yang lebih baik terhadap status pekerjaan tertentu daripada perempuan. Ironisnya, status

pekerjaan tertentu tersebut biasanya yang dapat memberikan imbalan jasa yang lebih tinggi. Ditambah dengan kenyataan bahwa pekerja keluarga merupakan pekerja yang tidak menerima upah atau penghasilan dari apa yang mereka kerjakan. Banyak faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut, antara lain faktor pendidikan dan budaya yang masih menempatkan perempuan sebagai pekerja domestik. Faktor pendidikan diduga merupakan faktor utama terbatasnya akses dan kesempatan perempuan untuk mendapatkan posisi yang lebih baik dalam pasar kerja.

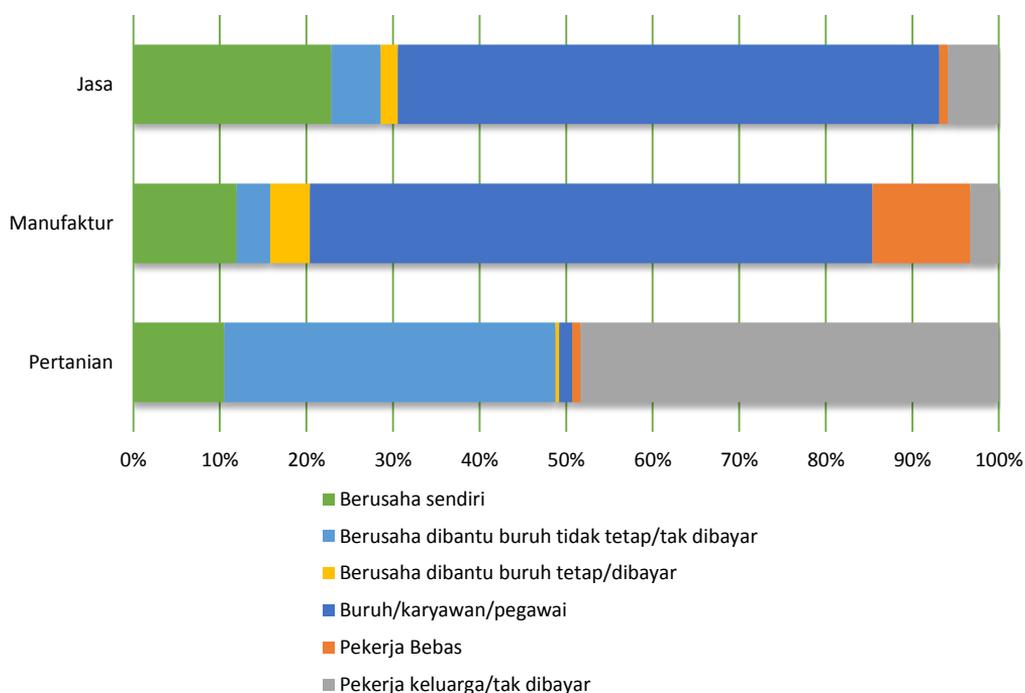
Gambar 9.14 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Status Pekerjaan di Provinsi Papua, 2015



Gambar 7.14 menunjukkan distribusi di dataran mudah terlihat bahwa pekerja menurut status pekerjaan di mayoritas penduduknya bekerja dengan wilayah Papua. Pada beberapa kabupaten status buruh/karyawan. Berbeda dengan

wilayah pegunungan seperti Kabupaten Mamberamo tengah, Yalimo, Yahukimo, Tolikara, Paniai, dan Dogiyai yang mempunyai kecenderungan mayoritas pekerjaannya adalah pekerja keluarga dan berusaha dibantu buruh tidak tetap.

Gambar 9.15 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Lapangan Usaha di Provinsi Papua, 2015



Jika dilihat berdasarkan lapangan usaha, jelas terlihat perbedaan status pekerjaan antara sektor pertanian, manufaktur dan jasa. Sebagian besar pekerja pertanian berstatus sebagai pekerja keluarga (48 persen) dan berusaha dibantu buruh tidak tetap (38 persen). Sementara sektor manufaktur dan jasa lebih didominasi oleh pekerja dengan status buruh/karyawan dengan

persentase masing-masing 65 persen dan 63 persen.

Karakteristik Pekerja: Sektor Formal dan Informal

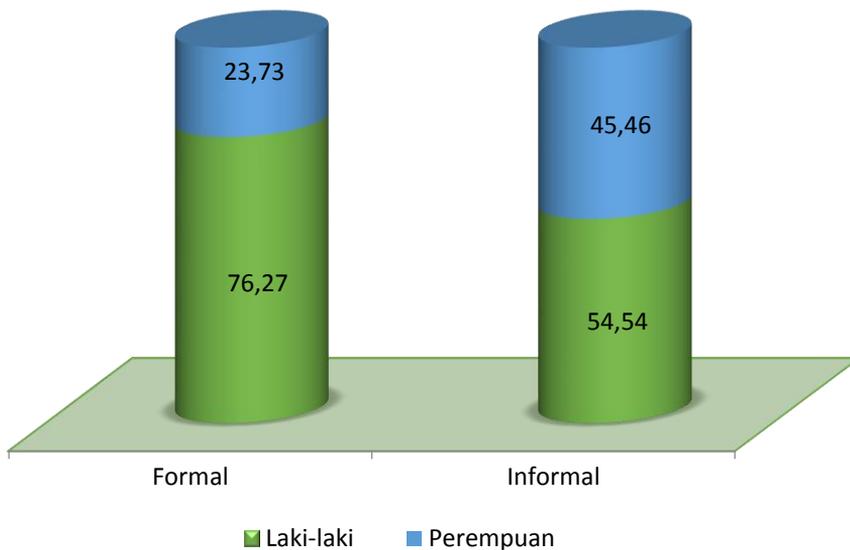
Dominasi pekerja di sektor informal sangat berkaitan dengan banyaknya penduduk bekerja pada sektor

pertanian. Seperti telah dipaparkan sebelumnya bahwa pertanian mendominasi penyerapan tenaga kerja di sebagian besar kabupaten di Papua. Banyaknya penduduk bekerja di sektor pertanian, terutama yang berstatus pekerja tidak dibayar menyebabkan

tingginya persentase pekerja sektor informal. Pada tahun 2015 penduduk bekerja di sektor formal di Provinsi Papua hanya sebesar 19 persen, sisanya 81 persen merupakan pekerja sektor informal.

Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Sektor Formal dan Informal dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua, 2015

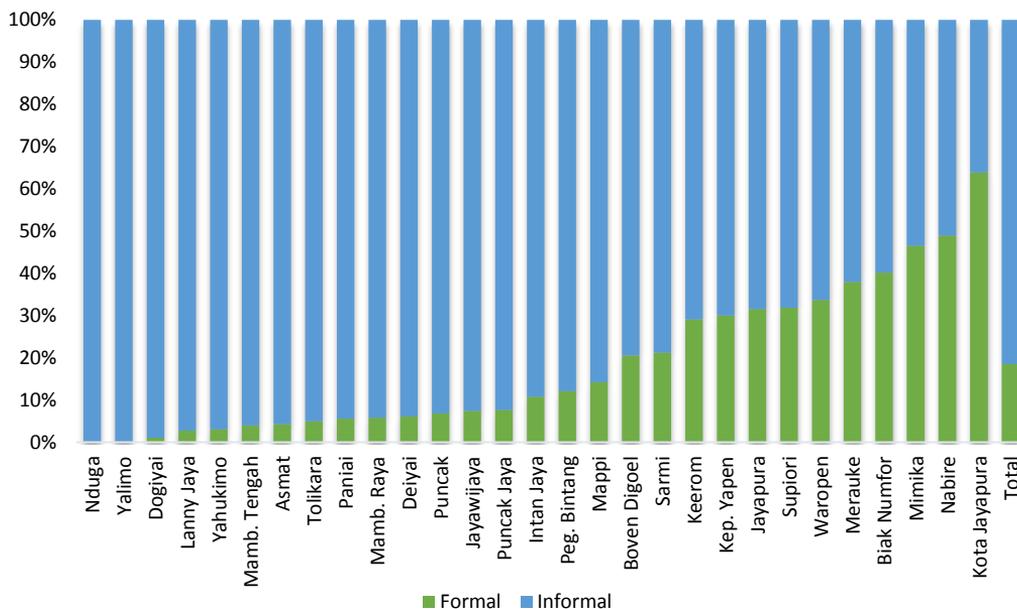
Gambar 9.16



Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, terlihat pada sektor formal lebih banyak didominasi oleh pekerja laki-laki. Sementara itu di sektor informal relatif

seimbang antara pekerja laki-laki dan pekerja perempuan, meskipun persentase pekerja laki-laki masih lebih tinggi daripada pekerja perempuan.

Gambar 9.17 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Sektor Formal dan Informal Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2015



Sebaran pekerja formal dan informal di kabupaten/kota di Provinsi Papua pada gambar di atas menunjukkan bahwa pekerja formal lebih banyak terdapat di daerah dataran rendah seperti Kota Jayapura, Nabire, Mimika, Biak Numfor dan Merauke. Sementara pekerja informal lebih banyak terdapat di daerah pegunungan seperti Kabupaten Nduga, Yalimo, Dogiyai dan Intan Jaya.

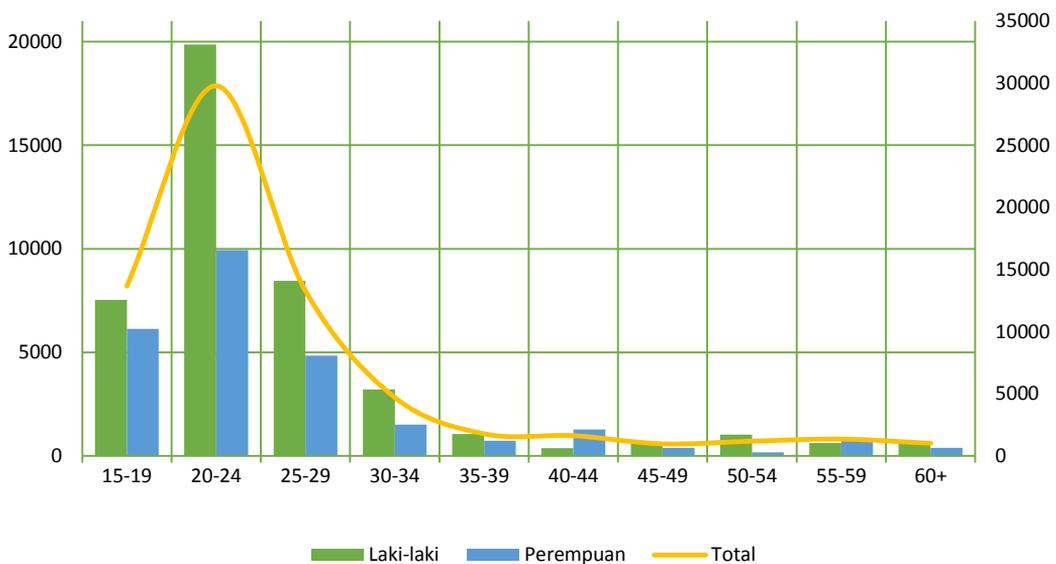
Karakteristik Pengangguran Papua

Pengangguran secara konsepsi merupakan bagian dari angkatan kerja. Adanya sejumlah pengangguran pada dasarnya menggambarkan adanya kelebihan penawaran tenaga kerja (*excess supply*) pada pasar kerja dibanding lowongan yang tersedia. Pengangguran merupakan keadaan seseorang yang mengalami hambatan di dalam usahanya untuk memperoleh pekerjaan.

Pada tahun 2015, jumlah pengangguran yang ada di Provinsi Papua adalah sebanyak 69.465 orang atau sebesar 3,99 persen dari total angkatan kerja. Banyak pemerhati ketenagakerjaan berpendapat bahwa nilai ini adalah terlalu kecil. Namun, perlu diingat kembali bahwa

seseorang yang bekerja membantu orang tuanya walaupun sebentar asalkan lebih dari 1 jam berturut-turut dalam satu minggu tetap tergolong sebagai bekerja dan di Papua mayoritas pekerjaannya adalah pekerja tak dibayar atau pekerja keluarga.

Gambar 9.18 Pengangguran Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua, 2015



Gambar di atas menunjukkan bahwa karakteristik demografi penganggur di Papua didominasi oleh penganggur muda yaitu mereka yang berusia 20-24 tahun dan berjenis kelamin laki-laki. Hal ini disebabkan karena sebagai output dari dunia pendidikan dimana pada usia

tersebut banyak orang yang baru lulus sekolah maupun kuliah dan sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha. Selanjutnya, pengangguran banyak ditemukan di kota atau kabupaten yang relatif maju seperti Kota Jayapura, Kabupaten Mimika, Jayapura Mimika, dan

Nabire (lampiran). Di beberapa kabupaten, angka pengangguran mencapai nol persen. Ini tidak berarti tidak ada pengangguran di wilayah tersebut, namun angkanya sangat kecil. Kabupaten tersebut di antaranya adalah Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, dan Intan Jaya. Jika ditinjau lebih dalam, kabupaten-kabupaten yang memiliki angka pengangguran nol persen adalah kabupaten yang masuk kategori wilayah pegunungan dengan mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian.

Tingginya tingkat pengangguran yang terjadi di Kota Jayapura disebabkan oleh banyaknya penduduk dari berbagai kabupaten yang datang untuk mencari pekerjaan di ibukota Papua ini, mengingat lebih banyak peluang dan fasilitas yang disediakan dibanding dengan kabupaten-kabupaten lain. Tak hanya dari kabupaten di Provinsi Papua, penduduk yang mencari

pekerjaan di Kota Jayapura bahkan datang dari provinsi lain. Laju pertumbuhan penduduk yang sedemikian pesatnya, tanpa diimbangi dengan perluasan kesempatan kerja menyebabkan banyak terjadinya pengangguran di Kota Jayapura.

Bila dilihat menurut kegiatannya, dari seluruh pengangguran di Papua, persentase terbesar adalah yang mencari pekerjaan sekitar 73 persen. Mereka yang mencari pekerjaan adalah mereka yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan; mereka yang sudah pernah bekerja, karena suatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan; serta mereka yang bekerja atau mempunyai pekerjaan, tetapi karena suatu hal masih berusaha untuk mendapatkan pekerjaan lain.

Tabel 9.6 Pengangguran Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua, 2015

Jenis Kegiatan	Jenis Kelamin		Jumlah	%
	Laki-laki	Perempuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Mencari Pekerjaan	31 120	19 246	50 366	72,51
Mempersiapkan Usaha	578	760	1 338	1,93

Tabel 8.3 Lanjutan

Jenis Kegiatan	Jenis Kelamin		Jumlah	%
	Laki-laki	Perempuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Mencari Pekerjaan	31 120	19 246	50 366	72,51
Putus asa/merasa tidak mungkin mendapat kerja	8 400	4 876	13 276	19,11
Sudah punya tapi belum mulai kerja	3 247	1 238	4 485	6,46
Jumlah	43 345	26 120	69 465	100,00

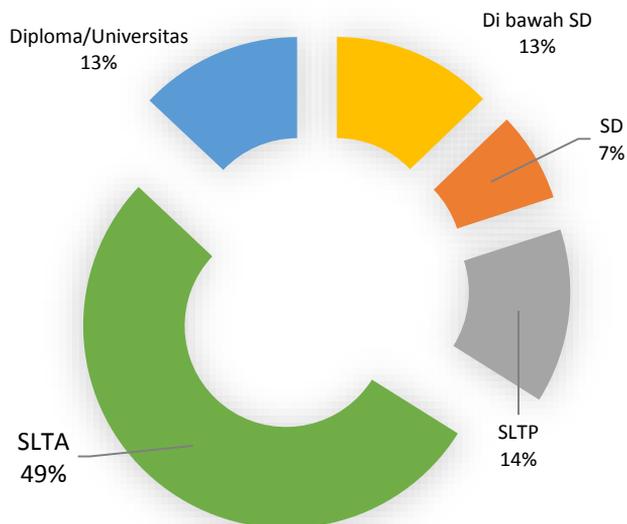
Persentase terkecil terdapat pada kegiatan mempersiapkan usaha, yaitu sebesar 1,93 persen. Mempersiapkan usaha cenderung pada pekerjaan yang berusaha sendiri atau berusaha dibantu buruh tidak tetap atau berusaha dibantu buruh tetap. Hal ini mengindikasikan bahwa keinginan penduduk untuk berwiraswasta sangat kecil sehingga mereka lebih memilih mencari pekerjaan daripada membuka lapangan usaha. Di samping itu ada sebanyak 6,5 persen pengangguran yang sudah diterima bekerja, namun belum mulai bekerja. Hampir pasti angka ini akan bergeser dari

status sebagai pengangguran menjadi bekerja.

Kualitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam pasar tenaga kerja dapat ditingkatkan melalui sarana pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang yang termasuk angkatan kerja akan mempengaruhi dan meningkatkan tingkat produktivitas dalam pekerjaannya. Untuk itu analisis pengangguran menurut tingkat pendidikan dapat digunakan sebagai indikator ketidakmampuan pasar tenaga kerja memanfaatkan *supply* angkatan kerja.

Gambar 9.19

Pengangguran Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Papua, 2015



Menurut tingkat pendidikan, karakteristik pengangguran di Papua adalah mereka yang berpendidikan tinggi yaitu SMA dan Perguruan Tinggi (62 persen), pendidikan rendah (20 persen), sisanya mereka yang memiliki pendidikan menengah yaitu SLTP sebesar 14 persen. Tingginya pengangguran pada pendidikan tinggi lebih disebabkan karena mereka lebih bersifat selektif dalam memilih pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan dan atau keterampilan yang mereka miliki. Seringkali terjadi bahwa lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sementara itu,

mereka memiliki kecenderungan untuk lebih memilih mencari pekerjaan di sektor formal daripada informal, sehingga menyebabkan angka pengangguran yang berpendidikan tinggi lebih tinggi dibanding yang berpendidikan rendah.

Meskipun demikian, apabila dilihat menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan penganggur, hampir 50 persen penganggur adalah tamatan SMA. Bagi pasar kerja, tingkat pendidikan SMA adalah pendidikan yang “tangung” karena saat ini sebagian besar sektor formal memerlukan kualifikasi pekerja

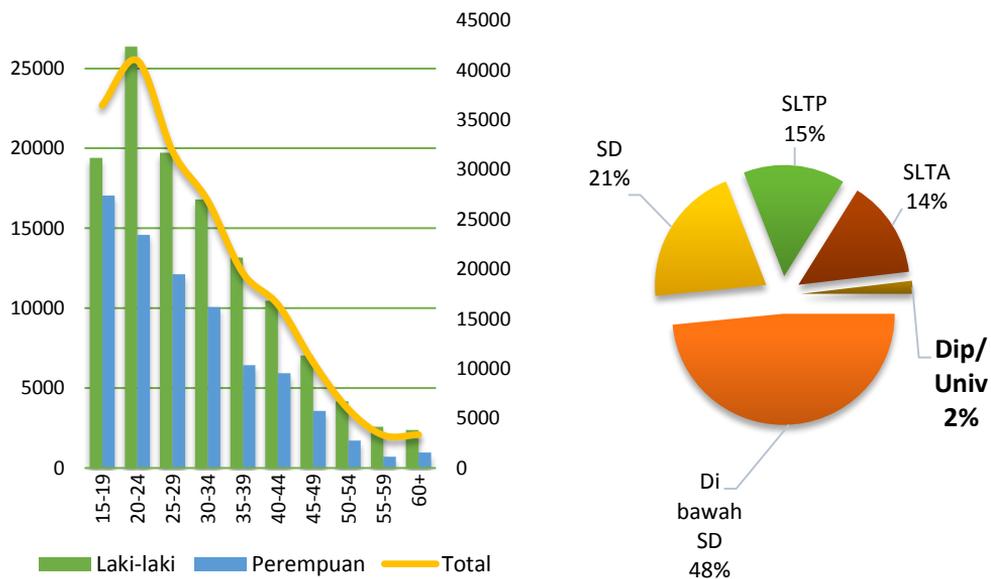
dengan tingkat pendidikan tinggi atau setara dengan Universitas atau minimal Diploma.

Karakteristik Setengah Pengangguran Papua

Penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu) dikategorikan dalam kelompok setengah pengangguran. Jumlah setengah pengangguran di Provinsi Papua Tahun 2015 adalah sebanyak 736.871 orang,

terdiri dari 195.280 orang setengah penganggur terpaksa (26,5 persen) dan 541.591 orang setengah penganggur sukarela (73,5 persen). Dalam kenyataannya setengah pengangguran sukarela tidak terlalu diperhitungkan dalam kategori pengangguran. Hal ini karena setengah penganggur sukarela memang tidak sedang mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain, meskipun jam kerjanya kurang dari jam kerja normal.

Gambar 9.20 Setengah Penganggur Terpaksa Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin dan Pendidikan di Provinsi Papua, 2015



Setengah penganggur terpaksa paling banyak berada pada kelompok umur 20-24 tahun. Pada kelompok usia ini, kecenderungan mencari pekerjaan atau menerima tawaran pekerjaan lain masih tinggi. Artinya mereka yang masih bekerja di bawah jam kerja normal masih punya keinginan untuk menambah pekerjaan lain (paruh waktu) atau mencari pekerjaan lain yang lebih sesuai. Dengan semakin meningkatnya umur, maka jumlah setengah penganggur pun semakin menurun. Jika dilihat berdasarkan gender, secara umum jumlah penganggur terpaksa lebih banyak laki-laki dibanding perempuan. Hal ini terjadi di semua kategori kelompok umur, dan secara perlahan keduanya menurun menjelang usia 50 tahun.

Berbeda dengan pengangguran terbuka, sebagian besar setengah penganggur terpaksa berpendidikan SD ke bawah, yaitu sekitar 69 persen. Penduduk yang berpendidikan rendah cenderung bekerja seadanya dan masih mencari pekerjaan yang lebih baik karena tuntutan ekonomi.

Tantangan: Kualitas Pekerja Papua

Kualitas tenaga kerja di Papua masih menjadi hambatan utama untuk mencapai produktivitas yang tinggi di suatu wilayah. Lebih dari separuh tenaga kerja di Papua berpendidikan rendah (SD ke bawah) dan pada umumnya bekerja di sektor pertanian, padahal sektor pertanian merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Papua. Untuk meningkatkan produktivitas sektor ini maka perlu upaya dan kerja keras pemerintah untuk meningkatkan modal manusia melalui pendidikan maupun pelatihan tenaga kerja sehingga mampu memperkuat diversifikasi sektor pertanian bernilai lebih tinggi.

Masuknya perempuan ke dalam kegiatan ekonomi aktif merupakan sumbangan yang besar bagi pembangunan di Papua. Perempuan yang bekerja tidak hanya memberikan sumbangan melalui produktivitas yang dihasilkannya tetapi juga memberikan manfaat bagi penurunan fertilitas dan pengendalian laju pertumbuhan penduduk yang manfaat jangka panjangnya salah satunya adalah

terhadap penurunan angka kematian bayi. Sayangnya, tingkat pendidikan pekerja perempuan yang relatif lebih rendah dari laki-laki mengakibatkan produktivitas yang dihasilkan lebih rendah daripada pekerja laki-laki. Selain itu, dominasi pekerja keluarga (tak dibayar) di Papua adalah perempuan.

Tantangan selanjutnya adalah pengangguran muda. Berdasarkan uraian di atas, pengangguran di Papua didominasi oleh kelompok umur muda

(20-24 tahun) di mana lebih dari 70 persen penganggur di Papua sedang mencari pekerjaan. Tingkat pendidikan penganggur yang mayoritas 'hanya' SMA dianggap pasar tenaga kerja sebagai tingkat pendidikan yang "tangung" untuk jenis pekerjaan tertentu. Oleh sebab itu upaya untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk menjadi pilihan program yang tepat untuk meningkatkan kapasitas manusia sebagai modal dasar untuk terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi.

**DEMOKRASI:
BENTUK
PEMBANGUNAN
MANUSIA
LAINNYA**

10

10

DEMOKRASI: BENTUK PEMBANGUNAN MANUSIA LAINNYA

“Indeks demokrasi bertujuan untuk mengkualifikasikan perkembangan demokrasi tingkat provinsi di Indonesia.”

Untuk melihat perkembangan demokrasi suatu wilayah bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan karena luasnya pemahaman dan pengertian tentang demokrasi yang mencakup sejumlah besar objek. Oleh karena itu perlu dilakukan penentuan komponen-komponen demokrasi apa saja yang datanya memungkinkan untuk dikumpulkan sehingga perkembangan demokrasi suatu wilayah dapat diukur dan dibandingkan dengan wilayah lain.

Demokrasi di Papua: Proses dan Progress

Sejak IDI pertama kali dihitung pada tahun 2009 IDI Provinsi Papua mengalami kondisi yang pasang surut. Pada tahun 2009 IDI Papua tercatat sebesar 63,80. Indeks ini terus mengalami penurunan sampai dengan tahun 2011 (59,05) dan menempatkan posisi demokrasi di Papua termasuk kategori “buruk” pada tahun tersebut. Namun pada tahun berikutnya, kondisi demokrasi di Papua menunjukkan perbaikan yang positif, sampai pada tahun 2014 indeksnya naik sebesar 3,1 poin dari tahun 2011 menjadi 62,15. Namun pada

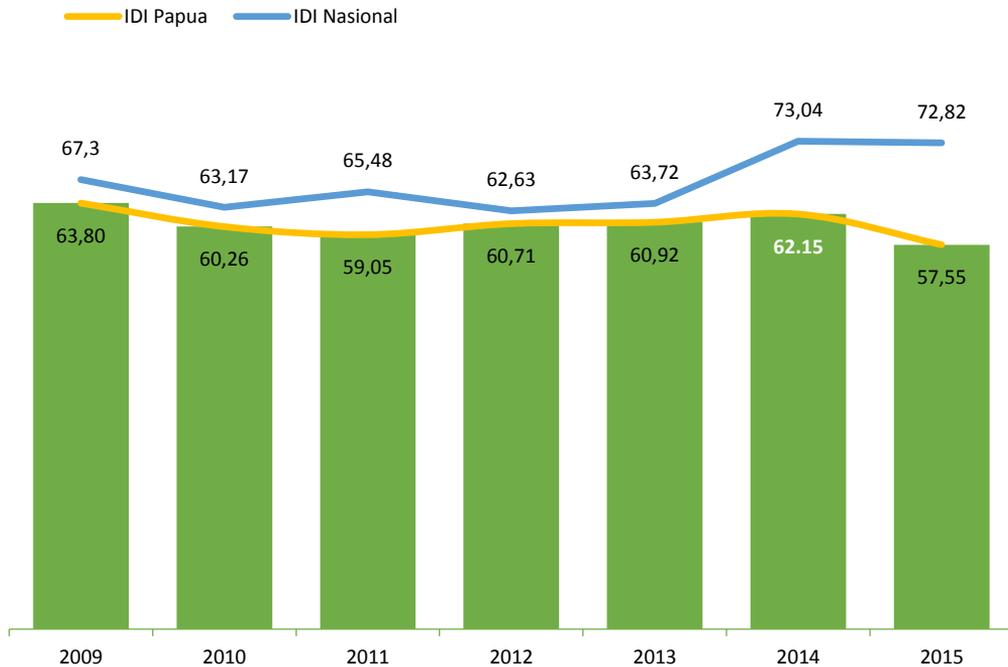
tahun 2015 IDI Provinsi Papua kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan yakni sebesar 4,6 poin dari 62,15 menjadi 57,55 dan kembali menempatkan posisi demokrasi Papua pada kategori “buruk”.

Fluktuasi angka IDI adalah cermin situasi dinamika demokrasi di Papua. IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas, memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya

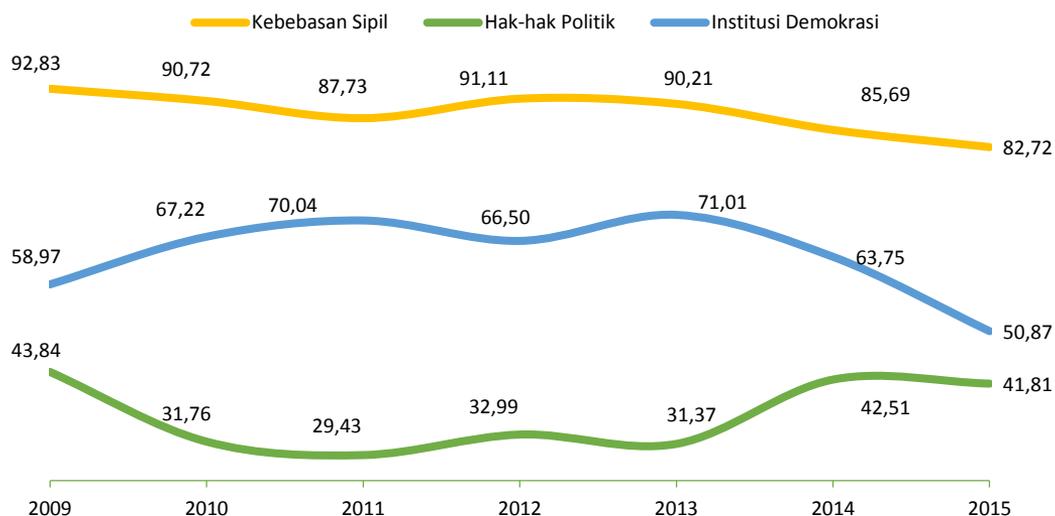
kondisi demokrasi suatu wilayah, karena IDI disusun secara cermat berdasarkan *evidence based* (fakta) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi.

Perlu diketahui, mulai periode 2015 ditetapkan 2 indikator baru komponen dari variabel “Peran Birokrasi Pemerintah Daerah”, sebagai langkah penyempurnaan agar penghitungan IDI lebih sensitif pada situasi lapangan terkini.

Gambar 10.1 Perkembangan IDI Provinsi Papua dan Nasional , 2009-2015



Gambar 10.2 Perkembangan IDI Provinsi Papua Menurut Aspek, 2009-2015



Distribusi Indeks dari ketiga aspek IDI pada gambar 9.2. menunjukkan nilai 82,72 untuk aspek Kebebasan Sipil; 41,81 untuk aspek Hak-hak Politik dan 50,87 untuk aspek Lembaga Demokrasi. Distribusi ketiga aspek ini sekaligus memperlihatkan kontribusi dari masing-masing aspek terhadap indeks keseluruhan. Aspek Kebebasan Sipil memberikan kontribusi paling tinggi disusul Lembaga Demokrasi, dan yang paling kecil memberikan kontribusi adalah aspek Hak-hak Politik. Meskipun aspek Kebebasan Sipil menyokong indeks sangat tinggi namun indeks secara keseluruhan yang dapat

dicapai oleh Provinsi Papua hanya sebesar 57,55, dikarenakan dua aspek lainnya memberikan kontribusi indeks relatif rendah, dan untuk tahun 2015 dua aspek demokrasi berada pada kategori “buruk”.

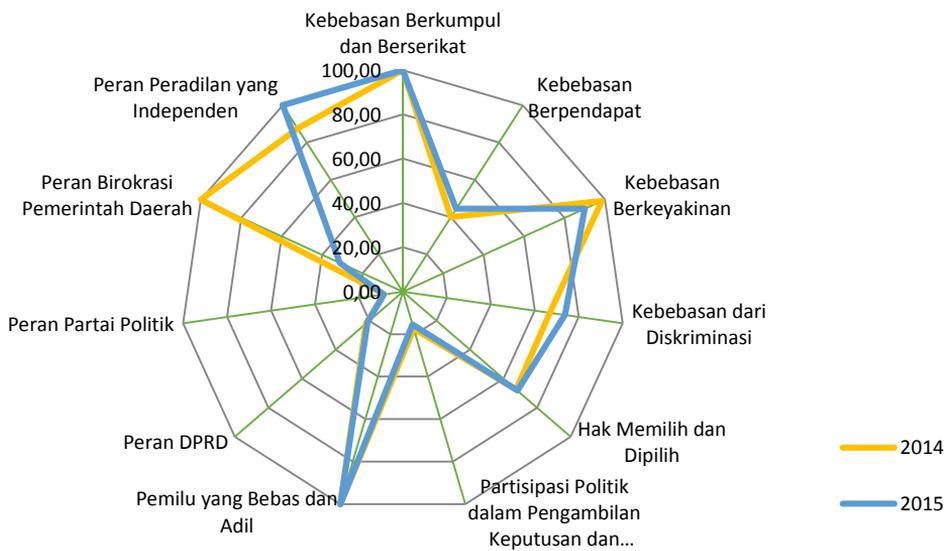
Angka-angka tersebut sepintas dapat diterjemahkan sebagai keberhasilan Pemerintah Provinsi Papua dalam mengembangkan sistem demokrasi, khususnya terkait hak kebebasan sipil bagi warganya. Walaupun demikian, harus diakui pemerintah belum sepenuhnya berhasil mengembangkan demokrasi terkait aspek lembaga demokrasi dan

menjadi perhatian adalah hubungannya dengan pengembangan hak-hak politik warga negara.

Tahun 2015 keadaan demokrasi di Provinsi Papua kembali mengalami degradasi, nilai indeks demokrasi 57,55

poin kembali menempatkan posisi demokrasi Papua pada kategori “buruk”. Penurunan IDI yang cukup signifikan ini tak lepas dari sumbangan penurunan aspek Lembaga Demokrasi yang sangat rendah.

Gambar 10.3 Perkembangan Variabel IDI Provinsi Papua, 2014-2015



Dari sisi variabel pembentuk IDI, terdapat lima variabel yang mengalami peningkatan skor dibandingkan dengan tahun 2014 yakni kebebasan berpendapat naik 4,47 poin, kebebasan dari diskriminasi naik 6,92 poin, hak memilih dan dipilih yang naik 0,64 poin, peran

partai politik naik 0,33 poin dan peran peradilan yang independen naik 12,50 poin. Sementara itu, ada empat variabel yang mengalami penurunan indeks, yaitu kebebasan berkeyakinan turun 8,62 poin, partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan turun 2,02

poin, peran DPRD turun 0,89 poin dan peran birokrasi pemerintah daerah yang turun cukup signifikan hingga mencapai 68,73 poin. Hal ini berkaitan dengan adanya perubahan 2 Indikator pada Aspek

tersebut yakni kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh PTUN dan indikator upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah.

Tabel 10.1 Perkembangan Skor Indikator IDI Provinsi Papua, 2014-2015

ASPEK / VARIABEL / INDIKATOR		2014	2015
(1)		(2)	(3)
INDEKS DEMOKRASI INDONESIA PROVINSI PAPUA		62.15	57.55
A.	KEBEBASAN SIPIL (CIVIL LIBERTIES)	85,69	82,72
I.	Kebebasan berkumpul dan berserikat	100,00	100,00
1	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	100,00	100.00
2	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	100,00	100.00
II.	Kebebasan berpendapat	40,00	44,47
3	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat	40,00	33.33
4	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat	40,00	100.00
III.	Kebebasan berkeyakinan	98,59	89.97
5	Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya	100,00	96.74
6	Tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya	87,50	62.50
7	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama	100,00	80.00
IV.	Kebebasan dari diskriminasi	66,92	73.83
8	Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	33,33	33.33

9	Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	75,00	100.00
10	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	100,00	100.00
B.	HAK-HAK POLITIK (<i>POLITICAL RIGHTS</i>)	42,51	41,81
V.	Hak memilih dan dipilih	67,58	68.22
11	Hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat	100,00	100.00
12	Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok dengan keterbatasan akses tidak dapat menggunakan hak memilih	60,00	60.00
13	Kualitas daftar pemilih tetap (DPT)	55,00	55.00
14	Penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (<i>voters turnout</i>)	94,12	94.12
15	Perempuan terpilih di DPRD provinsi	36,36	42.42
VI.	Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan	17,43	15.41
16	Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan	0,00	0.00
17	Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan	34,86	30.83
C.	LEMBAGA-LEMBAGA DEMOKRASI (<i>DEMOCRATIC INSTITUTIONS</i>)	63,75	50,87
VII.	Pemilu yang bebas dan adil	100,00	100.00
18	Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu	100,00	100.00
19	Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara	100,00	100.00
VIII.	Peran DPRD	39,51	21.12
20	Besaran alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan	31.01	32.06
21	Perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD	10,00	0.00
22	Rekomendasi DPRD kepada eksekutif	0,00	0.00
IX.	Peran Partai politik	8,37	8.69
23	Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu	0,00	0.00
24	Perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi	83,66	86.94
X.	Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	100,00	31.27
25	Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN	-	68.42

	Laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/parpol tertentu dalam pemilu legislatif	100,00	-
26	Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah/ Laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol pada pemilu legislatif	-	0.00
		100,00	-
XI.	Peran Peradilan yang independen	87,50	100.00
27	Keputusan hakim yang kontroversial	75,00	100.00
28	Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi	100,00	100.00

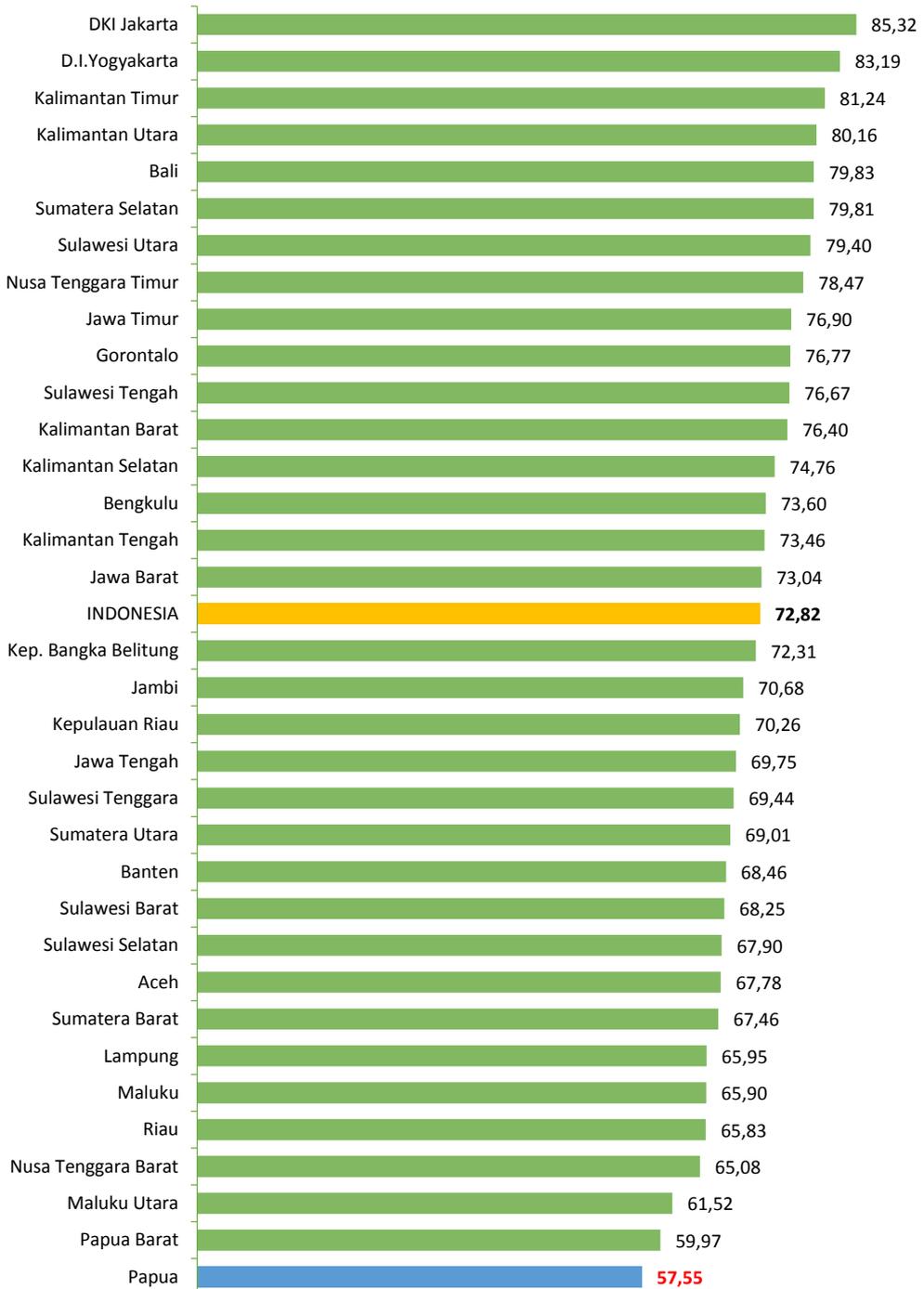
Dari sisi indikator, pada IDI 2015 terdapat 14 indikator yang mengalami kinerja baik (merupakan indikator yang memiliki skor di atas 80) diantaranya yaitu indikator 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 18, 19, 24, 27, 28. Kendati demikian, masih terdapat masalah kronis yang ditunjukkan melalui indikator 3, 8, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, dan 26 (merupakan indikator yang memiliki skor di bawah 60), diantaranya adalah jumlah kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu, demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan, rekomendasi DPRD kepada eksekutif, perda inisiatif DPRD, dan alokasi anggaran pendidikan/kesehatan. Oleh karena itu, indikator tersebut memerlukan

perhatian khusus agar kinerjanya dapat membaik.

IDI Provinsi Papua dan Nasional

Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, IDI Provinsi Papua selalu menempati urutan yang paling terakhir jika dibandingkan dengan 33 Provinsi lain yang ada di Indonesia. Sempat mengalami kenaikan peringkat pada tahun 2013 namun perkembangannya tidak menunjukkan hasil yang memuaskan, bahkan semakin mengalami penurunan pada tahun 2015 yang menempatkan Provinsi Papua sebagai peringkat terakhir dengan nilai indeks yang turun dari kategori sedang menjadi kategori buruk.

Gambar 10.4 Indeks Demokrasi Indonesia Menurut Provinsi, 2015

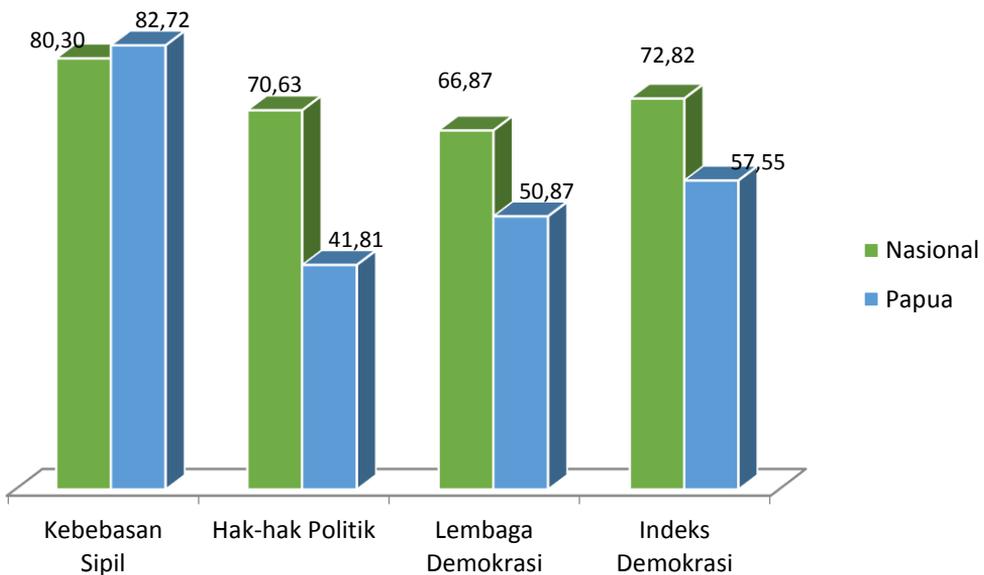


Dari gambar 9.4 dapat dilihat bahwa hanya ada 4 provinsi di Indonesia yang mempunyai indeks demokrasi dengan kategori tinggi (indeks > 80). Provinsi yang menduduki peringkat paling tinggi adalah DKI Jakarta (Indeks 85,32), diikuti oleh D.I. Yogyakarta (Indeks 83,19, Kalimantan Timur (indeks 81,24) dan Provinsi Kalimantan Utara (Indeks 80,16). Sementara 4 peringkat IDI terbawah didominasi oleh Provinsi di wilayah timur Indonesia yakni, Nusa Tenggara Barat (indeks 65,08), Maluku Utara (indeks

61,52), Papua Barat (indeks 59,97) dan Papua dengan nilai indeks 57,55.

Secara lebih teliti dapat dilihat bahwa rendahnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Papua sangat dipengaruhi oleh indeks aspek hak-hak politik (421,81) dan lembaga demokrasi (50,87) yang masih sangat rendah. Sementara aspek kebebasan sipil (82,72) tidak dapat memberikan perubahan besar terhadap kenaikan IDI karena rendahnya nilai kedua aspek yang lain.

Gambar 10.5 Indeks Demokrasi Provinsi Papua dan Nasional, 2015



Tantangan yang dihadapi

Demokrasi secara umum dapat diartikan sebagai bentuk pemerintahan dimana semua penduduknya memiliki kesamaan hak dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi secara terbuka mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung maupun melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara.

Nilai Indeks Demokrasi Indonesia yang semakin baik dapat memberi gambaran semakin majunya tatanan politik dan kehidupan berbangsa suatu wilayah. Lebih jauh dapat menunjukkan semakin profesionalnya pengelolaan pemimpin negara mulai dari level rendah hingga tertinggi dalam menghormati hak-hak politik dan hak-hak sipil warganya.

Selama kurun waktu 7 tahun sejak IDI mulai dihitung pada tahun 2009 nilai IDI Provinsi Papua belum menunjukkan hasil

yang memuaskan. Bahkan dalam 3 tahun terakhir IDI Provinsi Papua terus menunjukkan nilai indeks yang semakin menurun, sampai pada tahun 2015 nilai IDI Papua masuk dalam kategori buruk. Jika dilihat lebih dalam melalui Indikator-indikator penyusun IDI terdapat beberapa indikator yang memberikan pengaruh besar terhadap rendahnya IDI Papua. Indikator-indikator tersebut antara lain demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan, banyaknya kasus demonstrasi yang diwarnai dengan aksi kekerasan dan kasus pemalangan yang dilakukan oleh masyarakat melemahkan nilai indikator ini, bahkan karena banyaknya kasus yang terjadi dalam kurun waktu satu tahun membuat indikator tersebut bernilai nol. Indikator lain yang turut berperan dalam rendahnya nilai IDI Papua justru merupakan indikator penilaian terhadap lembaga-lembaga demokrasi. Perda yang berasal dari hak inisiatif DPR, rekomendasi DPR kepada eksekutif, kegiatan kaderisasi yang dilakukan oleh peserta pemilu serta indikator upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah.

Suksesnya pelaksanaan demokrasi di suatu wilayah bukan semata-mata tanggung jawab dari pemerintah, butuh dukungan penuh dari berbagai pihak termasuk lembaga-lembaga demokrasi bahkan dari seluruh lapisan masyarakat.

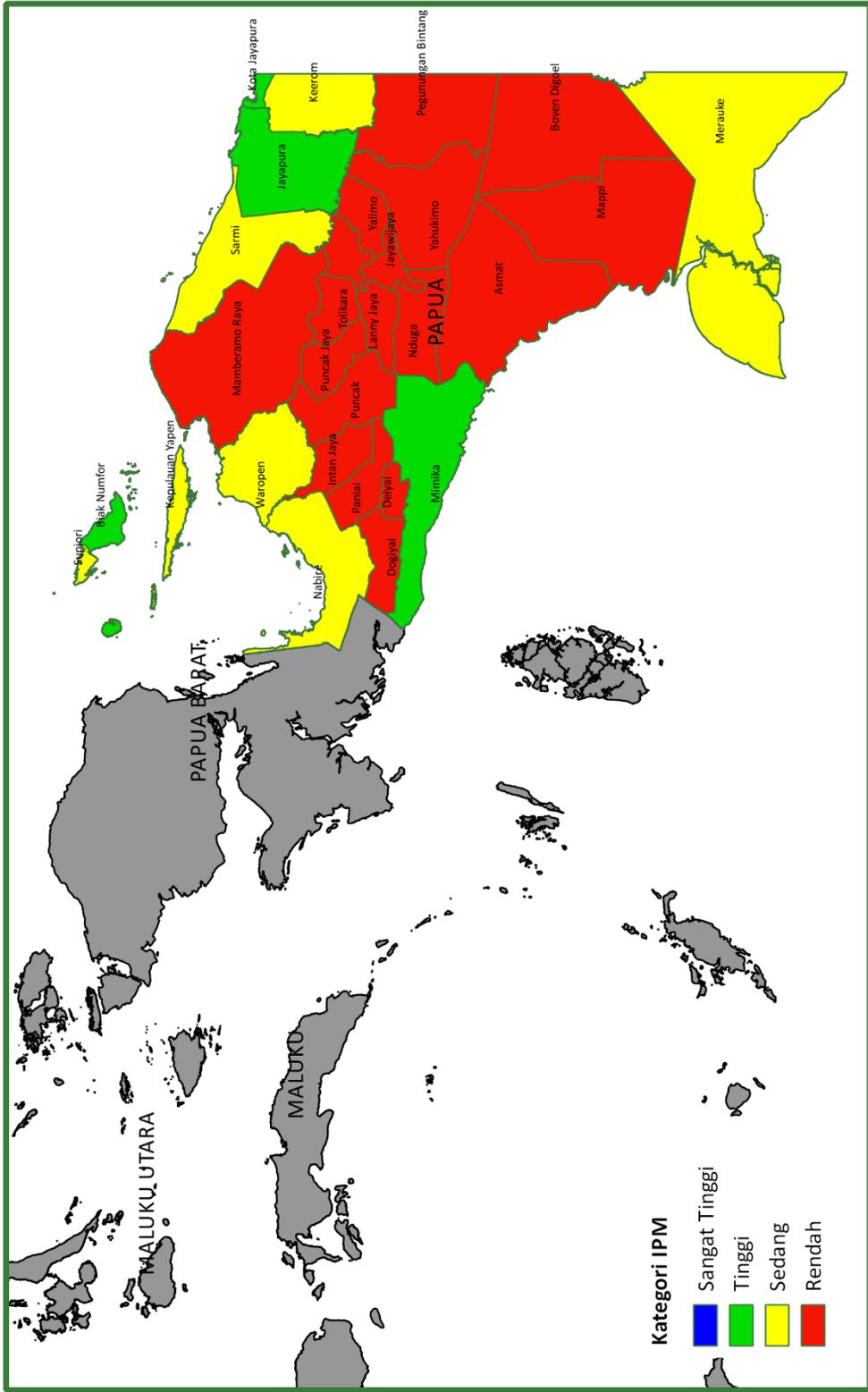
Prof. Dr. Thomas Meyer menjelaskan untuk mencapainya suksesnya demokrasi

perlu dilakukannya berbagi budaya sipil, keterlibatan warga sipil secara aktif menjadi faktor yang sangat positif dalam perkembangan demokrasi, ruang dialog publik dibuka seluas-luasnya untuk menjaga persatuan dalam keberagaman dengan kesetaraan dan keterbukaan antar sesama pihak yang memiliki perbedaan demi demokrasi yang lebih baik.

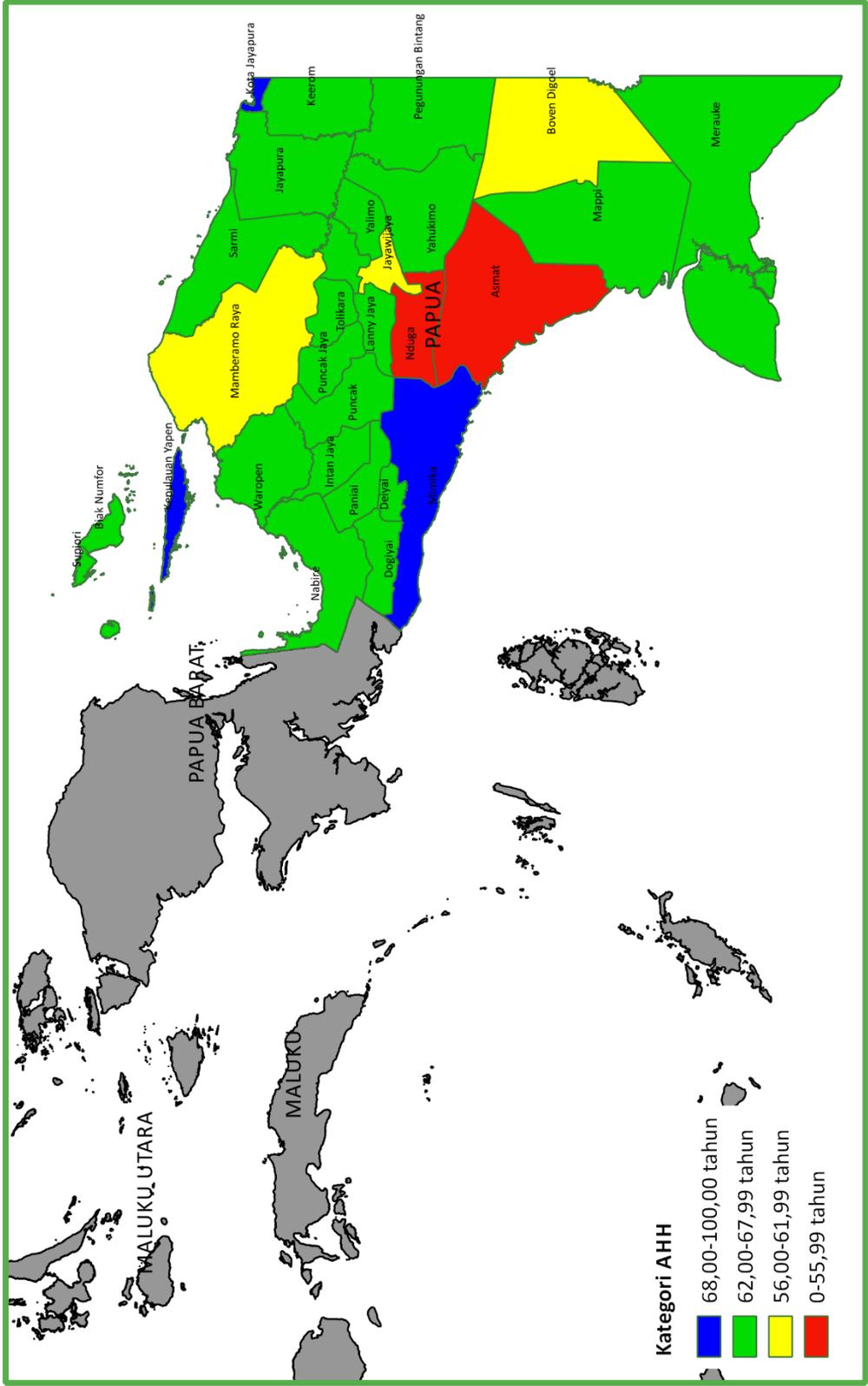
PETA TEMATIK

LAMPIRAN 1

Peta Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2015



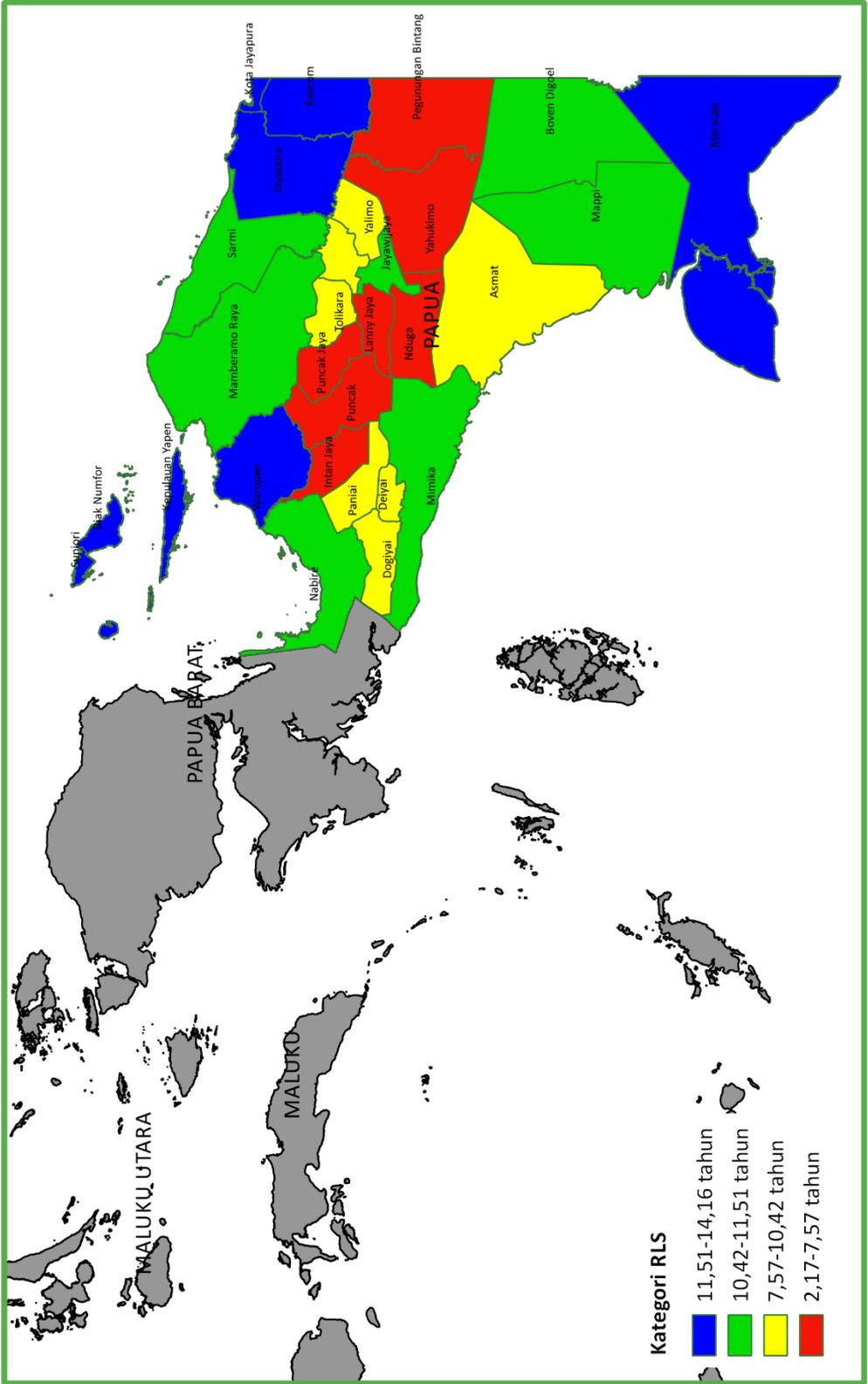
Peta Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2015



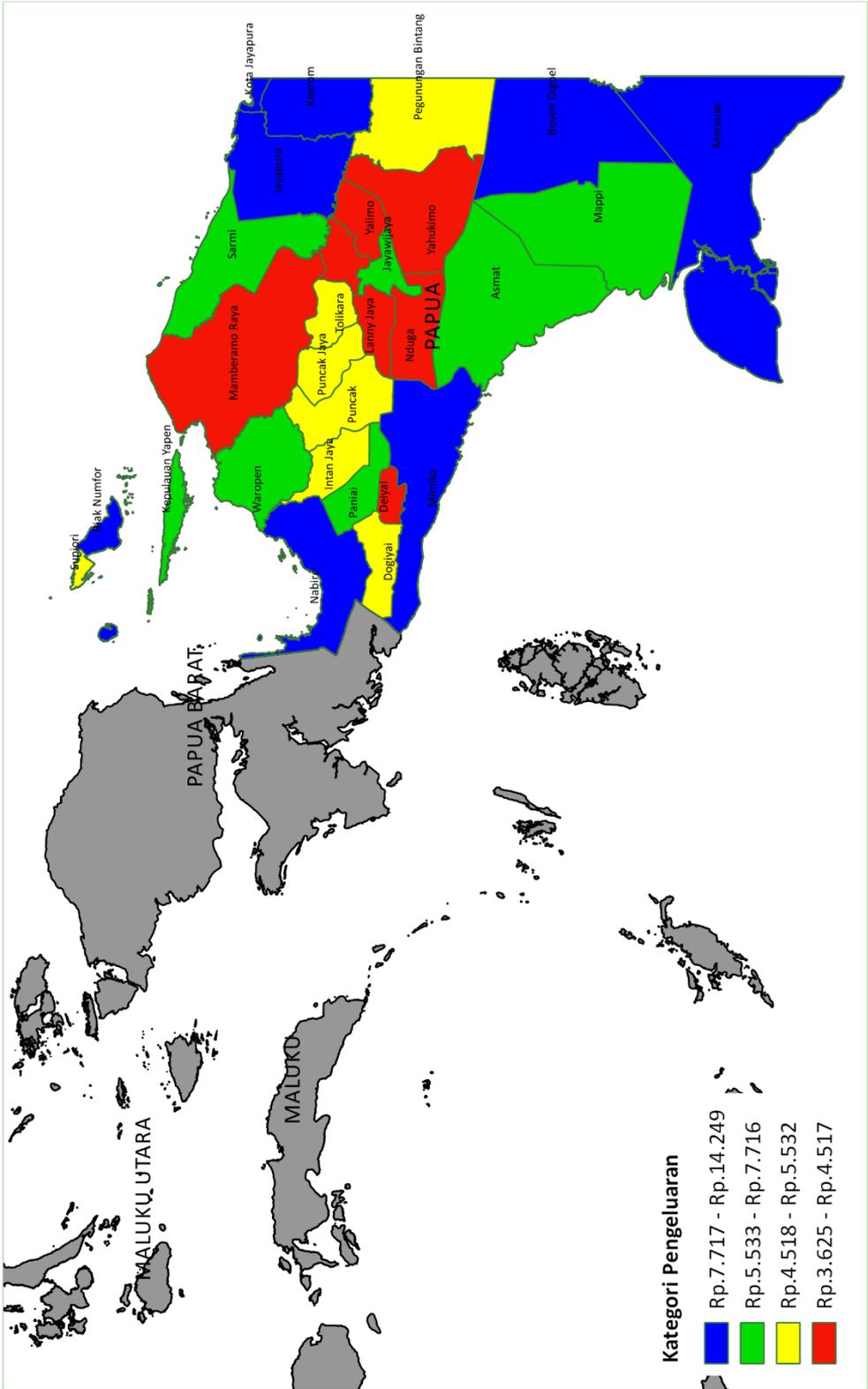
Kategori AHH

- 68,00-100,00 tahun
- 62,00-67,99 tahun
- 56,00-61,99 tahun
- 0-55,99 tahun

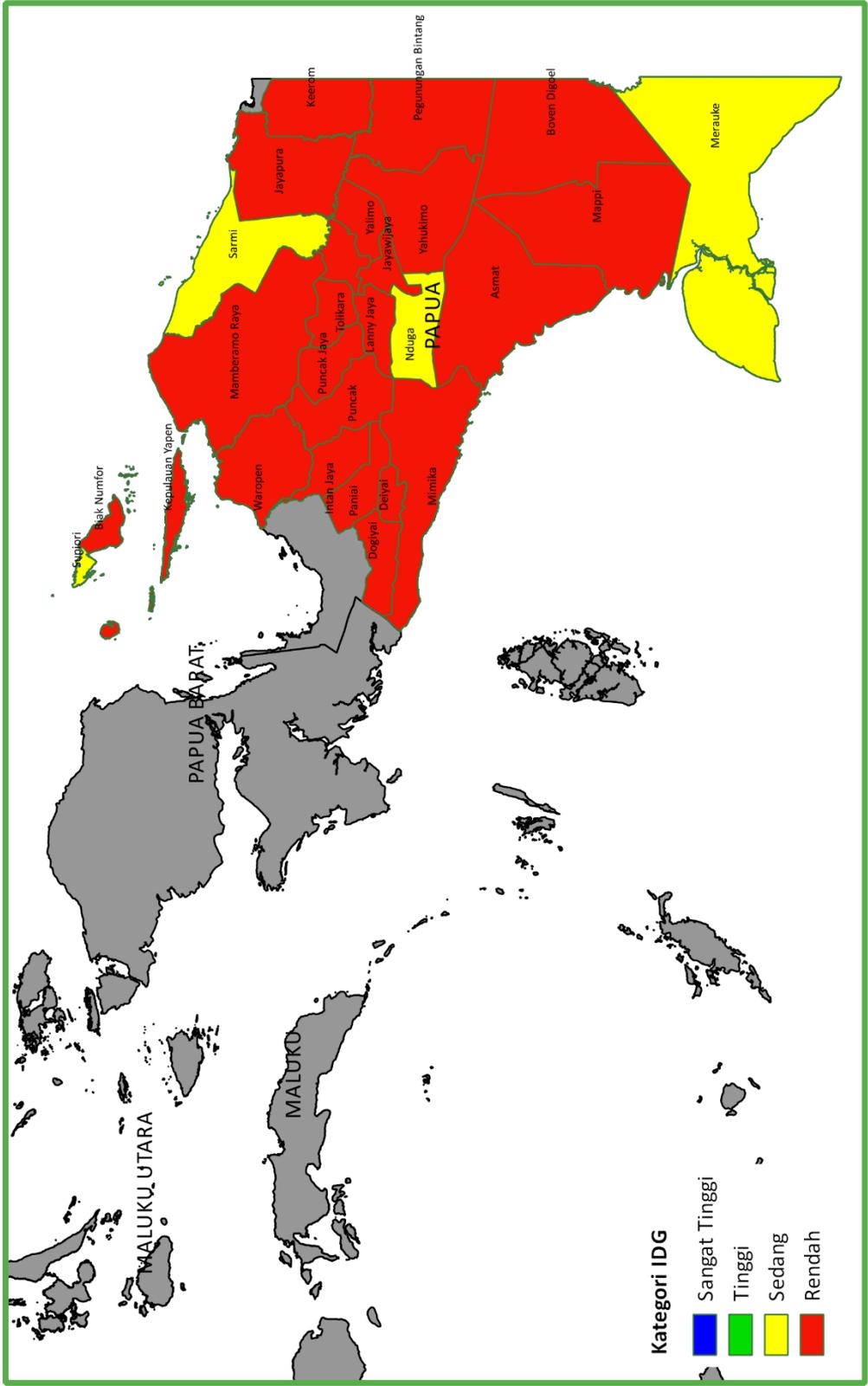
Peta Angka Harapan Lama Sekolah/Kota di Provinsi Papua, 2015



Peta Rata-rata Pengeluaran yang Disesuaikan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2015



Peta Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2015



TABEL-TABEL

LAMPIRAN 2

Lampiran 1. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi di Indonesia, 2010-2015

Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	67,09	67,45	67,81	68,30	68,81	69,45
Sumatera Utara	67,09	67,34	67,74	68,36	68,87	69,51
Sumatera Barat	67,25	67,81	68,36	68,91	69,36	69,98
Riau	68,65	68,90	69,15	69,91	70,33	70,84
Jambi	65,39	66,14	66,94	67,76	68,24	68,89
Sumatera Selatan	64,44	65,12	65,79	66,16	66,75	67,46
Bengkulu	65,35	65,96	66,61	67,50	68,06	68,59
Lampung	63,71	64,20	64,87	65,73	66,42	66,95
Kep. Bangka Belitung	66,02	66,59	67,21	67,92	68,27	69,05
Kepulauan Riau	71,13	71,61	72,36	73,02	73,40	73,75
DKI Jakarta	76,31	76,98	77,53	78,08	78,39	78,99
Jawa Barat	66,15	66,67	67,32	68,25	68,80	69,50
Jawa Tengah	66,08	66,64	67,21	68,02	68,78	69,49
D I Yogyakarta	75,37	75,93	76,15	76,44	76,81	77,59
Jawa Timur	65,36	66,06	66,74	67,55	68,14	68,95
Banten	67,54	68,22	68,92	69,47	69,89	70,27
Bali	70,10	70,87	71,62	72,09	72,48	73,27
Nusa Tenggara Barat	61,16	62,14	62,98	63,76	64,31	65,19
Nusa Tenggara Timur	59,21	60,24	60,81	61,68	62,26	62,67
Kalimantan Barat	61,97	62,35	63,41	64,30	64,89	65,59
Kalimantan Tengah	65,96	66,38	66,66	67,41	67,77	68,53
Kalimantan Selatan	65,20	65,89	66,68	67,17	67,63	68,38
Kalimantan Timur	71,31	72,02	72,62	73,21	73,82	74,17
Kalimantan Utara	n.a.	n.a.	n.a.	67,99	68,64	68,76
Sulawesi Utara	67,83	68,31	69,04	69,49	69,96	70,39
Sulawesi Tengah	63,29	64,27	65,00	65,79	66,43	66,76
Sulawesi Selatan	66,00	66,65	67,26	67,92	68,49	69,15
Sulawesi Tenggara	65,99	66,52	67,07	67,55	68,07	68,75
Gorontalo	62,65	63,48	64,16	64,70	65,17	65,86
Sulawesi Barat	59,74	60,63	61,01	61,53	62,24	62,96
Maluku	64,27	64,75	65,43	66,09	66,74	67,05
Maluku Utara	62,79	63,19	63,93	64,78	65,18	65,91
Papua Barat	59,60	59,90	60,30	60,91	61,28	61,73
Papua	54,45	55,01	55,55	56,25	56,75	57,25
Indonesia	66,53	67,09	67,70	68,31	68,90	69,55

Lampiran 2. Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Provinsi di Indonesia, 2010-2015

Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	69,08	69,15	69,23	69,31	69,35	69,50
Sumatera Utara	67,46	67,63	67,81	67,94	68,04	68,29
Sumatera Barat	67,59	67,79	68,00	68,21	68,32	68,66
Riau	70,15	70,32	70,49	70,67	70,76	70,93
Jambi	69,89	70,04	70,19	70,35	70,43	70,56
Sumatera Selatan	68,34	68,51	68,67	68,84	68,93	69,14
Bengkulu	67,82	67,98	68,16	68,33	68,37	68,50
Lampung	68,91	69,12	69,33	69,55	69,66	69,90
Kep. Bangka Belitung	69,15	69,31	69,48	69,64	69,72	69,88
Kepulauan Riau	68,42	68,63	68,85	69,05	69,15	69,41
DKI Jakarta	71,71	71,87	72,03	72,19	72,27	72,43
Jawa Barat	71,29	71,56	71,82	72,09	72,23	72,41
Jawa Tengah	72,73	72,91	73,09	73,28	73,88	73,96
D I Yogyakarta	74,17	74,26	74,36	74,45	74,50	74,68
Jawa Timur	69,89	70,02	70,14	70,34	70,45	70,68
Banten	68,50	68,68	68,86	69,04	69,13	69,43
Bali	70,61	70,78	70,94	71,11	71,20	71,35
Nusa Tenggara Barat	63,82	64,13	64,43	64,74	64,90	65,38
Nusa Tenggara Timur	65,28	65,45	65,64	65,82	65,91	65,96
Kalimantan Barat	69,06	69,26	69,46	69,66	69,76	69,87
Kalimantan Tengah	68,98	69,09	69,18	69,29	69,39	69,54
Kalimantan Selatan	66,65	66,88	67,11	67,35	67,47	67,80
Kalimantan Timur	72,89	73,10	73,32	73,52	73,62	73,65
Kalimantan Utara	71,39	71,60	71,82	72,02	72,12	72,16
Sulawesi Utara	70,40	70,55	70,70	70,86	70,94	70,99
Sulawesi Tengah	66,07	66,39	66,70	67,02	67,18	67,26
Sulawesi Selatan	68,93	69,12	69,31	69,50	69,60	69,80
Sulawesi Tenggara	69,65	69,85	70,06	70,28	70,39	70,44
Gorontalo	66,41	66,59	66,76	66,92	67,00	67,12
Sulawesi Barat	62,50	62,78	63,04	63,32	64,04	64,22
Maluku	64,46	64,61	64,77	64,93	65,01	65,31
Maluku Utara	66,70	66,87	67,05	67,24	67,34	67,44
Papua Barat	64,59	64,75	64,88	65,05	65,14	65,19
Papua	64,31	64,46	64,60	64,76	64,84	65,09
Indonesia	69,81	70,01	70,20	70,40	70,59	70,78

Lampiran 3. Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Menurut Provinsi di Indonesia, 2010-2015

Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	8,28	8,32	8,36	8,44	8,71	8,77
Sumatera Utara	8,51	8,61	8,72	8,79	8,93	9,03
Sumatera Barat	8,13	8,20	8,27	8,28	8,29	8,42
Riau	8,25	8,29	8,34	8,38	8,47	8,49
Jambi	7,34	7,48	7,69	7,80	7,92	7,96
Sumatera Selatan	7,34	7,42	7,50	7,53	7,66	7,77
Bengkulu	7,85	7,93	8,01	8,09	8,28	8,29
Lampung	7,26	7,28	7,30	7,32	7,48	7,56
Kep. Bangka Belitung	7,07	7,19	7,25	7,32	7,35	7,46
Kepulauan Riau	9,38	9,46	9,58	9,63	9,64	9,65
DKI Jakarta	10,37	10,40	10,43	10,47	10,54	10,70
Jawa Barat	7,40	7,46	7,52	7,58	7,71	7,86
Jawa Tengah	6,71	6,74	6,77	6,80	6,93	7,03
D I Yogyakarta	8,51	8,53	8,63	8,72	8,84	9,00
Jawa Timur	6,73	6,79	6,85	6,90	7,05	7,14
Banten	7,92	7,95	8,06	8,17	8,19	8,27
Bali	7,74	7,77	8,05	8,10	8,11	8,26
Nusa Tenggara Barat	5,73	6,07	6,33	6,54	6,67	6,71
Nusa Tenggara Timur	6,50	6,60	6,71	6,76	6,85	6,93
Kalimantan Barat	6,27	6,32	6,62	6,69	6,83	6,93
Kalimantan Tengah	7,62	7,68	7,73	7,79	7,82	8,03
Kalimantan Selatan	7,25	7,37	7,48	7,59	7,60	7,76
Kalimantan Timur	8,56	8,79	8,83	8,87	9,04	9,15
Kalimantan Utara	n.a.	n.a.	n.a.	8,10	8,35	8,36
Sulawesi Utara	8,66	8,68	8,71	8,79	8,86	8,88
Sulawesi Tengah	7,65	7,69	7,73	7,82	7,89	7,97
Sulawesi Selatan	7,29	7,33	7,37	7,45	7,49	7,64
Sulawesi Tenggara	7,57	7,67	7,76	7,93	8,02	8,18
Gorontalo	6,85	6,89	6,92	6,96	6,97	7,05
Sulawesi Barat	6,63	6,65	6,76	6,87	6,88	6,94
Maluku	8,64	8,72	8,80	8,81	9,15	9,16
Maluku Utara	7,91	7,98	8,04	8,27	8,34	8,37
Papua Barat	6,77	6,82	6,87	6,91	6,96	7,01
Papua	5,59	5,60	5,73	5,74	5,76	5,99
Indonesia	7,46	7,52	7,59	7,61	7,73	7,84

Lampiran 4. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Provinsi di Indonesia, 2010-2015

Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	12,90	13,03	13,19	13,36	13,53	13,73
Sumatera Utara	11,82	11,83	11,97	12,41	12,61	12,82
Sumatera Barat	12,22	12,52	12,81	13,16	13,48	13,60
Riau	11,76	11,78	11,79	12,27	12,45	12,74
Jambi	11,34	11,60	11,73	12,17	12,38	12,57
Sumatera Selatan	11,03	11,21	11,42	11,46	11,75	12,02
Bengkulu	11,59	11,88	12,20	12,78	13,01	13,18
Lampung	10,88	11,04	11,37	11,90	12,24	12,25
Kep. Bangka Belitung	10,48	10,70	10,79	10,96	11,18	11,60
Kepulauan Riau	11,51	11,61	11,90	12,26	12,51	12,60
DKI Jakarta	11,86	11,91	11,96	12,24	12,38	12,59
Jawa Barat	10,69	10,91	11,24	11,81	12,08	12,15
Jawa Tengah	11,09	11,18	11,39	11,89	12,17	12,38
D I Yogyakarta	14,15	14,61	14,64	14,67	14,85	15,03
Jawa Timur	11,49	11,62	11,74	12,17	12,45	12,66
Banten	11,02	11,41	11,79	12,05	12,31	12,35
Bali	11,71	12,12	12,26	12,40	12,64	12,97
Nusa Tenggara Barat	11,66	11,97	12,21	12,46	12,73	13,04
Nusa Tenggara Timur	10,85	11,55	11,73	12,27	12,65	12,84
Kalimantan Barat	10,79	10,80	11,11	11,60	11,89	12,25
Kalimantan Tengah	11,09	11,15	11,22	11,71	11,93	12,22
Kalimantan Selatan	10,86	11,14	11,54	11,67	11,96	12,21
Kalimantan Timur	11,87	12,06	12,46	12,85	13,17	13,18
Kalimantan Utara	n.a.	n.a.	n.a.	12,30	12,52	12,54
Sulawesi Utara	11,34	11,50	11,77	11,88	12,16	12,43
Sulawesi Tengah	11,17	11,82	12,09	12,36	12,71	12,72
Sulawesi Selatan	11,47	11,82	12,16	12,52	12,90	12,99
Sulawesi Tenggara	12,15	12,30	12,45	12,45	12,78	13,07
Gorontalo	11,12	11,68	11,78	12,13	12,49	12,70
Sulawesi Barat	10,58	11,21	11,28	11,46	11,78	12,22
Maluku	12,62	12,85	12,96	13,35	13,53	13,56
Maluku Utara	11,74	11,79	12,19	12,48	12,72	13,10
Papua Barat	11,10	11,21	11,45	11,67	11,87	12,06
Papua	8,57	8,92	9,11	9,58	9,94	9,95
Indonesia	11,29	11,44	11,68	12,10	12,39	12,55

Lampiran 6. Rata-rata Pengeluaran yang Disesuaikan Menurut Provinsi di Indonesia, 2010-2015

Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	7 934	8 044	8 134	8 289	8 297	8 533
Sumatera Utara	9 196	9 231	9 266	9 309	9 391	9 563
Sumatera Barat	9 339	9 409	9 479	9 570	9 621	9 804
Riau	9 857	9 957	10 058	10 180	10 262	10 364
Jambi	8 478	8 664	8 944	9 066	9 141	9 446
Sumatera Selatan	8 536	8 803	9 040	9 231	9 302	9 474
Bengkulu	8 459	8 572	8 682	8 803	8 864	9 123
Lampung	7 964	8 118	8 273	8 415	8 476	8 729
Kep. Bangka Belitung	10 707	10 808	11 218	11 657	11 691	11 781
Kepulauan Riau	12 267	12 513	12 740	12 942	13 019	13 177
DKI Jakarta	15 111	15 943	16 613	16 828	16 898	17 075
Jawa Barat	9 174	9 249	9 325	9 421	9 447	9 778
Jawa Tengah	8 992	9 296	9 497	9 618	9 640	9 930
D I Yogyakarta	12 080	12 115	12 137	12 261	12 294	12 684
Jawa Timur	9 002	9 396	9 797	9 978	10 012	10 383
Banten	10 777	10 933	11 008	11 061	11 150	11 261
Bali	12 074	12 307	12 530	12 738	12 831	13 078
Nusa Tenggara Barat	8 707	8 759	8 853	8 950	8 987	9 241
Nusa Tenggara Timur	6 615	6 678	6 785	6 899	6 934	7 003
Kalimantan Barat	7 654	7 825	8 002	8 127	8 175	8 279
Kalimantan Tengah	9 257	9 472	9 557	9 641	9 682	9 809
Kalimantan Selatan	10 304	10 437	10 553	10 655	10 748	10 891
Kalimantan Timur	10 790	10 927	10 944	10 981	11 019	11 229
Kalimantan Utara	n.a.	n.a.	n.a.	8 229	8 289	8 354
Sulawesi Utara	8 935	9 113	9 430	9 583	9 628	9 729
Sulawesi Tengah	7 988	8 077	8 286	8 501	8 602	8 768
Sulawesi Selatan	9 331	9 459	9 560	9 632	9 723	9 992
Sulawesi Tenggara	8 126	8 249	8 396	8 537	8 555	8 697
Gorontalo	8 207	8 293	8 673	8 719	8 762	9 035
Sulawesi Barat	8 003	8 049	8 091	8 148	8 170	8 260
Maluku	7 362	7 437	7 727	7 872	7 925	8 026
Maluku Utara	6 813	6 935	7 059	7 200	7 234	7 423
Papua Barat	6 677	6 709	6 732	6 896	6 944	7 064
Papua	6 251	6 303	6 349	6 394	6 416	6 469
Indonesia	9 437	9 647	9 815	9 858	9 903	10 150

Lampiran 7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2010-2015

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Merauke	65,58	66,03	66,28	66,88	67,33	67,75
Jayawijaya	50,79	51,66	52,27	52,94	53,37	54,18
Jayapura	67,15	68,04	68,85	69,21	69,55	70,04
Nabire	64,49	64,96	65,28	65,45	66,25	66,49
Kepulauan Yapen	63,5	63,82	64,11	64,34	64,89	65,28
Biak Numfor	68,22	68,8	69,05	69,35	70,32	70,85
Paniai	52,57	53,02	53,34	53,7	53,93	54,2
Puncak Jaya	38,83	40,36	41,85	43,36	44,32	44,87
Mimika	67,96	68,74	68,95	69,5	70,4	70,89
Boven Digoel	56,15	56,89	57,45	57,96	58,21	59,02
Mappi	54,09	54,61	55,09	55,51	55,74	56,11
Asmat	43,69	44,58	45,08	45,54	45,91	46,62
Yahukimo	40,63	41,72	43,82	45,63	46,36	46,63
Pegunungan Bintang	35,45	36,61	37,82	38,94	39,68	40,91
Tolikara	43,44	44,41	44,86	45,68	46,16	46,38
Sarmi	56,98	57,96	59,03	59,51	60,48	60,99
Keerom	60,00	60,65	61,13	62,49	62,73	63,43
Waropen	59,98	60,94	61,32	61,68	61,97	62,35
Supiori	57,71	58,31	58,86	59,4	59,7	60,09
Mamberamo Raya	44,89	45,82	46,62	47,28	47,88	48,29
Nduga	19,62	21,12	23,07	24,42	25,38	25,47
Lanny Jaya	41,49	41,9	42,53	43,05	43,28	44,18
Mamberamo Tengah	39,37	40,17	41,39	42,43	43,19	43,55
Yalimo	38,47	40,45	41,84	43,33	44,21	44,32
Puncak	33,44	35,08	36,85	37,73	38,05	39,41
Dogiyai	47,48	48,48	50,59	51,46	52,25	52,78
Intan Jaya	n.a.	40,07	41,89	42,69	43,51	44,35
Deiyai	n.a.	46,12	46,94	47,74	48,12	48,28
Kota Jayapura	76,69	76,97	77,25	77,46	77,86	78,05
Provinsi Papua	54,45	55,01	55,55	56,25	56,75	57,25

Lampiran 8. Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2010-2015

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Merauke	66,31	66,41	66,46	66,48	66,49	66,50
Jayawijaya	57,37	57,48	57,56	57,71	57,79	58,29
Jayapura	65,96	65,96	65,98	66,01	66,02	66,32
Nabire	67,17	67,20	67,21	67,23	67,24	67,44
Kepulauan Yapen	68,58	68,60	68,63	68,63	68,63	68,67
Biak Numfor	67,79	67,81	67,82	67,84	67,85	67,86
Paniai	64,81	64,99	65,09	65,13	65,15	65,45
Puncak Jaya	63,59	63,63	63,67	63,74	63,77	64,17
Mimika	71,74	71,78	71,81	71,85	71,87	71,89
Boven Digoel	56,97	57,32	57,51	57,60	57,64	58,24
Mappi	63,33	63,41	63,48	63,51	63,52	64,02
Asmat	53,50	54,45	54,73	54,91	55,00	55,50
Yahukimo	64,41	64,45	64,49	64,54	64,56	65,06
Pegunungan Bintang	63,48	63,50	63,52	63,56	63,58	63,78
Tolikara	64,27	64,45	64,59	64,64	64,66	64,86
Sarmi	65,37	65,40	65,40	65,46	65,49	65,69
Keerom	65,88	65,92	65,92	65,97	65,99	66,09
Waropen	65,48	65,64	65,69	65,71	65,72	65,73
Supiori	65,04	65,10	65,15	65,15	65,15	65,25
Mamberamo Raya	55,75	56,06	56,37	56,37	56,37	56,57
Nduga	52,65	53,09	53,42	53,54	53,60	53,60
Lanny Jaya	64,47	64,63	64,76	64,82	64,85	64,86
Mamberamo Tengah	62,22	62,35	62,53	62,59	62,62	62,72
Yalimo	64,64	64,73	64,78	64,83	64,85	64,86
Puncak	64,96	64,97	64,98	64,98	64,98	65,08
Dogiyai	64,21	64,24	64,30	64,34	64,36	64,86
Intan Jaya	64,72	64,80	64,84	64,87	64,88	64,98
Deiyai	64,07	64,19	64,21	64,25	64,27	64,47
Kota Jayapura	69,89	69,90	69,94	69,95	69,95	69,97
Provinsi Papua	64,31	64,46	64,60	64,76	64,84	65,09

Lampiran 9. Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2010-2015

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Merauke	7,60	7,74	7,88	8,03	8,23	8,24
Jayawijaya	3,92	4,26	4,31	4,36	4,39	4,59
Jayapura	8,30	8,67	9,05	9,33	9,41	9,48
Nabire	8,37	8,58	8,80	8,87	9,45	9,47
Kepulauan Yapen	8,23	8,28	8,32	8,37	8,68	8,80
Biak Numfor	8,81	8,92	8,93	8,99	9,61	9,83
Paniai	3,52	3,59	3,66	3,73	3,74	3,76
Puncak Jaya	1,98	2,24	2,53	2,86	3,04	3,19
Mimika	8,70	8,72	8,75	8,83	9,30	9,38
Boven Digoel	6,80	7,02	7,24	7,47	7,50	7,72
Mappi	5,30	5,46	5,71	5,92	5,96	5,97
Asmat	4,18	4,23	4,28	4,33	4,34	4,38
Yahukimo	1,78	2,00	2,94	3,78	3,97	3,98
Pegunungan Bintang	1,54	1,64	1,76	1,88	1,97	2,06
Tolikara	2,46	2,76	2,88	3,00	3,04	3,06
Sarmi	5,93	6,35	7,00	7,27	7,89	8,07
Keerom	4,88	5,23	5,52	6,45	6,57	6,85
Waropen	8,00	8,31	8,40	8,50	8,53	8,55
Supiori	7,26	7,52	7,78	8,06	8,11	8,12
Mamberamo Raya	4,15	4,24	4,33	4,42	4,44	4,61
Nduga	0,25	0,37	0,49	0,60	0,63	0,64
Lanny Jaya	2,00	2,11	2,35	2,55	2,60	2,75
Mamberamo Tengah	2,08	2,12	2,15	2,18	2,40	2,49
Yalimo	1,54	1,76	1,78	1,80	2,07	2,08
Puncak	1,05	1,21	1,37	1,40	1,43	1,61
Dogiyai	3,4	3,61	4,44	4,76	4,87	4,88
Intan Jaya	n.a.	2,02	2,09	2,16	2,32	2,48
Deiyai	n.a.	2,16	2,51	2,87	2,95	2,96
Kota Jayapura	10,62	10,71	10,8	10,88	11,09	11,11
Provinsi Papua	5,59	5,60	5,73	5,74	5,76	5,99

Lampiran 10. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2010-2015

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Merauke	11,54	11,63	11,64	11,99	12,14	12,47
Jayawijaya	9,93	10,10	10,28	10,46	10,64	10,82
Jayapura	12,55	12,91	13,28	13,28	13,54	13,79
Nabire	10,42	10,49	10,50	10,54	10,58	10,62
Kepulauan Yapen	10,95	11,06	11,17	11,28	11,4	11,51
Biak Numfor	12,31	12,61	12,80	12,98	13,21	13,44
Paniai	9,98	10,04	10,09	10,22	10,30	10,31
Puncak Jaya	4,27	4,67	5,13	5,58	5,93	5,97
Mimika	9,25	9,80	9,91	10,26	10,49	10,78
Boven Digoel	10,16	10,32	10,47	10,63	10,79	10,96
Mappi	10,16	10,29	10,32	10,35	10,41	10,42
Asmat	6,58	6,75	6,93	7,10	7,29	7,57
Yahukimo	6,33	6,60	6,87	7,17	7,47	7,48
Pegunungan Bintang	3,15	3,46	3,82	4,18	4,41	4,85
Tolikara	6,88	7,07	7,13	7,46	7,67	7,68
Sarmi	10,07	10,29	10,49	10,57	10,74	10,91
Keerom	11,23	11,27	11,30	11,34	11,38	11,55
Waropen	11,16	11,39	11,63	11,87	12,12	12,34
Supiori	11,88	12,03	12,19	12,36	12,52	12,69
Mamberamo Raya	9,04	9,40	9,78	10,18	10,59	10,65
Nduga	1,22	1,37	1,72	1,93	2,16	2,17
Lanny Jaya	6,82	6,89	6,96	7,04	7,11	7,45
Mamberamo Tengah	5,76	6,12	6,81	7,41	7,64	7,65
Yalimo	5,22	5,93	6,65	7,50	7,68	7,71
Puncak	2,84	3,21	3,73	4,04	4,13	4,47
Dogiyai	7,85	8,14	8,77	8,99	9,41	9,58
Intan Jaya	4,12	4,51	5,40	5,74	6,00	6,28
Deiyai	9,06	9,23	9,40	9,57	9,75	9,76
Kota Jayapura	13,64	13,77	13,91	13,95	14,06	14,16
Provinsi Papua	8,57	8,92	9,11	9,58	9,94	9,95

Lampiran 11. Rata-rata Pengeluaran yang Disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2010-2015

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Merauke	9 633	9 754	9 795	9 841	9 882	9 953
Jayawijaya	6 307	6 413	6 628	6 875	6 989	7 068
Jayapura	9 470	9 565	9 575	9 586	9 597	9 622
Nabire	8 455	8 552	8 589	8 615	8 652	8 725
Kepulauan Yapen	6 997	7 092	7 156	7 199	7 241	7 320
Biak Numfor	9 311	9 431	9 486	9 520	9 553	9 603
Paniai	5 786	5 911	5 970	6 026	6 086	6 161
Puncak Jaya	4 728	4 833	4 863	4 908	4 938	4 979
Mimika	10 664	10 772	10 822	10 849	10 873	10 952
Boven Digoel	7 454	7 571	7 598	7 625	7 646	7 717
Mappi	5 472	5 548	5 600	5 655	5 709	5 780
Asmat	5 208	5 322	5 378	5 427	5 485	5 533
Yahukimo	3 954	4 043	4 055	4 068	4 081	4 109
Pegunungan Bintang	4 846	4 938	5 010	5 052	5 095	5 176
Tolikara	4 264	4 310	4 356	4 412	4 468	4 518
Sarmi	6 190	6 301	6 318	6 342	6 358	6 379
Keerom	8 307	8 397	8 437	8 475	8 514	8 609
Waropen	5 803	5 961	5 970	5 979	5 989	6 070
Supiori	4 927	4 985	5 023	5 060	5 098	5 180
Mamberamo Raya	4 012	4 125	4 186	4 241	4 303	4 324
Nduga	3 214	3 344	3 406	3 542	3 607	3 625
Lanny Jaya	3 826	3 845	3 863	3 882	3 901	3 965
Mamberamo Tengah	3 844	3 901	3 921	3 964	3 985	4 051
Yalimo	4 016	4 123	4 197	4 247	4 298	4 321
Puncak	4 752	4 872	4 919	4 986	5 010	5 118
Dogiyai	4 769	4 897	4 924	4 992	5 061	5 120
Intan Jaya	n.a.	4 920	4 928	4 961	4 995	5 015
Deiyai	n.a.	4 244	4 262	4 281	4 293	4 320
Kota Jayapura	13 903	13 960	14 004	14 088	14 172	14 249
Provinsi Papua	6 251	6 303	6 349	6 394	6 416	6 469

Lampiran 12. Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2010-2015

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Merauke	0,69	0,38	0,91	0,67	0,62	0,69
Jayawijaya	1,71	1,18	1,28	0,81	1,52	1,71
Jayapura	1,33	1,19	0,52	0,49	0,70	1,33
Nabire	0,73	0,49	0,26	1,22	0,36	0,73
Kepulauan Yapen	0,50	0,45	0,36	0,85	0,60	0,50
Biak Numfor	0,85	0,36	0,43	1,40	0,75	0,85
Paniai	0,86	0,60	0,67	0,43	0,50	0,86
Puncak Jaya	3,94	3,69	3,61	2,21	1,24	3,94
Mimika	1,15	0,31	0,80	1,29	0,70	1,15
Boven Digoel	1,32	0,98	0,89	0,43	1,39	1,32
Mappi	0,96	0,88	0,76	0,41	0,66	0,96
Asmat	2,04	1,12	1,02	0,81	1,55	2,04
Yahukimo	2,68	5,03	4,13	1,60	0,58	2,68
Pegunungan Bintang	3,27	3,31	2,96	1,90	3,10	3,27
Tolikara	2,23	1,01	1,83	1,05	0,48	2,23
Sarmi	1,72	1,85	0,81	1,63	0,84	1,72
Keerom	1,08	0,79	2,22	0,38	1,12	1,08
Waropen	1,60	0,62	0,59	0,47	0,61	1,60
Supiori	1,04	0,94	0,92	0,51	0,65	1,04
Mamberamo Raya	2,07	1,75	1,42	1,27	0,86	2,07
Nduga	7,65	9,23	5,85	3,93	0,35	7,65
Lanny Jaya	0,99	1,50	1,22	0,53	2,08	0,99
Mamberamo Tengah	2,03	3,04	2,51	1,79	0,83	2,03
Yalimo	5,15	3,44	3,56	2,03	0,25	5,15
Puncak	4,90	5,05	2,39	0,85	3,57	4,90
Dogiyai	2,11	4,35	1,72	1,54	1,01	2,11
Intan Jaya	n.a.	4,54	1,91	1,92	1,93	n.a.
Deiyai	n.a.	1,78	1,70	0,80	0,33	n.a.
Kota Jayapura	0,37	0,36	0,27	0,52	0,24	0,37
Provinsi Papua	1,03	0,98	1,26	0,89	0,88	1,03

Lampiran 13. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2010-2015

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Merauke	84,77	85,69	86,41	86,83	87,62	87,43
Jayawijaya	81,79	82,02	82,29	82,45	83,07	82,78
Jayapura	89,95	90,59	90,66	90,69	90,70	90,60
Nabire	86,97	86,98	87,39	88,67	89,73	89,81
Kepulauan Yapen	85,50	86,98	87,31	87,85	88,26	88,09
Biak Numfor	88,13	88,71	88,74	89,49	89,86	89,55
Paniai	57,36	61,38	64,71	65,65	66,10	66,04
Puncak Jaya	61,88	62,09	62,29	62,43	62,50	62,36
Mimika	74,07	74,31	75,27	75,46	77,06	76,98
Boven Digoel	75,14	75,97	76,13	76,91	77,53	77,79
Mappi	76,45	77,71	79,95	81,82	82,92	83,15
Asmat	44,29	44,69	45,38	46,21	48,77	49,48
Yahukimo	59,43	62,42	65,02	65,70	67,88	68,13
Pegunungan Bintang	71,90	75,40	78,83	79,71	80,12	79,71
Tolikara	53,82	54,69	55,16	55,88	56,39	56,47
Sarmi	71,17	79,48	79,58	80,87	81,41	81,26
Keerom	79,40	79,64	81,86	82,25	84,15	84,46
Waropen	66,55	66,97	67,25	67,30	67,55	67,86
Supiori	64,35	66,85	69,99	72,26	74,50	75,13
Mamberamo Raya	71,33	72,42	75,25	77,99	80,32	80,92
Nduga	84,51	84,53	84,57	89,06	91,04	88,14
Lanny Jaya	87,31	87,76	89,22	90,50	91,33	90,82
Mamberamo Tengah	88,31	89,09	90,10	90,46	90,77	88,74
Yalimo	49,90	61,26	68,65	73,56	81,81	81,43
Puncak	71,71	74,92	78,68	81,53	84,62	83,95
Dogiyai	67,71	70,79	74,95	77,35	79,97	80,25
Intan Jaya	n.a.	64,13	65,67	66,25	67,56	68,25
Deiyai	n.a.	59,93	63,72	67,18	69,77	69,51
Kota Jayapura	94,44	94,61	94,78	94,92	94,94	94,50
Provinsi Papua	73,93	74,99	76,42	77,61	78,57	78,52

Lampiran 14. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Laki-laki Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2010-2015

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Merauke	69,84	70,53	71,26	72,17	72,48	72,94
Jayawijaya	54,11	54,85	56,57	57,23	57,83	58,86
Jayapura	71,76	72,48	73,18	73,63	74,03	74,57
Nabire	68,57	69,84	70,78	71,06	71,95	72,25
Kepulauan Yapen	68,59	69,09	69,48	69,64	70,26	70,71
Biak Numfor	72,76	73,21	73,93	74,77	75,20	75,84
Paniai	57,49	57,95	58,49	59,01	59,43	59,75
Puncak Jaya	44,46	46,34	48,28	50,31	52,08	52,86
Mimika	73,35	73,91	74,33	74,90	75,44	76,08
Boven Digoel	61,24	61,88	62,66	63,37	63,82	64,50
Mappi	59,93	60,45	60,74	61,30	61,60	61,99
Asmat	49,91	51,06	51,49	51,82	52,30	53,14
Yahukimo	45,28	48,27	51,92	55,06	56,57	57,15
Pegunungan Bintang	41,51	43,03	43,71	45,01	46,64	47,99
Tolikara	51,96	52,96	53,46	53,65	54,04	54,31
Sarmi	62,65	63,34	64,43	64,74	66,58	67,42
Keerom	64,22	65,48	66,24	67,96	68,84	69,50
Waropen	64,26	65,40	67,06	67,59	68,22	68,67
Supiori	62,68	63,94	64,77	65,58	66,22	66,65
Mamberamo Raya	49,86	50,73	51,61	52,35	53,07	53,71
Nduga	21,46	23,12	25,15	26,22	27,32	28,45
Lanny Jaya	44,28	44,78	45,16	45,53	46,46	47,42
Mamberamo Tengah	41,73	42,53	43,14	44,12	45,29	46,93
Yalimo	42,79	44,97	47,48	50,30	52,93	53,60
Puncak	36,52	37,20	38,06	38,95	39,76	40,89
Dogiyai	53,23	54,08	55,85	56,27	56,73	57,38
Intan Jaya	n.a.	47,35	48,14	50,62	51,73	52,24
Deiyai	n.a.	52,56	53,17	53,80	54,39	54,85
Kota Jayapura	78,62	79,05	79,49	79,92	80,31	80,92
Provinsi Papua	60,09	60,70	61,06	61,69	62,31	63,10

Lampiran 15. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Perempuan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2010-2015

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Merauke	59,21	60,44	61,57	62,66	63,51	63,78
Jayawijaya	44,26	44,99	46,56	47,19	48,04	48,72
Jayapura	64,55	65,65	66,34	66,78	67,15	67,56
Nabire	59,63	60,75	61,85	63,01	64,56	64,89
Kepulauan Yapen	58,64	60,09	60,66	61,18	62,01	62,29
Biak Numfor	64,13	64,95	65,61	66,91	67,58	67,91
Paniai	32,98	35,57	37,85	38,74	39,28	39,46
Puncak Jaya	27,51	28,77	30,07	31,41	32,55	32,96
Mimika	54,32	54,93	55,94	56,52	58,13	58,56
Boven Digoel	46,01	47,01	47,70	48,74	49,48	50,17
Mappi	45,82	46,97	48,57	50,16	51,08	51,54
Asmat	22,10	22,82	23,36	23,95	25,51	26,29
Yahukimo	26,91	30,13	33,76	36,18	38,40	38,94
Pegunungan Bintang	29,85	32,45	34,46	35,87	37,37	38,25
Tolikara	27,96	28,96	29,48	29,98	30,47	30,67
Sarmi	44,59	50,35	51,28	52,36	54,20	54,78
Keerom	51,00	52,15	54,22	55,90	57,93	58,70
Waropen	42,77	43,80	45,10	45,49	46,08	46,60
Supiori	40,33	42,74	45,33	47,38	49,33	50,07
Mamberamo Raya	35,56	36,74	38,84	40,83	42,63	43,46
Nduga	18,14	19,54	21,27	23,35	24,87	25,08
Lanny Jaya	38,66	39,30	40,29	41,20	42,43	43,07
Mamberamo Tengah	36,86	37,89	38,87	39,91	41,11	41,64
Yalimo	21,35	27,55	32,59	37,00	43,30	43,65
Puncak	26,19	27,87	29,95	31,76	33,65	34,33
Dogiyai	36,05	38,28	41,86	43,52	45,36	46,04
Intan Jaya	n.a.	30,37	31,61	33,54	34,95	35,65
Deiyai	n.a.	31,50	33,88	36,14	37,95	38,12
Kota Jayapura	74,25	74,78	75,34	75,86	76,24	76,47
Provinsi Papua	44,42	45,52	46,67	47,88	48,96	49,54

Lampiran 16. Angka Harapan Hidup (AHH) Laki-laki Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2010-2015

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Merauke	64,49	64,59	64,64	64,65	64,66	64,69
Jayawijaya	55,62	55,73	55,81	55,96	56,04	56,54
Jayapura	64,16	64,17	64,18	64,21	64,22	64,52
Nabire	65,30	65,33	65,34	65,36	65,37	65,57
Kepulauan Yapen	66,63	66,65	66,68	66,68	66,68	66,72
Biak Numfor	65,86	65,88	65,89	65,90	65,91	65,92
Paniai	63,07	63,25	63,34	63,38	63,40	63,70
Puncak Jaya	61,82	61,86	61,89	61,97	62,01	62,41
Mimika	69,73	69,77	69,80	69,85	69,88	69,88
Boven Digoel	55,23	55,58	55,75	55,85	55,90	56,50
Mappi	61,54	61,63	61,69	61,72	61,73	62,23
Asmat	51,82	52,75	53,03	53,20	53,29	53,79
Yahukimo	62,51	62,55	62,59	62,64	62,66	63,16
Pegunungan Bintang	61,70	61,72	61,74	61,78	61,80	62,00
Tolikara	62,33	62,52	62,65	62,70	62,72	62,92
Sarmi	63,41	63,45	63,45	63,50	63,53	63,73
Keerom	64,10	64,14	64,14	64,19	64,21	64,31
Waropen	63,52	63,68	63,73	63,75	63,76	63,78
Supiori	63,10	63,15	63,20	63,20	63,20	63,30
Mamberamo Raya	54,03	54,34	54,64	54,64	54,64	54,84
Nduga	50,98	51,42	51,74	51,86	51,92	52,42
Lanny Jaya	62,59	62,75	62,88	62,94	62,97	62,97
Mamberamo Tengah	60,39	60,52	60,69	60,75	60,78	60,88
Yalimo	62,82	62,90	62,95	63,00	63,02	63,04
Puncak	63,18	63,19	63,19	63,20	63,20	63,30
Dogiyai	62,28	62,30	62,36	62,41	62,44	62,94
Intan Jaya	n.a.	62,98	63,02	63,05	63,06	63,16
Deiyai	n.a.	62,26	62,27	62,31	62,33	62,53
Kota Jayapura	67,95	67,96	68,00	68,01	68,01	68,03
Provinsi Papua	62,51	62,66	62,81	62,97	63,05	63,30

Lampiran 17. Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2010-2015

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Merauke	68,02	68,13	68,18	68,20	68,21	68,23
Jayawijaya	59,02	59,14	59,22	59,37	59,45	59,95
Jayapura	67,65	67,66	67,67	67,71	67,73	68,03
Nabire	68,93	68,96	68,97	69,00	69,02	69,22
Kepulauan Yapen	70,42	70,44	70,46	70,47	70,47	70,50
Biak Numfor	69,62	69,64	69,65	69,66	69,67	69,67
Paniai	66,45	66,63	66,73	66,77	66,79	67,09
Puncak Jaya	65,26	65,30	65,34	65,41	65,44	65,84
Mimika	73,63	73,67	73,70	73,75	73,78	73,82
Boven Digoel	58,62	58,97	59,16	59,26	59,31	59,91
Mappi	65,01	65,09	65,16	65,19	65,20	65,70
Asmat	55,08	56,05	56,34	56,52	56,61	57,11
Yahukimo	66,20	66,24	66,28	66,33	66,35	66,85
Pegunungan Bintang	65,16	65,18	65,20	65,24	65,26	65,46
Tolikara	66,09	66,28	66,42	66,47	66,49	66,69
Sarmi	67,21	67,25	67,25	67,30	67,33	67,53
Keerom	67,55	67,59	67,59	67,65	67,68	67,78
Waropen	67,32	67,49	67,54	67,56	67,57	67,61
Supiori	66,88	66,94	66,99	66,99	66,99	67,09
Mamberamo Raya	57,37	57,69	58,00	58,00	58,00	58,20
Nduga	54,22	54,67	55,00	55,12	55,18	55,68
Lanny Jaya	66,24	66,40	66,54	66,59	66,61	66,61
Mamberamo Tengah	63,96	64,09	64,27	64,33	64,36	64,46
Yalimo	66,36	66,46	66,51	66,55	66,57	66,60
Puncak	66,65	66,66	66,67	66,67	66,67	66,77
Dogiyai	66,04	66,06	66,12	66,17	66,20	66,70
Intan Jaya	n.a.	66,52	66,55	66,59	66,61	66,71
Deiyai	n.a.	66,01	66,03	66,07	66,09	66,29
Kota Jayapura	71,72	71,74	71,78	71,78	71,78	71,81
Provinsi Papua	66,19	66,34	66,48	66,64	66,72	66,97

Lampiran 18. Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Laki-laki Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2010-2015

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Merauke	7,90	8,05	8,25	8,44	8,58	8,59
Jayawijaya	5,04	5,51	6,13	6,20	6,25	6,51
Jayapura	8,87	9,26	9,65	9,77	9,89	9,90
Nabire	8,95	9,23	9,52	9,66	10,27	10,28
Kepulauan Yapen	9,04	9,09	9,15	9,20	9,53	9,54
Biak Numfor	9,52	9,64	9,89	10,13	10,34	10,35
Paniai	3,67	3,74	3,81	3,88	3,90	3,91
Puncak Jaya	3,36	3,79	4,28	4,82	5,24	5,27
Mimika	9,27	9,30	9,33	9,45	9,61	9,69
Boven Digoel	7,15	7,43	7,72	7,98	8,06	8,16
Mappi	6,11	6,29	6,32	6,55	6,60	6,61
Asmat	4,68	4,73	4,79	4,84	5,03	5,17
Yahukimo	2,74	3,09	4,23	5,44	5,72	5,73
Pegunungan Bintang	2,10	2,55	2,66	2,76	3,48	3,73
Tolikara	3,49	3,93	4,10	4,20	4,30	4,31
Sarmi	6,59	7,05	7,72	7,79	8,65	8,92
Keerom	5,49	5,88	6,32	7,36	7,80	8,06
Waropen	8,65	8,77	8,93	9,09	9,13	9,16
Supiori	7,75	8,02	8,30	8,59	8,65	8,66
Mamberamo Raya	4,31	4,40	4,50	4,59	4,61	4,82
Nduga	0,32	0,53	0,75	0,84	0,89	0,90
Lanny Jaya	3,20	3,37	3,49	3,61	3,84	3,96
Mamberamo Tengah	3,04	3,09	3,28	3,48	3,85	4,07
Yalimo	2,19	2,49	3,02	3,55	3,96	3,97
Puncak	1,25	1,31	1,45	1,59	1,71	2,00
Dogiyai	4,42	4,70	5,15	5,23	5,35	5,36
Intan Jaya	n.a.	3,24	3,41	3,78	4,14	4,15
Deiyai	n.a.	3,38	3,55	3,74	3,90	3,91
Kota Jayapura	10,86	10,95	11,04	11,13	11,34	11,36
Provinsi Papua	6,45	6,46	6,47	6,49	6,62	6,85

Lampiran 19. Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2010-2015

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Merauke	7,24	7,38	7,47	7,56	7,84	7,85
Jayawijaya	2,76	2,94	3,68	3,72	3,75	3,88
Jayapura	7,66	7,99	8,38	8,56	8,57	8,58
Nabire	7,33	7,52	7,71	7,91	8,48	8,49
Kepulauan Yapen	7,41	7,45	7,49	7,50	7,76	7,77
Biak Numfor	8,05	8,16	8,24	8,82	8,87	8,88
Paniai	2,08	2,12	2,16	2,45	2,46	2,47
Puncak Jaya	1,67	1,89	2,14	2,41	2,57	2,60
Mimika	7,83	7,85	7,89	8,01	8,91	8,96
Boven Digoel	6,43	6,51	6,59	6,67	6,75	6,90
Mappi	4,38	4,51	5,03	5,22	5,26	5,27
Asmat	3,57	3,61	3,66	3,77	3,78	3,79
Yahukimo	0,77	0,82	1,46	1,50	1,53	1,63
Pegunungan Bintang	0,87	1,12	1,37	1,68	1,88	1,89
Tolikara	1,05	1,18	1,24	1,31	1,37	1,38
Sarmi	5,06	5,41	6,08	6,61	7,00	7,01
Keerom	4,17	4,47	4,50	5,31	5,40	5,69
Waropen	7,29	7,74	7,77	7,80	7,83	7,84
Supiori	5,66	5,86	6,42	6,57	6,72	6,94
Mamberamo Raya	2,85	2,91	2,94	3,00	3,01	3,21
Nduga	0,18	0,33	0,43	0,52	0,55	0,56
Lanny Jaya	0,73	0,78	0,86	0,94	0,95	1,14
Mamberamo Tengah	1,06	1,12	1,14	1,15	1,27	1,49
Yalimo	0,54	0,97	1,20	1,60	1,99	2,00
Puncak	0,17	0,20	0,34	0,40	0,45	0,52
Dogiyai	2,30	2,48	3,71	3,87	4,03	4,04
Intan Jaya	n.a.	0,83	0,93	1,05	1,13	1,29
Deiyai	n.a.	0,94	1,25	1,57	1,61	1,62
Kota Jayapura	10,45	10,54	10,63	10,72	10,81	10,82
Provinsi Papua	4,61	4,62	4,74	4,79	4,83	5,02

Lampiran 20. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Laki-laki Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2010-2015

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Merauke	11,68	11,97	12,26	12,26	12,26	12,49
Jayawijaya	10,25	10,58	10,90	11,24	11,60	11,87
Jayapura	13,19	13,31	13,43	13,62	13,75	13,80
Nabire	9,63	10,38	10,40	10,41	10,43	10,50
Kepulauan Yapen	11,18	11,29	11,30	11,31	11,45	11,72
Biak Numfor	12,59	12,67	13,00	13,39	13,54	13,77
Paniai	10,24	10,36	10,49	10,62	10,75	10,76
Puncak Jaya	3,53	3,97	4,47	5,03	5,66	5,92
Mimika	9,18	9,59	9,87	10,17	10,22	10,61
Boven Digoel	10,47	10,56	10,87	11,19	11,51	11,58
Mappi	10,39	10,44	10,48	10,53	10,58	10,59
Asmat	7,44	7,49	7,54	7,58	7,63	7,83
Yahukimo	6,53	6,87	6,95	7,61	8,28	8,29
Pegunungan Bintang	4,12	4,23	4,34	4,46	4,58	4,90
Tolikara	7,52	7,63	7,73	7,74	7,88	7,89
Sarmi	10,70	10,73	10,91	11,08	11,83	12,08
Keerom	11,33	11,41	11,50	11,72	11,94	12,05
Waropen	11,51	11,55	11,76	11,97	12,19	12,38
Supiori	12,17	12,87	13,12	13,36	13,62	13,72
Mamberamo Raya	10,29	10,49	10,69	10,89	11,17	11,18
Nduga	1,62	1,81	2,23	2,49	2,87	2,88
Lanny Jaya	7,62	7,64	7,67	7,70	8,05	8,36
Mamberamo Tengah	7,03	7,42	7,62	7,82	8,03	8,23
Yalimo	5,67	6,22	6,77	7,61	8,56	8,83
Puncak	3,63	3,81	4,00	4,20	4,41	4,57
Dogiyai	7,80	8,01	8,72	8,84	8,95	9,03
Intan Jaya	n.a.	5,53	5,75	6,87	7,15	7,27
Deiyai	n.a.	9,95	10,21	10,46	10,73	10,74
Kota Jayapura	13,77	13,87	13,97	14,07	14,17	14,55
Provinsi Papua	8,88	9,17	9,24	9,68	10,02	12,42

Lampiran 21. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Perempuan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2010-2015

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Merauke	11,25	11,29	11,34	11,38	11,43	11,62
Jayawijaya	9,45	9,49	9,61	9,73	9,78	9,89
Jayapura	12,08	12,74	12,94	13,11	13,27	13,39
Nabire	10,68	10,68	10,69	10,73	10,77	10,86
Kepulauan Yapen	9,95	10,91	11,01	11,11	11,21	11,35
Biak Numfor	12,10	12,36	12,49	12,69	12,89	13,06
Paniai	8,80	9,33	9,71	9,89	10,07	10,08
Puncak Jaya	5,05	5,30	5,57	5,84	6,13	6,18
Mimika	10,00	10,16	10,33	10,50	11,11	11,27
Boven Digoel	9,95	10,05	10,15	10,17	10,19	10,29
Mappi	9,24	9,41	9,58	10,19	10,34	10,35
Asmat	5,31	5,57	5,79	6,02	6,74	6,84
Yahukimo	6,07	6,41	6,59	6,77	6,95	6,96
Pegunungan Bintang	2,59	3,23	3,72	4,01	4,31	4,63
Tolikara	5,96	6,56	6,88	7,20	7,55	7,56
Sarmi	9,88	10,01	10,14	10,27	10,41	10,69
Keerom	10,93	10,98	10,99	11,01	11,02	11,26
Waropen	10,70	11,13	11,31	11,49	11,68	11,93
Supiori	11,58	11,72	11,86	12,01	12,15	12,19
Mamberamo Raya	7,61	8,08	8,58	9,11	9,67	9,95
Nduga	1,00	1,04	1,09	1,48	1,87	1,88
Lanny Jaya	5,93	6,03	6,39	6,75	6,86	6,99
Mamberamo Tengah	5,54	5,96	6,42	6,66	7,13	7,17
Yalimo	4,79	5,67	6,55	7,12	7,43	7,63
Puncak	2,06	2,44	2,90	3,44	4,08	4,26
Dogiyai	7,88	8,41	8,99	9,12	9,48	9,67
Intan Jaya	n.a.	3,85	4,28	4,77	5,31	5,49
Deiyai	n.a.	8,76	8,97	9,18	9,41	9,45
Kota Jayapura	13,43	13,49	13,55	13,62	13,68	13,85
Provinsi Papua	8,23	8,64	8,96	9,45	9,85	9,85

Lampiran 22. Rata-rata Pengeluaran yang Disesuaikan Penduduk Laki-laki Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2010-2015

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Merauke	13 886	14 091	14 297	15 393	15 621	15 964
Jayawijaya	7 103	6 891	7 314	7 424	7 534	7 679
Jayapura	12 842	13 007	13 172	13 340	13 507	13 974
Nabire	12 716	12 788	13 580	13 695	13 812	13 981
Kepulauan Yapen	9 881	10 195	10 509	10 591	10 673	10 822
Biak Numfor	12 780	13 055	13 195	13 399	13 467	14 026
Paniai	8 926	9 040	9 271	9 508	9 752	9 934
Puncak Jaya	7 509	7 559	7 609	7 660	7 711	7 881
Mimika	17 385	17 438	17 491	17 544	18 031	18 219
Boven Digoel	11 631	11 636	11 640	11 645	11 649	11 867
Mappi	8 327	8 487	8 650	8 815	8 984	9 109
Asmat	8 424	9 060	9 228	9 345	9 462	9 637
Yahukimo	5 038	6 141	7 271	7 463	7 655	7 942
Pegunungan Bintang	6 522	6 687	6 872	7 663	7 465	7 655
Tolikara	7 797	7 802	7 807	7 812	7 817	7 967
Sarmi	9 121	9 150	9 180	9 185	9 190	9 356
Keerom	11 447	12 215	12 280	12 344	12 410	12 624
Waropen	7 568	8 237	9 294	9 407	9 766	9 960
Supiori	6 914	7 077	7 244	7 415	7 651	7 848
Mamberamo Raya	5 402	5 630	5 867	6 114	6 371	6 552
Nduga	3 119	3 137	3 141	3 173	3 191	3 612
Lanny Jaya	3 651	3 694	3 737	3 781	3 826	3 961
Mamberamo Tengah	3 394	3 448	3 452	3 579	3 694	4 045
Yalimo	4 970	5 327	5 711	6 122	6 562	6 774
Puncak	4 952	5 000	5 048	5 097	5 147	5 190
Dogiyai	7 209	7 309	7 409	7 512	7 615	7 892
Intan Jaya	n.a.	6 731	6 777	6 823	6 869	7 093
Deiyai	n.a.	5 936	5 955	5 974	5 993	6 205
Kota Jayapura	15 788	16 160	16 542	16 932	17 011	17 406
Provinsi Papua	9 277	9 475	9 673	9 687	9 702	9 981

Lampiran 23. Rata-rata Pengeluaran yang Disesuaikan Penduduk Perempuan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2010-2015

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Merauke	5 803	6 337	6 920	7 557	7 898	7 944
Jayawijaya	4 188	4 351	4 515	4 682	5 034	5 123
Jayapura	8 611	8 638	8 664	8 716	8 876	9 003
Nabire	6 067	6 571	7 117	7 728	8 348	8 452
Kepulauan Yapen	5 573	5 777	5 989	6 209	6 437	6 500
Biak Numfor	7 220	7 516	7 823	8 143	8 476	8 604
Paniai	1 752	1 945	2 160	2 206	2 253	2 262
Puncak Jaya	1 708	1 769	1 832	1 897	1 964	1 990
Mimika	3 473	3 573	3 782	3 854	3 869	3 929
Boven Digoel	3 243	3 417	3 535	3 797	3 996	4 053
Mappi	3 330	3 544	3 760	3 989	4 232	4 319
Asmat	1 312	1 325	1 338	1 350	1 402	1 434
Yahukimo	1 642	1 925	2 258	2 647	3 104	3 161
Pegunungan Bintang	3 743	3 850	3 961	3 975	4 191	4 280
Tolikara	1 715	1 717	1 719	1 720	1 722	1 733
Sarmi	2 610	3 782	3 782	3 877	4 280	4 356
Keerom	4 147	4 400	5 254	5 544	6 620	6 675
Waropen	2 003	2 030	2 145	2 169	2 217	2 253
Supiori	1 866	2 065	2 286	2 530	2 800	2 883
Mamberamo Raya	2 468	2 561	2 862	3 199	3 543	3 606
Nduga	3 299	3 469	4 135	4 149	4 164	4 171
Lanny Jaya	4 450	4 607	4 661	4 716	5 278	5 288
Mamberamo Tengah	3 918	3 968	4 019	4 283	4 375	4 384
Yalimo	1 377	1 717	2 141	2 670	4 240	4 251
Puncak	3 986	4 087	4 126	4 166	4 207	4 224
Dogiyai	2 184	2 395	2 627	2 881	3 159	3 230
Intan Jaya	-	2 750	2 783	2 989	3 062	3 075
Deiyai	#NUM!	1 758	1 936	2 132	2 348	2 358
Kota Jayapura	11 707	12 136	12 595	13 057	13 345	13 402
Provinsi Papua	3 076	3 220	3 371	3 529	3 694	3 766

Lampiran 24. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2010-2015

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Merauke	69,66	71,24	69,93	69,26	60,95	60,88
Jayawijaya	57,93	54,87	48,48	58,39	53,25	50,57
Jayapura	56,70	55,88	58,73	58,21	50,06	47,25
Nabire	57,98	56,43	53,99	56,42	69,53	71,51
Kepulauan Yapen	48,10	49,99	49,29	50,88	47,20	47,47
Biak Numfor	44,23	47,83	49,16	49,47	57,02	56,52
Paniai	32,58	50,27	49,77	55,98	47,33	50,72
Puncak Jaya	62,54	68,48	67,29	56,45	58,08	55,33
Mimika	50,06	54,33	53,04	46,10	53,69	41,24
Boven Digoel	39,34	41,59	44,89	44,98	47,15	50,22
Mappi	60,08	61,01	54,17	60,20	54,07	58,66
Asmat	39,84	31,44	37,38	38,25	36,32	35,73
Yahukimo	57,88	38,27	50,26	49,93	51,28	42,38
Pegunungan Bintang	60,94	60,63	62,13	44,49	42,18	50,14
Tolikara	46,53	43,63	40,27	42,99	33,13	39,01
Sarmi	54,60	56,66	56,73	56,36	63,39	64,89
Keerom	59,00	62,03	60,62	63,02	52,17	52,16
Waropen	58,24	59,63	58,38	53,90	45,06	51,81
Supiori	62,62	67,63	66,73	69,64	60,14	60,77
Mamberamo Raya	58,77	59,74	59,98	51,49	55,51	57,36
Nduga	68,51	70,02	68,99	69,52	64,14	64,40
Lanny Jaya	62,02	62,70	63,63	64,40	45,78	45,58
Mamberamo Tengah	52,57	52,43	52,79	53,16	54,30	54,23
Yalimo	51,49	47,90	43,40	49,52	43,36	43,62
Puncak	48,07	49,25	48,86	49,28	27,32	33,15
Dogiyai	51,70	38,53	39,78	40,20	32,39	32,81
Intan Jaya	42,63	49,73	49,96	50,40	50,08	50,84
Deiyai	19,61	20,24	20,43	24,47	26,25	30,12
Kota Jayapura	70,54	72,63	71,45	74,02	77,93	74,98
Provinsi Papua	55,42	57,74	57,76	57,22	64,21	63,69

Lampiran 25. Keterlibatan Perempuan di Parlemen Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2010-2015

Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Merauke	20,00	20,00	20,00	10,00	10,00
Jayawijaya	10,00	10,00	10,00	6,67	6,67
Jayapura	8,00	8,00	8,00	0,01	0,01
Nabire	8,00	8,00	8,00	20,00	20,00
Kepulauan Yapen	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Biak Numfor	4,00	4,00	4,00	12,00	12,00
Paniai	3,33	3,33	3,33	0,01	0,01
Puncak Jaya	20,83	20,83	20,83	3,33	3,33
Mimika	12,00	12,00	12,00	8,33	0,01
Boven Digoel	0,01	0,01	0,01	5,00	5,00
Mappi	10,00	10,00	10,00	8,00	8,00
Asmat	5,00	5,00	5,00	4,00	4,00
Yahukimo	5,71	5,71	5,71	5,71	0,01
Pegunungan Bintang	15,00	15,00	15,00	4,00	4,00
Tolikara	16,67	6,67	16,67	6,67	6,67
Sarmi	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00
Keerom	10,00	10,00	10,00	0,01	0,01
Waropen	10,00	10,00	10,00	5,00	5,00
Supiori	25,00	30,00	30,00	15,00	15,00
Mamberamo Raya	10,00	10,00	10,00	15,00	15,00
Nduga	20,00	20,00	20,00	12,00	12,00
Lanny Jaya	16,00	16,00	16,00	0,01	0,01
Mamberamo Tengah	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Yalimo	5,00	5,00	5,00	0,01	0,01
Puncak	10,53	10,53	10,53	0,01	0,01
Dogiyai	5,00	5,00	5,00	0,01	0,01
Intan Jaya	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Deiyai	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Kota Jayapura	20,69	20,69	20,69	22,50	22,50
Provinsi Papua	7,14	8,93	7,14	12,96	12,73

Lampiran 26. Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi Perempuan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2010-2015

Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Merauke	42,46	36,81	33,65	38,72	37,33
Jayawijaya	26,28	16,44	29,87	28,49	22,05
Jayapura	34,57	43,27	38,50	45,00	33,53
Nabire	34,88	27,98	31,67	32,53	38,74
Kepulauan Yapen	43,74	39,96	45,20	32,28	31,13
Biak Numfor	38,65	45,89	45,19	37,85	34,44
Paniai	28,20	28,19	48,02	32,23	40,10
Puncak Jaya	23,70	22,38	10,07	52,38	32,57
Mimika	36,93	29,74	18,93	32,27	32,36
Boven Digoel	27,77	34,98	34,46	23,98	29,69
Mappi	55,11	24,77	35,13	26,78	36,71
Asmat	8,09	13,53	13,53	12,41	11,58
Yahukimo	10,47	24,00	22,94	27,27	22,88
Pegunungan Bintang	25,92	25,92	6,46	15,07	25,79
Tolikara	4,22	10,03	3,29	3,54	6,95
Sarmi	34,54	33,26	31,13	34,15	42,41
Keerom	47,85	35,24	43,08	43,29	44,03
Waropen	35,75	32,73	23,83	19,78	30,73
Supiori	31,31	24,95	28,92	27,46	30,53
Mamberamo Raya	35,75	35,75	20,13	18,61	20,95
Nduga	30,64	30,64	30,64	30,64	30,64
Lanny Jaya	30,64	30,64	30,64	30,64	29,91
Mamberamo Tengah	30,64	30,64	30,64	30,64	31,92
Yalimo	23,28	17,69	25,03	24,61	25,08
Puncak	20,22	20,22	20,22	13,38	18,10
Dogiyai	16,50	18,11	17,72	15,42	15,98
Intan Jaya	39,35	39,35	39,35	39,35	39,49
Deiyai	5,61	5,61	8,50	9,97	12,96
Kota Jayapura	51,10	35,79	45,81	42,70	34,08
Provinsi Papua	38,33	31,56	34,19	35,23	34,08

Lampiran 27. Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja Perempuan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2010-2015

Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Merauke	35,96	36,24	36,48	36,72	36,38
Jayawijaya	42,89	55,26	54,93	54,60	50,84
Jayapura	31,24	30,56	30,82	31,08	32,48
Nabire	33,53	32,07	32,35	32,12	32,99
Kepulauan Yapen	32,29	33,54	34,24	34,95	35,36
Biak Numfor	27,26	28,28	28,49	28,90	29,22
Paniai	49,04	44,49	47,33	48,15	47,89
Puncak Jaya	37,07	38,34	40,30	42,36	39,97
Mimika	22,42	20,20	20,37	20,54	22,81
Boven Digoel	30,60	31,46	31,61	31,76	32,81
Mappi	39,13	38,16	39,22	40,30	41,23
Asmat	32,71	33,21	34,39	35,05	37,44
Yahukimo	48,92	45,08	46,70	48,39	45,61
Pegunungan Bintang	40,63	40,63	50,62	45,75	47,36
Tolikara	37,90	54,37	54,21	54,21	48,82
Sarmi	37,79	37,80	38,11	35,06	37,31
Keerom	33,18	31,52	31,87	32,22	35,47
Waropen	32,82	33,21	33,41	33,61	34,89
Supiori	28,86	29,72	30,20	30,69	33,86
Mamberamo Raya	34,50	59,00	58,97	58,97	59,05
Nduga	41,43	43,84	45,32	46,75	46,75
Lanny Jaya	39,53	39,56	51,82	51,82	52,07
Mamberamo Tengah	45,32	45,34	46,10	46,54	48,85
Yalimo	43,40	49,43	44,82	45,51	45,51
Puncak	32,66	33,84	33,95	34,06	31,71
Dogiyai	62,07	36,04	62,02	62,02	62,02
Intan Jaya	47,77	47,77	47,60	47,79	47,30
Deiyai	63,75	32,34	63,31	63,31	62,15
Kota Jayapura	33,66	32,27	32,73	33,19	35,34
Provinsi Papua	35,36	35,36	35,57	35,75	35,97

Lampiran 28. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2012-2015

Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Merauke	260,24	251,20	247,59	195,66
Jayawijaya	298,51	250,84	254,25	269,20
Jayapura	131,81	142,59	144,52	131,25
Nabire	130,61	165,61	164,59	148,86
Kepulauan Yapen	123,73	160,51	158,31	145,03
Biak Numfor	143,16	152,03	153,17	167,96
Paniai	215,22	214,57	214,95	227,34
Puncak Jaya	376,03	414,76	413,38	409,55
Mimika	193,51	189,46	193,34	173,41
Boven Digoel	181,35	178,14	180,93	196,67
Mappi	211,75	216,66	219,06	204,81
Asmat	238,83	222,93	226,59	207,30
Yahukimo	219,03	191,50	197,53	216,76
Pegunungan Bintang	388,02	388,02	386,29	367,19
Tolikara	302,25	393,57	385,95	366,04
Sarmi	215,27	244,70	242,60	219,74
Keerom	164,97	180,39	176,76	170,34
Waropen	155,42	154,30	152,10	166,40
Supiori	193,55	182,57	185,87	176,18
Mamberamo Raya	214,05	185,42	187,03	194,18
Nduga	324,33	322,10	321,30	342,18
Lanny Jaya	365,41	362,44	357,07	337,46
Mamberamo Tengah	402,61	402,61	399,62	379,92
Yalimo	390,74	390,74	388,65	369,21
Puncak	461,52	461,52	462,84	449,72
Dogiyai	212,54	234,17	235,19	220,72
Intan Jaya	433,03	438,02	431,26	424,02
Deiyai	221,09	219,77	222,61	221,29
Kota Jayapura	197,71	170,07	172,80	158,69
Provinsi Papua	242,63	188,70	191,86	247,91

Lampiran 29. Indeks Kesulitan Geografis (IKG) Desa menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2014

Kabupaten/Kota	Minimum	Nilai Tengah	Maksimum
(1)	(2)	(3)	(4)
Merauke	24,51	51,41	85,84
Jayawijaya	36,22	68,70	90,70
Jayapura	19,99	51,86	89,78
Nabire	24,95	52,90	88,06
Kepulauan Yapen	26,75	63,57	87,28
Biak Numfor	29,77	55,73	81,53
Paniai	29,43	59,86	88,92
Puncak Jaya	23,68	81,62	95,84
Mimika	17,05	71,61	92,87
Boven Digoel	21,83	73,86	89,94
Mappi	36,95	78,48	91,20
Asmat	40,47	73,64	94,01
Yahukimo	19,98	81,77	94,76
Pegunungan Bintang	34,76	87,31	94,34
Tolikara	41,03	88,03	97,89
Sarmi	28,86	62,45	92,63
Keerom	17,56	46,79	91,52
Waropen	31,04	72,11	94,22
Supiori	20,01	52,35	83,44
Mamberamo Raya	34,54	80,85	95,43
Nduga	51,04	85,93	94,34
Lanny Jaya	42,86	75,63	92,06
Mamberamo Tengah	46,37	75,66	86,46
Yalimo	37,39	71,78	90,43
Puncak	55,54	90,03	94,76
Dogiyai	30,20	69,36	90,26
Intan Jaya	61,53	84,38	94,22
Deiyai	47,76	68,59	92,12
Kota Jayapura	25,39	33,23	60,87
Provinsi Papua	17,05	76,33	97,89

Lampiran 30. Indeks Pembangunan Desa (IPD) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2014

Kabupaten/Kota	IPD 2014	Pelayanan Dasar	Kondisi Infrastruktur	Aksesibilitas/ Transportasi	Pelayanan Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Merauke	4 647	5 369	2 666	5 620	4 567	5 330
Jayawijaya	3 454	2 939	1 342	5 651	3 881	5 355
Jayapura	4 736	4 418	3 106	6 927	4 534	5 568
Nabire	4 752	5 170	2 766	6 407	4 063	5 696
Kepulauan Yapen	3 677	3 500	2 397	5 484	4 253	3 213
Biak Numfor	4 378	3 598	2 946	7 646	4 246	4 047
Paniai	3 775	3 847	1 797	5 506	4 262	4 420
Puncak Jaya	2 456	1 387	1 225	4 283	3 852	3 696
Mimika	3 323	3 129	1 916	4 469	4 185	4 152
Boven Digoel	3 034	2 219	1 846	4 921	4 146	3 582
Mappi	2 932	2 579	1 627	4 160	4 113	3 526
Asmat	2 769	2 694	1 063	4 029	4 192	3 161
Yahukimo	2 543	1 902	1 171	4 077	3 749	3 567
Pegunungan Bintang	2 244	1 274	1 257	2 937	3 984	4 396
Tolikara	2 035	876	1 250	3 316	3 531	3 426
Sarmi	3 659	3 224	2 268	5 621	3 956	4 219
Keerom	4 189	4 401	2 167	5 778	4 566	4 888
Waropen	3 362	3 225	2 113	4 717	3 258	4 232
Supiori	4 832	5 007	2 874	7 050	4 564	4 961
Mamberamo Raya	2 752	2 704	1 352	3 179	4 161	3 926
Nduga	1 971	1 434	957	2 653	3 830	2 792
Lanny Jaya	3 432	3 355	1 713	4 460	4 391	4 758
Mamberamo Tengah	3 037	2 916	1 100	4 214	3 748	4 975
Yalimo	2 930	2 573	1 079	5 063	3 853	3 372
Puncak	2 154	1 606	1 209	2 143	3 899	4 254
Dogiyai	3 324	3 254	1 861	3 798	4 123	5 234
Intan Jaya	2 493	2 027	1 555	3 229	4 107	3 065
Deiyai	3 379	3 699	1 360	3 918	4 438	5 026
Kota Jayapura	6 326	7 175	4 199	8 619	4 769	5 977
Provinsi Papua	3 056	2 590	1 625	4 541	4 003	4 043

Lampiran 30. Lanjutan

Kabupaten/Kota	Persentase Klasifikasi Desa			Jumlah Desa
	Tertinggal	Tertinggal	Tertinggal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Merauke	5 912	4 033	55	181
Jayawijaya	9 329	671	0	328
Jayapura	5 827	4 101	72	139
Nabire	5 417	4 583	0	72
Kepulauan Yapen	8 447	1 553	0	161
Biak Numfor	7 312	2 688	0	253
Paniai	8 701	1 299	0	77
Puncak Jaya	9 868	132	0	302
Mimika	8 346	1 579	75	133
Boven Digoel	9 375	625	0	112
Mappi	9 568	432	0	162
Asmat	9 955	45	0	221
Yahukimo	9 922	78	0	510
Pegunungan Bintang	9 892	108	0	277
Tolikara	9 982	18	0	541
Sarmi	8 478	1 522	0	92
Keerom	7 692	2 198	110	91
Waropen	9 500	500	0	100
Supiori	5 263	4 737	0	38
Mamberamo Raya	9 855	145	0	69
Nduga	10 000	0	0	248
Lanny Jaya	9 944	56	0	354
Mamberamo Tengah	10 000	0	0	59
Yalimo	9 866	134	0	299
Puncak	10 000	0	0	80
Dogiyai	9 494	506	0	79
Intan Jaya	10 000	0	0	97
Deiyai	10 000	0	0	30
Kota Jayapura	769	8 462	769	13
Provinsi Papua	9 179	811	10	5 118

Lampiran 31. Angka Melek Huruf (AMH) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2010-2015

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Merauke	87,99	88,22	88,22	88,55	98,80	92,39
Jayawijaya	52,52	52,76	52,77	53,08	71,22	64,28
Jayapura	96,65	96,89	96,90	97,21	99,08	92,34
Nabire	83,59	83,66	83,67	83,73	97,88	92,84
Kepulauan Yapen	88,82	89,11	90,87	90,94	97,00	91,65
Biak Numfor	98,27	98,67	98,68	99,01	99,06	92,87
Paniai	62,93	62,94	62,95	62,97	62,75	43,35
Puncak Jaya	86,81	86,82	86,82	86,83	67,76	53,70
Mimika	87,96	88,19	88,20	88,27	100,00	92,83
Boven Digoel	32,94	33,25	35,25	35,28	94,31	89,57
Mappi	31,43	31,46	33,47	33,50	88,28	72,99
Asmat	31,1	31,13	31,15	31,18	78,53	77,90
Yahukimo	32,52	32,76	32,77	32,77	53,76	47,34
Pegunungan Bintang	32,32	32,50	32,50	32,64	52,69	49,62
Tolikara	33,2	33,44	33,45	33,56	67,03	53,77
Sarmi	87,55	87,67	87,68	87,77	94,79	93,54
Keerom	92,15	92,38	92,39	92,50	92,80	86,33
Waropen	77,11	77,26	78,27	78,35	99,35	94,46
Supiori	96,19	96,68	96,69	96,76	98,02	92,11
Mamberamo Raya	65,04	65,36	65,36	65,43	80,53	79,65
Nduga	30,53	30,54	30,54	30,61	26,31	n.a.
Lanny Jaya	36,72	36,91	36,92	36,93	51,01	47,95
Mamberamo Tengah	34,34	34,52	34,53	34,58	57,96	45,72
Yalimo	33,3	33,51	33,52	33,72	58,85	31,30
Puncak	32,11	32,13	32,15	32,17	30,17	32,56
Dogiyai	34,02	34,23	34,65	34,68	87,79	54,11
Intan Jaya	27,39	27,78	28,08	28,08	50,83	33,14
Deiyai	28,45	30,12	31,02	31,05	58,10	26,27
Kota Jayapura	99,58	99,83	99,84	99,86	99,76	96,43
Provinsi Papua	75,60	75,81	75,83	75,92	77,84	70,83

Lampiran 32. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Umur Sekolah dan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2015

Kabupaten/Kota	07-12	13-15	16-18
(1)	(2)	(3)	(4)
Merauke	97,37	96,73	74,41
Jayawijaya	83,57	80,85	66,76
Jayapura	97,71	94,83	87,18
Nabire	84,55	91,77	82,87
Kepulauan Yapen	94,23	97,84	83,48
Biak Numfor	94,20	99,72	83,66
Paniai	88,68	54,40	38,51
Puncak Jaya	68,20	67,39	32,21
Mimika	97,87	100,00	83,04
Boven Digoel	93,79	97,69	74,45
Mappi	87,12	95,25	38,55
Asmat	76,21	83,38	[38,89]
Yahukimo	64,75	48,91	26,52
Pegunungan Bintang	66,69	66,22	28,95
Tolikara	58,77	42,72	39,89
Sarmi	96,04	[100,00]	n.a.
Keerom	89,91	92,00	80,85
Waropen	97,53	98,19	[83,29]
Supiori	96,57	100,00	[84,91]
Mamberamo Raya	93,16	98,82	49,99
Nduga	n.a.	n.a.	n.a.
Lanny Jaya	60,03	79,78	73,90
Mamberamo Tengah	95,43	[97,18]	[69,05]
Yalimo	69,88	62,51	52,75
Puncak	48,84	33,55	20,82
Dogiyai	83,95	85,60	[79,02]
Intan Jaya	69,85	[53,50]	[52,87]
Deiyai	73,33	[68,98]	[58,62]
Kota Jayapura	97,36	100,00	91,57
Provinsi Papua	81,04	78,14	61,96

Lampiran 33. Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2010-2015

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Merauke	26,51	28,57	27,59	26,80	26,00	21,87
Jayawijaya	45,41	84,61	81,61	78,70	85,00	81,12
Jayapura	20,42	21,42	20,64	20,00	20,90	17,02
Nabire	36,27	44,32	42,73	41,50	38,00	33,13
Kepulauan Yapen	27,90	28,17	27,20	26,40	26,00	23,87
Biak Numfor	39,49	42,53	41,00	39,70	41,00	37,53
Paniai	57,85	65,75	63,38	61,50	64,90	58,82
Puncak Jaya	34,37	45,21	43,60	41,60	44,80	41,16
Mimika	35,65	41,81	40,32	38,70	40,20	32,22
Boven Digoel	9,35	14,54	13,99	13,60	14,40	11,65
Mappi	24,41	27,19	26,24	25,40	26,80	23,46
Asmat	26,05	27,39	26,43	25,60	28,90	25,37
Yahukimo	74,49	77,41	74,66	72,40	76,10	69,89
Pegunungan Bintang	41,82	26,21	25,27	24,30	25,90	23,27
Tolikara	21,95	47,91	46,20	44,80	47,80	42,77
Sarmi	5,23	7,07	6,85	6,60	6,30	4,80
Keerom	11,53	11,75	11,38	11,00	12,10	10,18
Waropen	6,73	9,98	9,65	9,70	10,10	9,11
Supiori	6,23	7,28	7,04	7,00	7,10	6,42
Mamberamo Raya	8,79	7,40	7,14	6,90	6,80	6,20
Nduga	13,19	34,59	33,38	32,30	34,70	33,38
Lanny Jaya	27,39	71,70	69,16	67,20	71,60	67,22
Mamberamo Tengah	11,16	18,96	18,56	18,00	17,20	16,20
Yalimo	8,73	22,78	21,99	21,40	22,40	20,66
Puncak	23,99	42,01	40,51	38,80	42,10	38,65
Dogiyai	25,45	28,29	27,30	26,50	28,90	26,55
Intan Jaya	n.a.	18,64	17,94	17,40	18,40	17,22
Deiyai	n.a.	32,10	30,96	30,10	31,80	30,44
Kota Jayapura	39,05	45,52	43,89	42,50	44,30	33,92
Provinsi Papua	709,39	981,16	946,62	916,40	960,60	864,11

Lampiran 34. Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2010-2015

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Merauke	15,44	14,54	13,22	12,95	12,33	10,20
Jayawijaya	46,30	41,84	39,03	39,05	41,81	39,60
Jayapura	20,77	18,64	17,30	17,08	17,58	14,18
Nabire	35,69	33,68	30,86	30,65	27,69	23,92
Kepulauan Yapen	36,13	33,54	30,76	30,35	29,32	26,39
Biak Numfor	36,51	33,61	30,31	29,84	30,28	27,44
Paniai	47,68	43,47	37,18	38,69	40,15	36,07
Puncak Jaya	46,92	43,80	40,25	38,21	39,92	36,15
Mimika	24,74	22,57	20,78	20,09	20,37	16,11
Boven Digoel	27,01	25,79	23,52	22,79	23,70	18,87
Mappi	34,94	33,11	30,14	29,30	30,35	25,95
Asmat	38,69	35,40	32,38	30,57	33,84	29,10
Yahukimo	49,61	46,21	42,49	41,98	43,27	39,02
Pegunungan Bintang	43,77	40,08	36,23	35,63	37,23	32,78
Tolikara	44,63	41,17	37,81	36,30	38	33,27
Sarmi	22,63	21,09	19,42	18,82	17,72	13,32
Keerom	25,57	24,12	21,98	21,65	23,23	19,12
Waropen	44,00	39,88	36,23	36,63	37,27	32,63
Supiori	50,66	45,75	42,73	41,58	41,50	36,65
Mamberamo Raya	44,43	39,98	36,38	35,21	34,25	29,86
Nduga	47,28	42,53	39,49	38,14	39,69	35,89
Lanny Jaya	47,73	46,55	43,68	42,33	43,79	39,26
Mamberamo Tengah	47,07	43,15	43,69	42,84	39,59	35,47
Yalimo	47,76	44,13	40,65	39,49	40,33	35,65
Puncak	49,20	44,65	40,77	39,38	41,96	37,85
Dogiyai	36,57	33,96	30,40	30,08	32,25	29,10
Intan Jaya	n.a.	47,82	41,53	40,65	42,03	38,16
Deiyai	n.a.	49,58	46,76	45,93	47,52	44,49
Kota Jayapura	17,87	17,31	16,03	15,77	16,19	12,21
Provinsi Papua	34,77	34,10	31,25	30,66	31,52	27,80

Lampiran 35. Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2010-2015

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Merauke	230 729	241 904	253 987	261 300	275 008	294 257
Jayawijaya	242 655	273 270	289 785	307 760	317 168	349 878
Jayapura	315 835	350 569	376 261	404 404	419 312	454 989
Nabire	334 168	357 820	391 024	423 864	441 408	486 456
Kepulauan Yapen	333 936	358 284	394 193	435 185	457 488	512 934
Biak Numfor	345 406	357 595	384 399	409 164	422 155	466 074
Paniai	283 225	293 224	311 294	331 280	341 762	388 098
Puncak Jaya	332 533	358 876	389 094	428 465	449 832	497 583
Mimika	385 267	418 426	463 700	510 154	535 342	597 620
Boven Digoel	255 543	269 760	298 858	331 147	348 780	379 630
Mappi	200 403	210 576	225 031	240 527	248 690	260 880
Asmat	221 672	236 081	252 526	271 053	280 854	299 893
Yahukimo	215 897	233 405	253 240	274 781	286 300	303 586
Pegunungan Bintang	308 929	319 795	340 483	362 626	374 249	405 665
Tolikara	169 004	182 150	190 421	199 192	203 714	218 759
Sarmi	258 002	280 100	305 217	333 493	348 720	377 926
Keerom	325 176	342 852	374 821	406 808	423 918	460 199
Waropen	337 101	351 885	396 228	448 507	477 672	536 760
Supiori	249 340	281 743	301 605	325 385	338 029	381 346
Mamberamo Raya	351 596	368 891	428 716	498 326	538 203	569 859
Nduga	211 691	235 346	228 045	235 439	239 201	n.a.
Lanny Jaya	254 417	291 230	313 959	338 536	351 597	383 166
Mamberamo Tengah	238 363	255 346	273 978	289 262	297 215	316 341
Yalimo	201 665	219 074	232 140	246 035	253 293	270 455
Puncak	342 655	363 223	397 897	438 789	461 014	517 396
Dogiyai	302 914	333 046	336 900	345 421	349 727	385 923
Intan Jaya	294 524	304 909	356 862	418 057	453 388	501 749
Deiyai	285 675	331 524	367 678	408 519	430 883	483 206
Kota Jayapura	504 235	556 462	624 424	700 719	716 186	763 326
Provinsi Papua	284 755	-	297 502	339 096	358 204	402 031

Lampiran 36. Indeks Kedalaman Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2010-2015

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Merauke	3,79	2,29	2,37	2,44	2,39	1,95
Jayawijaya	9,12	7,65	6,73	8,51	8,32	10,36
Jayapura	4,36	3,73	3,77	3,78	3,70	3,98
Nabire	7,66	7,81	8,83	7,28	7,12	5,63
Kepulauan Yapen	8,98	7,73	7,52	6,04	5,91	8,81
Biak Numfor	9,91	6,32	6,41	4,37	4,28	5,78
Paniai	11,02	9,47	8,92	10,50	10,27	14,72
Puncak Jaya	16,28	10,33	7,84	3,67	3,59	6,59
Mimika	7,11	7,17	6,03	5,99	5,86	5,02
Boven Digoel	3,29	4,34	5,52	3,69	3,61	7,62
Mappi	5,15	6,37	5,58	6,08	5,95	4,95
Asmat	11,03	5,87	6,11	6,74	6,60	4,84
Yahukimo	5,98	8,49	14,15	10,77	10,54	8,55
Pegunungan Bintang	7,46	4,21	4,13	3,16	3,09	6,61
Tolikara	8,00	5,54	3,67	4,91	4,81	11,30
Sarmi	2,55	3,31	5,16	4,00	3,92	1,47
Keerom	5,49	4,41	3,41	2,99	2,92	3,95
Waropen	10,93	7,46	11,47	11,35	11,10	7,68
Supiori	18,28	6,37	7,51	7,55	7,39	11,44
Mamberamo Raya	13,13	9,79	10,61	5,91	5,78	8,34
Nduga	6,21	4,90	3,16	6,11	5,97	n.a.
Lanny Jaya	19,16	7,27	8,22	8,18	8,01	11,86
Mamberamo Tengah	2,64	6,59	5,47	4,46	4,37	2,85
Yalimo	9,32	7,16	7,80	7,46	7,30	4,75
Puncak	10,24	8,07	6,44	4,21	4,12	7,07
Dogiyai	9,75	5,67	3,24	4,61	4,51	7,72
Intan Jaya	13,44	9,41	17,94	15,91	15,57	15,92
Deiyai	7,32	13,59	17,94	16,82	16,45	14,53
Kota Jayapura	3,01	2,89	3,06	3,51	3,44	1,90
Provinsi Papua	8,14	7,93	7,35	6,56	6,42	8,82

Lampiran 37. Indeks Keparahan Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2010-2015

Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Merauke	1,49	0,63	0,64	0,71	0,77	0,53
Jayawijaya	2,88	2,22	1,56	2,42	2,63	4,39
Jayapura	1,70	1,14	1,12	1,31	1,43	1,34
Nabire	2,55	2,77	3,38	2,70	2,94	1,95
Kepulauan Yapen	3,41	2,59	2,41	1,74	1,89	3,77
Biak Numfor	4,48	1,86	2,02	0,94	1,02	1,85
Paniai	3,76	3,18	2,85	4,08	4,44	7,25
Puncak Jaya	8,18	3,92	2,06	0,55	0,60	1,70
Mimika	3,54	3,19	2,53	2,44	2,65	2
Boven Digoel	0,56	1,29	1,58	0,87	0,95	3,82
Mappi	1,07	2,04	1,48	1,65	1,80	1,37
Asmat	4,45	1,68	1,68	2,01	2,18	1,18
Yahukimo	1,20	2,36	6,11	3,43	3,73	2,46
Pegunungan Bintang	2,39	0,84	0,80	0,38	0,42	2,35
Tolikara	2,30	1,33	0,56	0,93	1,01	4,52
Sarmi	0,60	0,98	2,02	1,37	1,49	0,23
Keerom	1,81	1,21	0,75	0,67	0,73	1,31
Waropen	4,02	2,23	4,88	4,68	5,09	2,60
Supiori	9,43	1,37	2,17	1,93	2,10	4,21
Mamberamo Raya	5,84	3,36	3,90	1,36	1,48	2,99
Nduga	1,19	1,02	0,60	1,47	1,60	n.a.
Lanny Jaya	10,15	1,67	2,23	2,19	2,39	4,66
Mamberamo Tengah	0,24	1,40	0,98	0,75	0,82	0,41
Yalimo	3,11	1,79	2,16	2,05	2,24	1,06
Puncak	3,28	2,19	1,38	0,57	0,62	1,72
Dogiyai	3,58	1,58	0,64	0,94	1,02	3,00
Intan Jaya	5,05	2,80	8,85	8,62	9,37	6,96
Deiyai	1,50	4,75	8,44	7,27	7,91	6,17
Kota Jayapura	0,79	0,92	0,94	1,14	1,24	0,47
Provinsi Papua	3,07	2,76	2,44	2,01	2,18	3,78

Lampiran 38. Gini Ratio Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2010-2015

Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Merauke	0,35	0,39	0,41	0,47	0,45	0,41
Jayawijaya	0,24	0,42	0,40	0,37	0,34	0,40
Jayapura	0,32	0,29	0,28	0,27	0,32	0,39
Nabire	0,33	0,34	0,37	0,33	0,35	0,39
Kepulauan Yapen	0,35	0,32	0,36	0,32	0,36	0,37
Biak Numfor	0,36	0,30	0,46	0,42	0,39	0,39
Paniai	0,30	0,30	0,25	0,32	0,25	0,32
Puncak Jaya	0,27	0,24	0,25	0,22	0,27	0,34
Mimika	0,36	0,33	0,34	0,30	0,34	0,33
Boven Digoel	0,37	0,40	0,35	0,30	0,35	0,36
Mappi	0,36	0,38	0,41	0,30	0,30	0,34
Asmat	0,39	0,44	0,42	0,39	0,39	0,34
Yahukimo	0,39	0,31	0,34	0,27	0,30	0,26
Pegunungan Bintang	0,27	0,21	0,18	0,15	0,22	0,27
Tolikara	0,23	0,32	0,17	0,20	0,22	0,37
Sarmi	0,34	0,33	0,39	0,33	0,43	0,35
Keerom	0,31	0,36	0,33	0,28	0,31	0,36
Waropen	0,30	0,23	0,18	0,22	0,28	0,33
Supiori	0,38	0,23	0,29	0,28	0,24	0,28
Mamberamo Raya	0,37	0,30	0,36	0,31	0,27	0,23
Nduga	0,13	0,26	0,21	0,20	0,22	n.a.
Lanny Jaya	0,28	0,20	0,21	0,18	0,22	0,30
Mamberamo Tengah	0,11	0,29	0,24	0,23	0,26	0,27
Yalimo	0,19	0,27	0,28	0,26	0,21	0,14
Puncak	0,22	0,16	0,22	0,18	0,25	0,33
Dogiyai	0,30	0,24	0,20	0,19	0,25	0,20
Intan Jaya	n.a.	0,23	0,29	0,23	0,38	0,27
Deiyai	n.a.	0,32	0,33	0,32	0,26	0,28
Kota Jayapura	0,37	0,27	0,37	0,38	0,35	0,35
Provinsi Papua	0,42	0,39	0,44	0,41	0,41	0,42



PUSDALISBANG

Pusat Data dan Analisis Pembangunan
Provinsi Papua

Alamat : Jl. Soa Situ Dok II Bawah Jayapura Provinsi Papua